BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan kondisi umum daerah Provinsi Papua yang meliputi aspek-aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, dan penelahaan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), serta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Provinsi Papua dalam pembahasan ini ditinjau berdasarkan luas wilayah, letak dan kondisi geografis, kondisi kawasan, topografi, klimatologi, hidrologi dan tutupan lahan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Posisi Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 01°00’ LU - 9°10’ LS dan 134°00’ BT - 141°05’ BT dengan luas 32.027.839 hektar. Wilayah administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, yang terbagi menjadi 470 distrik dan 4.378 kampung. Secara administratif Provinsi Papua berbatasan dengan:

a. sebelah utara : Samudra Pasifik
b. sebelah selatan : Laut Arafuru
c. sebelah barat : Papua Barat
d. sebelah timur : Papua New Guinea

Sementara jika diperhatikan dari luas wilayah, terlihat jelas bahwa Kabupaten Sarmi memiliki luas yang paling besar di Papua yakni mencapai 3.558.900 hektar, dan yang paling kecil adalah Kabupaten Supiori hanya seluas 52.800 hektar. Sedangkan bila diamati menurut wilayah adat, berturut-turut luas wilayah yang paling besar adalah Wilayah Mamta seluas 8.624.691 hektar, kemudia Anim Ha seluas 8.215.000 hektar, La Pago seluas 7.467.900 hektar, Mee Pago seluas 5.507.848 hektar, dan terakhir Saireri seluas 2.212.400 hektar.

Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi Provinsi Papua

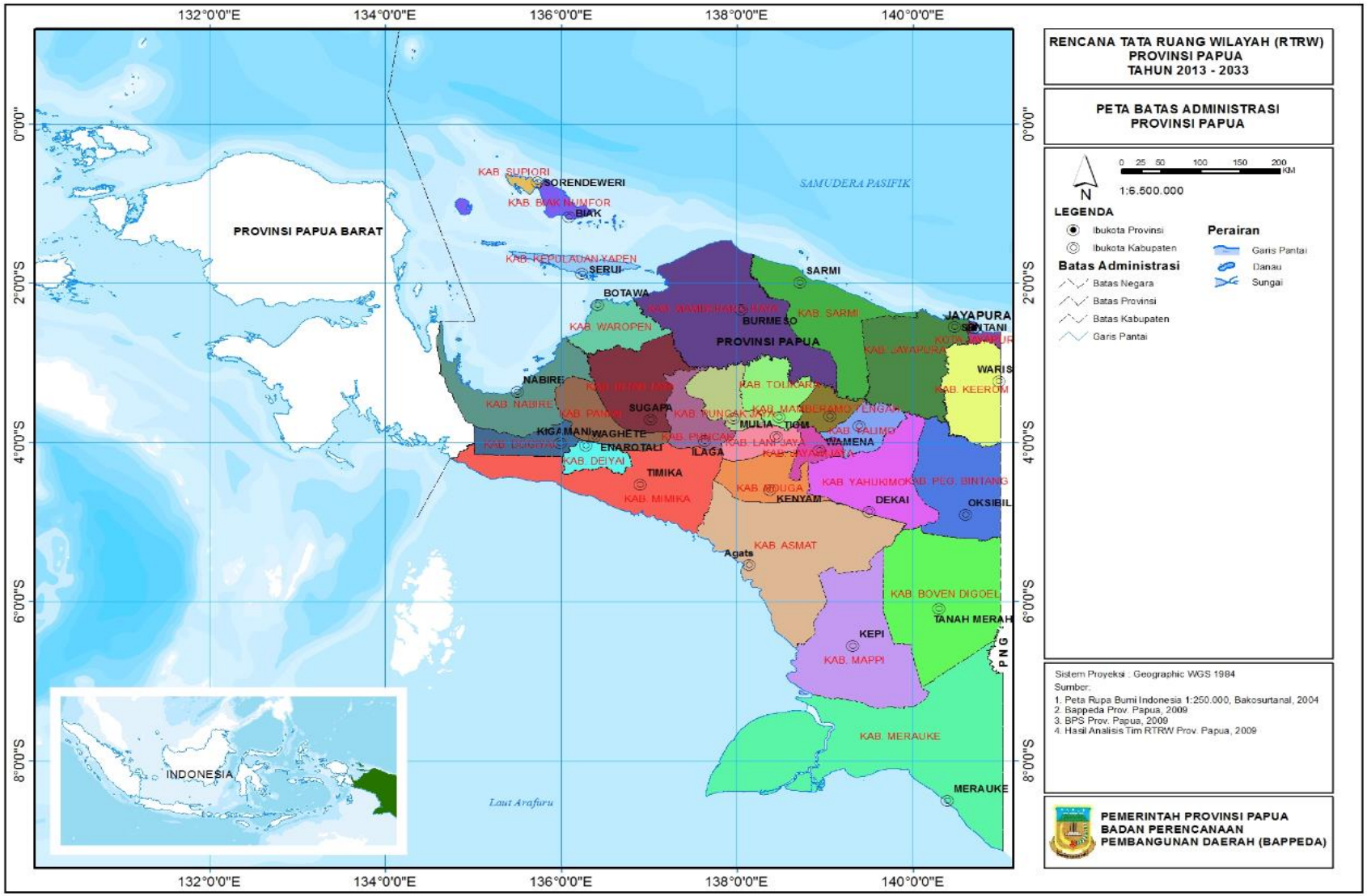

Tabel 2.1. Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten /Kota	Luas Wilayah (Ha)*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
Anim Ha	Merauke	647.200	Merauke	20	165	10	Dataran Mudah Akses
	Asmat	2.965.800	Agats	23	217	4	Dataran Sulit Akses
	Boven Digoel	2.710.800	Tanah Merah	20	105	5	
	Mappi	1.891.200	Keppi	15	162	2	
La Pago	Jayawijaya	658.500	Wamena	39	317	14	Pegunungan Tengah
	Lanny Jaya	224.800	Tiom	38	353	-	
	Mamberamo Tengah	127.500	Kobakma	5	59	-	
	Nduga	216.800	Kenyam	32	248	-	
	Pegunungan Bintang	1.568.200	Oksibil	34	277	-	
	Puncak	805.500	Ilaga	25	205	-	
	Puncak Jaya	680.000	Mulia	26	302	-	
	Tolikara	1.456.400	Karubaga	46	545	-	
	Yahukimo	1.604.900	Dekai	51	517	1	
	Yalimo	125.300	Elelim	5	254	-	
Mee Pago	Nabire	1.535.801	Nabira	15	76	9	Dataran Mudah Akses
	Mimika	2.003.900	Timika	18	123	24	Dataran Sulit Akses
	Deiyai	53.739	Waghete	5	67	-	Pegunungan Tengah
	Dogiyai	423.740	Kigamani	10	79	-	
	Intan Jaya	392.202	Sugapa	6	78	-	
	Paniai	1.098.466	Enarotali	20	74	-	
Saireri	Biak Numfor	260.200	Biak	19	239	23	Dataran Mudah Akses
	Kepulauan Yapen	205.000	Serui	16	147	18	
	Supiori	52.800	Sorendiweri	5	37	1	
	Waropen	1.694.400	Waren	12	116	1	Dataran Sulit Akses
Mamta	Jayapura	1.751.400	Sentani	19	127	17	Dataran Mudah Akses
	Keerom	839.000	Arso	11	91	-	
	Sarmi	3.558.900	Sarmi	19	108	2	
	Mamberamo Raya	2.381.391	Burmeso	9	59	-	
	Kota Jayapura	94.000	Jayapura	5	16	23	Dataran Sulit Akses
Total		**32.027.839**		**568**	**5.163**	**154**	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2017 (diolah)

Keterangan: (*) Luas wilayah berdasarkan undang-undang pemekaran

Berdasarkan Gambar 2.1 dan Tabel 2.1, terdapat 19 kabupaten di wilayah Papua yang berada di daerah dataran sulit akses dan pegunungan. Dari 5.163 kampung yang teridentifikasi melalui data statistik tahun 2017, sekitar 79,68% atau sebanyak 4.114 kampung terletak di daerah pegunungan dan sulit akses, dimana kurang lebih 70% dari seluruh kampung tersebut masih merupakan daerah yang terisolasi dari akses transportasi. Keragaan kondisi geografi wilayah kabupaten/kota yang tidak seimbang baik itu dilihat dari luas maupun letak wilayahnya, menjadi salah satu kendala bagi pemerintah provinsi selama ini dalam memberi memberi pelayanan publik ke seluruh pelosok kampung secara optimal.

Masalah lainnya adalah yang terkait dengan wilayah administrasi, terutama sengketa tapal batas antarwilayah kabupaten. Misalkan Kabupaten Tolikara yang mengklaim memiliki luas 1.456.400 hektar menurut UU pemekaran selama ini mempunyai persoalan sengketa wilayah dengan beberapa kabupaten di

sekelilingnya, seperti dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yahukimo. Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Yapen yang memiliki luas wilayah 205.000 hektar bersengketa tapal batas dengan Kabupaten Nabire. Permasalahan tapal batas ini jika tidak ditangani segera akan menjadi penyulut pecahnya konflik horisontal yang lebih besar di masa mendatang.

2.1.1.2. Topografi

Wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan yaitu: 1) Pegunungan Utara di lingkar luar, 2) deretan Pegunungan Selatan di lingkar dalam, serta 3) deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari *The Australian Continent*. Daerah pegunungan berada pada ketinggian di antara 3000-4000 dan lebih dari 4000 meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl sedangkan yang paling rendah adalah Kota Jayapura dengan ketinggian rata-rata 4 mdpl.

Kelerengan yang mendominasi wilayah provinsi papua adalah lereng landai (0 – 8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (>40%) menempati 43,3%, yang tersebar pada wilayah Haanim, Meepago, Mamta dan Laapago.

Kondisi topografi Papua yang sangat ekstrim (lihat Gambar 2.2 dan 2.3) menyebakan pembangunan jaringan transportasi darat sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk juga dalam pembangunan jaringan fasilitas publik lainnya seperti listrik, air bersih, informasi dan komunikasi juga terkendala dengan kondisi topografi ini. Semuanya membutuhkan biaya besar dan sangat mahal yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Karenanya dalam hal pembangunan infrastruktur Papua, peran pemerintah pusat sangat diperlukan selama ini.

2.1.1.3. Kondisi Kawasan

Selain terhampar daratan yang sangat luas, Provinsi Papua juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu Laut Arafuru dan Samudera Pasifik, sehingga wilayah Papua memiliki potensi di bidang perikanan laut tangkap.

Gambar 2.2. Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua

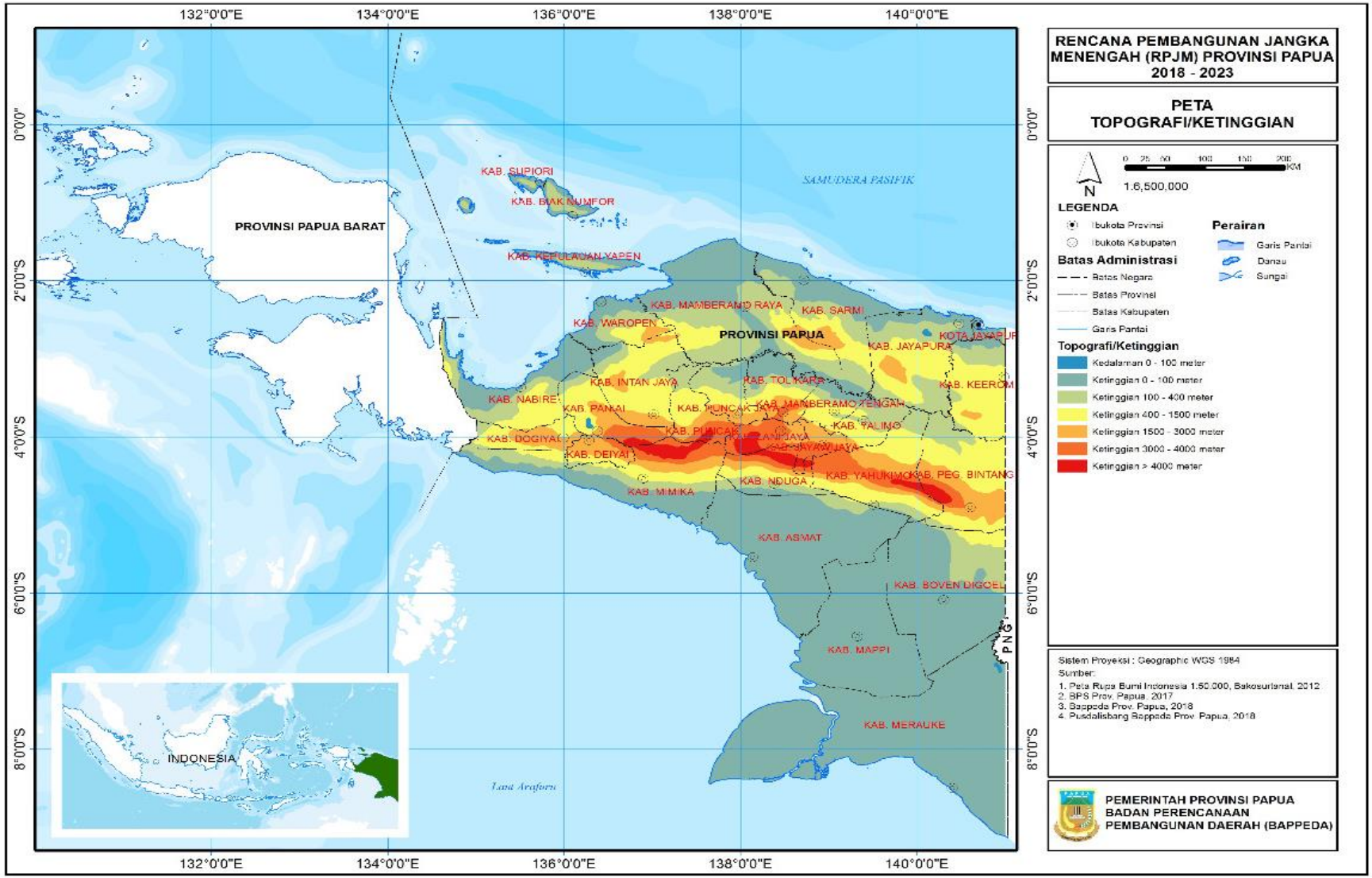

Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng

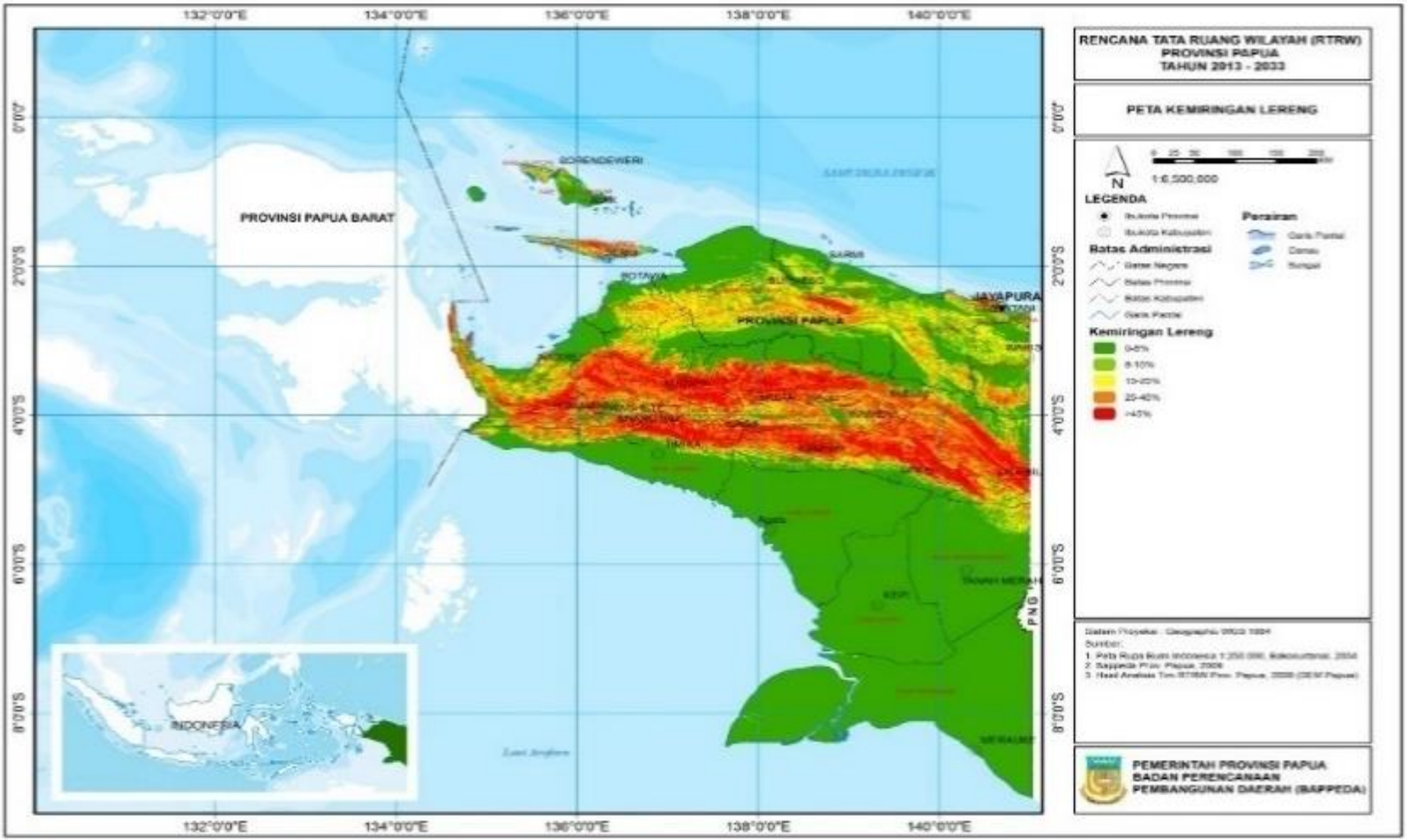

Adapun luas wilayah laut sebesar 12.151,61 km^2 dan panjang garis pantai sebesar 5.878,11 km (lihat 0).

Tabel 2.2.Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Laut (km^2)	Panjang Garis Pantai (km)
1	Merauke	3.179,51	1.497,01
2	Jayapura	1,35	148,33
3	Nabire	234,97	641,16
4	Kepulauan Yapen	40,03	897,72
5	Biak Numfor	47,85	537,17
6	Mimika	2.832,30	464,80
7	Mappi	582,14	151,47
8	Asmat	2.845,91	275,97
9	Sarmi	31,85	302,20
10	Waropen	666,69	222,58
11	Supiori	35,83	340,80
12	Mamberamo Raya	1.650,37	291,45
Provinsi Papua		**12.151,61**	**5.878,11**

Sumber: BPS, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2008, Bakorsutanal, dan hasil pengukuran GIS Tahun 2009, Buku Rencana RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sebagai wilayah yang dikelilingi laut dan berada di perairan bebas samudera pasifik, Provinsi Papua juga memiliki beberapa pulau yang berbatasan dengan negara lain. Terdapat 2 *daerah terluar* di Papua yang wilayahnya berbatasan dengan perairan negara Palau dan Australia, yaitu di Kabupaten Supiori dan Merauke (lihat Tabel 2.3).

Tabel 2.3.Kawasan Terluar di Provinsi Papua

No	Nama Pulau	Kabupaten/Kota	Negara yang berbatasan	Keterangan
1	P. Fanildo	Supiori	Palau	Tidak berpenduduk
2	P. Brass	Supiori	Palau	Berpenduduk
3	P. Bepondi	Supiori	Palau	Berpenduduk
4	P. Liki	Sarmi	Palau	Berpenduduk
5	P. Kolepon/P. Dolok	Merauke	Australia	Berpenduduk

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Papua 2008 dalam RPJPD 2005-2025

Provinsi Papua juga merupakan salah satu kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guninea (PNG). Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota sebagai *daerah terdepan* di Provinsi Papua yang posisinya berbatasan langsung dengan PNG yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul dan Merauke. Dinamika perbatasan RI-PNG diwarnai oleh adanya mobilitas lintas batas tradisional. Untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas tersebut, Pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2018 telah

membangun 17 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Papua (lihat Gambar 2.44).

Gambar 2.4. Peta Pos Lintas Batas Negara di Indonesia Tahun 2018

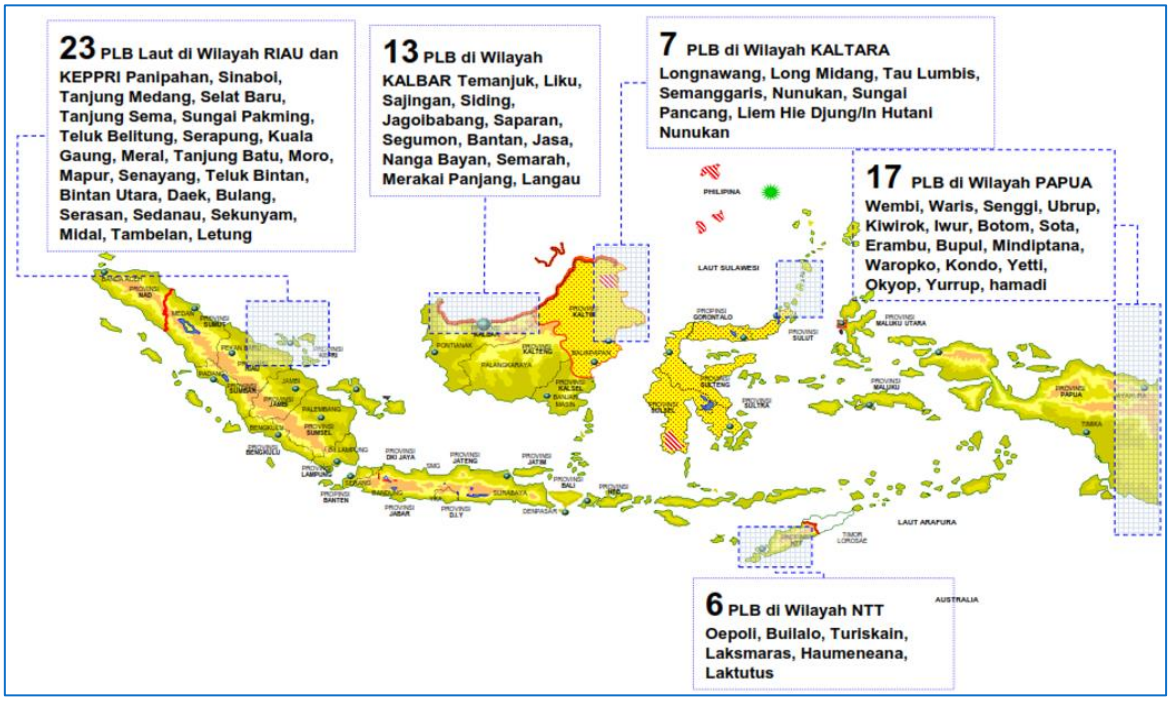

Sumber: Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI (2018)

Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, pemerintah pusat telah membangun PLBN Skouw di Kota Jayapura. PLBN Skouw berdiri megah di atas lahan dengan luas total mencapai 10,7 hektar, dengan luas bangunan mencapai 7.619 m^2 yang terbagi dalam beberapa zona. Desain Gedung PLBN Skouw ini mengusung budaya lokal Papua yang mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Tangfa, penggunaan ornamen lokal, serta penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau (*green building*). Direncanakan pada tahun 2018, PLBN Sota di Kabupaten Merauke akan direnovasi dan dibangun lebih besar, namun tidak semegah seperti PLBN Skouw, karena aktifitas ekonomi dan lintas batas antar 2 (dua) negara RI-PNG pada PLBN Sota tidak seintensif PLBN Skouw.

Kondisi topografi yang begitu ekstrim yang tersebar di hampir sebagian wilayah Papua menyebabkan banyak daerah yang terisolasi dan belum tersentuh oleh pelayanan publik dari pemerintah secara memadai, sehingga jumlah daerah di

Papua yang terkategori sebagai *daerah tertinggal* paling banyak di Indonesia. Sebagaimana yang dipaparkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 disebutkan jumlah daerah tertinggal di Papua sebanyak 26 Kabupaten, yang mana lebih jauh lagi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dikatakan penyebab utama ke-26 tersebut menjadi daerah tertinggal ada 6 faktor yakni : (1) aksesbilitas, (2) Sumber Daya Manusia, (3) Ekonomi, (4) Sarana dan Prasarana, (5) Karakteristik Daerah, dan (6) Kemampuan Keuangan Daerah. Urutan faktor-faktor penyebab utama ketertinggalan suatu daerah di wilayah di Papua dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4.Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan Wilayah Papua Tahun 2015-2019

Wilayah Adat	Kabupaten	Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)					
		1	2	3	4	5	6
Anim Ha	Merauke	Aksesbilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana		
	Boven Digul	Aksesbilitas	SDM	Ekonomi			
	Mappi	Aksesbilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana		
	Asmat	Aksesbilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana	Karakteristik Daerah	
Mamta	Sarmi	Aksesbilitas	SDM	Ekonomi			
	Keerom	Aksesbilitas	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	SDM		
	Mamberamo Raya	Aksesbilitas	Ekonomi	SDM			
La Pago	Jaywijaya	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesbilitas		
	Puncak Jaya	Aksesbilitas	Sarana dan Prsarana	Ekonomi	SDM		
	Yahukimo	Aksesbilitas	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana		
	Pegunungan Bintang	Aksesbilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana		
	Tolikara	Aksesbilitas	Sarana dan Prsarana	SDM	Ekonomi		
	Nduga	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana	Aksesbilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	
	Lanny Jaya	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesbilitas		
	Mamberamo Tengah	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesbilitas		
	Yalimo	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Karakteristik Daerah		
	Puncak	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesbilitas		
Mee Pago	Nabire	Aksesbilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan	

Wilayah Adat	Kabupaten	Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)					
		1	2	3	4	5	6
						Daerah	
	Paniai	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesbilitas	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah
	Dogiyai	Ekonomi	SDM	Aksesbilitas	Sarana dan Prsarana	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah
	Intan Jaya	SDM	Ekonomi	Aksesbilitas	Sarana dan Prsarana	Karakteristik Daerah	
	Deyiai	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Kemampuan Keuangan Daerah		
Saireri	Kepulauan Yapen	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Aksesbilitas			
	Biak Numfor	Ekonomi	Aksesbilitas	Kemampuan Keuangan Daerah			
	Waropen	Aksesbilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	
	Supiori	Ekonomi	Aksesbilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	SDM	

Sumber: Perpres No. 21 Tahun 2018 (diolah)

Dalam Tabel 2.4 terlihat bahwa permasalahan yang paling utama (nomor 1) penyebab ketertinggalan suatu daerah kabupaten di wilayah Papua menurut perspektif pemerintah pusat adalah aksesbilitas, ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Merujuk kepada indikasi yang tercantum dalam Tabel 2.4 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyebab utama ketertinggalan wilayah Anim Ha dan Mamta adalah faktor aksesibilitas. Penyebab utama ketertinggalan di La Pago dan Mee Pago adalah faktor aksesbilitas, ekonomi, dan Sumber Daya Manusia. Adapun penyebab ketertinggalan Saireri adalah ekonomi, terkecuali untuk Waropen penyebab utamanya adalah aksesbilitas.

Dalam tataran wilayah yang lebih kecil yakni perdesaan, berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, jumlah desa tertinggal yang menjadi prioritas untuk wilayah Papua sebanyak 615 desa atau 88,87% dari yang dilaporkan pada tahun 2017 (lihat Tabel 2.5).

Sebagian besar desa tertinggal di Papua tersebar di daerah-daerah pegunungan, terutama di wilayah adat La Pago mencapai 233 desa. Berikutnya di wilayah Saireri sebanyak 111 desa, di Mamta sebanyak 107 desa, dan Anim Ha

sebanyak sebanyak 102 desa. Adapun di Mee Pago, jumlahnya yang terlihat sedikit karena banyak desa yang belum melaporkan kepada pemerintah pusat, sehingga teridentifikasi hanya 62 desa yang terkategori sebagai desa tertinggal.

Tabel 2.5.Jumlah Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Provinsi Papua Tahun 2017*

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Total
Anim Ha	**3**	**102**	**138**
Asmat	1	18	20
Boven Digoel	1	11	14
Mappi		14	14
Merauke	1	59	90
La Pago	**3**	**233**	**236**
Jayawijaya	1	67	68
Puncak	1	3	4
Puncak Jaya	0	15	15
Tolikara	0	29	29
Yahukimo	0	15	15
Lanny Jaya	0	19	19
Mamberamo Tengah	0	15	15
Nduga	0	14	14
Pegunungan Bintang	0	11	11
Yalimo	1	45	46
Mee Pago	**3**	**62**	**66**
Deiyai	1	4	5
Intan Jaya		14	14
Mimika		8	8
Nabire	1	5	6
Paniai		15	15
Dogiyai	1	16	18
Saireri	**3**	**111**	**118**
Biak Numfor	1	55	59
Kepulauan Yapen	1	30	31
Supiori		7	7
Waropen	1	19	21
Mamta	**4**	**107**	**134**
Jayapura	1	9	19
Keerom	1	16	21
Mamberamo Raya	1	4	5
Sarmi	1	78	89
Total	**16**	**615**	**692**

Sumber: Kemendes PDTT RI (2017)

Keterangan*:
1. Penetapan desa tertinggal berdasarkan nilai IDM (Indeks Desa Membangun)
2. Jumlah desa yang dinilai tergantung dari banyaknya desa yang memberi laporan
3. Jumlah desa di Papua (diluar yang ada di Kota Jayapura) sebanyak 4.339 desa
4. Hanya 16% dari total desa di Papua yang dapat dinilai IDM-nya

Selain terdapat daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal, Provinsi Papua juga teridentifikasi memiliki *Daerah Tertentu*, khususnya daerah rawan konflik dan bencana. Berdasarkan *data base* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT RI) tahun 2015, terekam 2.624 kejadian konflik di Papua, yang sebagian besar (33,84%) disebabkan karena main hakim sendiri.

Terdapat 3 (tiga) daerah tertentu yang sangat rawan konflik main hakim sendiri yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Jayapura. Sedangkan untuk konflik sumber daya lebih dominan di Kabupaten Mimika yang kaya akan sumber daya tambang emas dan tembaga. Adapun untuk daerah lainnya, seperti Kabupaten Deiyai, Intan Jaya, Mamberamo Raya, Boven Digoel, Yalimo, Mamberamo Tengah, Nduga, Supiori, Waropen dan Mappi semuanya terindikasi merupakan daerah yang sangat rendah kerawanan konfliknya (lihat Gambar 2.55).

Gambar 2.5. Kejadian Konflik di Provinsi Papua Tahun 2015

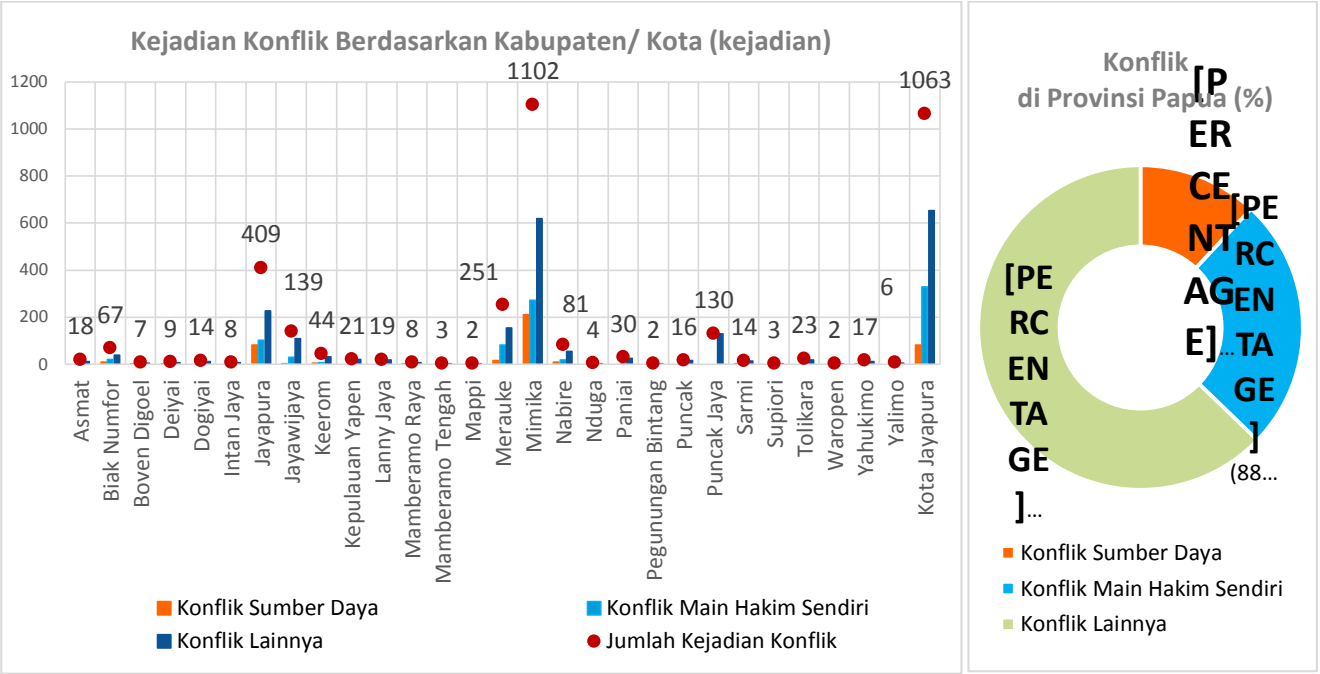

Sumber: Kemendes PDTT RI, 2017 (data diolah)

Kawasan daerah tertentu lainnya yang patut diperhatikan adalah kawasan bencana. Berdasarkan *data base* yang dikeluarkan Kemendes PDTT RI tahun 2013, terdapat tiga bencana yang sangat rawan terjadi di Provinsi Papua yaitu banjir, tanah longsor dan kebakaran (lihat Tabel 2.6).

Tabel 2.6.Tingkat Kerawanan Bencana di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	RB Banjir	RB Gempa Bumi	RB Tsunami	RB Tanah Longsor	RB Gelombang Ekstrim & Abrasi	RB Kebakaran	RB Cuaca Ekstrim	RB Kekeringan
Merauke	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Kabupaten/Kota	RB Banjir	RB Gempa Bumi	RB Tsunami	RB Tanah Longsor	RB Gelombang Ekstrim & Abrasi	RB Kebakaran	RB Cuaca Ekstrim	RB Kekeringan
Jayawijaya	-	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Jayapura	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Nabire	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	-
Kep. Yapen	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	-
Biak Numfor	-	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Puncak Jaya	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Tinggi
Paniai	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Mimika	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Sarmi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Keerom	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Rendah	Tinggi
Peg. Bintang	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi
Yahukimo	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi
Tolikara	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Rendah	Tinggi
Waropen	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Boven Digoel	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi
Mappi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Asmat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Supiori	-	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	-
Mamb. Raya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Mamb. Tengah	Sedang	Tinggi	-	Sedang	-	Sedang	Rendah	-
Yalimo	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	-
Lanny Jaya	-	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Nduga	Tinggi	Sedang	-	Sedang	-	Sedang	Sedang	-
Puncak	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	-
Dogiyai	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Intan Jaya	-	Tinggi	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	-
Deiyai	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Kota Jayapura	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	-	Sedang	Tinggi

Sumber: Kemendes PDTT RI (2017)

Dalam Tabel 2.6 tergambarkan bahwa tingkat kerawanan bencana banjir pada hampir setiap kabupaten/kota termasuk dalam kelas yang tinggi. Hanya 6 daerah tertentu saja yang diindikasikan tidak memiliki kerawanan banjir yakni Kabupaten Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori, Lanny Jaya dan Intan Jaya. Sedangan untuk kerawanan tanah longsor sebagian besar daerah di Papua berpotensi tinggi, terkecuali untuk Kabupaten Merauke, Nabire, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah dan Nduga yang mempunyai kelas sedang. Selanjutnya untuk rawan kebakaran, oleh karena Papua memiliki hutan yang sangat luas dan menyebar diseluruh daerah, akhirnya hampir seluruh daerah di Papua terindikasi rawan kebakaran, kecuali Kota Jayapura saja yang dianggap tidak berpotensi rawan kebakaran. Untuk daerah lain potensi kerawanan kebakarannya bervariasi antara kelas yang tinggi dan sedang, dengan yang terbanyak pada kerawanan tinggi seperti di Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Paniai, Mimika, Sarmi, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Tolikara. Daerah yang potensi rawan kebakarannya dalam kelas sedang hanya ada 7 (tujuh) yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Nduga, Puncak dan

Intan Jaya. Secara visual, kondisi penyebaran rawan bencana alam di Provinsi Papua dapat diperhatikan pada Gambar 2.6 berikut ini.

Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Alam

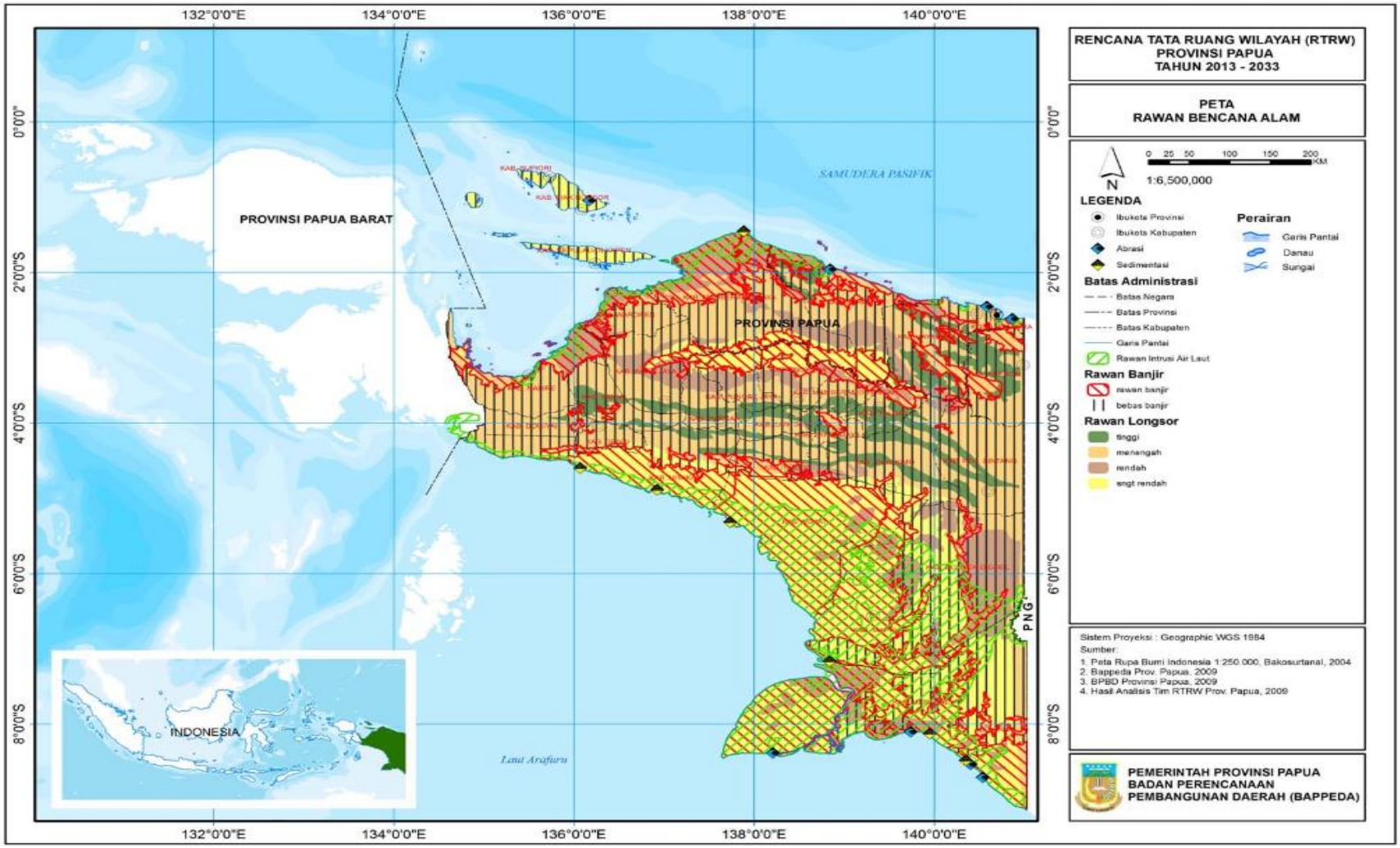

2.1.1.4. Klimatologi

Iklim Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis (*tropical rain forest*), yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan, dan angin Muson yang menyebabkan Papua kaya dengan flora dan fauna khas hutan hujan tropis. Secara umum, musim kemarau di Papua terjadi di Bulan Juni-September, sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan Desember-Maret, dengan masa peralihan pada Bulan April-Mei dan Bulan Oktober-November. Terdapat 32,4% tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40° dan rawa-rawa yang luas terutama di sepanjang pesisir pantai Selatan Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai pedalaman. Curah hujan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data curah hujan dan hari hujan dari berbagai stasiun lima tahun terakhir menunjukkan angka merata dihampir seluruh wilayah di provinsi Papua. Terdapat kecenderungan jumlah curah hujan meningkat sejalan dengan peningkatan ketinggian tempat Pola penyebaran curah hujan menunjukkan adanya variasi antar wilayah, dari curah hujan sedang (1750 mm), tinggi (2500-4000mm), hingga sangat tinggi (>4000mm), secara umum dapat dikatakan tinggi. Penyebaran curah hujan Penyebaran curah hujan sedang, hanya dijumpai di kabupaten Biak Numfor, kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten paniai, kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yahukimo. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya memiliki curah hujan tinggi hingga sangat tinggi (lihat Gambar 2.77).

Selain memiliki potensi yang menguntungkan, curah hujan yang tinggi juga dapat memberikan permasalahan bagi bidang pertanian, perhubungan, infrastruktur jalan, dan sebagainya. Dampak langsung dari curah hujan ada yang dirasakan seketika, dan ada yang dirasakan secara lambat. Dampak langsung seketika, misalnya curah hujan yang tinggi atau terus menerus dapat menimbulkan tanah longsor saat itu. Kondisi ini dapat dilihat sering terjadi di daerah-daerah pegunungan seperti di Yalimo, Lanni Jaya, Puncak Jaya, dan sebagainya.

Suhu udara di Provinsi Papua, sangat variatif. Pada daerah pengunungan dengan variasi ketinggian wilayah yang beragam memiliki suhu udara minimum 15°C dan daerah pesisir dan landai suhu maksimal mencapai 33°C. Kelembaban udara rata-rata yaitu 78-85% dan durasi penyinaran matahari di Provinsi papua berada pada level 35-68% dengan tekanan udara rata-rata 1.008 mbs.

Gambar 2.7. Peta Intensitas Curah Hujan

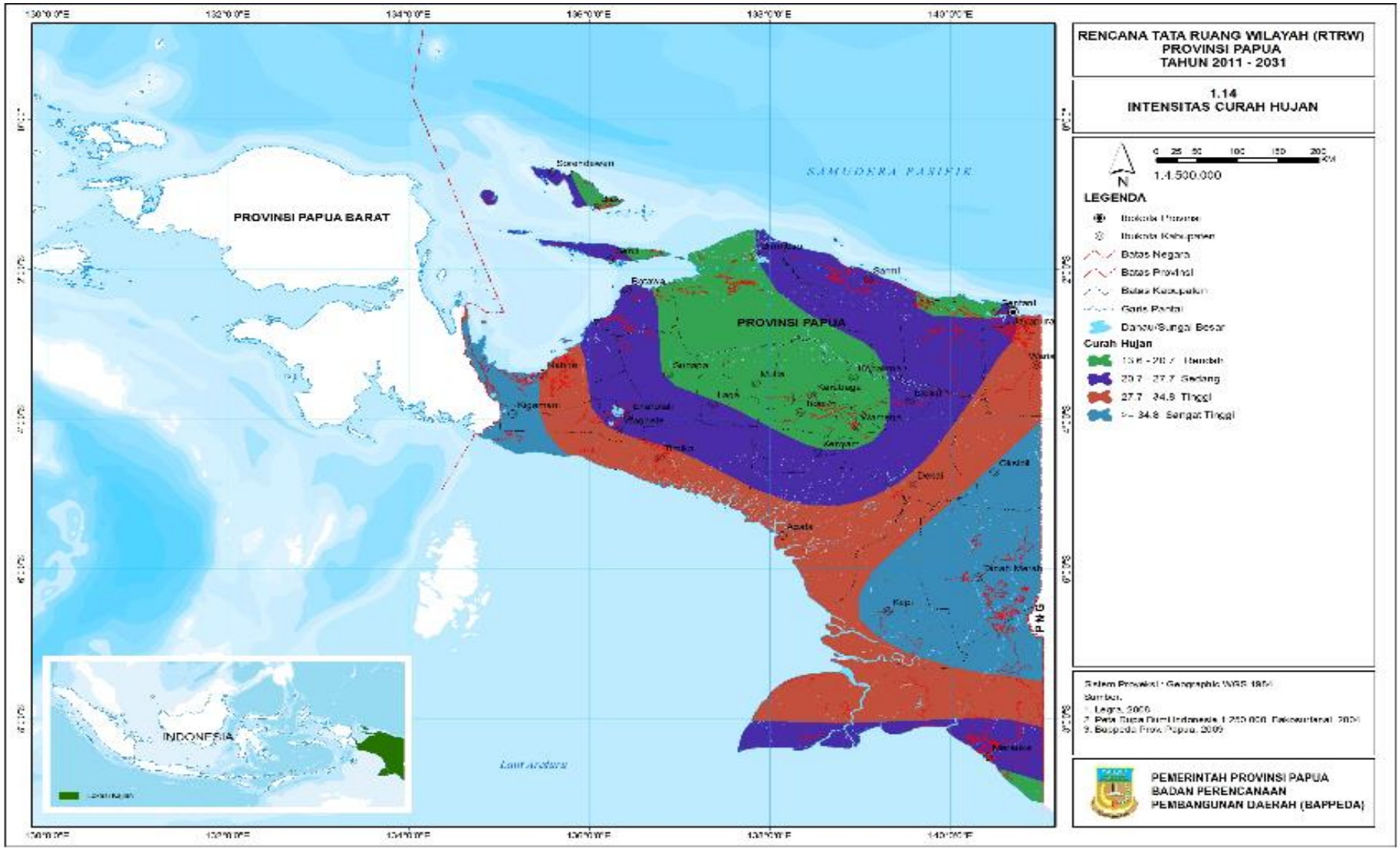

Kondisi yang ekstrim juga terjadi di beberapa daerah pegunungan dengan adanya hujan yang tinggi diiringi dengan butiran es sehingga menimbulkan hujan es. Hujan es yang pernah terjadi di tahun 2015 berlangsung selama 10 hari di tiga Kampung di Distrik Agadugume Kabupaten Puncak misalkan mengakibatkan tanaman di kebun warga membusuk dan mati, dan kurang lebih 10.000 jiwa penduduk yang mendiami tiga kampung tersebut terancam mengalami rawan pangan akibat peristiwa ini. Fenomena yang sama juga terjadi di Kabupaten Lanny Jaya dan Puncak Jaya.

2.1.1.5. Hidrologi

Provinsi Papua memiliki 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total panjang sungai 35.924,737 km dan total luas daerah tangkapan 572.753, 823 km^2 (lihat Tabel 2.7). Banyaknya jumlah DAS menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan Sumber Daya Air yang berlimpah. Sungai-sungai besar yang terbentang dan danau yang tersebar di Papua dapat menjadi sumber energi listrik terbarukan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produktif, pendapatan asli daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Tabel 2.7.Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua

Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km^2)
Memberamo Hilir	660.457	80.099,16
Turitatu Hilir	788.626	47.872,90
Turiku Hilir	930.094	34.912,40
Apauwer	252.59	2.998,00
Wiru	155.114	2.494,80
Verkume	155.798	1.845,50
Biri	116.087	2.173,00
Sermo	151.866	1.599,20
Tor	244.29	3.153,60
Van Dallen	513.64	8.585,15
Wediman	875.27	11.492,30
Digul Kanan	420.912	7.253,70
Digul Hilir	1,178.81	33.698,04
Digul Kiri	615.753	6.162,50
Digul Timur	196.058	3.189,91
Digul Barat	196.01	2.489,90
Ein Hilir	1,956.46	65.315,43
Ein Hulu	509.886	5.337,72
Wapoga	574.393	10.637,14
Sobger	1.262.169	35.174,80
Turitatu Tengah	662.304	20.312,70
Bigadu	315.5	9.103,53
Sirowo	150.915	4.013,00
Turiku Hulu	10.628.779	7.925,61

Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km^2)
Maro	559.804	9.909,00
Tami	320.328	7.015,40
Omba	157.253	3.427,60
Yawe	147.289	4.170,30
Lorentz	747.383	8.717,65
Kumbe	262.015	3.282,00
Wanggar	361.35	4.776,20
Kapiraya	121.26	2.860,90
Peter	682.955	10.992,30
Otokwa	187.337	3.395,30
Sentani	35.04	968,60
Grime	110.725	1.050,00
Bunga	397.783	3.457,07
Vriendschaps	475.472	5.912.508,00
Bian	640.218	12.080,12
Kamura	118.525	2.187,60
Rombak	346.119	1.971,20
Nadubuai	222.608	1.971,20
Brazza	990.666	10.088,02
Parongga	31.33	593,20
Yawe	61.296	1.272,00
Akimuga	288.925	2.660,10
Mimika	477,71	4.670,01
Aidoma	306.834	3.184.599,00
Minajerwi	447.597	5.054,70
Cemara	280.4	2.556,40
Otokwa	181.007	1.662,00
Nordwest	624.39	7.832,82
Odamun	264.36	6.808
Dolok	224.573	3.119,20
Bulaka	331.26	6.418,01
Siriwo	155.759	1.187,60
Kumbe	38.4	483,90
Paranggo	94.882	774,90
Kamura	270.438	2.243,20
Mappi	524.98	7.596,00
Biak	84.27	467,15
Supiori	83.457	245.917,00
Yapen	298.986	1.266.089,00
Gesa	457.979	5.551,02

Sumber: RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

Adapun berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai menetapkan pembagian wilayah sungai di Provinsi Papua sebagai berikut :

1) WS Mamberamo-Tami-Apauvar (kewenangan BWS Papua), terdiri atas beberapa DAS:DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu, DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Sermo, DAS Grimer dan DAS Sentani.

Gambar 2.8. Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua

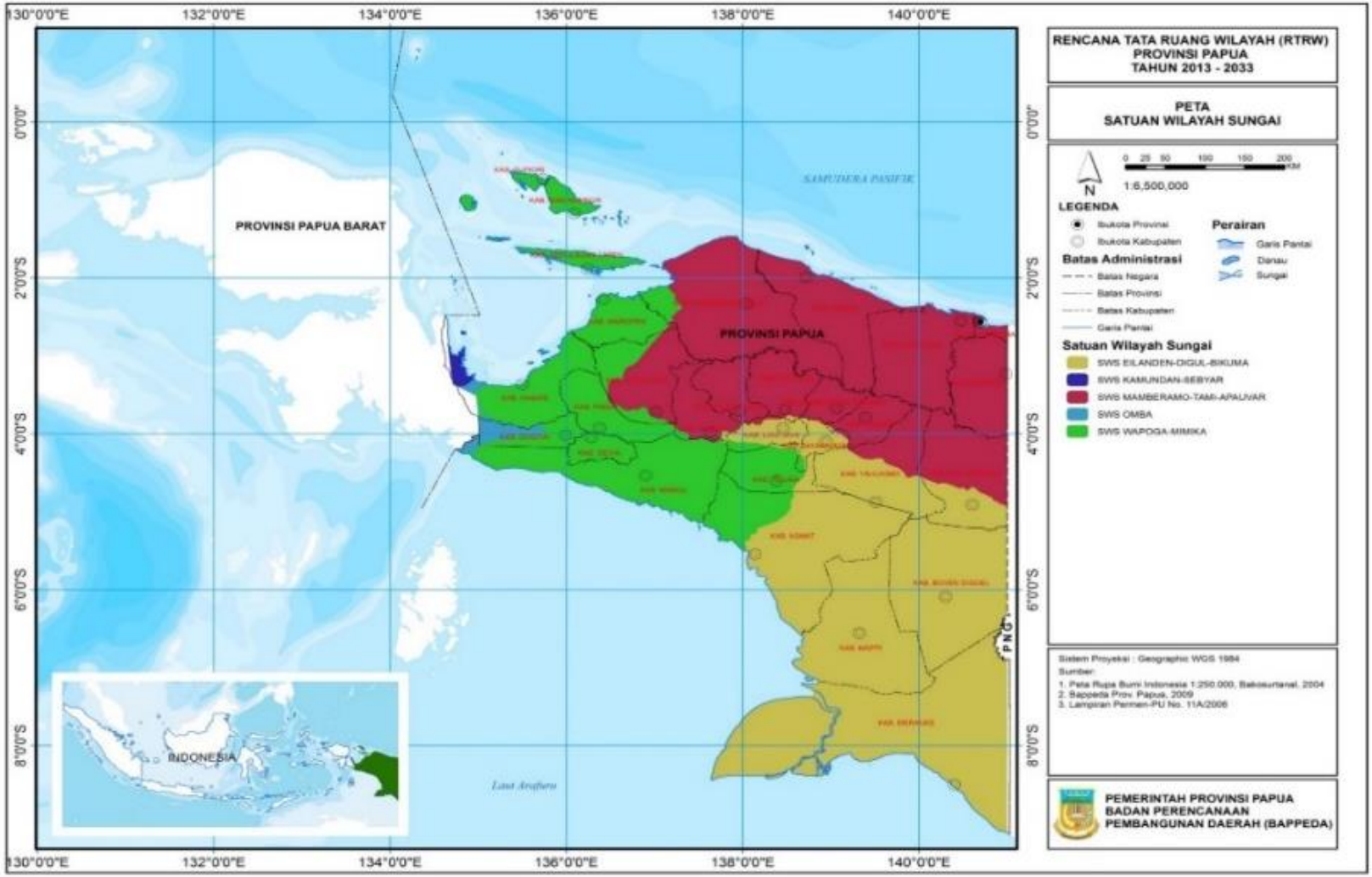

2) WS Einlanden-Digoel-Bikuma (kewenangan BWS Papua Merauke), terdiri atas beberapa daerah aliran sungai:DAS Einlanden, DAS Digoel, DAS Maro, DAS Kumber, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digoel dan DAS Cemara.
3) Wilayah sungai Omba (lintas Provinsi Papua-Provinsi Papua Barat, kewenangan Papua Barat), terdiri atas WS Omba mencakup beberapa DAS:DAS Omba, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bedidi dan DAS Bomberai.
4) Wilayah sungai lintas kabupaten/kota terdiri atas WS Wapoga-Mimika (kewenangan Dinas PU Provinsi), yang mencakup beberapa DAS:DAS Wapoga, DAS Aikimuga, DAS Otokwa, DAS Minarjerwi, DAS Kamura, DAS Mimika, DAS Yawe, DAS Parongga, DAS Aidoma, DAS Wanggar, DAS Siriwo, DAS Rombak, DAS Nadubuai, DAS Yapen, DAS Biak, DAS Supiori dan DAS Kemabu.

Instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS cukup banyak, misalkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, baik itu secara administrasi, perencanaan dan teknis dilapangan, maka diperlukan adanya koordinasi intensif berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah.

Selain memberi peluang yang besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, banyaknya sungai dan rawa juga merupakan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Pada wilayah yang dikelilingi rawa atau banyak rawa membuat pembangunan jalan di daerah-daerah tersebut membutuhkan konstruksi yang lebih kokoh dibanding biasanya, yang dipastikan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Seringkali ditemukan pada pembangunan jalan di Papua, dalam satu lajur tidak sampai ratusan kilo ada perubahan formasi dari tanah keras ke tanah lunak, gambut dan rawa. Kondisi ini yang menyebabkan perkiraan biaya pembangunan jalan di wilayah Papua selalu bisa *over estimated*. Banyaknya sungai juga menjadi permasalahan tersendiri, karena pembangunan jalan harus dihubungkan juga dengan banyaknya jembatan yang dibangun di atas sungai, yang akhirnya membutuhkan biaya yang lebih besar.

2.1.1.6. Tutupan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033, diindikasikan Papua memiliki kawasan hutan yang luas dengan tutupan lahan yang relatif masih utuh. Hutan lahan kering primer dan hutan rawa primer merupakan daerah terluas yaitu masing-masing sekitar 15 juta ha (49%) dan 4,5 juta ha (14,5%); kemudian hutan lahan kering sekunder seluas 3,2 juta ha (10,5%) dan savanna seluas 1,4 juta ha (4,5%). Sementara itu, hutan lindung dan hutan produksi memiliki luasan yang hampir sama masing-masing sebesar 8,3 juta ha dan 8,2 juta ha. Sedangkan, jenis penggunaan hutan produksi konversi dan KSA/KPA mencapai 6,4 juta ha dan 5,6 juta ha (lihat Tabel 2.8 dan Gambar 2.9).

Tabel 2.8.Jenis Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2023

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan	Persentase
1	A i r	551.789,45	2%
2	APL	1.707.014,50	5%
3	Hutan Lindung	7.838.861,32	24%
4	Hutan Produksi	4.767.346,35	14%
5	Hutan Produksi Konversi	4.136.177,07	13%
6	HPT	5.982.030,10	18%
7	KSA	6.755.034,81	21%
8	KSA Air	1.019.016,51	3%
JUMLAH		32.757.270,10	100%

Sumber: RTRW 2012, Pemerintah Provinsi Papua

Sekitar 81,14% luas lahan di Papua berupa tutupan hutan yang mengandung kekayaan keanekaragaman hayati begitu tinggi. Diperkirakan dalam hutan Papua terdapat 602 jenis burung (52% jenis endemik), 223 jenis mamalia (58% jenis endemik), 223 jenis reptil (35% jenis endemik) dan 1.030 jenis tumbuhan (55% jenis endemik) hidup di belantara Papua.

Gambar 2.9. Peta Tutupan Lahan Tahun 2012

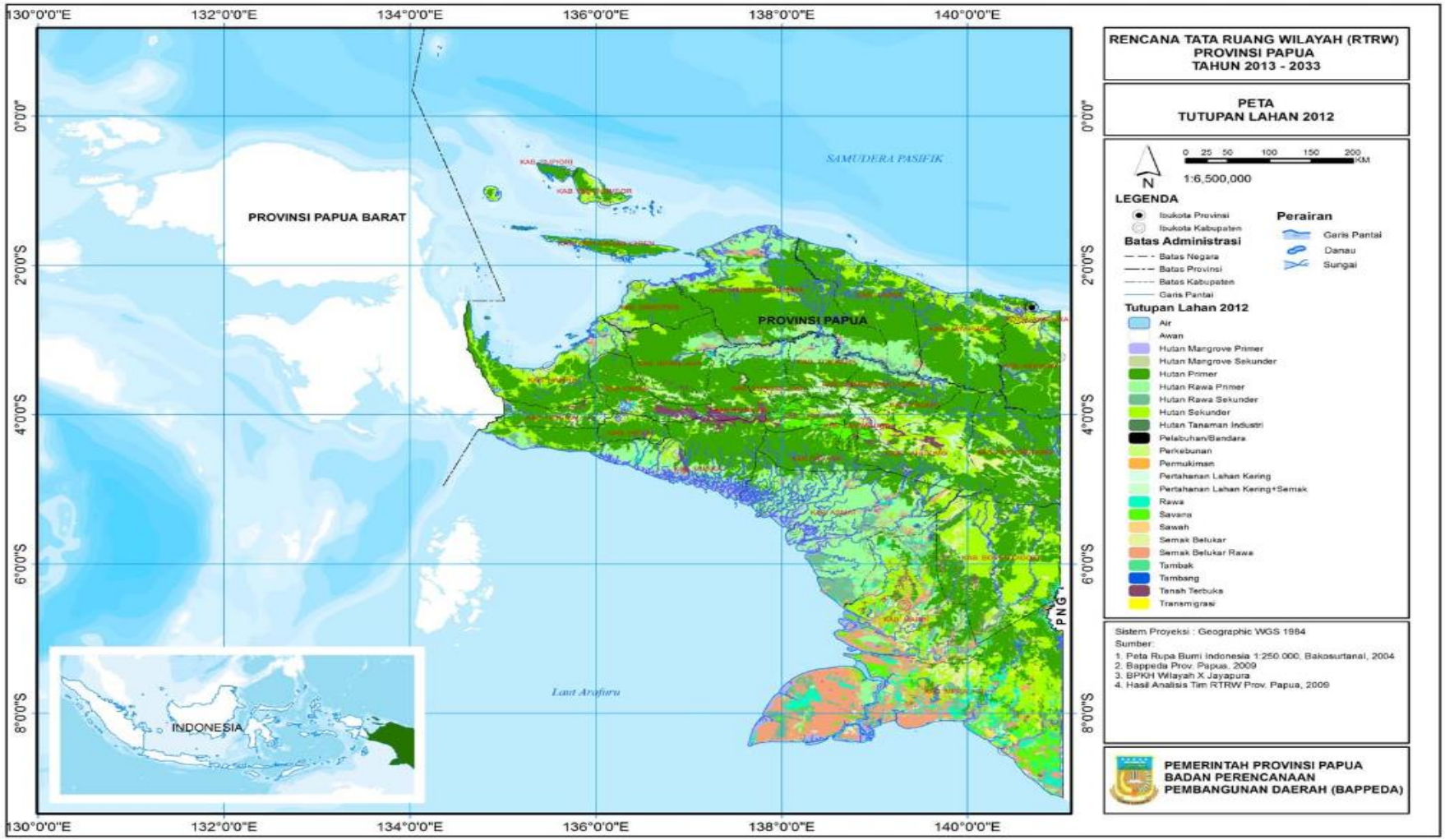

Selanjutnya, menurut data terbaru yang dipublikasikan oleh BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah X Papua, Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua berdasarkan Citra 8 OLI liputan tahun 2017 adalah seluas 32.498.762 hektar yang terdiri atas : (1) Kawasan Berhutan seluas 25.028.044 hektar, dan (2) Kawasan Tidak Berhutan seluas 7.470.718 hektar. Dimana Kelas Tutupan Lahan paling luas adalah untuk Hutan Lahan Kering Primer yaitu 14.746.788 hektar, serta daerah yang paling besar memiliki tutupan lahan adalah Kabupaten Merauke seluas 4.640.188. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10. Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8 OLI liputan tahun 2017 (dalam hektar)

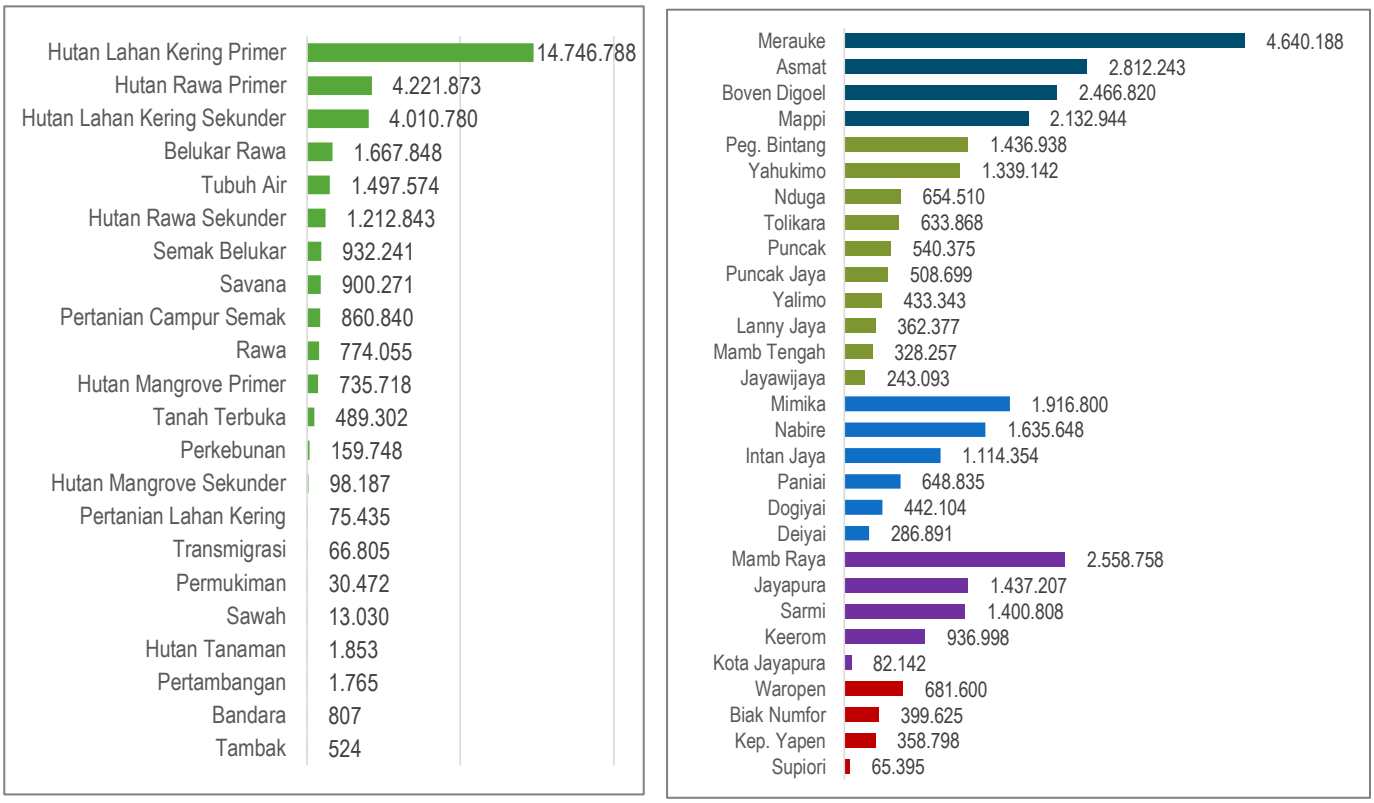

Sumber : BPKH Wilayah X Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Dari liputan BPKH Wilayah X Provinsi Papua, sebagian besar daerah kabupaten/kota terdiri atas Tutupan Lahan Hutan Primer, rata-rata sekitar 25%-58% dari total luas tutupan lahan masing-masing daerah, hanya di Kabupaten Merauke dan Asmat yang paling dominan adalah Belukar dan Hutan Rawa Primer, dengan luasnya mencapai 21,70-55,64%. Adapun distribusi penyebaran tutupan lahan berdasarkan Kelas Tutupan Lahan dan Kabupaten/Kota sewilayah Papua selengkapnya dapat dilhat pada Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9.Distribusi Penyebaran Tutupan Lahan Menurut Kelas Tutupan Lahan Dan Kabupaten/Kota Di Papua Tahun 2017

No.	Kelas Tutupan Lahan	Asmat	Biak Numfor	Boven Digoel	Deiyai	Dogiyai	Intan Jaya	Jayapura	Jayawijaya	Keerom	Kep. Yapen	Lanny Jaya	Mamberamo Raya
1	Bandara		110	48	35	12		102			52		
2	Belukar Rawa	116.525	129	34.849	1.240	3.232	19.972	2.859		987	526		62.262
3	Hutan Lahan Kering Primer	311.745	100.190	1.259.016	220.439	311.369	846.193	982.301	70.427	731.923	177.121	182.075	1.480.829
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	112.388	64.901	717.728	31.781	48.203	49.006	236.871	29.747	85.816	32.665	15.511	184.231
5	Hutan Mangrove Primer	177.742	3.942					108			680		86.102
6	Hutan Mangrove Sekunder	21.183	221								3.028		19.585
7	Hutan Rawa Primer	1.564.755	202	76.265	672	14.391	89.546	86.576		30.830	142		543.694
8	Hutan Rawa Sekunder	295.409	608	33.695	82	936	46.017	28.747		25.337	521		82.840
9	Hutan Tanaman							52					
10	Perkebunan			26.914	7.058			23.843		23.665			
11	Permukiman	413	1.533	2.740	2.312	493		1.229	2.001	1.269	1.014		27
12	Pertambangan												
13	Pertanian Campur Semak	1.278	15.419	32.589	5.232	33.620	43.458	26.012	46.687	9.332	10.581	38.307	2.140
14	Pertanian Lahan Kering		5.780	2.275				2.141	3.903	9.942	262		
15	Rawa	24.966	760	20.115		155	579	575	3	324		75	2.801
16	Savana	2.296		12.173	524	295	152	20	37.532			93.036	2.780
17	Sawah							135					
18	Semak Belukar	25.062	28.277	187.280	11.258	11.199	8.026	12.205	44.927	2.972	15.878	23.889	12.021
19	Tambak												
20	Tanah Terbuka	714	4.683	34.374	1.062	14.787	7.560	12.167	6.907	2.144	140	9.182	5.863
21	Transmigrasi							5.677		8.100			
22	Tubuh Air	157.766	172.870	26.761	5.197	3.412	3.846	15.589	958	4.356	116.188	302	73.584
	Total	2.812.243	399.625	2.466.820	286.891	442.104	1.114.354	1.437.207	243.093	936.998	358.798	362.377	2.558.758

Sumber : BPKH Wilayah X Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Lanjutan Tabel 2.9.

No.	Kelas Tutupan Lahan	Mamberamo Tengah	Mappi	Merauke	Mimika	Nabire	Nduga	Paniai	Peg. Bintang	Puncak	Puncak Jaya	Sarmi
1	Bandara		78	158	140	26			31			
2	Belukar Rawa	2.111	327.801	1.006.873	8.688	27.351		4.960		3.512	11.539	10.014
3	Hutan Lahan Kering Primer	206.066	400.068	549.218	917.185	574.697	562.647	452.936	1.126.632	340.219	303.967	929.790
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	25.336	311.203	674.260	154.866	307.912	20.861	30.954	109.628	24.047	12.700	200.346
5	Hutan Mangrove Primer		53.042	196.736	180.065	17.110						1.687
6	Hutan Mangrove Sekunder		4.218	24.956	12.812	578						1.515
7	Hutan Rawa Primer	41.677	343.238	199.859	388.253	118.674	17.899	3.927	15.241	51.167	121.042	185.001
8	Hutan Rawa Sekunder	15.367	163.988	364.065	30.848	23.680	2.104	2.975	1.713	7.122	4.150	34.454
9	Hutan Tanaman		1.792			10						
10	Perkebunan		2.792	64.100	534	10.841						
11	Permukiman		2.708	3.503	3.660	1.422		313	193		985	469
12	Pertambangan				1.591			106				
13	Pertanian Campur Semak	26.043	59.055	54.438	24.463	19.203	5.502	14.290	97.684	23.491	39.501	11.176
14	Pertanian Lahan Kering		1.754	16.567	3.151	10.887		1.319	467			3.804
15	Rawa	658	125.819	568.284	9.738	4.416	245	5.649	80	4.979	108	1.341
16	Savana	16	85.667	581.994	628	826	33.189	79	2.169	6.814	4.215	371
17	Sawah			11.154		563						
18	Semak Belukar	5.070	119.141	166.016	16.486	11.972	3.714	40.578	69.262	12.508	4.085	4.256
19	Tambak					89						
20	Tanah Terbuka	69	71.890	58.743	52.706	2.188	3.725	74.840	2.232	62.708	1.065	291
21	Transmigrasi			44.934	274	3.271						2.731
22	Tubuh Air	5.844	58.693	54.329	110.712	499.933	4.623	15.907	11.607	3.807	5.342	13.561
	Total	328.257	2.132.944	4.640.188	1.916.800	1.635.648	654.510	648.835	1.436.938	540.375	508.699	1.400.808

Lanjutan Tabel 2.9.

No.	Kelas Tutupan Lahan	Supiori	Tolikara	Waropen	Yahukimo	Yalimo	Jayapura	Jumlah
1	Bandara				8	7		807
2	Belukar Rawa	70	12.595	6.236	373	2.289	856	1.667.848
3	Hutan Lahan Kering Primer	52.641	301.763	375.993	710.715	246.433	22.189	14.746.788
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	4.004	20.690	93.132	299.305	88.172	24.519	4.010.780
5	Hutan Mangrove Primer	3.585		14.646			272	735.718
6	Hutan Mangrove Sekunder	78		10.014				98.187
7	Hutan Rawa Primer		207.027	47.119	35.875	34.625	4.179	4.221.873
8	Hutan Rawa Sekunder		12.930	21.344	5.199	4.676	4.035	1.212.843
9	Hutan Tanaman							1.853
10	Perkebunan						2	159.748
11	Permukiman	425		398		152	3.215	30.472
12	Pertambangan				68			1.765
13	Pertanian Campur Semak	761	58.563	3.244	116.207	35.429	7.134	860.840
14	Pertanian Lahan Kering			702	2.741	3.805	5.933	75.435
15	Rawa	29	2.345		11			774.055
16	Savana		411	382	30.710	3.967	27	900.271
17	Sawah						1.177	13.030
18	Semak Belukar	3.734	1.338	5.582	75.234	6.248	4.023	932.241
19	Tambak						435	524
20	Tanah Terbuka	62	3.485	1.477	51.565	996	1.675	489.302
21	Transmigrasi			1.476			342	66.805
22	Tubuh Air	7	12.721	99.853	11.131	6.544	2.130	1.497.574
	Total	65.395	633.868	681.600	1.339.142	433.343	82.142	32.498.762

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2033, maka potensi pengembangan wilayah dalam jangka panjang ialah sebagai berikut:

2.1.2.1. Potensi Hutan

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Provinsi Papua memiliki 3 jenis kawasan peruntukan hutan produksi, yaitu: Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Hutan Produksi Terbatas memiliki kriteria: a) memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125-174, b) kawasan hutan yang digunakan untuk budi daya hutan alam. Sedangkan Hutan Produksi tetap (HP) memiliki kriteria: 10 memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124, b) kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) memiliki kriteria, sebagai berikut: a) memiliki faktor kemiringan, lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 dan/atau, b) merupakan kawasan yang jika dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, c) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MenLHK/2015 Tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan, di Provinsi Papua terdapat 9 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana secara garis besarnya terdiri atas KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) yang tersebar pada : (1) KPHL Unit II Lintas Nabire, Dogiyai, (2) KPHL Unit VI Lintas Mimika, Dogiyai, Deyiai, (3) KPHL Unit X Lintas Intan Jaya, Waropen, Puncak, (4) KPHP Unit XXII Sarmi, (5) KPHL Unit XLII Lintas Lanny Jaya, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, (6) KPHP Unit XLIII Lintas Yahukimo, Nduga, (7) KPHL Unit XXXV Lintas Pegunungan Bintang, Yahukimo, (8) KPHP Unit LI Lintas BOVEN DIGUL, Pegunungan Bintang, dan (9) KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11. Peta Penetapan Lokasi Fasilitasi Pada 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 4 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Tahun 2015

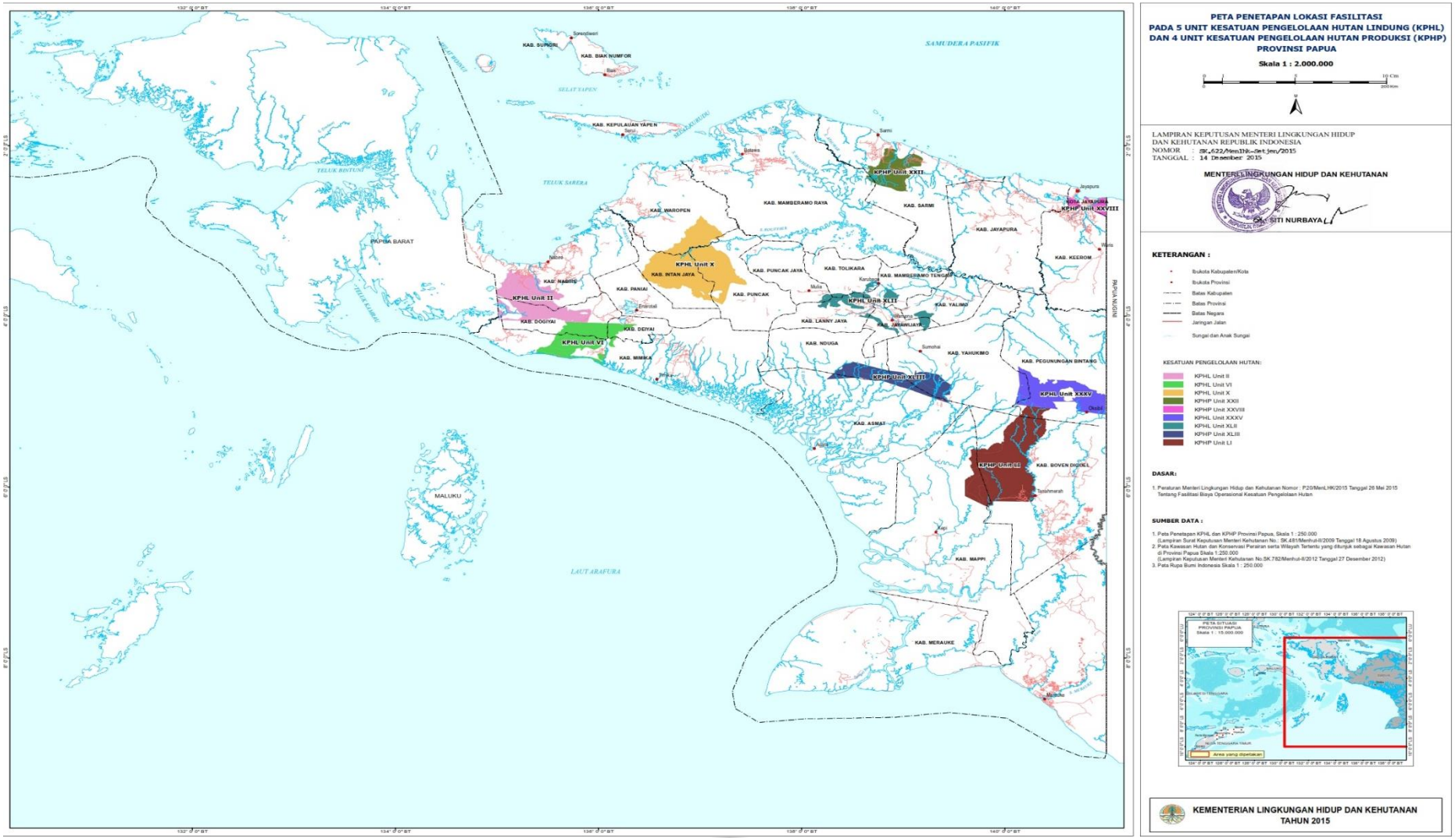

b. Kawasan Hutan rakyat

Kawasan perutukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Selain itu, kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Pada kawasan ini, kegiatan yang diperbolehkan ialah kegiatan permanenen berdasarkan sistem tebang butuh.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perkebunan

Kawasan perumtukan pertanian dan perkebunan terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura. Kawasan ini memiliki beberapa kriteria, yaitu: kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Kegiatan pada kawasan pertanian adalah pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, kegiatan pertanian skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus lebih dulu memiliki kajian studi AMDAL.

Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlaur dalam air drainase) dan polusi industry pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL. Kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang. Kawasan pertanian diharapkan menyediakan kegiatan pertanian berskala besar untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja yang merupakan penduduk asli setempat, baik Orang Asli Papua maupun pendatang.

Potensi pengembangan lahan pertanian di Papua masih terbuka sangat lebar melalui klarifikasi status lahan untuk pembangunan pertanian oleh Pemerintah dan masyarakat adat, pengembangan infrastruktur pertanian termasuk jaringan irigasi, jaringan jalan pendukung pertanian, pasar, peningkatan SDM secara konsisten dan terpadu, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun sektor pertanian. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan yang tersedia secara tepat dan lestari bukan tidak mungkin mengangkat Provinsi Papua sebagai sentra produksi pertanian di wilayah timur, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat asli Papua, dan melestarikan sumber pangan lokal yang sudah terbukti adaptif untuk ketahanan pangan dan kelestarian budaya setempat. Kegiatan perkebunan juga masih terbatas pada komoditas dengan orientasi pada pasar lokal. Meski demikian, beberapa investasi perkebunan untuk kako dan kopi telah menunjukkan kemajuan dan layak dikembangkan dengan basis pengelolaan oleh masyarakat adat.

2.1.2.2. Potensi Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Provinsi Papua memiliki panjang pantai kurang lebih 1.170 mil laut. Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua terbagi dua, yaitu perairan utara Papua tergabung dalam WPP 717 yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik (perhatikan Gambar 2.12) dengan pantai 509 mil laut (916 km) dengan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km^2) sebagai kawasan yang kaya akan sumberdaya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumberdaya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumberdaya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:

- Laut Papua Utara dengan pusat kegiatan di Biak, dan Jayapura.
- Laut Papua Selatan dengan pusat kegaitan di Mimika dan Merauke

Gambar 2.12. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

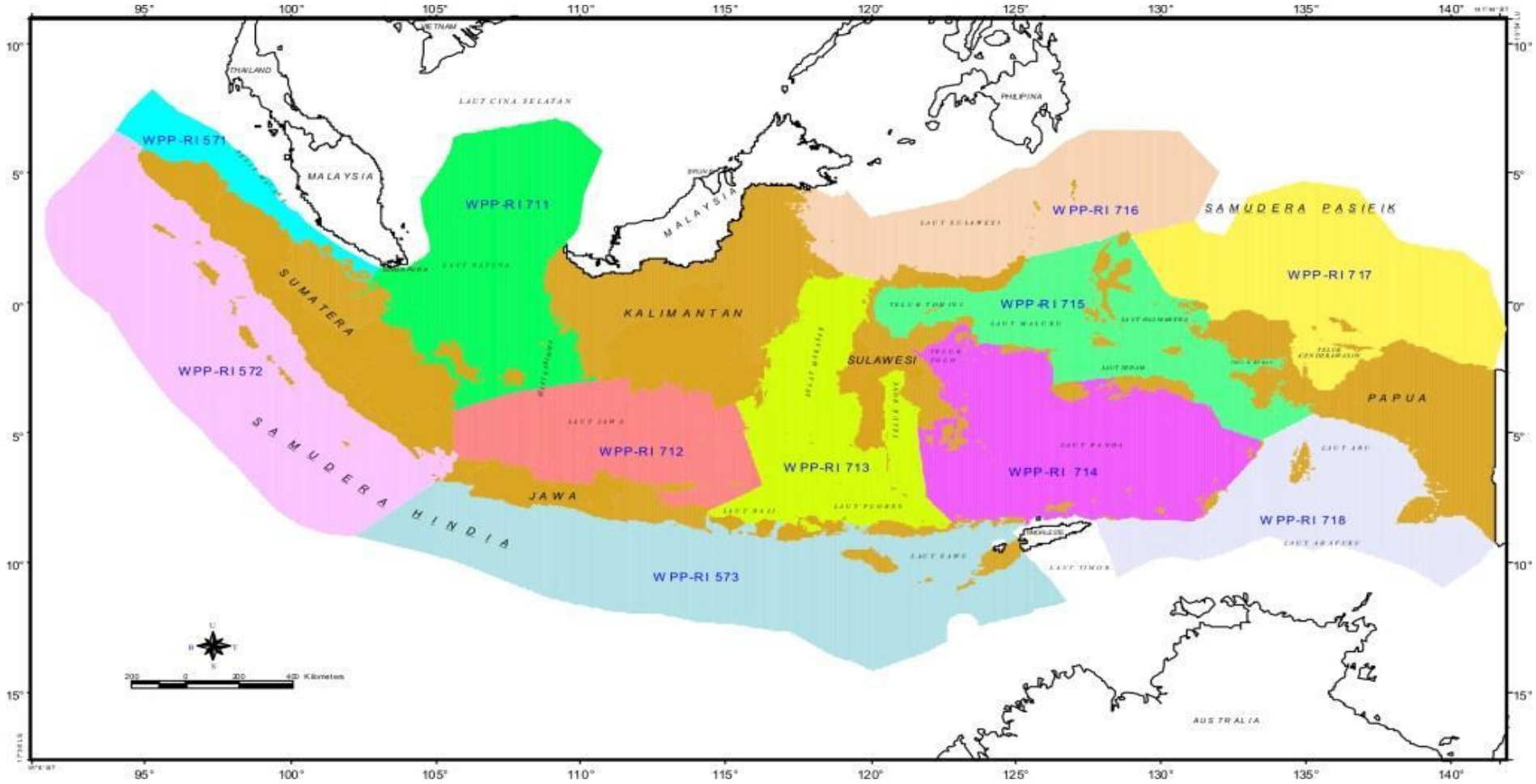

Sumber : Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2009

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat lokal masih bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak).

b. Perikanan Budidaya

Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai berikut:

1. Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.
2. Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabuapten Sarmi dan Waropen.
3. Perikanan budidaya air tawar (kolam) di Kabupaten Jayawijaya dan Jayapura, serta Kota Jayapura.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua tersebar di seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah pesisir Jayapura dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan baronang, sedangkan untuk perairan laut terbesar di Kabupaten Biak dengan budidaya unggulan rumput laut yang dapat terus ditingkatkan produktivitasnya.

2.1.2.3. Pertambangan

Pulau Papua terbentuk dari hasil benturan Lempeng Benua Australia (*Australia Plate*) yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (*Pacific Crustal Plate*) yang bergerak ke arah Barat. Konsentrasi mineral-mineral logam diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua. Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral logam maupun non logam yang besar, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Potensi Mineral Logam dan Non Logam

Kabupaten /Kota	Lokasi	Jenis Galian Mineral
Kota Jayapura	S.Numbai, Kodam	Emas
	S. Yapis, Kel. Imbi	Emas
	S. APO	Emas
	S. Entrop	Emas

Kabupaten /Kota	Lokasi	Jenis Galian Mineral
	S. Perumnas IV	Emas
	S. Borgonjie	Emas
	S. Kujabu, Waena	Emas
Jayapura	Sentani	Kobal
		Tungsten
		Nikel
		Asbes
	S. Kemiri	Emas
	Sentani	Emas
	S. Deyau, Sentani	Emas
	S. Sawe Sentani	Emas
	S. Ayapo Sentani	Emas
	S. Tami	Krom
	Tg. Tanahmerah	Talk
	Waris	Emas, tembaga, timah hitam
	Web	Emas, perak
	Arso	Krom, batubara
	Depapre	Marmer
	Bonggo	Batubara
	Genyem	Batubara
	Siduarsi	Nikel Laterit
	S.Pis dan S.Pas	Emas
	Senggi	Tembaga, timah hitam
Jayawijaya	Kurulu	Pasir Kuarsa, batu gamping
	Assolokobal	Pasir Kuarsa, batu gamping
	Asologaima	Batubara
	Borme Utara	Emas
	Okbibab	Tungsten
	Soba	Timbal-Seng
	Holuwan	Timbal-Seng
	Bokondini	Tembaga, emas
	Tiom	Emas, batu garam
	Mbua	Batubara
	Nalca	Emas
	Dabera	Emas, tembaga
	Aboyi	Emas, molibdenum
Nabire	Yaur	Pasir kuarsa, granit, marmer
	Logari	Emas
	S. Sanoba, Nabire	Emas
	S.Nabarua, Nabire	Marmer
	Uwapa	Seng, Kaolin
	Jali Bumi, Topo	Emas
	Cemara, Topo	Emas
	Haiura	Emas, tembaga
	Wapoga	Emas
Biak Numfor	Supiori	Emas, Batu Kapur
	Korido	Kalsit
	Biak	Fosfat, Pasir Besi
Kepualauan Yapen	Yapen	Pasir Besi
	P. Num	Nikel
Waropen	Waropen Bawah	Emas
	Waropen Atas	Batu bara
Merauke	Jair	Emas, perak
	Mediptana	Tembaga, timah hitam, seng
	Kuoh	Emas

Kabupaten /Kota	Lokasi	Jenis Galian Mineral
Puncak Jaya	Obaa	Emas, Perak
	Ilu	Arsenit, tembaga
	Ilaga	Arsenit, tembaga, emas, perak
Paniai	Enarotali	Pasir kuarsa
	Bilogai	Emas
	Mapia	Garnet
	Kemabu	Tembaga, Emas
	Uwagimamo	Emas, tembaga, bismuth
	Mandoga	Tembaga, emas
	Komopa	Tembaga, emas
Mimika	Tembagapura	Tembaga, perak, emas

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Berdasarkan potensi geologinya, wilayah Papua mempunyai kekayaan bahan galian mineral yang sangat besar dan potensial. Mulai dari emas, tembaga, nikel, timah, batu kapur, gamping, dan sebagainya tersedia di wilayah ini. Akan tetapi, meskipun kekayaan mineral tersebut sudah teridentifikasi sejak lama, namun hanya sedikit wilayah yang dapat memanfaatkan potensi tersebut. Salah satunya di Kabupaten Mimika yang memiliki potensi tembaga dan emas terbesar di dunia yang selama ini telah dikelola oleh perusahaan multinasional yaitu PT. Freeport Indonesia. Sedangkan di daerah-daerah penghasil emas lainnya seperti di Paniai dan Nabire lebih banyak dikelola oleh penambangan rakyat dengan jumlah yang sangat kecil.

Eksplorasi pertambangan di Papua sangat berisiko. Ditambah lagi cadangannya berada di lokasi-lokasi terpencil yang minim infrastruktur, tersembunyi di hutan dan pegunungan. Pada saat eksplorasi, membutuhkan teknik khusus untuk menemukan cadangan mineral di Papua. Wilayah pertambangan secara topografi sangat sulit sehingga tak mudah merancang infrastruktur untuk tambang. Semua kondisi ini menjadi kendala bagi investor lain untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan mineral. Sehingga perusahaan besar pertambangan yang ada masih sangat sedikit. Investasi pertambangan di Papua perlu dalam skala besar dengan resiko bisnis tinggi yang membutuhkan stabilitas jangka panjang.

2.1.2.4. Pariwisata

Provinsi Papua memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua ialah: Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke, dan Taman Naional Teluk Cendrawasih di Nabire. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara

maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua dikelompokkan menjadi 7 kawasan yaitu kawasan wisata bahari, kawasan wisata air terjun, kawasan wisata pulau, kawasan wisata budaya, kawasan wisata sejarah, kawasan wisata religi, dan kawasan wisata alam.

Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua yang tidak termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: KP Asmat (Kabupaten Asmat), TW Parieri (Kabupaten Biak Numfor), SM. D. Bian (Kabupaten Boven Digoel), DS. Anguruk (Kabupaten Mappi), TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika), KP Paradoi (Kabupaten Nabire), dan KP. Kurudu dan KP. Paradoi (Kabupaten Waropen). Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

2.1.3. Aspek Demografi

Berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Provinsi Papua selama ini adalah struktur penduduk muda. Baik itu di tahun 2013 maupun 2017 bentuk piramida penduduk Provinsi Papua kurang signifikan mengalami perubahan. Lihat Gambar 2.13 berikut ini.

Gambar 2.13. Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017

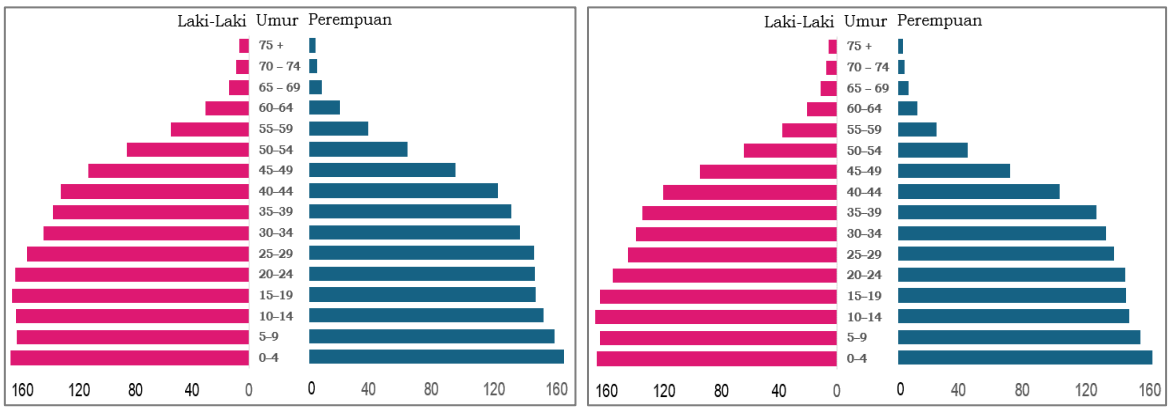

[a] Piramida Tahun 2013 [b] Piramida Tahun 2017

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2014 & 2018 (data diolah)

Penduduk usia muda (0-14 tahun) masih dominan, namun dengan kecenderungan tingkat kelahiran bayi semakin menurun di tahun 2017. Selain itu, bentuk piramida yang gemuk, terutama di antara usia 15-44 tahun mengindikasikan bahwa penduduk usia yang sangat produktif lebih dominan dibandingkan yang non produktif. Adapun bentuk kerucut piramida yang tajam diantara tahun 2013 dan tahun 2017 memvisualisasikan bahwa usia harapan hidup di Provinsi Papua masih berkisar diantara 65-69 tahun, dan ada kecenderungan usia harapan hidup untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki mengalami peningkatan di tahun 2017.

Jumlah penduduk Papua selama periode 2013-2017 berkembang pada tingkat pertumbuhan yang sangat terkendali dan relatif menurun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Papua sebesar 3.032,5 ribu jiwa dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 1,97%. Selanjutnya di tahun 2014 pertumbuhan penduduk Papua relatif mengalami pelambatan, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 1,93%. Kondisi ini terus berlanjut sepanjang periode 2015-2017, dimana pada tahun 2017 pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi 1,80%, yang terlihat jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Adapun jumlah penduduk yang tercatat di tahun 2017 adalah sebanyak 3.265,2 ribu jiwa (lihat Gambar 2.1414).

Gambar 2.14. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

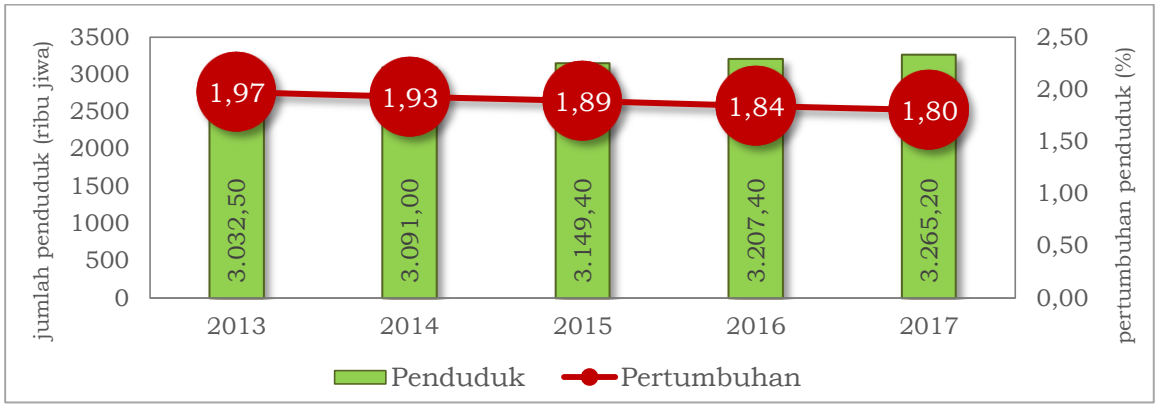

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan (lihat Gambar 2.1515). Jumlah penduduk laki-laki tahun 2013 tercatat 1.603.158 jiwa, dan meningkat menjadi 1.718.513 jiwa pada tahun 2017. Sementara jumlah penduduk perempuan pada tahun 2013 sebesar 1.429.330 jiwa, dan meningkat menjadi 1.546.689 jiwa pada

tahun 2016. Hal ini menyebabkan angka Rasio Sex menjadi lebih besar dari 100, namun mempunyai kecenderungan angka yang relatif menurun. Tahun 2013 angka Rasio Sex mencapai 112,16 dan menurun menjadi 111,11 di tahun 2017.

Gambar 2.15. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Sex

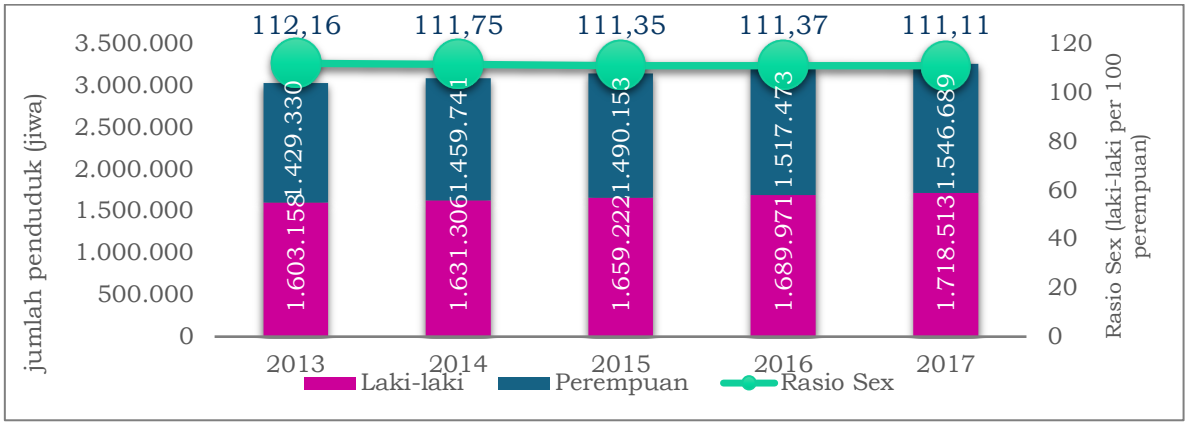

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Kemudian dari persebaran penduduk di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Papua terlihat tidak merata. Terdapat kabupaten/ kota yang memiliki luas wilayah yang sangat luas namun jumlah penduduk yang berada di kabupaten/kota tersebut sedikit, sebaliknya ada kabupaten/kota dengan luas wilayah yang kecil tetapi memiliki jumlah penduduk yang besar. Daerah dengan penduduk terbesar, terlihat di kota Jayapura, dengan tingkat kepadatannya tertinggi di Provinsi Papua di tahun 2017 sebesar 309,02 jiwa per km^2 luas wilayah. Adapun yang paling rendah di Kabupaten Mamberamo Raya, hanya sebesar 0,80 jiwa per km^2 (lihat Tabel 2.11).

Tabel 2.11. Keadaan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2017 (jiwa)	Kepadatan 2017 (jiwa/km2)	Pertumbuhan 2013-2017 (%)	Rasio Sex (Laki-laki per 100 perempuan)
Anim Ha	Merauke	223.389	4,71	1,56	105,02
	Boven Digoel	66.209	2,68	2,32	116,82
	Mappi	94.671	4,08	1,84	100,96
	Asmat	92.909	3,76	2,25	104,03
	Total/Rata-rata	477.178	3,81	1,99	106,71
La Pago	Jayawijaya	212.811	91,29	1,18	105,40
	PuncakJaya	123.591	50,52	2,49	124,06
	Yahukimo	187.021	12,42	1,66	105,00
	Peg. Bintang	73.473	5,01	1,47	107,21
	Tolikara	136.576	22,21	2,17	118,91
	Nduga	97.012	16,65	3,09	123,99
	Lanny Jaya	176.687	51,37	2,34	114,66
	Mamb. Tengah	47.487	14,03	2,70	113,75

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2017 (jiwa)	Kepadatan 2017 (jiwa/km2)	Pertumbuhan 2013-2017 (%)	Rasio Sex (Laki-laki per 100 perempuan)
	Yalimo	60.822	16,62	2,59	114,13
	Puncak	107.822	19,19	1,92	109,78
	Total/Rata-rata	1.223.302	29,93	2,16	113,69
Mee Pago	Nabire	145.101	31,89	1,39	112,80
	Paniai	170.193	8,23	1,35	107,83
	Mimika	210.413	91,47	1,74	128,47
	Dogiyai	94.997	21,01	1,55	98,26
	Intan Jaya	48.318	5,18	2,72	100,57
	Deiyai	72.206	31,04	2,07	105,10
	Total/Rata-rata	741.228	31,47	1,80	108,84
Saireri	Kep. Yapen	95.007	19,25	1,88	105,70
	Biak Numfor	144.697	11,12	1,73	107,00
	Waropen	29.480	5,48	2,31	106,11
	Supiori	19.104	30,12	3,00	103,41
	Total/Rata-rata	288.288	16,49	2,23	105,55
Mamta	Jayapura	125.975	8,75	1,48	111,13
	Sarmi	38.210	2,74	1,85	114,48
	Keerom	55.018	6,10	1,53	115,46
	Mamb. Raya	22.313	0,80	3,06	104,35
	Kota Jayapura	293.690	309,02	1,89	115,98
	Total/Rata-rata	535.206	65,48	1,96	112,28
Provinsi Papua		3.265.202	10,31	1,87	111,11

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Walaupun kepadatan penduduknya rendah, akan tetapi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamberamo Raya selama tahun 2013-2017 terlihat paling tinggi di Provinsi Papua bersama dengan Kabupaten Nduga. Laju pertumbuhan penduduk di Mamberamo Raya dan Nduga berkisar diantara 3,06-3,09% per tahun. Sedangkan pertumbuhan yang terendah di Kabupaten Jayawijaya hanya sebesar 1,18% per tahun untuk periode yang sama.

Jika diperhatikan pada perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan, terlihat di seluruh kabupaten/kota wilayah Papua mempunyai angka Rasio Sex di atas 100, terkecuali Kabupaten Dogiyai yang memiliki Rasio Sex di bawah 100 yakni 98,26 laki-laki per 100 perempuan, yang mengindikasikan bahwa diantara jumlah penduduk perempuan sebanyak 100 jiwa terdapat penduduk laki-laki sebanyak 98 jiwa. Dengan kata lain jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Sementara daerah dengan angka rasio sex yang tertinggi adalah Kabupaten Nduga mencapai 123.99 laki-laki per 100 perempuan.

Ditinjau berdasarkan wilayah adat, diketahui bahwa wilayah yang paling banyak jumlah penduduknya adalah La Pago yakni sebanyak 1.223.302 jiwa, dengan tingkat pertumbuhannya sekitar 2,16% per tahun selama periode 2013-2017, serta

kepadatan penduduk mencapai 29,93 per km^2, dan angka Rasio Sex sebesar 13,69 laki-laki per 100 perempuan. Adapun wilayah adat yang memiliki pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Saireri (2,23% per tahun), dengan total penduduk 288.288 jiwa yang terindikasi paling rendah untuk seluruh wilayah pembangunan. Wilayah Mamta dapat dikatakan merupakan wilayah pembangunan yang paling padat penduduknya, rata-rata sekitar 65.48 jiwa per km^2, namun dengan pertumbuhannya yang paling rendah bersama wilayah Mee Pago sebesar 1,96% per tahun.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan aspek kesejahteraan masyarakat merupakan upaya paling mendasar yang harus dilakukan dari segala proses pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat disajikan dalam tiga fokus utama yakni: (1) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) fokus kesejahteraan masyarakat, serta (3) fokus sosial budaya.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mencakup aspek-aspek yang tergabung dalam isu otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Secara lebih detil mencakup pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan regional, persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Perkembangan ekonomi Provinsi Papua dapat dilihat melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan komponen untuk melihat jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan, yang mana untuk pengukuran pertumbuhannya lebih jauh dapat dipisahkan untuk wilayah Papua menjadi pertumbuhan PDRB dengan sektor pertambangan dan tanpa tambang. Pertumbuhan ekonomi Papua dengan menyertakan sektor pertambangan (DP) berada dalam kondisi yang sangat fluktuatif sepanjang tahun 2013-2017 (lihat Gambar 2.1616).

Pertumbuhan ekonomi dengan sektor pertambangan cenderung mengalami ekpansif selama periode 2014-2016, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,86% per tahun. Kemudian di tahun 2017 ada kontraksi kurang lebih -3,96% sehingga laju pertumbuhan di tahun tersebut melambat menjadi 5,18%. Lain halnya pertumbuhan ekonomi Papua jika diamati tanpa menyertakan sektor pertambangan, cenderung melambat selama tahun 2014-2017, dengan rata-ratanya sekitar 7,00 yang terlihat jauh lebih baik dibandingkan dengan sektor pertambangan.

Gambar 2.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 (%)

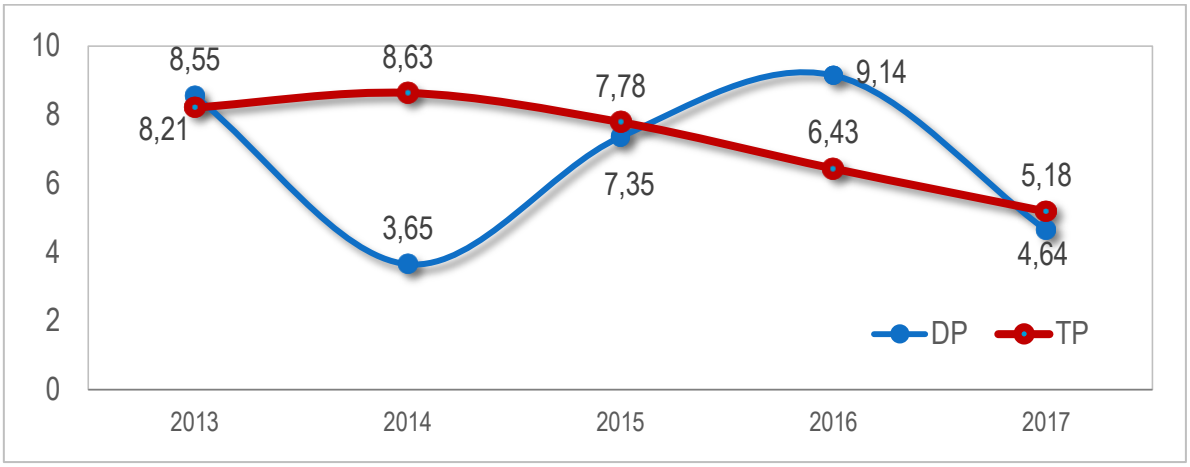

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Secara spasial terlihat sebagian besar wilayah kabupaten/kota mengalami kontraksi perekonomian yang cukup besar jika dilakukan perbandingan antara tahun 2013 dengan 2017. Pelambatan yang terbesar untuk wilayah adat Saireri adalah di Kabupaten Biak Numfor yang mengalami kontraksi rata-rata sekitar -2,90% per tahun. Kemudian untuk Mee Pago adalah Kabupaten Intan Jaya sebesar -1,90% per tahun, di La Pago adalah Kabupaten Yalimo sebesar -1,79% per tahun, di Mamta adalah Kabupaten Keerom sebesar -1,17% per tahun, dan di Anim Ha adalah Kabupaten Boven Digoel sebesar -0,60% per tahun. Lihat Gambar 2.17.

Hanya ada 3 (tiga) daerah di Papua yang dapat dikatakan mengalami ekspansif perekonomian yakni Kabupaten Mappi yang paling tinggi mencapai 0,53% per tahun, selanjutnya Sarmi sebesar 0,09% per tahun, dan terakhir Yahukimo mencapai 0,02% per tahun. Terjadinya pelambatan ekonomi di sebagian besar wilayah di Papua tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya

kinerja ekonomi di berbagai sektor potensial, rendahnya akses infrastruktur penggerak ekonomi dan masih lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik serta kualitas tenaga kerja yang rendah, sehingga berimplikasi langsung terhadap rendahnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.17. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dengan Tambang per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (%)

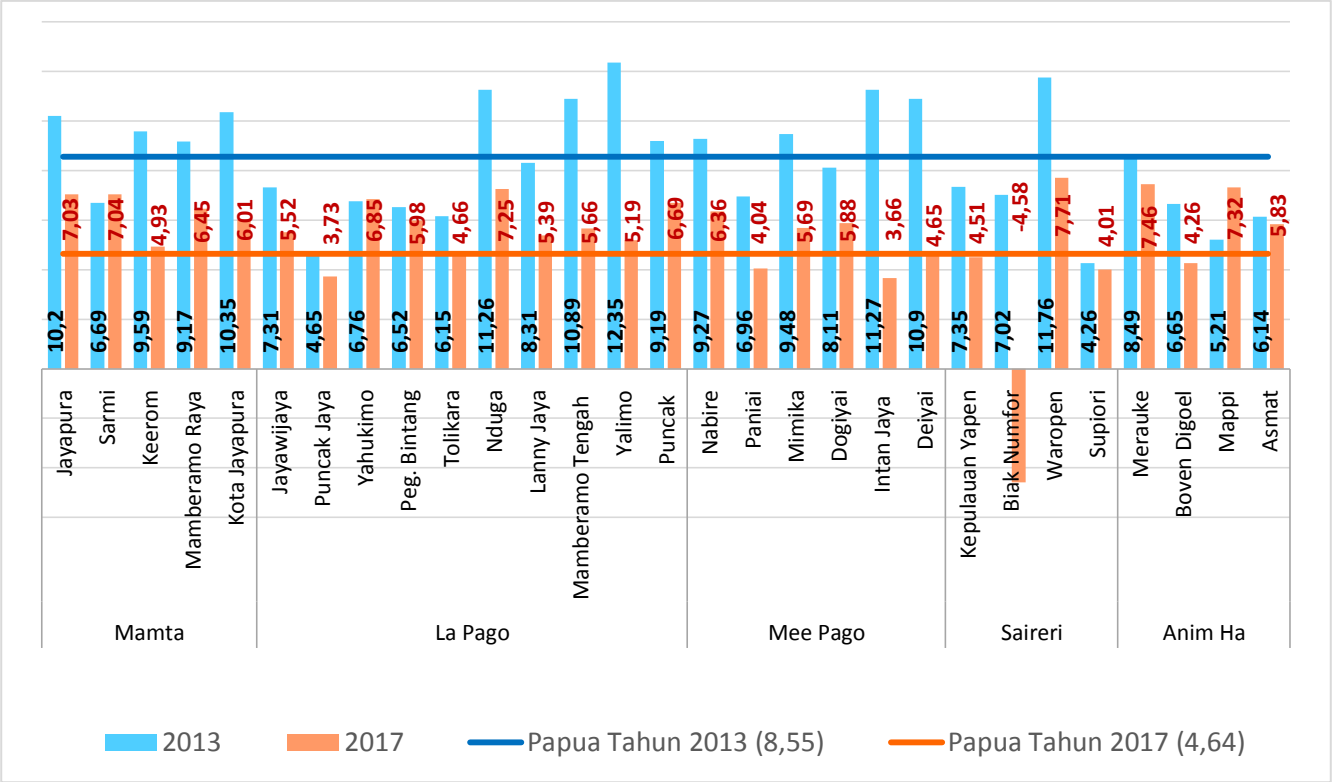

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Secara sektoral struktur perekonomian Papua terlihat kurang berimbang, oleh karena sektor pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar PDRB dari tahun 2013 hingga 2017. Rata-rata kontribusi sektor pertambangan dan penggalian per tahunnya mencapai 41,77% dengan kecenderungan yang menurun. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga memiliki kontribusi yang tinggi dengan rata-rata 11,38% per tahun (lihat Tabel 2.122).

Tabel 2.12. Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Rata[2]
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.66	11.89	11.66	10.87	10.80	11.38
B. Pertambangan dan Penggalian	43.56	40.84	40.60	42.08	41.78	41.77

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Rata[2]
C. Industri Pengolahan	1.96	2.06	1.99	1.91	1.94	1.97
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
F. Konstruksi	10.07	10.54	10.87	10.84	10.90	10.64
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.71	7.98	8.04	7.88	8.00	7.92
H. Transportasi dan Pergudangan	3.88	4.14	4.23	4.19	4.24	4.13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.63	0.68	0.68	0.66	0.67	0.66
J. Informasi dan Komunikasi	3.65	3.75	3.68	3.48	3.56	3.62
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.47	1.53	1.46	1.42	1.39	1.45
L. Real Estate	2.32	2.42	2.39	2.34	2.36	2.37
M,N. Jasa Perusahaan	1.11	1.18	1.14	1.10	1.11	1.13
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.47	8.27	8.55	8.59	8.56	8.29
P. Jasa Pendidikan	2.00	2.07	2.07	2.04	2.06	2.05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.42	1.50	1.52	1.50	1.51	1.49
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.00	1.05	1.05	1.02	1.03	1.03
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018

Struktur perekonomian Papua tergolong bersifat ekstratif karena ditopang oleh sektor-sektor primer seperti pertambangan dan pertanian. Adapun peranan sektor industri manufaktur masih sangat kecil dalam komposisi PDRB, rata-rata hanya 1,97% per tahun, yang terlihat lebih rendah dibandingkan sektor-sektor jasa tersier seperti perdagangan (7,92%), transportasi dan pergudangan (4,13%), informasi dan komunikasi (3,62%), administrasi pemerintahan (8,29%), dan sebagainya. Untuk itu, penguatan sektor industri dalam perekonomian wilayah menjadi kebijakan yang sangat penting dan strategis dimasa mendatang, dalam upaya mengubah struktur ekonomi ke sektor yang lebih banyak menyerap lapangan kerja, memberi pendapatan yang lebih baik, memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap sektor lainnya, dan menghasilkan efek multiplier yang lebih besar bagi wilayah lainnya.

2.2.1.2. Laju Inflasi dan Tingkat Kemahalan Harga

Kenaikan harga-harga di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 cenderung terkendali. Meskipun sempat mengalami kenaikan tinggi di tahun 2014, namun untuk tahun 2015-2017 berikutnya terus mengalami penurunan, hingga mencapai titik terendah di tahun 2017 sebesar 2,41%. Kondisi ini mengindkasikan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua yang dimotori oleh Bank Indonesia berperan efektif sehingga mampu mengendalikan inflasi.

Gambar 2.18. Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi

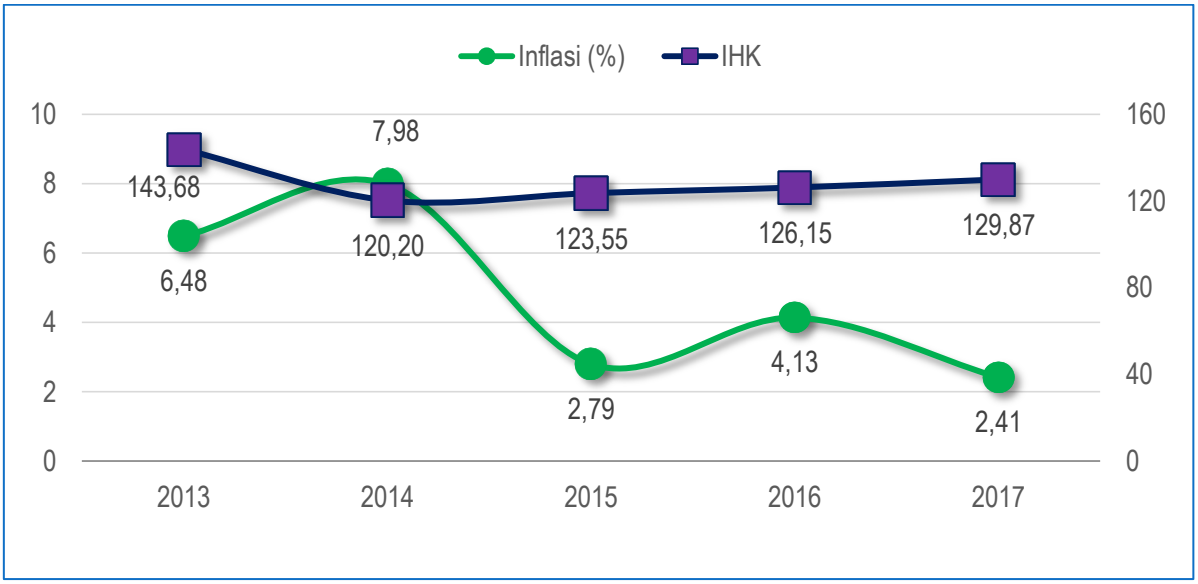

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Laju inflasi dapat menjadi tolak ukur bagi kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi di berbagai wilayah Papua dapat dikatakan cukup terkendali karena bergerak diantara 3,98% hingga 7,04% (lihat Gambar 2.199). Inflasi tertinggi di wilayah adat Mamta tercatat di Mamberamo Raya sebesar 6,82% per tahun sepanjang periode 2014-2017. Sedangkan untuk La Pago di Jayawijaya sebesar 7,04% per tahun. Kemudian di Mee Pago di Intan Jaya sebesar 6,52% per tahun, untuk Saireri di Biak Numfor sebesar 6,82% per tahun, dan di Anim Ha pada Kabupaten Asmat sebesar 5,79% per tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi di beberapa daerah (inflasi 5-7%) antara lain masih besarnya ketergantungan konsumsi pangan dari luar daerah (terutama beras), sulitnya akses transportasi perdagangan, tingginya harga BBM dan

faktor stabilitas sosial yang berpengaruh pada tingkat kelancaran distribusi barang ke berbagai daerah pegunungan dan dataran rendah sulit akses.

Gambar 2.19. Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Berdasarkan Angka Deflator Tahun 2014-2017 (%)

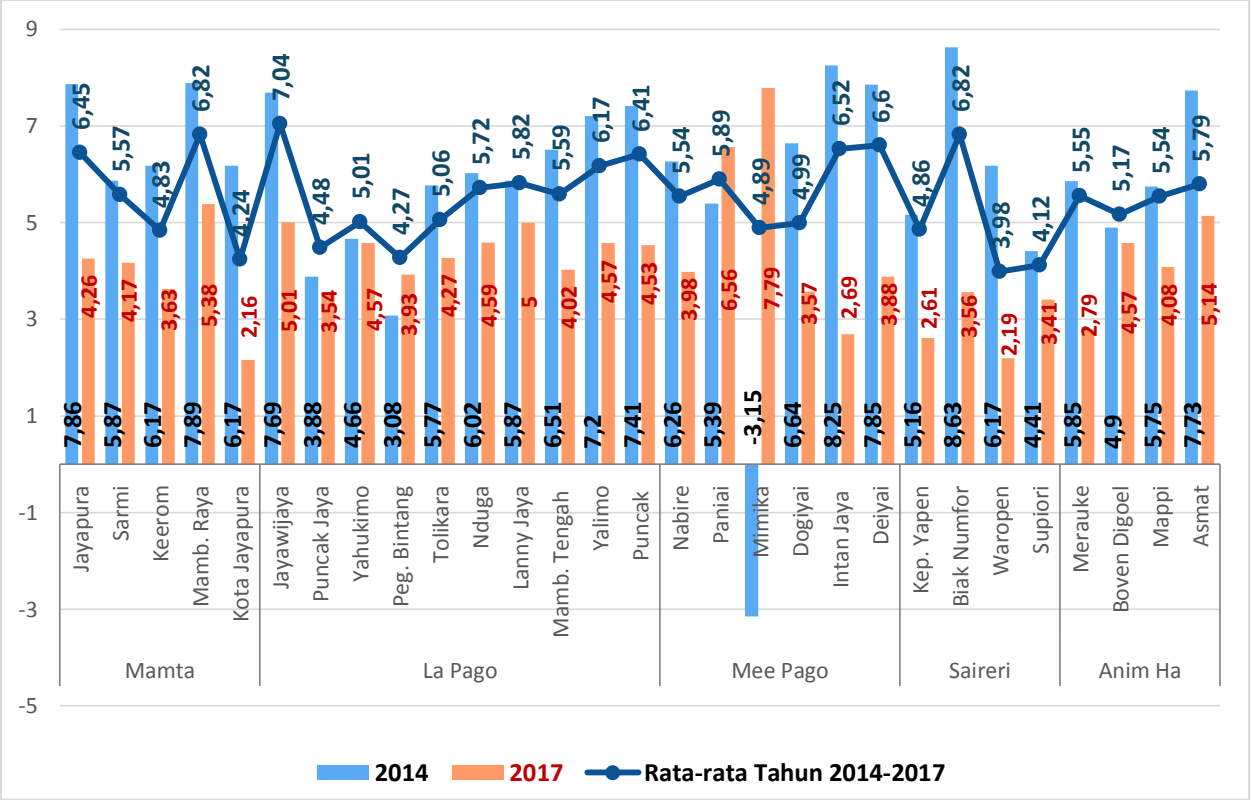

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selain inflasi, permasalahan harga yang juga signifikan mempengaruhi kemiskinan di Papua selama ini adalah Tingkat Kemahalan Harga. Dalam Gambar 2.208 terlihat bahwa tingkat kemahalan harga yang direpresentasikan dengan IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi) sangat tinggi. Ada 15 kabupaten yang mempunyai IKK di atas 200%.

Sebagian besar daerah kabupaten yang ada wilayah Papua, tampaknya belum begitu optimal untuk menekan tingkat kemahalan harga. Indikasinya dapat diperhatikan pada IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi) setiap daerah di Papua yang semuanya di atas 100 poin, dimana ada 15 kabupaten yang mempunyai IKK di atas 200 poin, dengan IKK yang tertinggi karena sudah di atas 300 point yaitu Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Tolikara, Lanny Jaya, dan Nduga. Kebijakan subsidi untuk menekan tingkat kemahalan harga

yang telah dijalankan belum efektif karena berfokus pada sisi konsumsi, yang belum diikuti dengan peningkatan kemampuan daerah untuk menghasilkan sendiri barang-barang produksi dan sekaligus meningkatkan pendapatan produsen lokal.

Gambar 2.20. Tingkat Kemahalan Konstruksi di Provinsi Papua

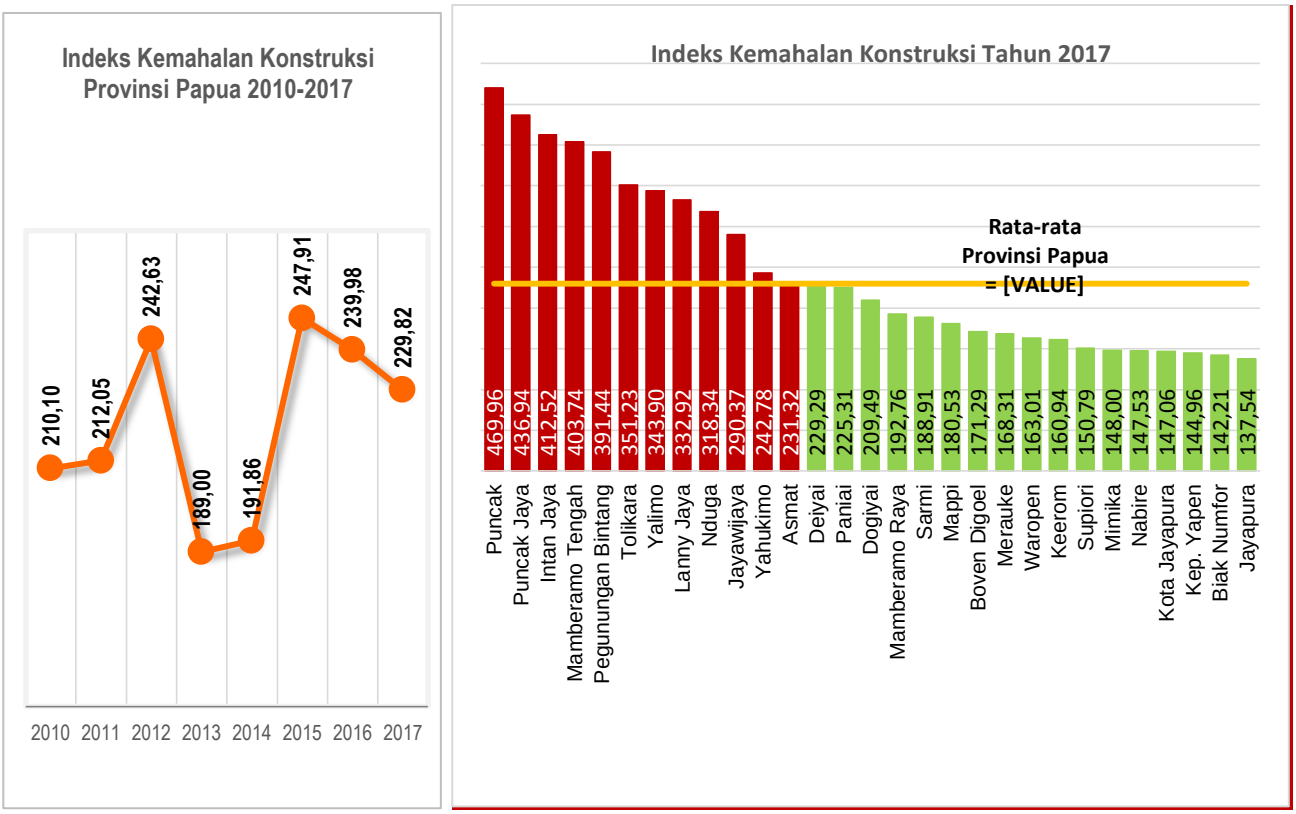

Sumber: BPS RI dan BPS Papua, 2018 (data diolah)

Terdapat kecenderungan juga bahwa daerah-daerah yang memiliki IKK tinggi merupakan daerah yang terindikasi sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Sebagaimana yang terlihat dalam Gambar 2.21, hampir di semua daerah La Pago dan Mee Pago, seperti Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Puncak Jaya dan Yalimo yang ada di La Pago, kemudian Deyiai, Paniai, Dogiyai dan Intan Jaya yang ada di Mee Pago, memiliki tingkat kemiskinan rata-rata di atas 32% dengan IKK diatas 200%. Sementara di daerah-daerah pesisir yang ada di wilayah Adat Anim Ha, Saereri dan Mamta, cenderung memiliki IKK dan tingkat kemiskinan yang rendah. Fenomena ini memvisualisasikan bahwa ada korelasi yang erat antara tingkat kemiskinan dengan IKK, sehingga upaya untuk menurunkan IKK yang dijalankan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) selama ini perlu diteruskan lebih optimal di masa mendatang, agar akselarasi penurunan kemiskinan menjadi lebih baik.

Gambar 2.21. Peta Kemahalan Konstruksi dan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017

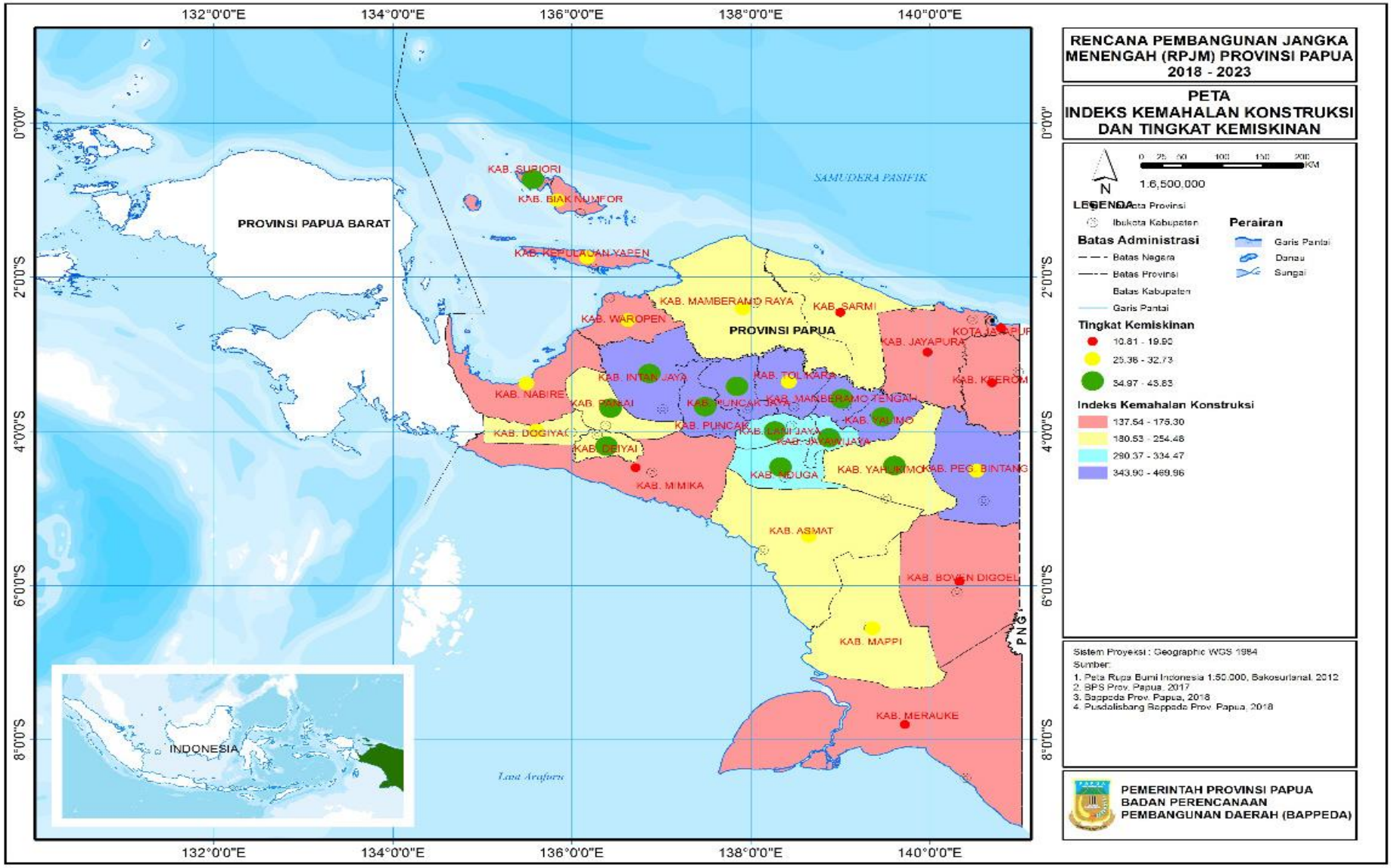

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Terlihat bahwa capaian PDRB perkapita provinsi Papua secara umum mengalami peningkatan positif. PDRB perkapita dengan tambang perkembangannya menunjukkan tren positif dari tahun 2013-2017. Secara keseluruhan pertumbuhannya rata-rata mencapai 11,20% per tahun, dimana PDRB per kapita dengan tambang pada tahun 2013 tercatat sebesar 40,51 juta rupiah menjadi 58,68 juta pada tahun 2017.

Gambar 2.22. Pendapatan Perkapita Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 (juta Rp)

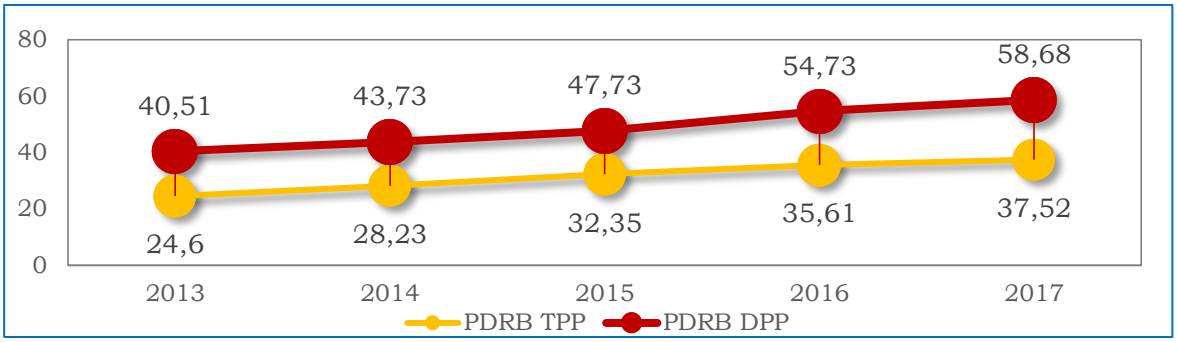

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Perhitungan pendapatan per kapita juga dapat dilakukan tanpa memasukan sektor pertambangan. Dalam hal ini, apabila diamati tanpa sektor pertambangan, tampak jelas PDRB per kapita Provinsi Papua menjadi lebih rendah. Dengan sektor pertambangan rata-rata PDRB per kapita mencapai Rp. 49.08 juta per tahun selama periode 2013-2017, sedangkan tanpa sektor pertambangan hanya sekitar Rp. 31.62 juta per tahun. Meskipun demikian ada kecenderungan pertumbuhan PDRB per kapita tanpa sektor pertambangan jauh lebih cepat yaitu sekitar 17.41% per tahun.

Apabila perkembangan pendapatan per kapita di Provinsi Papua diamati berdasarkan kewilayahan, Kabupaten Mimika pada tahun 2017 berdasarkan PDRB dengan tambang memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi mencapai Rp. 298,73 juta, dan yang terendah Kabupaten Lanny Jaya sebesar Rp. 7,21 juta untuk tahun yang sama (selengkapnya lihat Gambar 2.23). Terjadi ketimpangan pendapatan per kapita yang sangat mencolok di Provinsi Papua, ketika sektor pertambangan disertakan dalam perhitungan. Akan tetapi, jika perhitungan pendapatan per kapita tanpa menyertakan sektor pertambangan, terlihat deviasi antara nilai tertinggi

dengan terendah mengecil (namun tetap dalam kategori timpang), dimana pada tahun 2017 yang tertinggi adalah Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke masing-masing sebesar Rp. 80,96 juta dan Rp. 80,02 juta, serta PDRB per kapita terendah adalah Kabupaten Lanny Jaya sebesar Rp. 7,08 juta.

Gambar 2.23. Pendapatan Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Dengan Tambang dan Tanpa Tambang di Provinsi Papua Tahun 2017

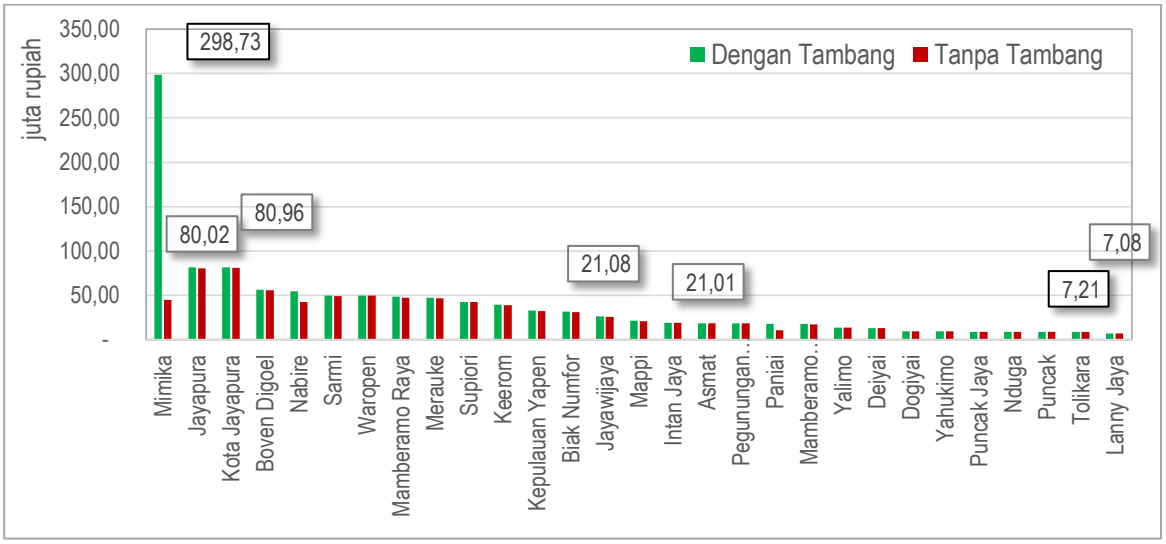

Sumber: BPS Papua, 2018 (data diolah)

2.2.1.4. Ketimpangan Pendapatan

Secara konseptual ukuran ketimpangan pendapatan dapat dipilah menjadi dua bagian yakni ketimpangan antarpersonal, dan ketimpangan antarwilayah. Ketimpangan antarpersonal lazimnya diukur dengan 2 (dua) cara yakni menggunakan Rasio Gini dan Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Sementara untuk ketimpangan antarwilayah, ukuran yang sederhana dan biasa digunakan adalah Indeks Williamson.

Untuk ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan angka Ratio Gini menunjukan bahwa secara keseluruhan ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Papua mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013-2017) dan cenderung mengalami perbaikan, dengan kategori termasuk ketimpangan sedang (lihat Gambar 2.24).

Gambar 2.24. Angka Rasio Gini di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

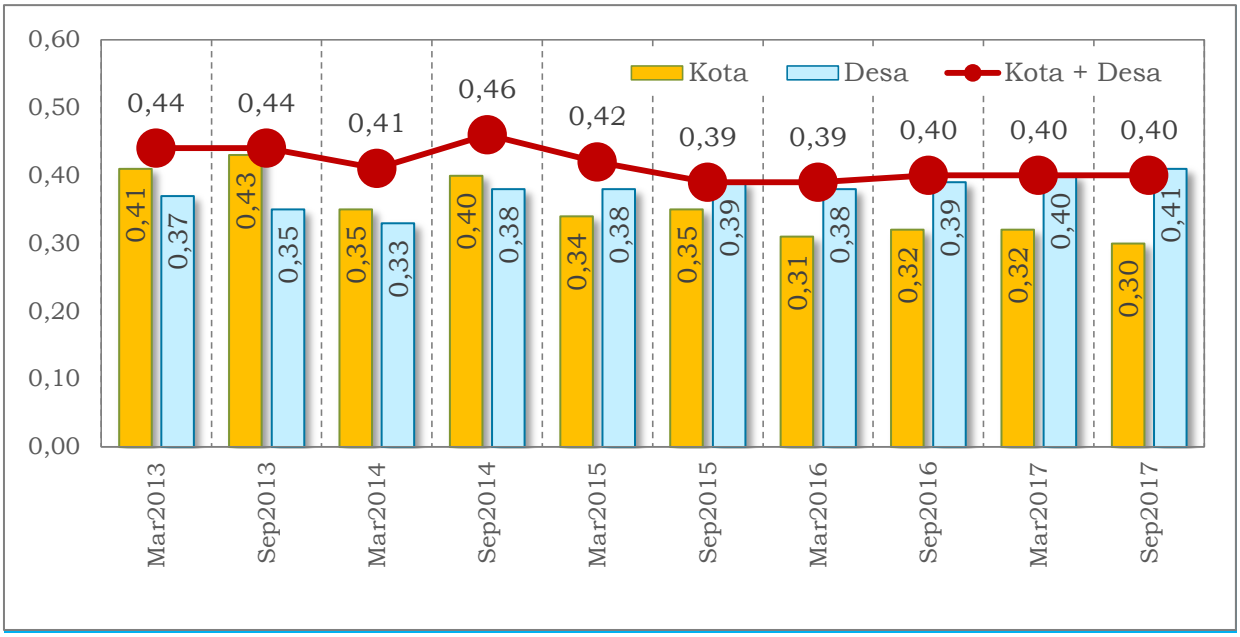

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Keterangan :

Menurut PERKA Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia, dijelaskan bahwa Daerah Perkotaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang ***memenuhi*** persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumahtangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Sedangkan Daerah Perdesaan adalah suatu wilayah setingkat desa/kelurahan yang ***belum memenuhi*** persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumahtangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

Daerah perkotaan (perdefinisi BPS Provinsi Papua) memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan daerah perdesaan. Fenomena ini tercermin pada kecenderungan angka Rasio Gini perkotaan yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2017 mencapai 0,30 yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan (perdefinisi BPS Provinsi Papua), selama tahun 2013-2017 distribusi pendapatannya menyebar dalam kondisi ketimpangan sedang, dan cenderung mengalami peningkatan, dimana pada bulan september 2017 tercatat angka Rasio Gini untuk wilayah perdesaan sebesar 0,41 naik sekitar 0,06 poin bila dibandingkan september 2013 sebesar 0,35.

Apabila dilihat berdasarkan wilayah adat, Anim Ha merupakan wilayah adat yang cenderung mengalami perbaikan ketimpangan pendapatan sepanjang tahun 2013-2016. Sedangkan wilayah lainnya cenderung mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan.

Tabel 2.13. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Tahun 2013-2016

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
Anim Ha	Merauke	0.466	0.451	0.411	0.340
	Boven Digoel	0.299	0.347	0.357	0.330
	Mappi	0.295	0.301	0.338	0.440
	Asmat	0.389	0.387	0.339	0.310
Mamta	Jayapura	0.268	0.323	0.386	0.310
	Sarmi	0.328	0.429	0.352	0.350
	Keerom	0.283	0.311	0.361	0.350
	Kota Jayapura	0.375	0.348	0.347	0.280
	Mamberamo Raya	0.309	0.265	0.234	0.300
Saereri	Biak Numfor	0.416	0.389	0.392	0.360
	KepulauanYapen	0.322	0.360	0.369	0.320
	Supiori	0.280	0.240	0.280	0.310
	Waropen	0.221	0.281	0.329	0.310
La Pago	Jayawijaya	0.367	0.336	0.397	0.340
	Yahukimo	0.271	0.299	0.257	0.250
	Pengunungan Bintang	0.146	0.220	0.268	0.290
	Tolikara	0.198	0.218	0.365	0.380
	Puncak Jaya	0.216	0.266	0.341	0.150
	LannyJaya	0.181	0.224	0.299	0.280
	Mamberamo Tengah	0.234	0.257	0.274	0.270
	Yalimo	0.259	0.212	0.135	0.190
	Puncak	0.183	0.253	0.333	0.190
	Nduga	0.199	0.222	n.a.	0.250
Mee Pago	Nabire	0.326	0.354	0.389	0.300
	Paniai	0.319	0.249	0.320	0.460
	Mimika	0.299	0.340	0.333	0.290
	Dogiyai	0.192	0.248	0.204	0.250
	Intan Jaya	0.225	0.382	0.274	0.290
	Deiyai	0.319	0.262	0.284	0.250
Papua		**0.411**	**0.410**	**0.422**	**0.313**

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016

Sepanjang tahun 2013-2016 terdapat 25 kabupaten yang memiliki distribusi pendapatan yang relatif rendah berkisar antara 0,19-0,35 di antaranya adalah Kabupaten Yalimo, Dogiyai, Nduga, Pengunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Mamberamo Raya, Supiori, Deiyai, Waropen, Tolikara, Intan Jaya, Mimika, Jayapura, Keerom, Boven Digoel, Paniai, Kota Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Mappi dan Asmat. Selain itu, terdapat juga beberapa daerah dengan kondisi tingkat ketimpangan yang relatif tinggi dan belum merata di antaranya adalah Kabupaten Jayawijaya, Sarmi, Biak Numfor dan Merauke. Pertumbuhan pendapatan per kapita yang begitu tinggi ternyata lebih banyak dinikmati oleh 20% penduduk yang berpendapatan tinggi. Dalam Gambar 2.2525 diketahui adanya peningkatan proporsi penduduk yang berpendapatan tinggi, yaitu dari 41,68% di tahun 2013 menjadi 43,26% di tahun 2016. Sementara proporsi

penduduk berpendapatan rendah cenderung menurun dari 20,92% pada tahun 2013 menjadi 14,36% pada tahun 2016.

Gambar 2.25. Distribusi Pendapatan Menurut Kategori Bank Dunia

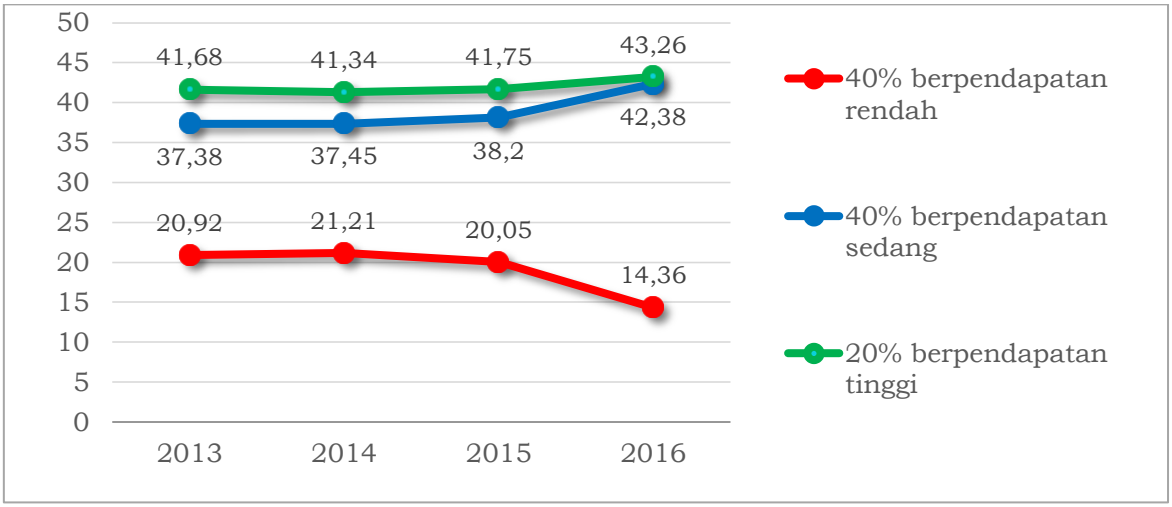

Sumber: BPS Papua, 2017 (data diolah)

Selain antar penduduk, distribusi pendapatan lainnya yang juga penting untuk diperhatikan adalah antar wilayah. Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah lazim digunakan indikator Williamson Index (WI).

Gambar 2.26. Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Berdasarkan Angka Williamson Index dengan Menyertakan Sektor Pertambangan

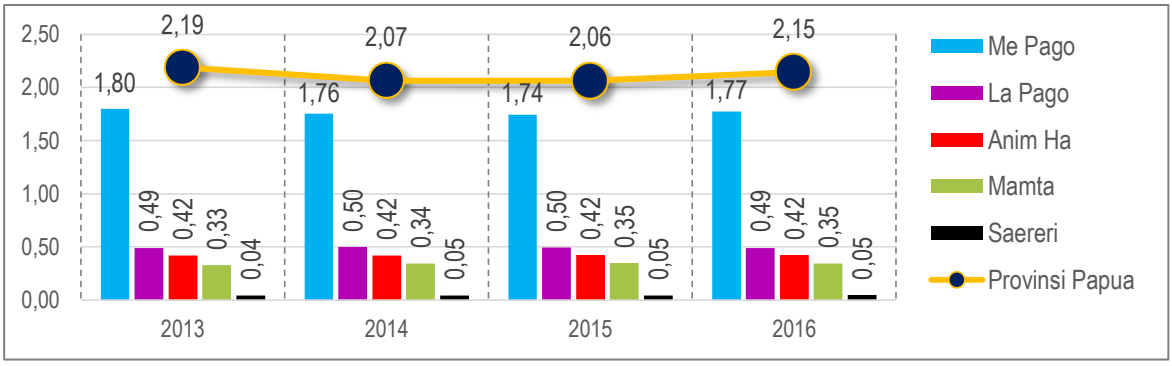

Sumber: BPS Papua, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Williamson Index (lihat Gambar 2.2626), terindikasi bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Papua selama periode 2013-2016 selalu diatas normal karena melampaui batas maksimal nilai WI di atas 1, yakni sebesar 2,19 point pada tahun 2013 sampai dengan 2,15 point di tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan yang sangat besar sekali antara PDRB per kapita

tertinggi dengan yang terendah saat disertakan sektor pertambangan dalam perhitungan WI. Kabupaten Mimika dengan sektor tambang menjadi *outlier* (data pencilan) dalam pengukuran WI tersebut. Jika ditelusuri berdasarkan wilayah pembangunan berbasis adat, terlihat jelas ketimpangan antar wilayah paling tinggi dengan nilainya di atas normal hanya terjadi di wilayah Me Pago, oleh karena ada penguasaan pangsa PDRB yang sangat besar oleh Kabupaten Mimika. Sementara untuk wilayah La Pago, Anim Ha, Saereri, dan Mamta ketimpangan pendapatannya masing-masing tidak terlalu mencolok berkisar diantara 0,49 poin yang tertinggi di La Pago dan sebesar 0,05 poin di Saereri.

Kondisi yang berbeda ketika perhitungan WI tanpa menyertakan sektor pertambangan terlihat nilai indeksnya di bawah angka maksimum yaitu sekitar 0,79 point di tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 0,82 di tahun 2016 (lihat Gambar 2.277). Kecenderungan ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Papua selama periode 2013-2016 belum dapat membaik secara optimal. Dimana ketimpangan tertinggi terjadi di wilayah Me Pago, kemudian La Pago, Anim Ha, Mamta, dan terendah di wilayah Saireri.

Gambar 2.27. Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Berdasarkan Angka Williamson Index Tanpa Sektor Pertambangan

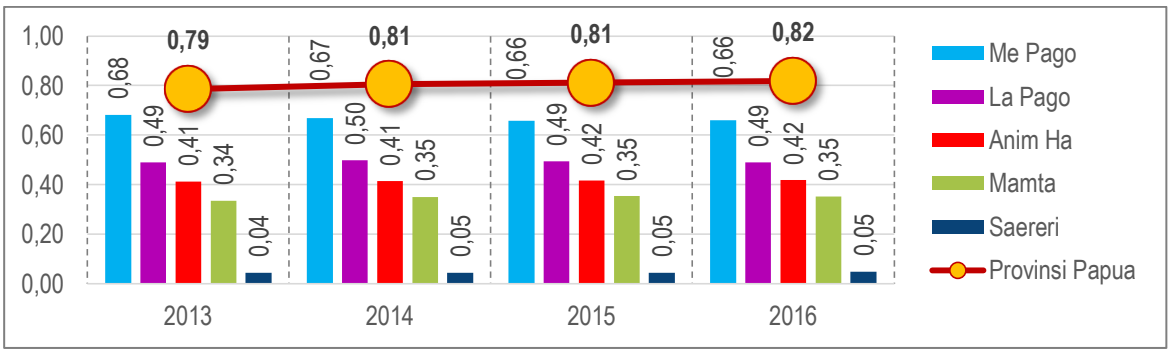

Sumber: BPS Papua, 2018 (data diolah)

Meskipun disadari bahwa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah pusat di Provinsi Papua semenjak tahun 2014 hingga sekarang memiliki dampak dalam jangka panjang, namun sebenarnya untuk jangka pendek manfaatnya dapat dirasakan segera oleh masyarakat Papua guna mengurangi ketimpangan antarwilayah. Sebagai misal, pembangunan Trans Papua yang sudah dikerjakan pemerintah pusat hingga mencapai 2.905,75 km atau 89,15% dari total

panjang yang direncanakan, dapat dimanfaatkan segera oleh setiap daerah kabupaten/kota yang dilalui jalur Trans Papua tersebut untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Contohnya untuk Kabupaten Yalimo yang menjadi pintu transit penghubung antara Kota Jayapura yang ada di pesisir dengan Kota Wamena yang ada di pegunungan, dapat mengambil manfaat dari beroperasinya trans papua Jayapura-Wamena dengan membangun kawasan ekonomi baru di Distrik Benawa dan Abenaho. Begitu juga dengan Kabupaten Keerom dapat menjadikan Distrik Senggi sebagai pusat pertumbuhan baru, dan Distrik Lereh di Kabupaten Jayapura.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

2.2.2.1. Kemiskinan

Jika mengamati perkembangan tingkat kemiskinan selama tahun 2013-2017, kemiskinan di Provinsi Papua terus mengalami penurunan, meskipun sempat di tahun 2015 naik 0,6 poin, namun penurunan kemiskinan bisa dipercepat kembali sampai dengan tahun 2017, hingga menjadi 27,76%. (lihat Gambar 2.288). Dengan kata lain Provinsi Papua berhasil mempercepat penurunan kemiskinan kurang lebih -0,94% per tahun selama periode 2013-2017.

Gambar 2.28. Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Papua

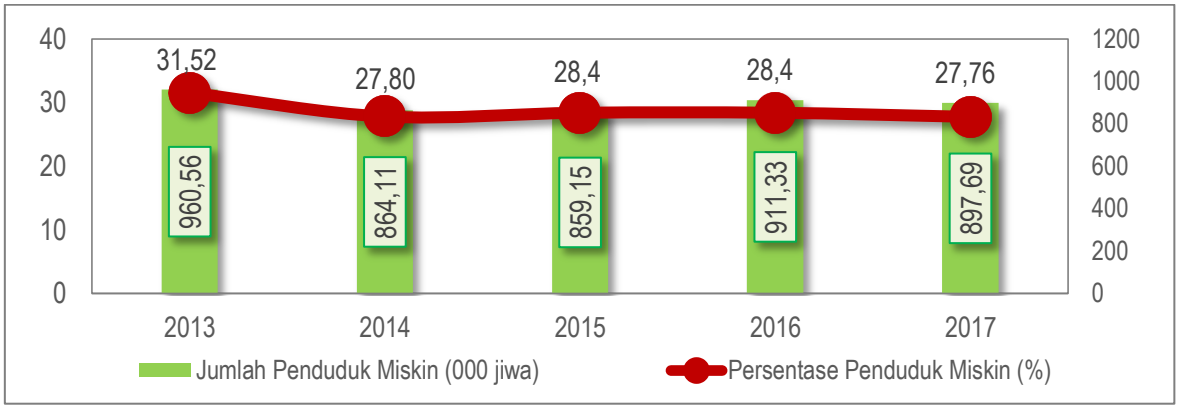

Sumber: BPS Papua, 2017 (data diolah)

Menurut kewilayahan, daerah yang paling miskin selama ini adalah di perdesaan. Sampai tahun 2017 (September) tercatat kemiskinan di perdesaan mencapai 36,56%, atau turun -0,51% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan di perkotaan sebesar 4,55% yang juga turun dibandingkan tahun 2016.

Gambar 2.29. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua (%)

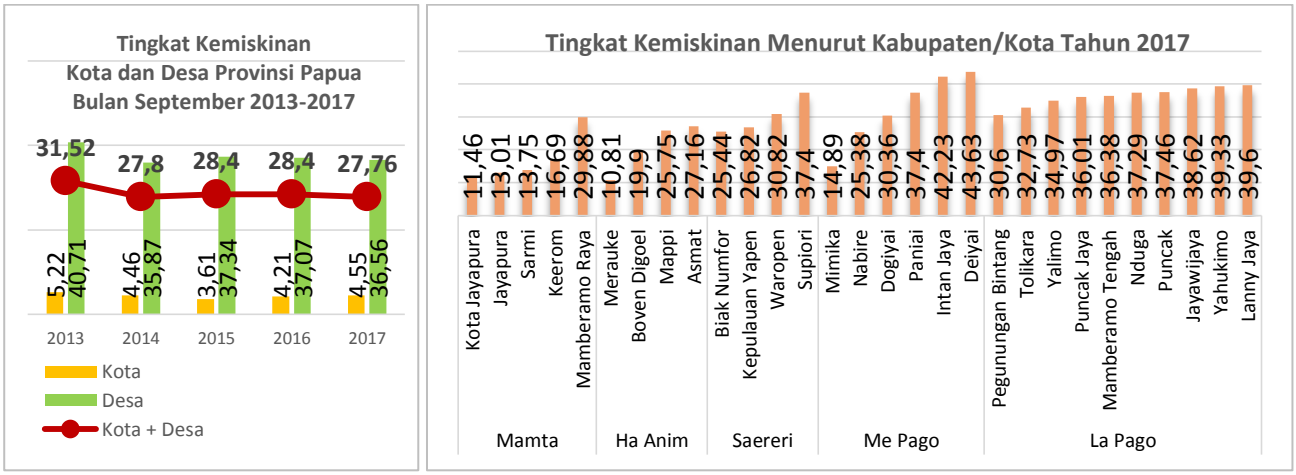

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Secara kumulatif selama tahun 2017, jika dipilah berdasarkan kabupaten/kota, terlihat kabupaten Deiyai sebagai penyumbang terbesar kemiskinan di Provinsi Papua (lihat Gambar 2.29). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Deyiai adalah 43,63% yang masuk kawasan pembangunan Mee Pago. Posisi kedua terbesar adalah kabupaten Intan Jaya dengan angka 42,23% yang keduanya masuk kawasan pembangunan La Pago. Sedangkan kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah adalah kabupaten Merauke dengan angka 10,81% yang masuk kawasan

pembangunan Mamta, yang diikuti oleh kota Jayapura dengan angka 11,46% dan kabupaten Jayapura dengan angka 13,01% yang keduanya masuk kawasan pembangunan Mamta. Jika diambil rata-ratanya per wilayah adat, dapat dikatakan bahwa wilayah La Pago mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi di Papua yaitu sebesar 36,30%, menyusul wilayah Me Pago sebesar 32,32%, Saireri sebesar 30,12%, Ha Anim sebesar 20,91%, dan Mamta sebesar 16,96%.

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga perlu diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) dari kemiskinan. Di mana semakin tinggi nilai indeks P1 ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang menggambarkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Berikutnya, semakin tinggi angka indeks P2 maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Gambar 2.30. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua (%)

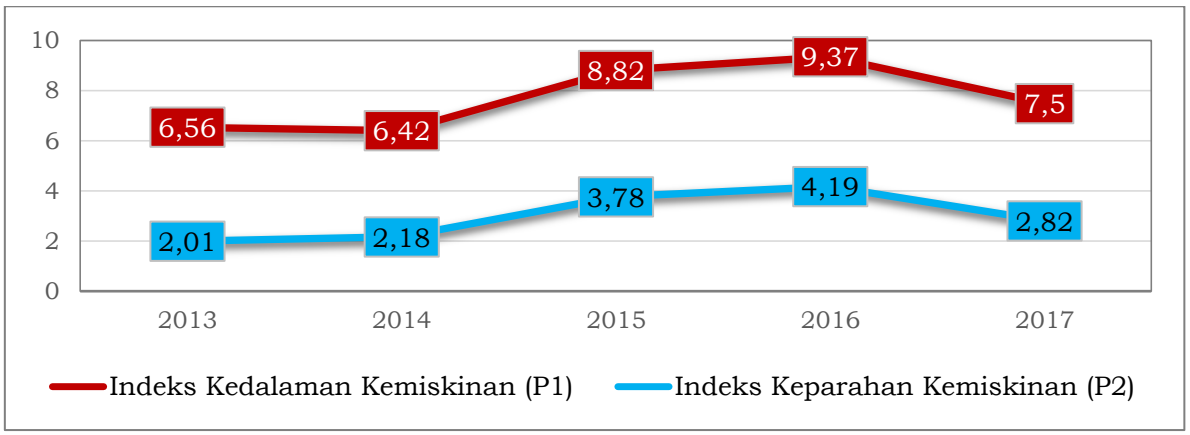

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2013-2016 cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi, rata-rata naik 2,81% per tahun. Kemudian menurun di tahun 2017 sebesar 1,87% menjadi 7,5%, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, sehingga rata-rata tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 relatif kelihatan naik sebesar 0,24% per tahun.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua selama ini tampaknya kurang berdampak signifikan terhadap akselerasi penurunan kemiskinan. Fenomena ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan tinggi dibandingkan penduduk yang berpendapatan rendah. Sehingga efek multiplier yang dihasilkan perekonomian kurang optimal mendorong pendapatan penduduk miskin di atas garis kemiskinan. Dalam konteks kewilayahan hal ini terlihat jelas. Dimana berdasarkan Gambar 2.31, diketahui bahwa tidak semua daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinannya rendah. Begitu sebaliknya, pertumbuhan yang rendah ternyata tidak diikuti dengan kemiskinan yang tinggi.

Gambar 2.31. Peta Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017

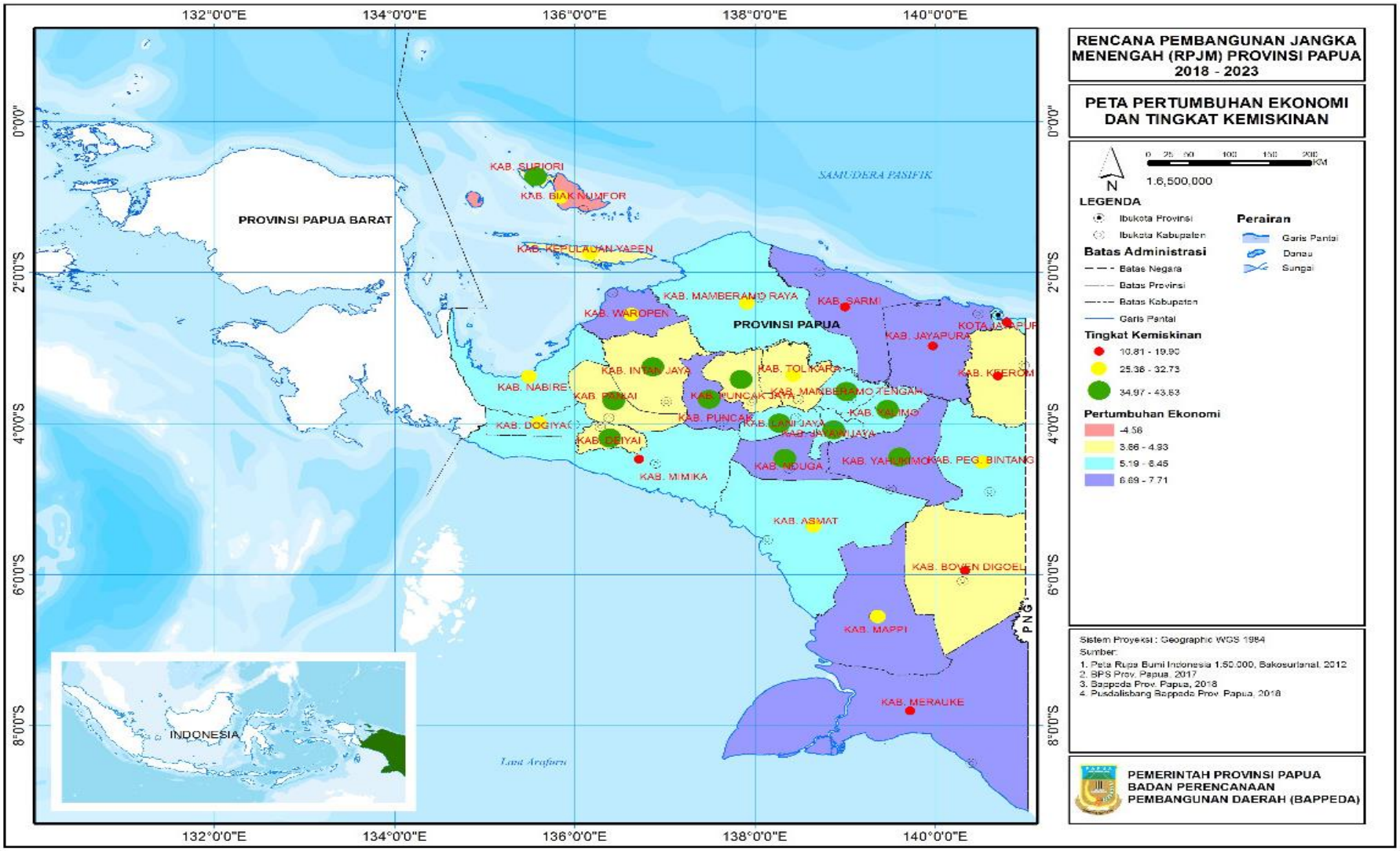

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan manusia di Provinsi Papua yang diindikatorkan oleh IPM cenderung terus mengalami peningkatkan, namun demikian masih dalam kategori IPM rendah, dan juga paling rendah di Indonesia. Dimana komponen pembentuk IPM yang paling cepat tumbuh selama ini adalah Harapan Lama Sekolah. Adapun untuk Angka Harapan Hidup, kontribusinya terhadap pertumbuhan IPM sangat rendah.

Tabel 2.14. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (thn)	64,76	64,84	65,09	65,12	65,14
Harapan Lama Sekolah (thn)	9,58	9,94	9,95	10,23	10,54
Rata-Rata Lama Sekolah (thn)	5,74	5,76	5,99	6,15	6,27
Pengeluaran (Rp. ribu)	6.394	6.416	6.469	6.637	6.996
IPM	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09
Rank IPM Papua Di Indonesia	34	34	34	34	34

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Angka Harapan Hidup (AHH), merupakan salah satu komponen dalam perhitungan IPM yang merefleksikan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan AHH di provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan, namun berjalan lambat dan masih dibawah angka maksimum. Tahun 2013, Angka Harapan Hidup 64,76 tahun meningkat 0,83 poin menjadi 65,14 tahun pada tahun 2017, dan masih belum mencapai angka maksimum 85 tahun.

Berdasarkan data capaian yang ada terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah maupun Angka Rata-rata Lama Sekolah masih jauh di bawah angka ideal dan bergerak sangat lambat. Meskipun demikian pergerakan kedua indikator tersebut sepanjang lima tahun ke arah yang lebih baik. Terlihat bahwa selama tahun 2013-2017, kenaikan rata-rata angka harapan lama sekolah mencapai 2.43 poin per tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah sebesar 2.24 poin per tahunnya. Terakhir untuk komponen pengeluaran per kapita Provinsi Papua sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan rata-rata pengeluaran per kapita di Provinsi Papua adalah sebesar Rp. 6.582,40 per tahun. Berdasarkan capaian dimensi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran tersebut terlihat bahwa IPM di provinsi Papua tahun 2013-2017, dikategorikan IPM rendah dengan peningkatan rata-rata mencapai 1.24 point setiap tahunnya dengan capaian 59,09 point pada tahun 2017 dan menduduki ranking ke 34 di Indonesia (lihat Gambar 2.32).

Gambar 2.32. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Pada Tahun 2017

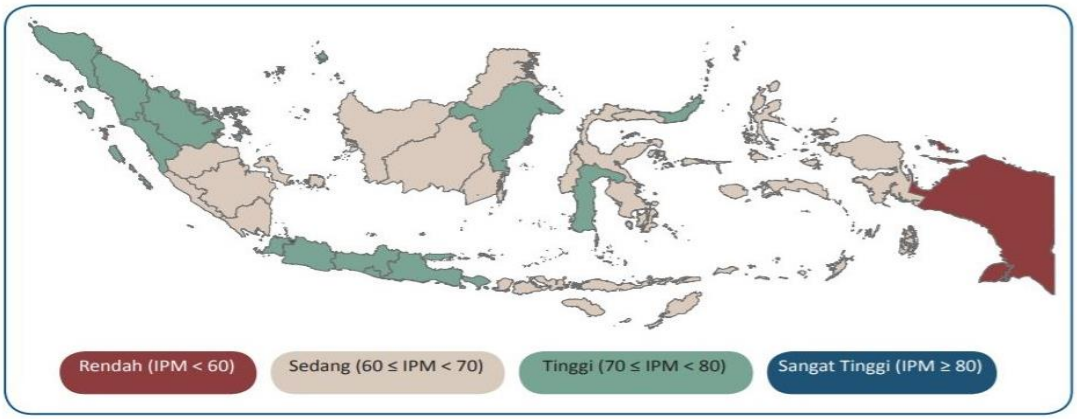

Sumber: BPS RI (2018)

Komponen pembentuk IPM yang paling cepat tumbuh selama ini adalah Harapan Lama Sekolah, yang tercatat selama tahun 2013-2017 mencapai 3,01% per tahun. Sedangkan yang kedua cepat tumbuh adalah angka rata-rata lama sekolah yaitu 1,66% per tahun, kemudian komponen pengeluaran per kapita sekitar 1,64% per tahun, dan yang terendah adalah angka harapan hidup hanya 0,18 per tahun. Secara keseluruhan pertumbuhan IPM Papua kurang lebih 1,18% per tahun.

Gambar 2.33. Tingkat Pertumbuhan IPM Beserta Komponennya di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

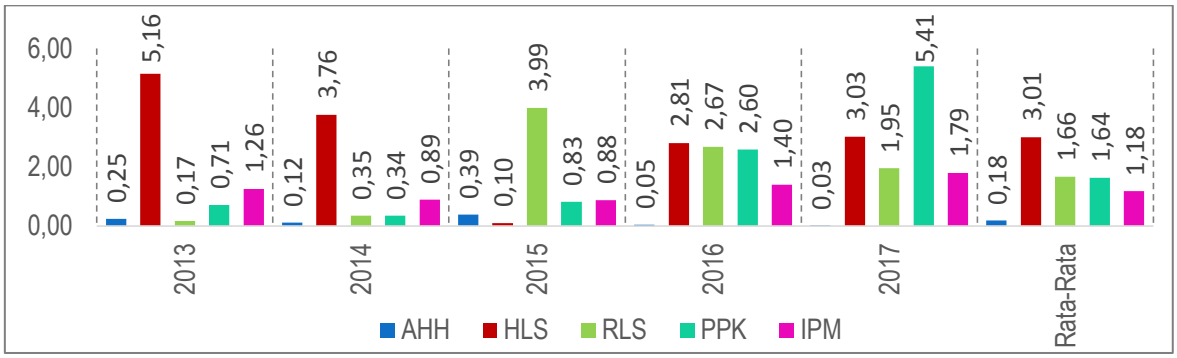

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dalam Gambar 2.3434 diketahui bahwa IPM kabupaten/kota di wilayah Papua sepanjang tahun 2013-2017 sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Kota Jayapura selama periode tersebut dapat dikatakan yang paling konsisiten dalam peringkat pertama di Provinsi Papua, dimana sampai dengan tahun 2017 nilai IPM Kota Jayapura telah mencapai 79,23 poin. Kemudian di ikuti dengan Kabupaten

Mimika pada urutan ke-2, dan Kabupaten Biak Numfor di urutan ke-3. Adapun pada tahun 2017 daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Nduga (urutan ke 29), Puncak (urutan 28) dan Pegunungan Bintang (urutan ke 27).

Gambar 2.34. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

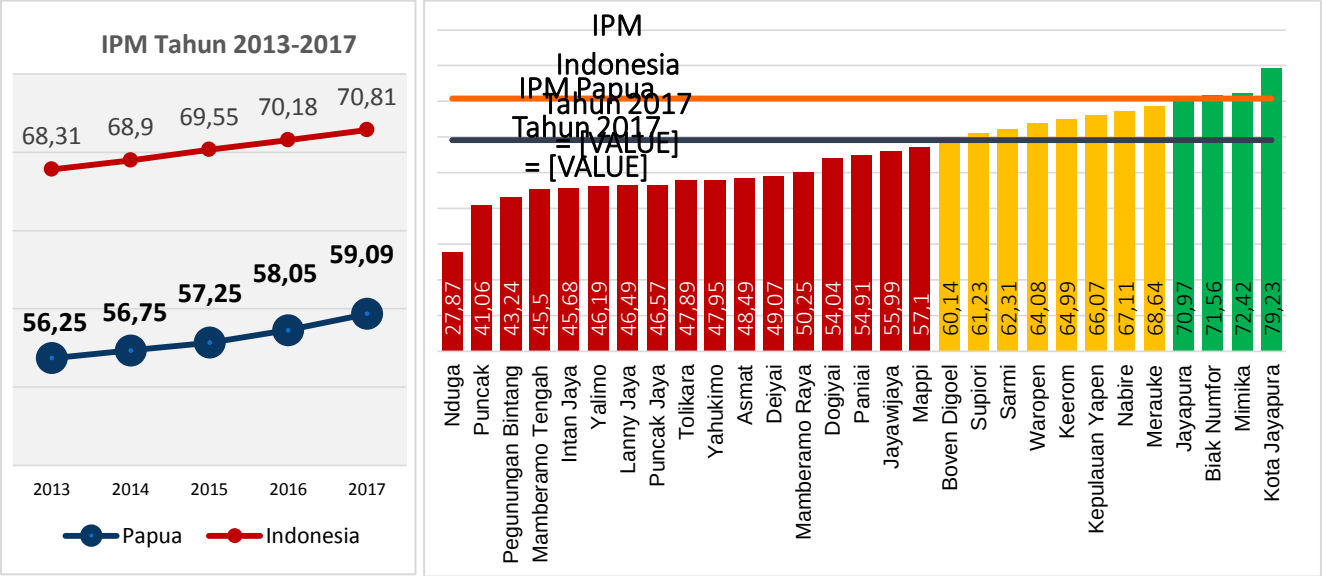

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Daerah yang mengalami perubahan peringkat IPM sepanjang tahun 2013-2017 adalah sebanyak 10 Kabupaten. Dimana yang memiliki perubahan dalam peringkat IPM yang mengarah pada pergerakan positif (peringkat naik) adalah Kabupaten Jayawijaya, Asmat, Mamberamo Raya dan Lanny Jaya. Sedangkan daerah dengan pergeseran peringkat IPM mengalami perubahan ke arah negatif (peringkat turun) antara lain Kabupaten Paniai, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Intan Jaya dan Deiyai.

Melihat kecenderungan berbagai komponen pembentuk IPM selama ini, terindikasi bahwa sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Papua telah berhasil membangun sektor kesehatan. Namun untuk pembangunan di bidang pendidikan dan ekonomi masih belum maksimal, yang diindikasikan dengan Rata-Rata Lama Sekolah yang masih dibawah Wajib Belajar Sembilan Tahun, dan pengeluaran per kapita yang relatif di bawah garis kemiskinan.

2.2.3. Fokus Pendidikan

Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan yaitu akses, mutu dan tata kelola. Secara makro akses pendidikan dapat

diindikasikan dengan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Sementara untuk mutu pendidikan, salah satunya dapat digambarkan melalui kecenderungan indikator Angka Melek Huruf. Adapun untuk tata kelola, karena pembahasannya lebih bersifat mikro, akan dibahas pada konteks pembangunan menurut urusan berikutnya.

2.2.3.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kondisi literasi suatu masyarakat disuatu daerah. Angka melek huruf ini merupakan salah satu komponen penentu tingkat kualitas pembangunan pendidikan di suatu daerah. Oleh karena itu Angka Melek huruf merupakan bagian dari indikator penting pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan. Provinsi Papua tampaknya kurang optimal untuk meningkatkan penduduk yang melek huruf sepanjang tahun 2013-2017.

Dalam Gambar 2.3533 terlihat bahwa AMH (Angka Melek Huruf) Provinsi Papua pada tahun 2013 hanya sebesar 75,83% dan menurun menjadi 73,89% pada tahun 2017. Meskipun demikian, untuk periode 2015-2017 ada kecenderungan peningkatan AMH dengan rata-rata 1,02% per tahun. Jika diperhatikan menurut kabupaten/kota, terpetakan cukup banyak daerah kabupaten yang mempunyai AMH di bawah rata-rata provinsi, semuanya di wilayah pegunungan (La Pago dan Mee Pago).

Gambar 2.35. Angka Melek Huruf di Provinsi Papua Tahun 2013-2016 (%)

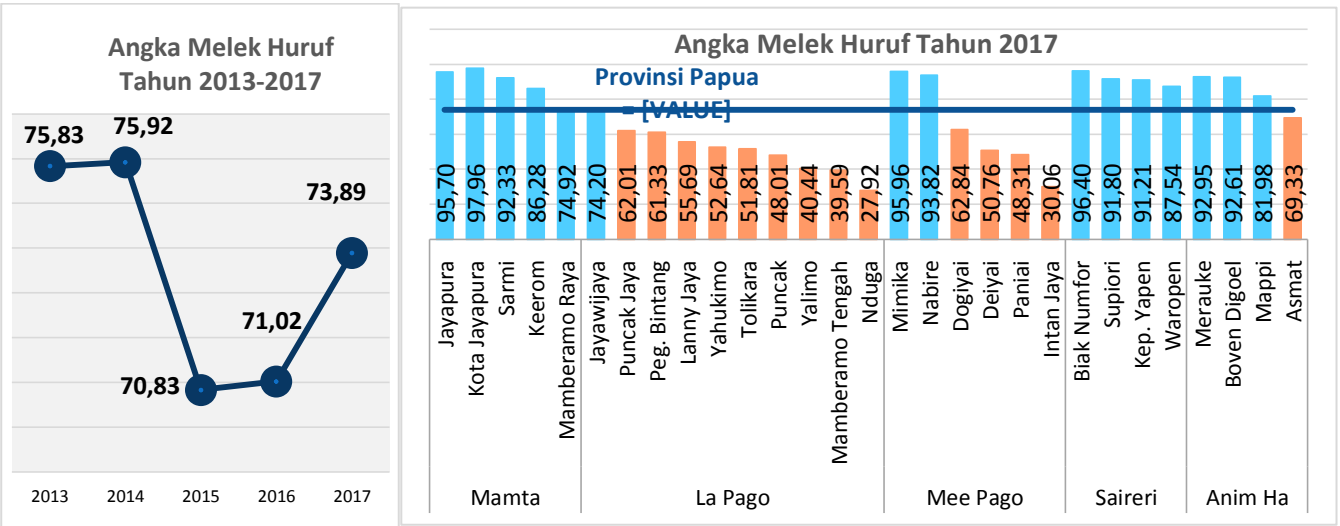

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Dari Gambar 2.3535 tampak jelas bahwa masih ada beberapa kabupaten yang mencapai AMH di bawah 70%. Bahkan 6 (enam) diantaranya dibawah 50% yaitu Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak dan Paniai. Dimana Kabupaten Nduga memiliki AMH yang terendah di Papua hanya sebesar 27,92% pada tahun 2017. Dengan kata lain sekitar 72,08% penduduknya yang berusia diatas 15 tahun mengalami buta huruf.

Di samping itu juga terjadi ketimpangan yang sangat mencolok dalam pengentasan buta huruf melalui peningkatan AMH antar daerah di wilayah Papua. Pada umumnya daerah-daerah yang sulit akses baik itu di dataran rendah maupun pegunungan mempunyai AMH yang rendah, rata-rata dibawah AMH Papua. Sedangkan di daerah yang mudah akses, sebagian besar sudah di atas AMH Papua, dan beberapa diantaranya telah mencapai angka 100% seperti Kabupaten Merauke, Biak Numfor, Mimika, dan Waropen, atau yang mendekati 100% misalkan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Mamberamo Raya.

2.2.3.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Gambar 2.36. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua (tahun)

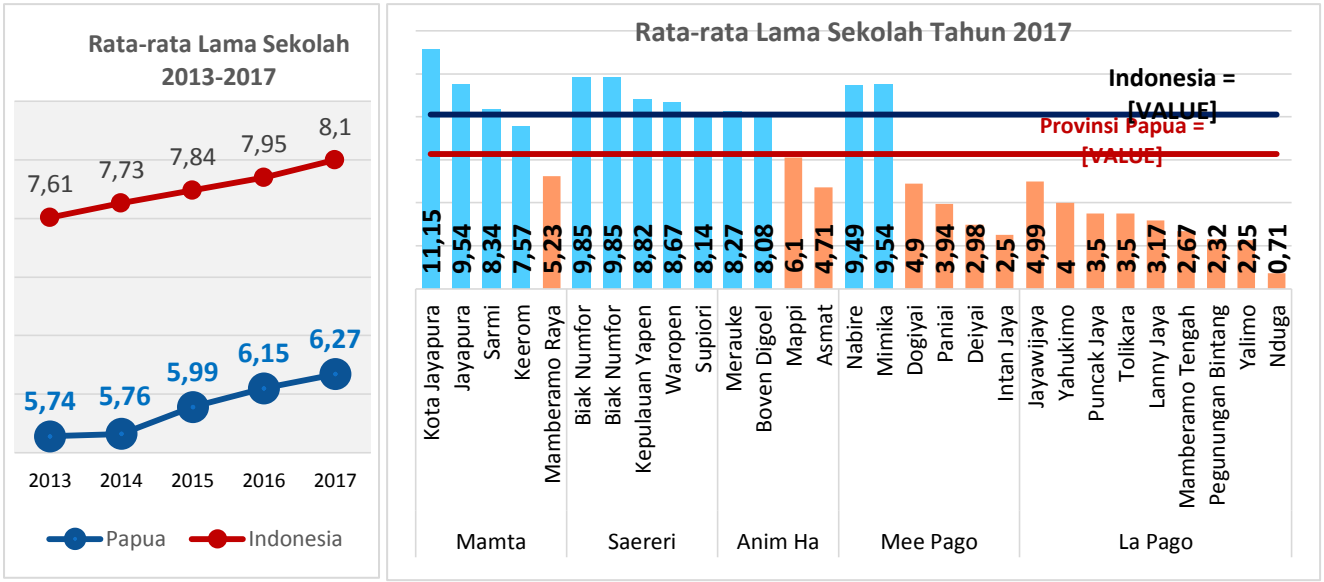

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih dibawah target program pendidikan wajib belajar 9 tahun, dimana hingga tahun 2017 tercatat RLS Provinsi Papua hanya mencapai 6,27 tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua dalam menyerap penduduk usia sekolah. Beberapa daerah di Provinsi Papua telah memiliki capaian RLS yang cukup baik, namun sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua masih memiliki capaian RLS yang relatif rendah (lihat Gambar 2.3636).

Sebaran capaian RLS kabupaten/kota diatas menunjukkan rata-rata RLS yang paling tinggi di Papua adalah wilayah Mamta dengan capaian tertinggi berada di Kota Jayapura sebesar 11,15 tahun di tahun 2017, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 5,23 tahun. Adapun untuk wilayah pembangunan yang paling rendah RLS di seluruh Provinsi Papua adalah La Pago dengan nilai rata-rata hanya 2,9 tahun pada tahun 2017, dimana Kabupaten Nduga merupakan yang terendah di wilayah La Pago dan Provinsi Papua yakni 0,71 tahun, yang berarti sebagian besar penduduknya banyak yang tidak dapat mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SD.

Untuk wilayah Mee Pago terlihat relatif lebih baik dibandingkan La Pago, meskipun masih dibawah 6 tahun. RLS pada tahun 2017 di wilayah Mepago kurang lebih mencapai 5,56 tahun dengan RLS terendah di Kabupaten Intan Jaya sebesar 2,5

tahun, dan tertinggi di Kabupaten Mimika sebesar 9,54 tahun. Berikutnya di wilayah Anim Ha, pada tahun 2017 secara rata-rata bisa mencapai 6,79 tahun. Dengan RLS tertinggi di Kabupaten Merauke sebesar 8,27 tahun, dan terendah di Kabupaten Asmat sebesar 4,71 tahun. Terakhir untuk wilayah Mamta, karena di topang oleh RLS Kota Jayapura yang paling tinggi yakni 11,15 tahun, akhirnya secara rata-rata capaian RLS di wilayah tersebut dapat mencapai 8,37 tahun. Dimana yang paling rendah di Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 5,23 tahun. Semua fakta ini menunjukan adanya ketimpangan kemampuan masyarakat di kelima wilayah adat tersebut dalam mengakses layanan pendidikan, yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan sehingga akses dan kualitas pendidikan antar wilayah menjadi berbeda sangat nyata.

2.2.3.3. Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Secara umum, perkembangan HLS Provinsi Papua mengalami sedikit peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun capaian HLS Provinsi Papua rata-rata meningkat sebesar 0,24 poin per tahun, dimana pada tahun 2017 diperkirakan HLS Provinsi Papua mencapai 10,54 tahun, yang mengindikasikan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 10,54 tahun atau setara dengan kelas 1 SLTA, berarti masih dibawah jenjang pendidikan diploma/pendidikan tinggi (lihat Gambar 2.377).

Gambar 2.37. Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua (tahun)

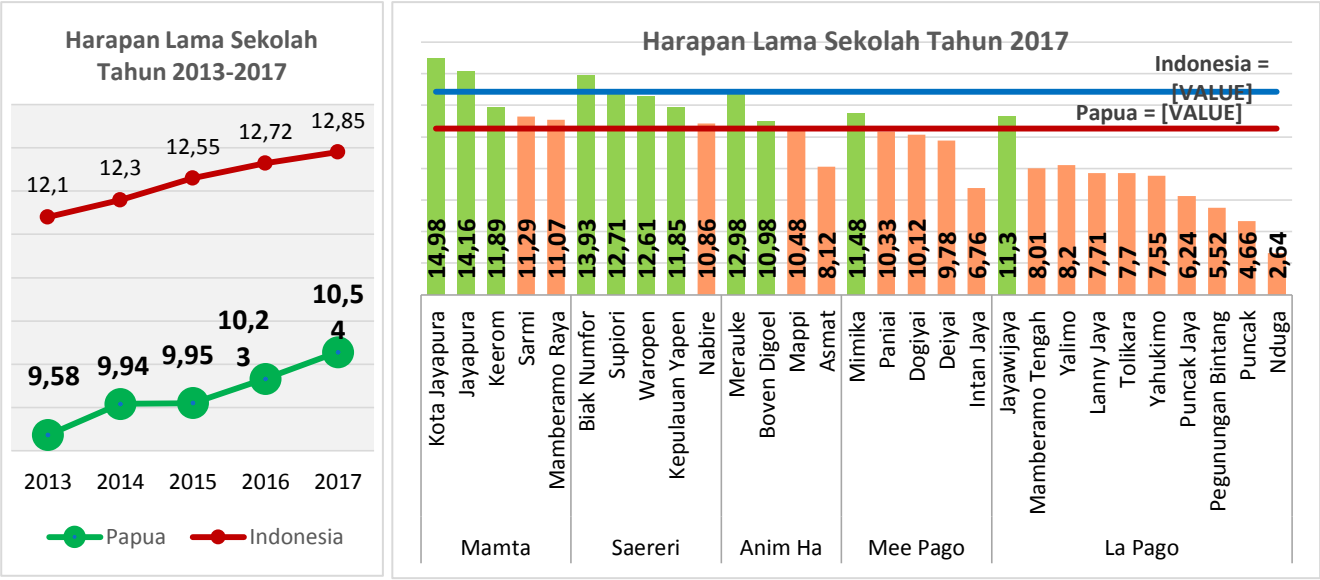

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018

Secara umum, Mamta merupakan wilayah adat dengan rata-rata HLS tertinggi di Papua, sedangkan untuk yang terendah di wilayah Lapago. Dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah adat Mamta, Kota Jayapura mempunyai HLS paling tinggi yakni sebesar 14,98 tahun pada akhir tahun 2017, sedangkan Kabupaten Mamberamo Raya merupakan daerah yang memiliki HLS terendah yakni 11,07 tahun pada tahun yang sama. Selanjutnya, wilayah adat La Pago dengan rata-rata HLS sekitar 6,06 tahun pada tahun 2017, yang mana salah satu kabupaten di wilayah tersebut yaitu Nduga tercatat memiliki HLS yang paling rendah di Provinsi Papua sebesar 2,64 tahun. Kemudian untuk wilayah Mee Pago tercatat Kabupaten Mimika, Paniai dan Dogiyai diestimasi mempunyai HLS yang paling tinggi yakni masing-masing sebesar 11,48 tahun, 10,33 tahun dan 10,12 tahun. Sedangkan untuk wilayah Anim Ha, semua daerah diharapkan memiliki lama sekolah di atas 9 tahun, terkecuali untuk Kabupaten Asmat masih dibawah 9 tahun yakni sebesar 8,12 tahun.

2.2.4. Fokus Kesehatan

Pembangunan kesehatan di suatu daerah pada umumnya diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, upaya kesehatan masyarakat dan sumber daya kesehatan yang mencakup penyediaan sarana dan prsarana kesehatan yang berkualitas dan memadai. Dalam tataran makro, indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan dalam upaya

meningkatkan derajad kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu dan Bayi, serta persentase balita gizi buruk dan gizi kurang. Sementara untuk upaya kesehatan masyarakat, salah satunya dapat menggunakan indikator cakupan desa siaga aktif. Namun, karena data mengenai Desa Siaga Aktif tidak tersedia, maka sebagai proksi digunakan data jumlah desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).

2.2.4.1. Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yag mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu. Berikut ini merupakan perkembangan AHH Provinsi Papua. Secara umum capaian AHH Provinsi Papua mengalami kecenderungan yang relatif meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai angka tertinggi di tahun 2017 sebesar 65,14 tahun, atau naik sebesar 0,4 tahun bila dibandingkan tahun 2013. Meningkatnya AHH menunjukan adanya keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesbilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antarsektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini.

Gambar 2.38. Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua

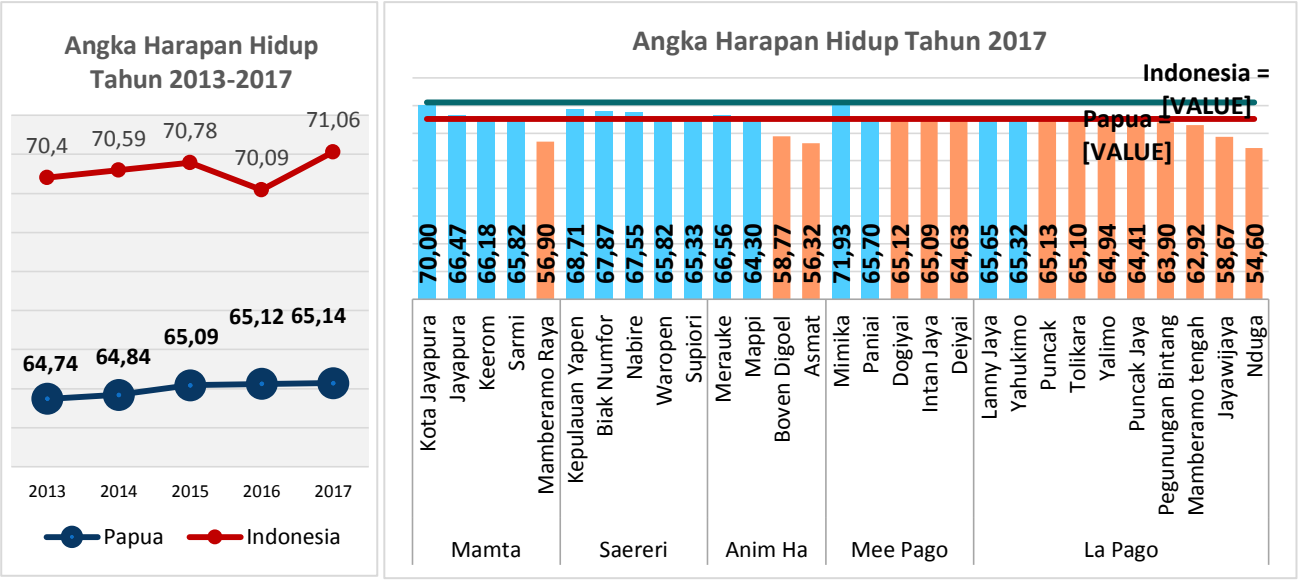

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2018

Rata-rata capaian Angka Harapan Hidup (AHH) di 4 wilayah adat masih berada di bawah capaian AHH rata-rata Provinsi Papua. Saireri merupakan satu-satunya wilayah adat yang memiliki capaian rata-rata AHH di atas Provinsi Papua. Hal ini mengindikasikan ketimpangan ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan diantara kabupaten/kota di Provinsi Papua. Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah dengan capaian AHH tertinggi di wilayah adat Saireri yang mencapai 68,71 tahun pada akhir tahun 2017. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah AHH Kabupaten Mimika yang mencapai 71,93 tahun hingga akhir tahun 2017. Capaian AHH Kabupaten Mimika tersebut juga berada jauh di atas rata-rata AHH Provinsi Papua. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Mimika relatif jauh lebih optimal dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua.

Sebaliknya, wilayah adat La Pago merupakan kawasan dengan rata-rata capaian AHH terendah di Provinsi Papua yaitu, 62,59 pada tahun 2017. Kabupaten Nduga merupakan daerah dengan capaian AHH terendah di wilayah adat Lapago yaitu sebesar 54,6 tahun sedangkan, Kabupaten Kabupaten Lanny Jaya merupakan daerah dengan capaian AHH tertinggi dibandingkan dengan seluruh kabupaten di wilayah adat La Pago.

2.2.4.2. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Pemantauan Status Gizi (PSG) merupakan kegiatan pemantauan perkembangan status gizi balita yang dilaksanakan setiap tahun secara berkesinambungan untuk memberikan gambaran tentang kondisi status gizi balita. Status gizi buruk bayi usia 0-23 bulan di Provinsi Papua cukup memprihatinkan, karena selama tahun 2015-2017 kecenderungannya mengalami peningkatan, yakni dari 5,2% di tahun 2015 menjadi 6,5% di tahun 2017. Padahal untuk jangka waktu yang sama secara keseluruhan gizi buruk di Indonesia mengalami penurunan. Angka gizi buruk di Papua juga terlihat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indonesia yang pada tahun 2017 hanya sebesar 3,5%.

Gambar 2.39. Status Gizi Anak Balita Umur 0 - 23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2015-2017 (%)

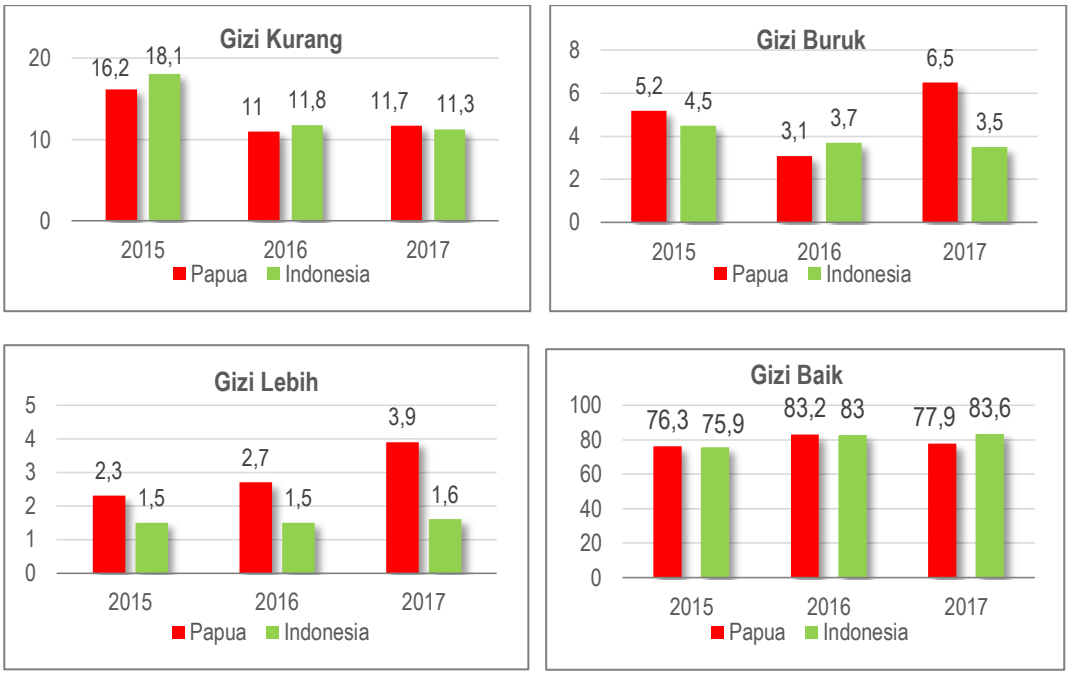

Sumber: Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI, 2018 (data diolah)

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Provinsi Papua termasuk paling tinggi memiliki stunting di atas rata-rata Indonesia bersama 19 provinsi lainnya (lihat Gambar 2.409).

Gambar 2.40. Angka Stunting Tertinggi di Indonesia Tahun 2017 (%)

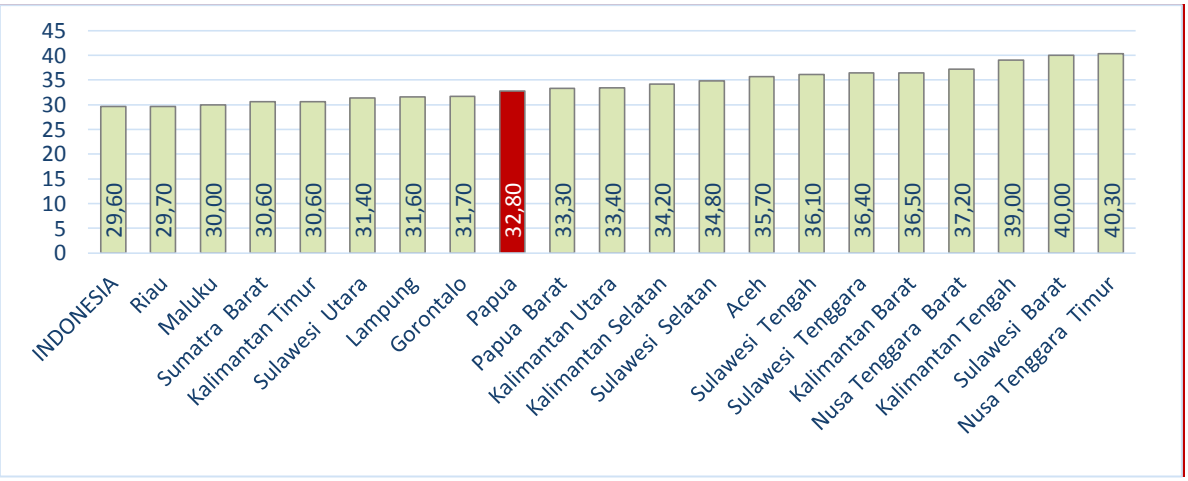

Sumber: Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI, 2018 (data diolah)

Keadaan stunting yang terlihat tinggi di Provinsi Papua ini, yaitu mencapai 32,80%, perlu ditangani segera dengan efektif, agar manfaat bonus demografi yang akan diterima selama periode 2020-2030 mendatang dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Papua.

2.2.4.3. Cakupan Desa yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular

Desa Posbindu PTM (Pos Pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular) yang mulai dikembangkan pada tahun 2011 merupakan wujud peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Kegiatan Posbindu PTM juga terintegrasi secara rutin di masyarakat, seperti di lingkungan tempat tinggal dalam wadah desa/kelurahan siaga aktif. Tujuan Posbindu PTM adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Sasaran utama kegiatan adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas.

Dalam Gambar 2.41 terlihat bahwa upaya kesehatan masyarakat secara keseluruhan yang dilaksanakan di Provinsi Papua berada dalam kategori paling rendah di Indonesia, dengan cakupan Posbindu PTM hanya sebesar 1,90% dari seluruh total desa/kampung yang ada. Kondisi inilah yang menyebabkan Provinsi Papua selama ini sangat sulit untuk mendeteksi dini dengan cepat dan efektif mengenai potensi risiko penyakit tidak menular di seluruh kampung.

Gambar 2.41. Cakupan Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Posbindu TM di Indonesia sampai dengan Tahun 2017 (%)

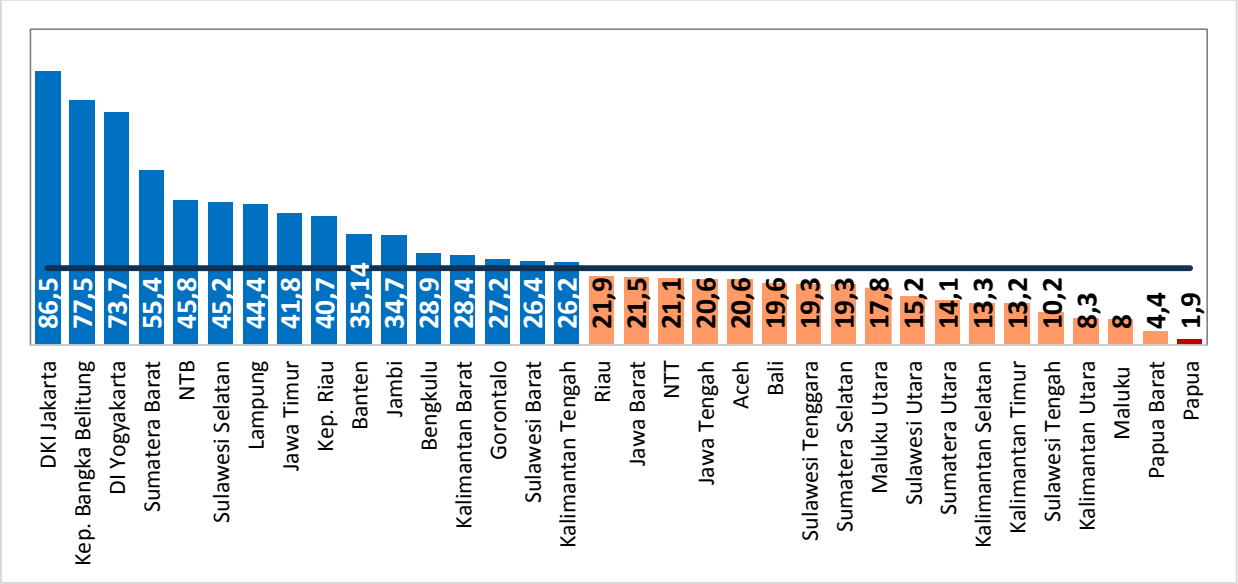

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2018 (data diolah)

2.2.5. Fokus Ketenagakerjaan

Apabila dilihat sepanjang tahun 2013-2017, jumlah angkatan kerja dan jumlah orang yang bekerja di provinsi Papua terlihat meningkat, kecuali tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jumlah orang yang menganggur, dari tahun 2013-2017 jumlahnya mengalami fluktuasi. Tercatat jumlah angkatan kerja 1.688.876 jiwa pada tahun 2013 dan orang yang bekerja berjumlah 1.634.332 jiwa, sedangkan pengangguran berjumlah 54.544 jiwa.

Tabel 2.15. Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas (jiwa)	2.165.070	2.129.404	2.189.230	2.245.462	2.291.111
Angkatan Kerja (jiwa)	1.688.876	1.675.113	1.741.945	1.722.162	1,762,841
1. Bekerja	1.634.332	1.617.437	1.672.480	1.644.485	1,699,071
2. Penganggur	54.544	57.676	69.465	57.677	63,770
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	476.194	454.291	447.285	523.300	528,270
Laju Pertumbuhan yang Bekerja (%)	6,96	-1,03	3,40	-1,67	3.32
Daya Serap Tenaga Kerja (%)	96,77	96,56	96,01	95,49	96.38
Rasio Orang Bekerja dengan Penduduk +15 (jiwa)	75,49	75,96	76,40	74,13	74,16
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	78,01	78,67	79,57	74,13	77.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%)	3,23	3,44	3,99	3,35	3.96

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat fluktuatif selama tahun 2013-2017. Dimana untuk TPAK di Provinsi Papua dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersebut cenderung berkembang stabil dengan rata-rata mencapai 77,53%. Tahun 2013, TPAK provinsi Papua tercatat sebesar 78,01%, yang kemudian naik di tahun 2014 kemudian meningkat di tahun 2015, kemudian turun kembali di tahun 2016 menjadi 74,13%. Sampai dengan tahun 2017 kondisi TPAK Provinsi Papua adalah sebesar 77.30%. Akibat penambahan penduduk usia 15 tahun ke atas yang lebih cepat dibandingkan penduduk yang bekerja, menyebabkan penyerapan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam lapangan kerja semakin menurun yaitu dari 75,49% di tahun 2013 menjadi 74,16% pada tahun 2017. Dengan kata lain mengalami penurunan sekitar -0,33% per tahun selama periode 2013-2017. Dari sisi pengangguran, terlihat bahwa jumlah orang yang menganggur di provinsi Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan, dengan rata-rata mencapai 60.626 orang setiap tahun. Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami flukstuasi dan cenderung meningkat, dengan rata-rata mencapai 3,59 % pertahun selama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017).

Gambar 2.42. Tingkat Pengangguran di Provinsi Papua Tahun 2017 (%)

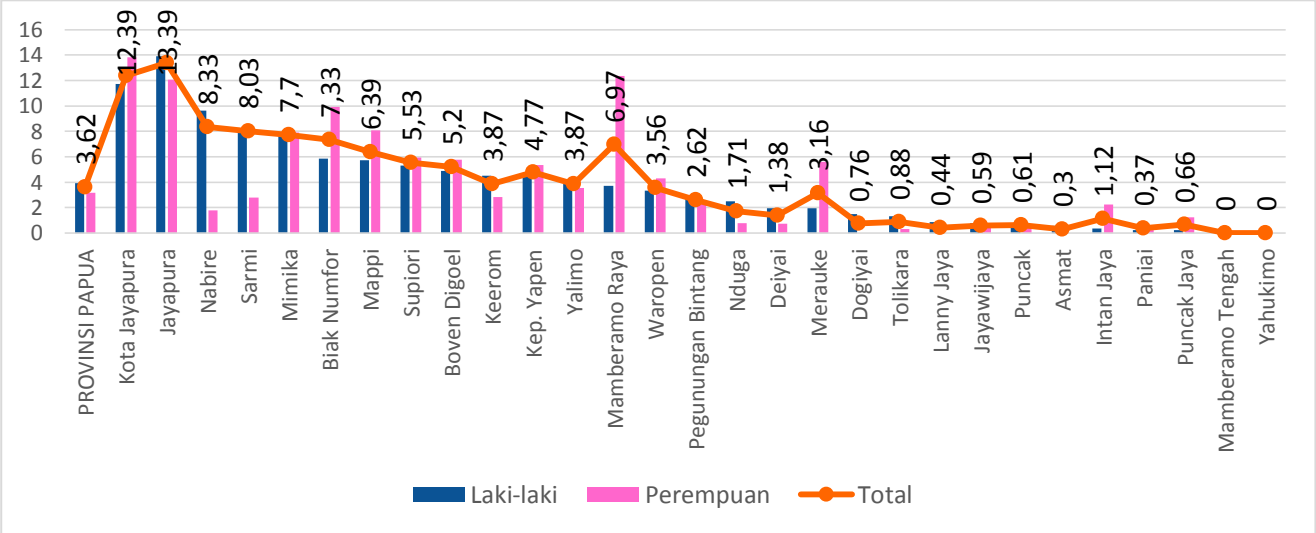

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Jika diperhatikan menurut kabupaten/kota terlihat tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Kota Jayapura yakni sebesar 13,39% di tahun 2017, dengan kontribusinya yang terbesar bila diamati menurut jenis kelamin adalah penduduk yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 13,82% yang menganggur, sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 11,72%. Perhatikan Gambar 2.42 di atas.

Gambar 2.43. Peta Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017

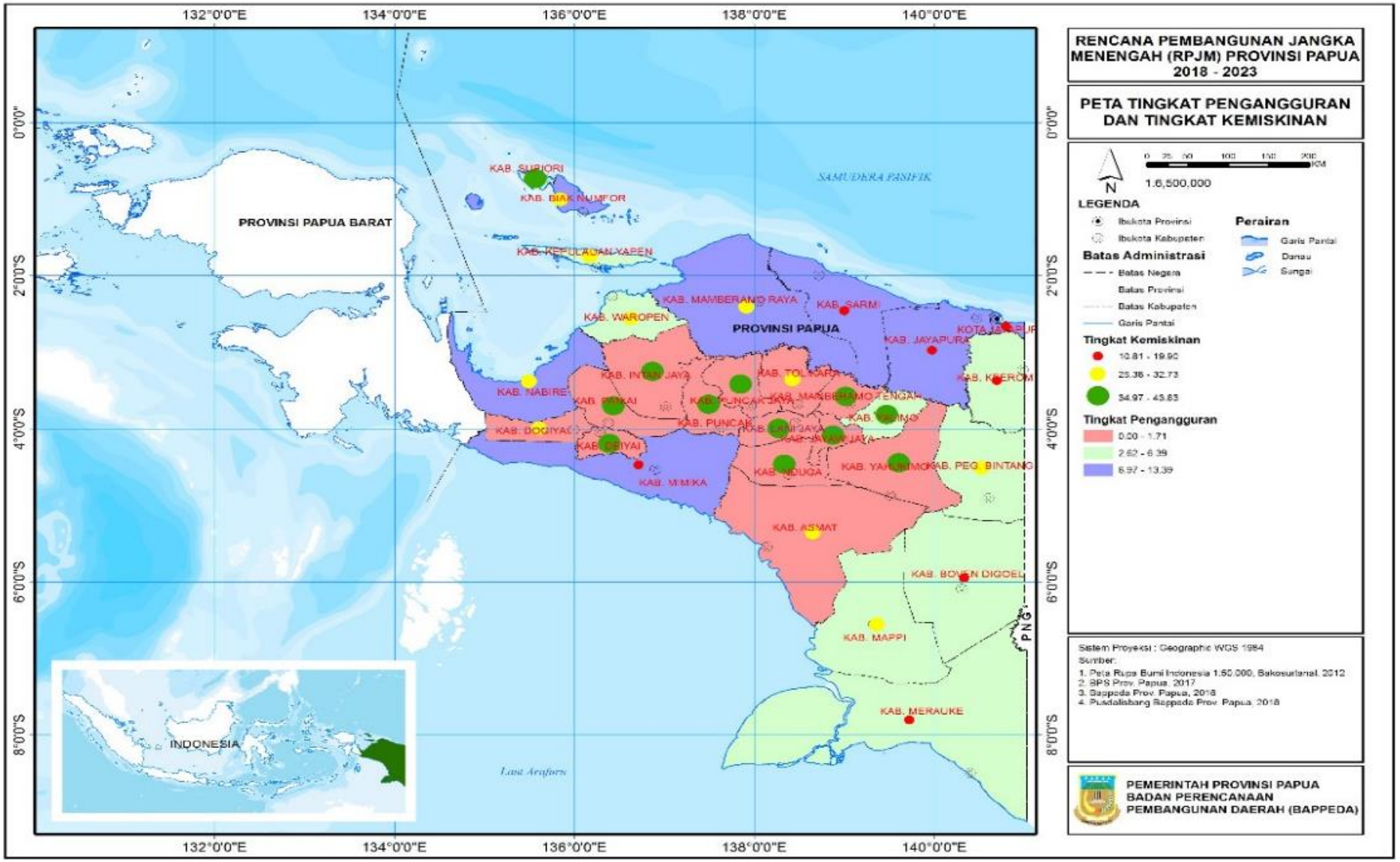

Sementara wilayah kabupaten dengan tingkat pengangguranya terendah adalah Asmat, hanya sebesar 0,30% pada tahun 2017. Walaupun pengangguran terlihat sangat rendah, yang menandakan jumlah orang bekerja lebih banyak, namun bukan berarti hal tersebut mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan secara signifikan di Provinsi Papua.

Dalam Gambar 2.4343 berikutnya juga terpetakan bahwa daerah-daerah yang rendah tingkat pengangguranny a, seperti di Kawasan La Pago dan Mee Pago ternyata merupakan daerah yang paling banyak kantong kemiskinannya, dengan persentase kemiskinan rata-rata di atas 35%. Kondisi ini menggambarkan belum nampak korelasi yang signifikan antara pengangguran yang rendah dengan kemiskinan yang rendah juga. Hal ini disebabkan tenaga kerja yang ada ternyata lebih banyak terserap di sektor pertanian tradisional dimana tidak membutuhkan tingkat keahlian dan pendidikan yang tinggi, sehingga nilai upah yang diterima tenaga kerja sangat rendah dan belum maksimal mendorong perubahan pendapatan pada rumah tangga di sektor pertanian untuk hidup di atas garis kemiskinan.

Apabila mengamati struktur tenaga kerja menurut sektor di Provinsi Papua, (lihat Gambar 2.4444), diketahui bahwa jumlah orang yang bekerja pada sektor pertanian mendominasi struktur tenaga kerja dengan proporsi yang cenderung menurun sepanjang tahun 2013-2017, yaitu rata-rata pertahun mencapai 70,34%. Adapun sektor industri rata-rata mencapai 4,20%, dan sektor jasa-jasa rata-rata mencapai 24,53%.

Gambar 2.44. Komposisi dan Struktur Tenaga Kerja Menurut Sektor

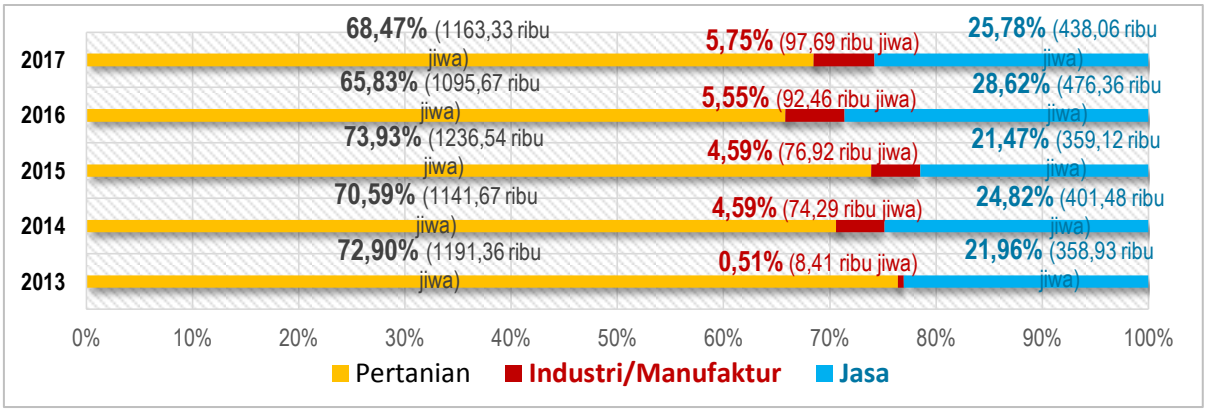

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Peranan tenaga kerja untuk mengatasi kemiskinan sepertinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan tenaga kerja yang lebih banyak terserap dalam lapangan

kerja merupakan tenaga kerja yang berpendidikan rendah, sehingga *transfer payment* yang dihasilkan belum maksimal mendorong pendapatannya di atas garis kemiskinan. Kondisi faktual tahun 2013-2017 dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana selama ini komposisi tenaga kerja di Provinsi Papua lebih dominan pada tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Perhatikan Gambar 2.45 dibawah ini.

Gambar 2.45. Struktur Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

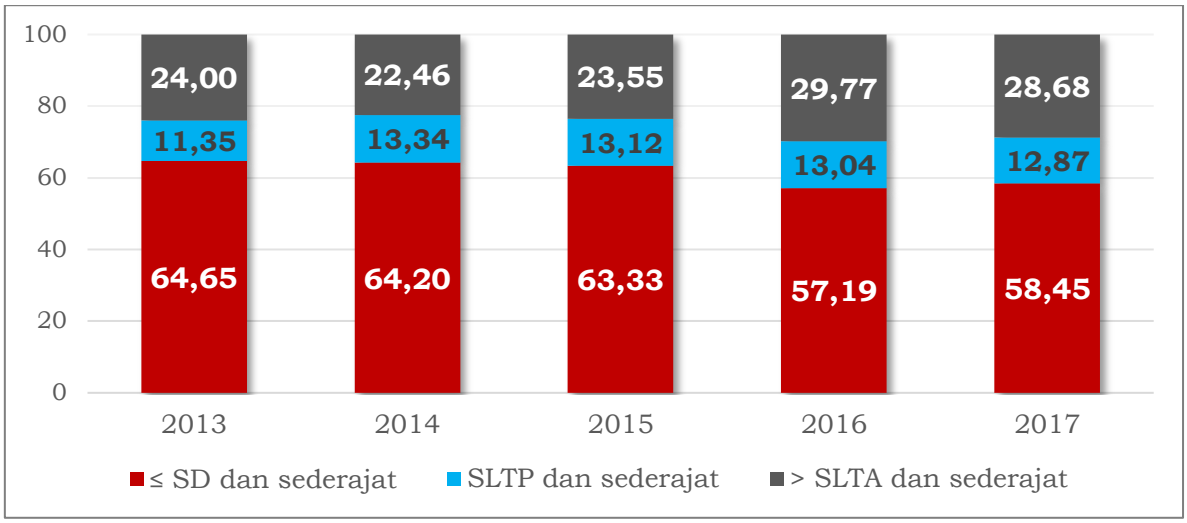

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.455 diketahui bahwa selama tahun 2013-2017 profil tenaga kerja di Provinsi Papua lebih dominan yang berpendidikan rendah yaitu SD/sederajad dan atau di bawah SD/sederajad, kurang lebih setiap tahunnya sekitar 61,56% dari total tenaga kerja. Sementara yang berpendidikan SLTP/sederajad sebesar 12,79% per tahun, dan yang berpendidikan SLTA/sederajad/diatasnya sekitar 25,69% per tahun untuk periode yang sama.

Keadaan tenaga kerja menurut lapangan usaha dan pendidikan berikut ini juga memberikan gambaran bahwa peranan sektor pertanian belum memadai untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Papua. Meskipun sektor pertanian mampu menyerap lapangan kerja paling tinggi, namun tenaga kerja yang paling banyak diserap adalah tenaga kerja yang berpendidikan rendah (SD/sederajad dan tidak sekolah), sekitar 77,15% dari total tenaga kerja di sektor tersebut. (lihat Gambar 2.4646)

Gambar 2.46. Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2017 (%)

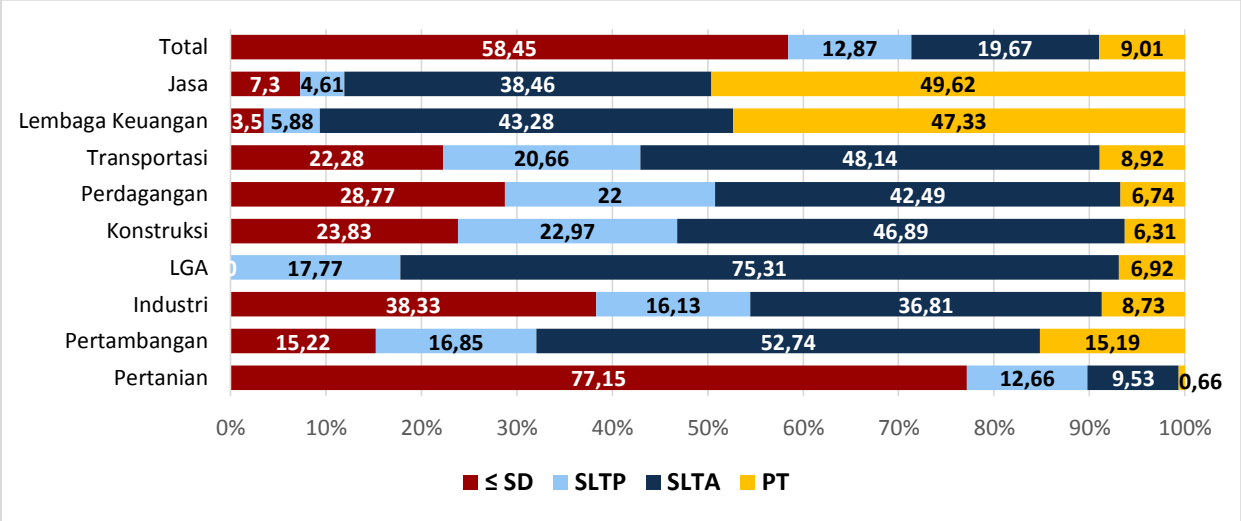

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Termasuk juga di sektor industri, proporsi yang berpendidikan rendah tampak dominan, kurang lebih 38,33%. Tenaga kerja yang berpendidikan SLTA dan PT lebih banyak tersebar di sektor lembaga keuangan dan jasa sekitar 44,67%. Padahal kedua sektor tersebut kurang mampu menyerap lapangan kerja selama ini di Provinsi Papua.

Akibat tenaga kerja yang terserap lebih dominan yang berpendidikan rendah, akhirnya produktifitas regional yang dihasilkan Provinsi Papua selama ini terindikasi rendah (lihat Gambar 2.477). Rata-rata produktifitas tenaga kerja untuk menghasilkan PDRB di Provinsi Papua selama tahun 2013-2017 hanya mencapai 79,53 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Namun demikian cenderung produktifitas tenaga kerja mengalami kenaikan setiap tahun, sekitar 5,18% per tahun.

Gambar 2.47. Produktifitas Regional (Juta Rupiah Per Tenaga Kerja)

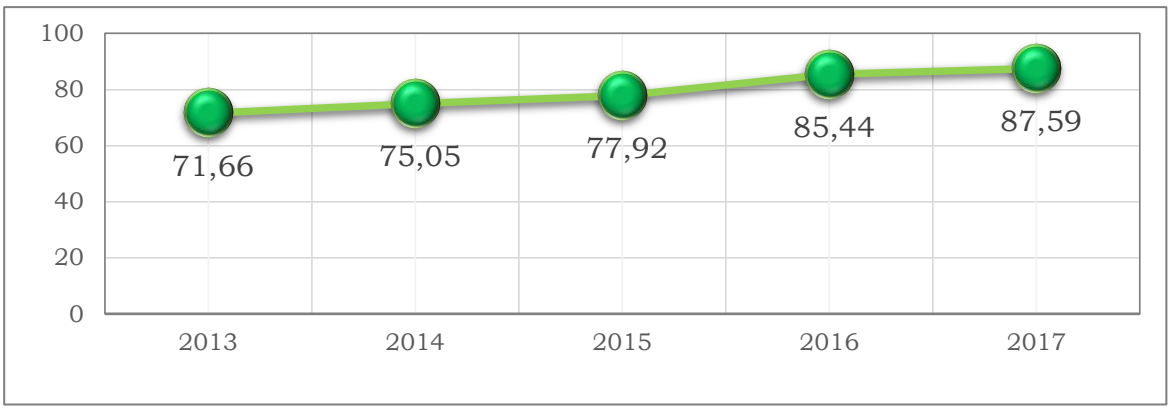

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Untuk meningkatkan produktifitas tenaga regional penting sekali dimasa mendatang mengupayakan peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, seperti pengembangan pendidikan vokasional untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian penduduk pada bidang pertanian, industri dan pertambangan. Serta penguatan pelatihan yang inovatif agar tenaga kerja Papua mampu mentransformasi teknologi untuk menghadapi revolusi industri ke-4 yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, editing genetik, maraknya perkembangan neuroteknologi dan internet.

2.2.6. Fokus Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Dalam perspektif kesejahteraan sosial dan ekonomi, beberapa indikator yang penting dianalisis antara lain perkembangan keluarga sejahtera, tingkat kebahagiaan, ketahanan pangan, kemandirian fiskal dan kontribusi sektoral terhadap PDRB di Provinsi Papua.

2.2.6.1. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya. Adapun untuk Keluarga Sejahtera II adalah keluarga

yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Pada keluarga sejahtera II ini kebutuhan fisik dan sosial psikologis telah terpenuhi namun kebutuhan untuk pengembangan belum terpenuhi.

Berdasarkan pentahapan keluarga sejahtera, kondisi demografi Provinsi Papua cenderung lebih banyak pada Keluarga Sejahtera I dan Pra Sejahtera, masing-masing sebesar 51,74% dan 27,38% dari total keluarga yang tercatat sebanyak 182.514 KK pada tahun 2017 (lihat Gambar 2.48). Fenomena ini menandakan meskipun sebagian besar keluarga di Provinsi Papua sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi kebutuhan sosial psikologinya masih belum maksimal terutama untuk pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, dan interaksi dengan lingkungan. Dimana pada akhirnya hal ini dapat berdampak terhadap meningkatnya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Gambar 2.48. Kondisi Demografi Keluarga di Provinsi Papua Tahun 2017

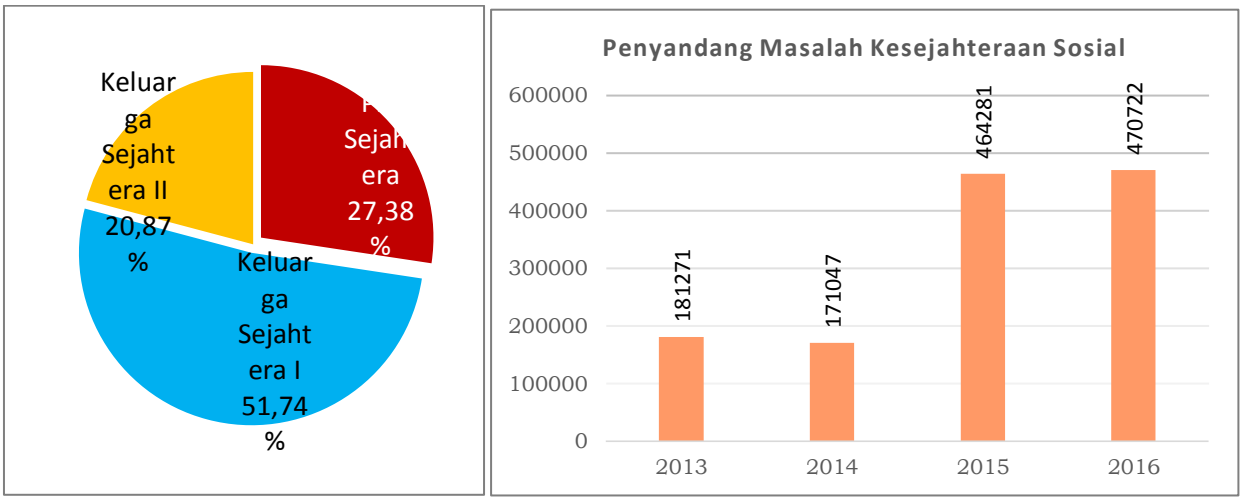

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.2.6.2. Indeks Kebahagiaan

Diantara tahun 2014 dan 2017, terindikadikasi hampir seluruh wilayah provinsi mengalami kenaikan Indeks Kebahagiaan, terkecuali untuk Provinsi Jambi terjadi penurunan (lihat Gambar 2.49). Meskipun Provinsi Papua memiliki nilai Indeks Kebahagian paling rendah di Indonesia, akan tetapi peningkatannya di tahun 2017 paling tinggi yakni 6,55 poin dibandingkan tahun 2014. Tercatat Indeks

Kebahagiaan Papua pada tahun 2014 sebesar 60.97 poin, dan tahun 2017 sebesar 67.52 poin. Fakta ini menunjukan bahwa Papua paling berhasil meningkatkan kebahagiaan masyarakatnya dibandingkan wilayah provinsi lain.

Merujuk kepada hasil perhitungan BPS Papua (2018) teridentifikasi faktor yang paling besar kontribusinya terhadap Indeks Kebahagiaan adalah Kepuasan terhadap Kondisi Keamanan, dengan nilainya di tahun 2017 sebesar 75,79 poin. Sementara yang terendah adalah faktor Pendidikan dan Keterampilan, dengan nilai sub indeksnya sebesar 53,54 poin. Kedua hal ini menandaskan bahwa diantara tahun 2014 dan 2017 cenderung masyarakat merasa sangat puas dengan kondisi keamaanan yang diwujudkan oleh pemerintah selama itu, namun untuk tingkat pendidikan tampaknya masih jauh dari harapan masyarakat sehingga penilaian terhadap elemen tersebut menjadi sangat rendah (lihat Gambar 2.499).

Gambar 2.49. Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi Tahun 2014 dan 2017

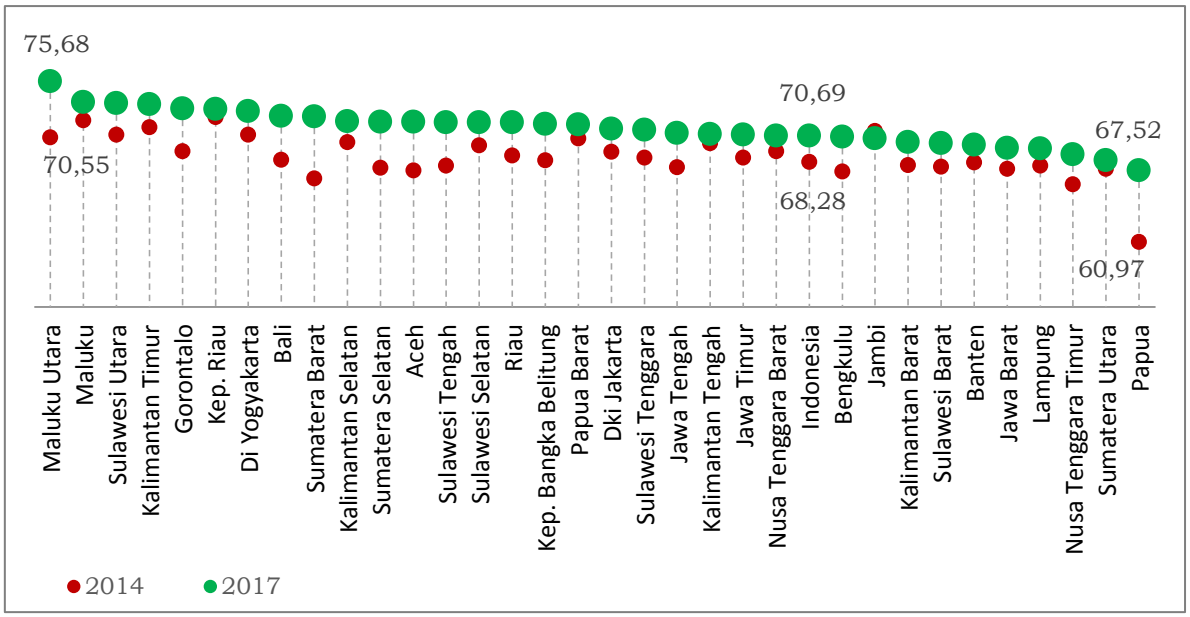

Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Apabila diperhatikan seksama pada perbedaan nilai sub indeks pembentuk Indeks Kebahagiaan diantara tahun 2014 dan 2017 terlihat bahwa elemen-elemen keharmonisan keluarga, kondisi keamanan, serta keadaan lingkungan semuanya meningkat lebih tinggi dibandingkan elemen pendidikan, kesehatan dan pendapatan rumah tangga (perhatikan Gambar 2.5050).

Gambar 2.50. Perbedaan Nilai Sub Indeks Terpenting Pembentuk Indeks Kebahagiaan di Provinsi Papua Antara Tahun 2014 dan 2017

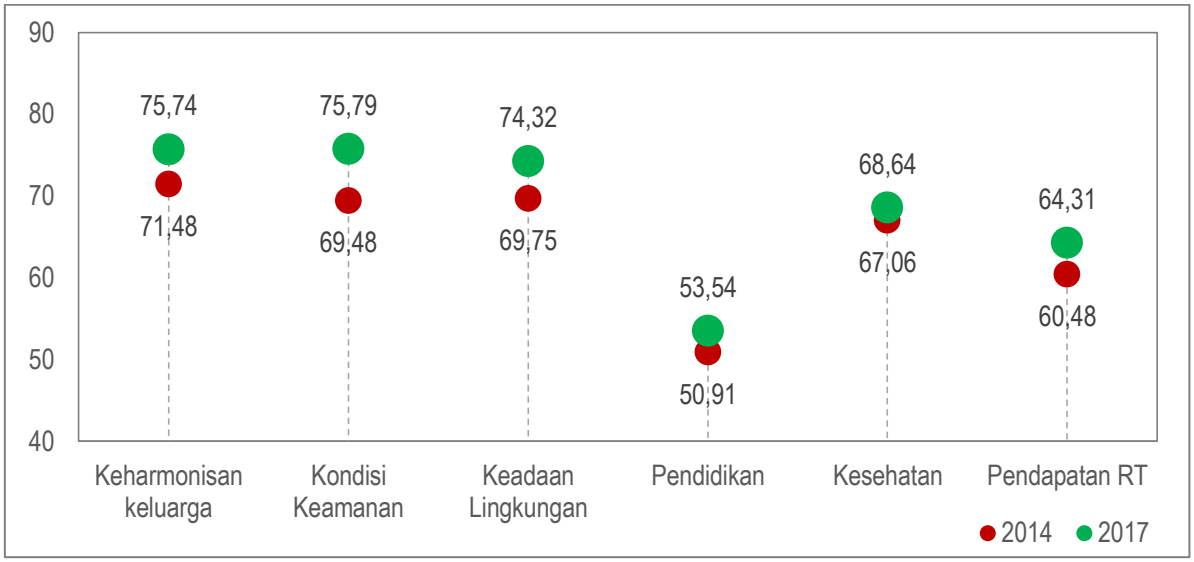

Sumber: BPS Papua, 2018 (data diolah)

Paling tinggi perubahannya adalah sub dimensi Kondisi Keamanan yang naik sekitar 6,31 poin, sedangkan yang terendah sub dimensi kesehatan hanya sebesar 1,58 poin. Dinamika ini kembali menunjukan bahwa masyarakat menilai faktor keamanan di Provinsi Papua yang paling baik dan memuaskan perubahannya, termasuk untuk faktor keluarga dan lingkungan. Sedangkan untuk pendidikan, kesehatan dan pendapatan rumah tangga, walaupun ada peningkatan di tahun 2017 namun kurang begitu memuaskan, sehingga ketiganya dinilai masih tetap rendah dalam komponen Indeks Kebahagiaan.

2.2.6.3. Ketahanan Pangan

(1) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan atau *Desireable Dietary Pattern* adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan atau kontribusi energi dan kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dan suatu pola ketersediaan atau pola konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan berguna sebagai instrumen sederhana menilai situasi ketersediaan dan konsumsi pangan berupa jumlah dan komposisi menurut jenis pangan secara agregat. Disamping itu juga berguna sebagai basis untuk penghitungan skor Pola Pangan Harapan yang digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan keragaman konsumsi pangan baik pada tingkat ketersediaan maupun tingkat konsumsi (lihat Tabel 2.16).

Tabel 2.16. Pemenuhan Konsumsi Energi dan Protein Berdasarkan Kelompok Bahan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Enengi (kkal/kap/hari)					Konsumsi Protein (gram protein/kap/hari)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Padi-padian	764	747	901	368	993	17.7	17.4	20.5	19.8	22.7
Umbi-umbian	589	662	816	615	720	4.3	5.4	7	7.1	6.1
Pangan Hewani	172	187	192	1S5	227	16.7	17.5	17.5	16.6	20
Minyak dan Lemak	228	246	277	290	291	0.1	0.1	0	0	0
Buah/biji berminyak	28	27	34	21	18	0.4	0.4	0,4	0.3	0.3
Kacang-kacangan	59	46	50	49	49	5.1	4	5	5.1	5.1
Gula	98	76	117	101	123	0	0	0	0	0
Sayuran dan buah	123	120	100	96	96	6.3	6.1	4.4	4.4	4.3
Lain-lain	17	17	23	23	26	1	0.8	0.9	1	1.1
Total	2078	2130	2512	2448	2448	51.8	51.7	55.7	54.3	59.7

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementan RI, 2017 (data diolah)

Sumber energi yang terbesar dikonsumsi penduduk di Papua ternyata paling banyak berasal dari bahan pangan padi-padian, yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diperkirakan komoditi padi-padian memberi kontribusi sekitar 32,66% per tahun terhadap pemenuhan kebutuhan energi penduduk Papua sepanjang tahun 2013-2017. Sementara dari umbi-umbian sebesar 29,29% per tahun, serta dari minyak dan lemak sebesar 11,46% per tahun. Secara keseluruhan terlihat ketiga kelompok bahan pangan ini (padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak) menjadi sumber energi yang terbesar bagi penduduk Papua, dengan kontribusinya mencapai 73,41% per tahun. Sisanya, dipenuhi dari konsumsi bahan pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, dan lain-lainnya.

Kondisi yang sama juga terlihat untuk pemenuhan kebutuhan protein. Bahan pangan padi-padian masih paling besar proporsinya. Menyusul kemudian yang berasal dari pangan hewani. Selama periode 2013-2017, kedua kelompok bahan pangan tersebut memberi kontribusi terhadap pemenuhan protein penduduk di Provinsi Papua sekitar 68,14% per tahun. Sisanya terpenuhi dari sumber bahan pangan lainnya, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buahan.

Ada indikasi telah terjadi pergeseran pola pangan pokok penduduk Papua selama ini, sehingga padi-padian sekarang menjadi sumber energi dan protein utama. Padahal produksi lokal padi di Provinsi Papua sampai sekarang masih sangat rendah

dan tidak mampu mencukupi konsumsi beras lokal, sehingga diperlukan impor beras dalam jumlah yang sangat banyak setiap tahunnya. Hal ini akhirnya membuat Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi lebih rendah dibandingkan skor nasional secara keseluruhan.

Gambar 2.51. Skor Pola Pangan Harapan di Indonesia dan Provinsi Papua

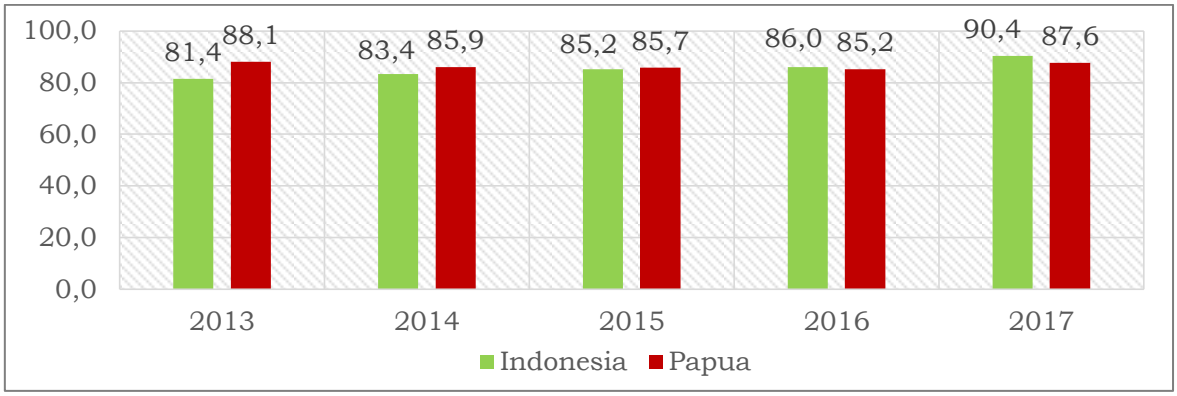

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementan RI, 2017 (data diolah)

Seperti yang disajikan dalam Gambar 2.51, terlihat jelas Skor PPH Provinsi Papua mengalami penurunan selama periode 2013-2017, dan dibawah skor PPH nasional. Pada tahun 2017, skor PPH Provinsi Papua hanya sebesar 87,60%, sementara skor PPH nasional sebesar 90,40%. Perlu upaya yang lebih keras bagi Provinsi Papua untuk mencapai skor PPH yang ideal sebesar 100%.

(2) Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dapat dikatakan Provinsi Papua cukup berhasil menangani daerah rawan pangan selama ini. Seperti yang divisualisasikan dalam Gambar 2.520, tampak jelas bahwa pada tahun 2013 dan 2014 jumlah daerah kabupaten yang terindikasi rawan pangan mencapai lebih dari 20 kabupaten. Begitu masuk di tahun 2015 sampai dengan 2016 jumlah daerah rawan pangan akhirnya dapat ditekan menjadi 13 kabupaten.

Gambar 2.52. Kondisi Ketahanan Pangan di Provinsi Papua

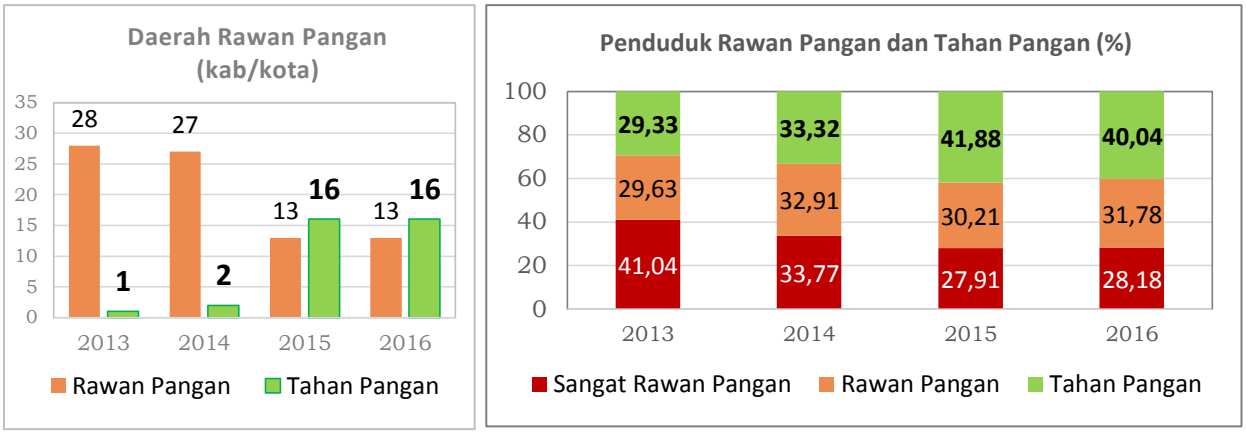

Sumber: Bappeda Papua, 2018 dan Badan Ketahanan Pangan Kementan RI, 2017 (diolah)

Begitu juga dengan jumlah penduduk yang rawan pangan, cenderung mengalami penurunan antara tahun 2013-2016. Seperti yang disajikan dalam Gambar 2.45, pada tahun 2013 jumlah penduduk sangat rawan/rawan pangan di Papua masih sebesar 70,67%%, kemudian menurun terus setiap tahun hingga pada tahun 2016 menjadi 59,96%. Berarti ada penurunan sekitar 3,57% per tahunnya.

Meskipun ada indikasi keberhasilan dalam menekan jumlah daerah dan penduduk yang rawan/sangat rawan pangan, akan tetapi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menimpa Kabupaten Asmat dan Pegunungan Bintang di awal tahun 2018 patut menjadi perhatian lebih serius dimasa mendatang, untuk mempercepat penuntasan 100% daerah-daerah yang teridentifikasi rawan pangan, oleh karena kerawanan pangan tersebut sangat berkaitan erat dengan kejadian gizi buruk, dan wabah penyakit menular. Terdapat 3 (tiga) elemen dasar yang penting untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan peningkatan ketahanan pangan yaitu (1) konsumsi pangan, (2) produksi pangan, dan (3) distribusi pangan. Ketiganya harus dilakukan secara komprehensif dan holistik, integratif antarsektor, dan spasial.

(3) Cadangan Pangan

Cadangan pangan di Provinsi Papua berupa beras yang tersimpan di Bulog cenderung mengalami peningkatan yang sangat tajam sepanjang tahun 2013-2017. Meskipun sempat mengalami penurunan -10,11% di tahun 2014 bila dibandingkan tahun 2013, namun secara keseluruhan cadangan pangan Provinsi Papua terlihat meningkat rata-rata 45,00% per tahun (lihat Gambar 2.5353).

Gambar 2.53. Ketersediaan Cadangan Pangan di Provinsi Papua (ribu ton)

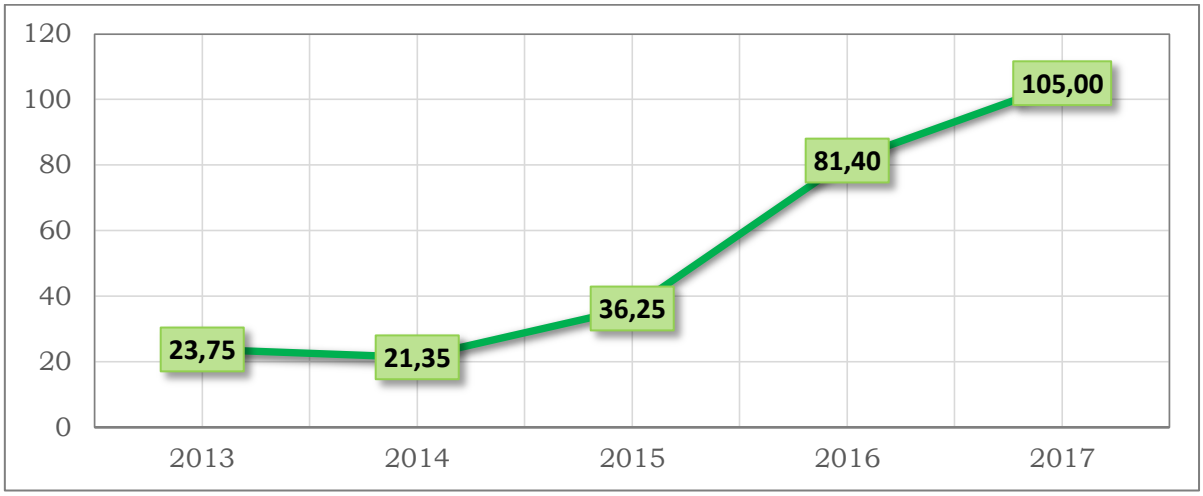

Sumber: Bappeda Papua dan Kementan RI, 2018 (data diolah)

Berdasarkan perkembangan cadangan pangan yang tersedia sepanjang tahun 2013-2017, dapat dikatakan Provinsi Papua selama ini tidak mengalami permasalahan dalam mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya beras. Tetapi untuk penyaluran kontrak beras ditemukan ada masalah, oleh karena umumnya selalu melewati tahun kontrak, yang akhirnya memberikan tambahan beban pemeliharaan beras pada Perum BULOG. Kemudian, terjadinya perubahan Harga Pembelian Pemerintah Beras pada tahun berjalan juga merupakan masalah bagi BKP Provinsi Papua, sehingga perlu penyesuaian harga atau pemotongan kuantum. Agar semua permasalahan ini tidak lagi menjadi penghambat dalam penyediaan stok pangan dimasa mendatang, perlu dibuatkan strategi kebijakan anggaran.

2.2.6.4. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan dalam Perekonomian

Secara agregat dalam komposisi PDRB Provinsi Papua, sektor pertanian terbagi atas 5 sub sektor mencakup sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 terlihat lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian sekitar 3,80% per tahun, yang dipacu oleh pertumbuhan sub sektor peternakan dan perkebunan, masing-masing mengalami percepatan yang tinggi di atas sektor pertanian secara menyeluruh yakni sebesar

6,17% untuk sektor perkebunan dan 7,05% per tahun pada sektor peternakan selama tahun 2013-2017 (lihat Tabel 2.177).

Tabel 2.17. Komposisi PDRB Sektor Pertanian dan Perkebunan Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2017 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan(%)
Tanaman Pangan	3,119.76	3,316.05	3,420.24	3,324.63	3,371.14	1.96
Tanaman Hortikultura	1,164.97	1,186.57	1,237.36	1,287.18	1,360.78	3.96
Tanaman Perkebunan	942.03	1,022.16	J072.03	1,130.43	1,197.14	6.17
Peternakan	939.76	1,032.78	1,103.78	1,167.66	1,234.08	7.05
Jasa Pertanian dan Perburuan	109.31	111.35	115.75	117.01	121.37	2.65
Total Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6,275.83	6,668.91	5,877.13	7,026.91	7,284.51	3.80
PDRB	117,118.82	121,391.23	130,311.60	142,221.09	148,823.63	6.17

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Meskipun pertumbuhan sub sektor tanaman pangan lebih lambat, namun kontribusinya terhadap perekonomian wilayah terlihat lebih baik dibandingkan sub sektor lainnya. Seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2.5452, kontribusi tanaman pangan kurang lebih mencapai 2,52% per tahun, jauh di atas sub sektor jasa pertanian dan perburuan yang tercatat paling rendah untuk kelompok sektor ini yakni sebesar 0,09% pertahun.

Gambar 2.54. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

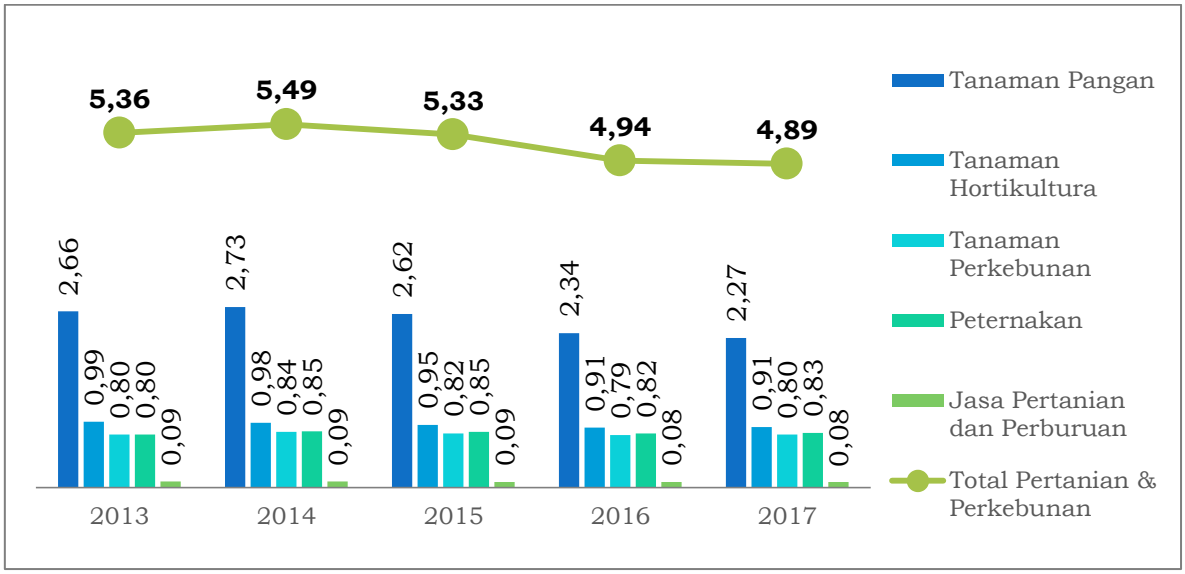

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Apabila diamati secara keseluruhan, peranan sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Papua rata-rata hanya mencapai 5,40% per tahun untuk periode 2013-2017, yang cenderung menurun setiap tahunnya dikarenakan adanya redistribusi nilai tambah ke sektor kontruksi yang mulai menonjol peranannya semenjak tahun 2013. Walaupun demikian, perubahan struktur ekonomi belum terjadi selama ini, kontribusi sektor pertambangan masih dominan.

2.2.6.5. Kontribusi sektor kehutanan terhadap Perekonomian Wilayah

Dalam komponen PDRB, sektor kehutanan meliputi kegiatan-kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa {fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Perkembangan nilai PDRB sektor kehutanan, beserta laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian wilayah (lihat Gambar 2.5555).

Gambar 2.55. Nilai PDRB, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

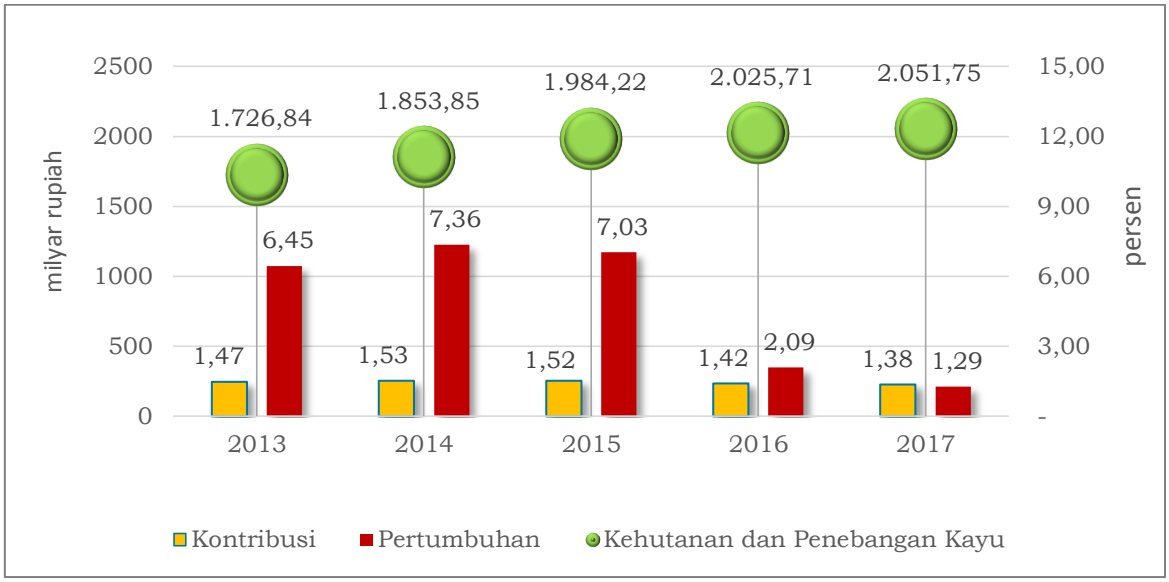

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Ada kecenderungan nilai PDRB sektor kehutanan terus mengalami kenaikan sepanjang tahun 2013-2017, namun dengan pertumbuhan yang melambat selama tahun 2015-2017, sehingga secara keseluruhan laju kenaikan PDRB sektor kehutanan hanya mencapai 4,84% per tahun. Kondisi ini akhirnya menyebabkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Papua mengalami penurunan yaitu dari 1,47% di tahun 2013 menjadi 1,38% pada tahun 2017, atau rata-rata turun sebesar 0,10% per tahun.

2.2.6.6. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Wilayah

Sejak periode 1970'an, yaitu ketika mulai diproduksinya tembaga di Kabupaten Mimika oleh PT. Freeport Indonesia (anak perusahaan Freeport-McMoRan Inc), komoditi tembaga mengalami masa kejayaan, sehingga dapat menempatkan nilai tambah sektor pertambangan nonmigas menguasai PDRB Provinsi Papua kurang lebih 60% per tahun. Seiring dengan berkembangnya pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya di Papua, secara perlahan kontribusi sektor pertambangan mengalami penurunan, namun tetap terbesar dan mendominasi struktur perekonomian wilayah.

Gambar 2.56. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

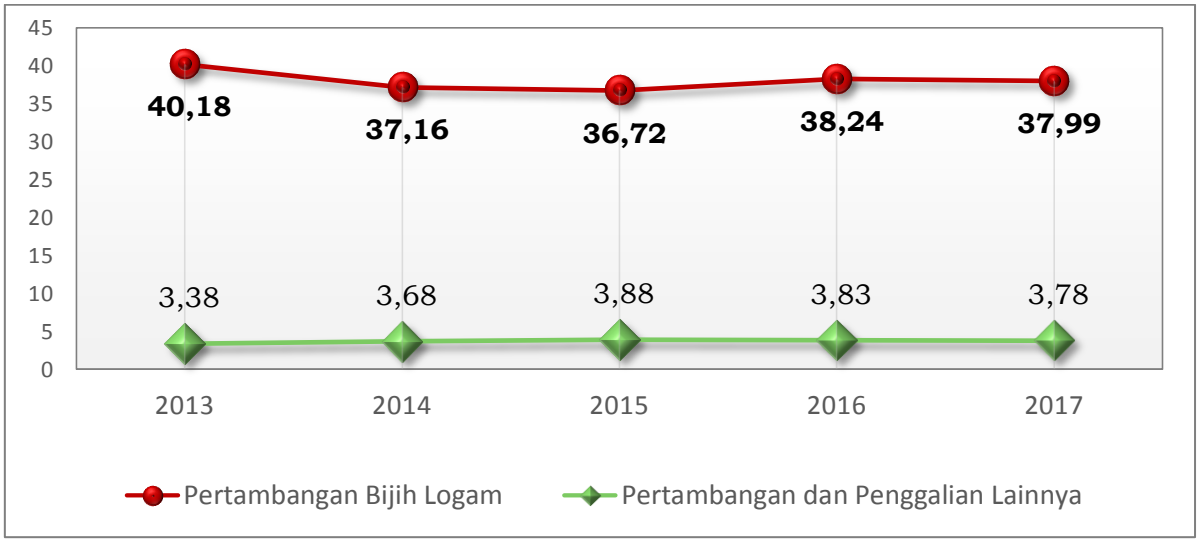

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Porsi sektor pertambangan dalam PDRB wilayah sangat dominan, misalkan untuk periode 2013-2017 rata-rata per tahun bisa mencapai 38,06% kontribusinya, dan berada jauh di atas kontribusi sektor industri manufaktor yang masih dibawah 2% per tahun, atau sektor kontruksi sekitar 10,64% per tahun. Keberadaan sektor pertambangan yang sangat dominan ini dapat dimanfaatkan guna lebih mensejahterakan masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan, yakni dengan cara meningkatkan potensi sektor pertambangan untuk menghasilkan *trickle down effect* bagi wilayah lain terutama pada Kabupaten Paniai, Intan Jaya dan Puncak Jaya yang terindikasi paling banyak penduduk miskinnya, dan *backward linkage effect* untuk sektor ekonomi lain seperti sektor pertanian yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi namun rendah kontribusinya terhadap PDRB.

2.2.6.7. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Wilayah

Pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri, tetapi banyak terkait dengan sektor lain. Untuk mengukur peranannya dalam perekonomian tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi melalui identifikasi semua sektor yang terkait dengan kegiatan ini. Beberapa sektor/sub sektor yang termuat dalam PDRB Provinsi Papua yang dapat diasumsikan terkait dengan kegiatan pariwisata antara lain : (1) Angkutan Darat; (2) Angkutan Laut; (3) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; (4) Angkutan Udara (5) Informasi dan Komunikasi; (6) Jasa Penunjang Angkutan; (7)

Penyediaan Akomodasi; (8) Penyediaan Makan Minum; dan (9) Jasa Pariwisata Lainnya.

Tabel 2.18. Komposisi PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Papua (milyar rupiah)

Sektor Terkait Pariwisata	2013	2014	2015	2016	2017
Angkutan Darat	1.811,96	1.995,86	2.197,09	2.375,71	2.513,90
Angkutan Laut	836,73	923,41	994,17	1.076,65	1.143,61
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	68,93	74,92	80,51	85,99	91,32
Angkutan Udara	1.636,56	1.821,65	2.007,30	2.170,86	2.301,37
Jasa Penunjang Angkutan	164,03	180,26	196,38	211,49	224,58
Penyediaan Akomodasi	429,60	492,55	531,77	567,72	601,92
Penyediaan Makan Minum	303,51	332,73	355,55	377,59	400,48
Jasa Pariwisata Lainnya	44,30	48,27	51,12	54,27	57,35
Total PDRB Sektor Pariwisata	5.295,62	5.869,65	6.413,89	6.920,28	7.334,53

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Jika melihat komposisi nilai PDRB sektor pariwisata yang disajikan pada Tabel 2.188 di atas, terindikasi kelompok sektor pariwisata yang paling berperan sekali dalam perekonomian wilayah Papua adalah sektor angkutan terutama angkutan laut, darat dan udara. Berikutnya sektor penyediaan akomodasi, dan sektor penyedia makan minum. Semua sektor ini paling dominan membentuk kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Papua sekitar 4,81% per tahun selama periode 2014-2017 yang relatif naik sekitar 0,03% per tahun. Dimana sampai pada tahun 2017 kontribusi sektor pariwisata tercatat sebesar 4,93%. Adapun pertumbuhannya cenderung melambat, dimana pada tahun 2014 bisa mencapai 10,84%, namun pada tahun 2017 mengecil menjadi 5,99%.

Gambar 2.57. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

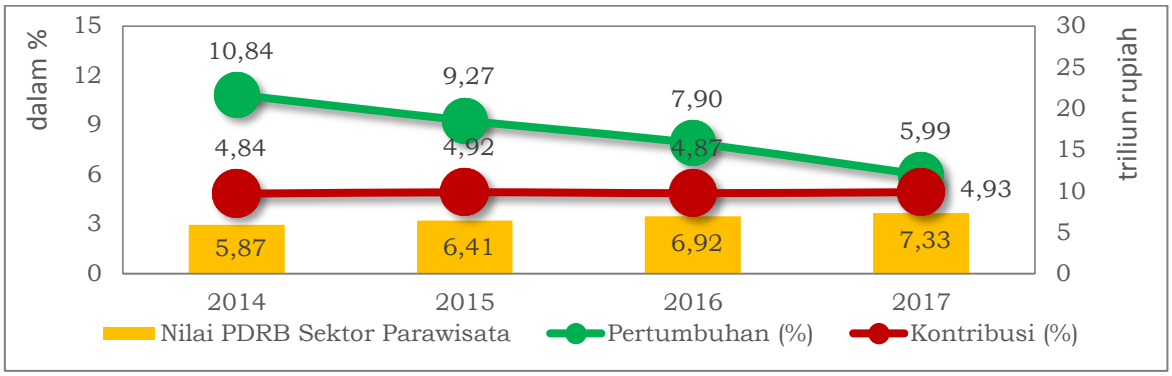

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Potensi sektor pariwisata di Provinsi Papua sangat berpeluang untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian wilayah. Hal ini tercermin dari keberadaan subyek pariwisatanya yang sangat potensial. Contohnya bila dilihat dari rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel, Provinsi Papua masuk dalam urutan ke-6 terbesar di Indonesia yaitu 47,84% per tahun (BPS RI, 2018). Kemudian untuk *home stay* atau rata-rata lama tamu menginap, Papua urutan ke-3 terbesar setelah Bali dan Papua Barat, yakni rata-rata selama 2,7 hari (BPS RI, 2018). Dengan peluang seperti ini maka potensi ekowisata di Provinsi Papua sangatlah besar. Destinasi pariwisata perlu ditingkatkan baik itu dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya. Dalam hal ini membangun infrastruktur pariwisata merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam pembangunan kepariwisataan di Provinsi Papua dengan tetap memperhatikan peran serta kelembagaan adat dan lingkungan sosial budaya.

2.2.6.8. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Perekonomian

Pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh nelayan rakyat maupun perusahaan perikanan (kecil dan menengah) selama ini berhasil menempatkan nilai tambah sektor perikanan pada posisi ke-5 terbesar dalam komposisi PDRB Provinsi Papua. Dimana selama tahun 2013-2017 tercatat rata-rata nilai PDRB sektor perikanan Provinsi Papua sekitar Rp. 6.194,00 milyar per tahun, dengan kecederungannya yang sangat berfluktuatif. Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perikanan kurang lebih 4,46% per tahun, dengan kontribusinya terhadap total PDRB Provinsi Papua mencapai 4,68% per tahun (lihat Gambar 2.588).

Nilai tambah yang dihasilkan sektor perikanan ini masih berpeluang untuk ditingkatkan lebih besar setiap tahunnya di masa mendatang. Berdasarkan data yang ada, potensi perikanan yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan selama ini baru mencapai 15,30% dari potensi perikanan yang ada di WPP Papua. Beberapa kendala yang menjadi tantangan untuk mengoptimalisasi potensi perikanan laut di Provinsi Papua selama ini antara lain : (1) masih banyak nelayan yang menggunakan perahu dayung tanpa bermotor, (2) daerah penangkapan ikan (*fishing gorund*) tidak jauh, (3) alat penangkapan ikan dan alat pengolahan hasil ikan masih tradisional, (4) kurangnya modal nelayan, dan (5) rendahnya investasi di sektor perikanan.

Gambar 2.58. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

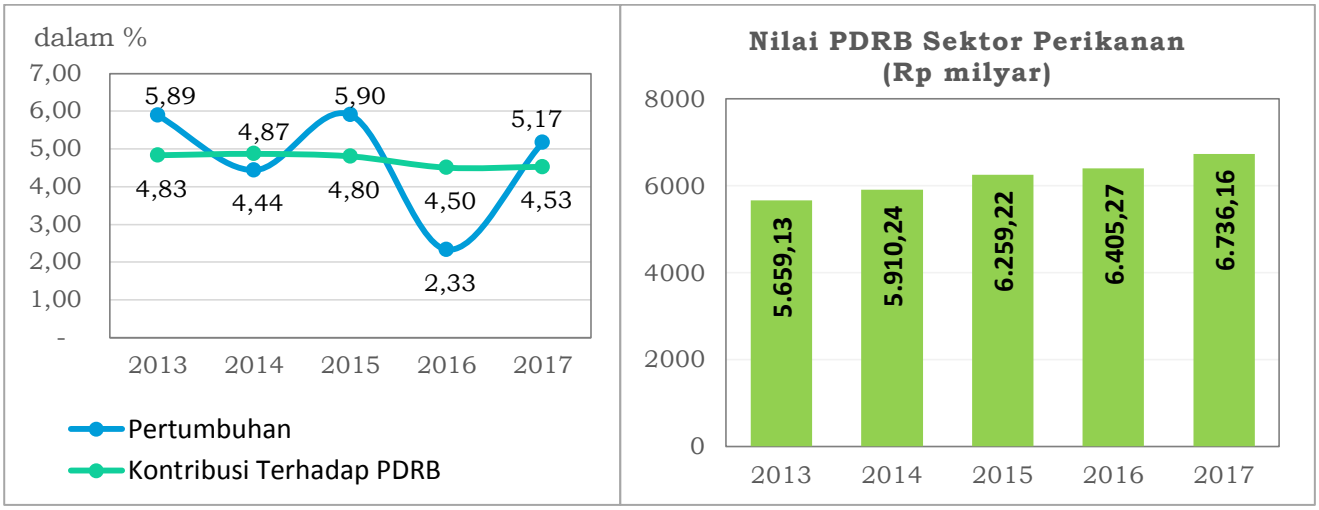

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.2.6.9. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap Perekonomian Wilayah

Sektor yang dimotori oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran ini selama tahun 2013-2017 rata-rata mampu memberi kontribusi terhadap PDRB Provinsi Papua sekitar 7,92% per tahun, dengan kecenderungannya yang terus meningkat. Kontribusi yang paling besar diberikan oleh perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor, dimana untuk periode 2013-2017 bisa mencapai 6,58% per tahun, yang berada di posisi ke-4 terbesar. Sedangkan kontribusi dari sub sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reperasinya, sangat rendah, dengan rata-rata per tahun sekitar 1,34% (lihat Gambar 2.599).

Gambar 2.59. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)

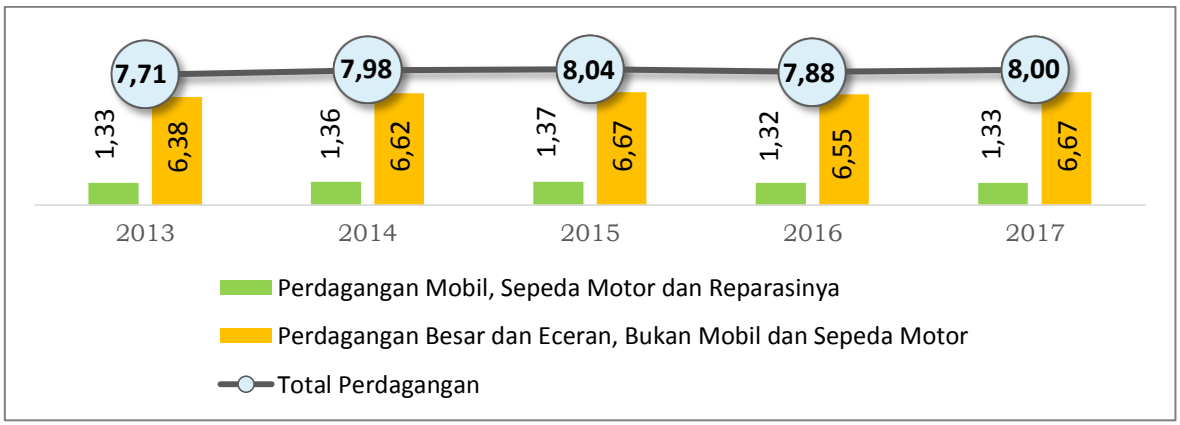

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sektor perdagangan sangat potensial untuk terus dikembangkan, karena tanpa adanya sektor ini dipastikan perekonomian wilayah Papua tidak akan bergerak. Selain dapat memberikan nilai tambah yang tinggi, daya serapnya terhadap kesempatan berusaha juga sangat potensial. Sektor ini paling banyak memberikan peluang bergeraknya lapangan usaha informal yang selama ini dilaksanakan pengusaha golongan ekonomi lemah, sehingga upaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar penduduk dapat diwujudkan melalui pengembangan sektor perdagangan. Termasuk juga dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya, karena *backward linkage* sektor perdagangan dapat diarahkan ke sektor-sektor lainnya dalam perekonomian wilayah.

2.2.6.10. Kontribusi sektor Industri terhadap Perekonomian Wilayah

Peranan sektor industri dalam perekonomian wilayah Provinsi Papua selama ini masih sangat rendah, tidak lebih dari 2% kontribusinya terhadap PDRB setiap tahun, yang cenderung stagnan sepanjang periode 2013-2017. Hanya ada 2 sub sektor industri yang paling berperan dalam perekonomian wilayah Papua, yakni industri makanan dan minuman, serta industri kayu. Kedua sub sektor tersebut menguasai pangsa industri kurang lebih 83% per tahun sepanjang periode 2013-2017, serta memberi kontribusi terhadap perekonomian wilayah Papua sebesar 1,64% untuk periode yang sama (lihat Tabel 2.199).

Tabel 2.19. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)

Kelompok Industri	2013	2014	2015	2016	2017
Industri Pengolahan	1.96	2.06	1.99	1.91	1.94
Industri Makanan dan minuman	0.79	0.83	0.80	0.77	0.80
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.85	0.89	0.86	0.80	0.79
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Industri Barang Galian bukan Logam	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Industri Alat Angkutan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Industri Furnitur	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dalam upaya mengurangi ketergantungan barang-barang produksi dari luar provinsi, terutama Jawa dan Sulawesi, maka strategi industrialisasi subtitusi impor merupakan pilihan yang paling tepat. Khususnya di tahap awal adalah pengembangan industri makanan dan minuman, seperti tepung sagu, pasta ubi, mie instan, ikan kaleng, butiran coklat, beras organik, sirup buah merah, minyak goreng, dan sebagainya. Agar hal ini dapat terlaksana optimal, maka berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan industri di Provinsi Papua selama ini harus segera dituntaskan antara lain yang paling utama adalah: (1) minimnya sarana dan prasarana pendukung industri, (2) kualitas tenaga kerja yang masih rendah, (3) tingginya biaya transaksi (transportasi, administrasi dan lobi), (4) tingkat kerawanan keamanan yang tinggi, dan (5) rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Papua. Semua permasalahan ini harus diselesaikan secara holistik-integratif, terfokus dan spasial, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Agar dapat terus berkelanjutan, pengembangan *Eco-Industry* atau industri ramah lingkungan dapat dijadikan sebagai pioner bagi pengembangan agroindustri di Provinsi Papua masa mendatang. Mengadopsi strategi yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian (2017), maka strategi pembangunan industri yang berkelanjutan di Provinsi Papua harus difokuskan pada peningkatan nilai tambah melalui inovasi dan pengembangan teknologi industri, pengembangan pola produksi yang dapat mengurangi pemborosan sumber daya, dan mengintegrasikan industri daerah dalam *Global Value Chain* (GVC) untuk menjamin ketersediaan sumber daya industri dan pasar bagi industri nasional.

2.2.6.11. Kontribusi Sektoral Terhadap Perekonomian Wilayah Kabupaten/Kota

Secara absolut dan spasial, peranan sektoral dalam perekonomian wilayah jika ditelusuri berdasarkan potensi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua terpetakan ada 23 daerah yang memiliki kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian wilayahnya di atas 25%, dimana 12 kabupaten diantaranya memiliki peranan sektor pertanian yang sangat dominan yaitu Kabupaten, Merauke, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Boven Digoel, Tolikara, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Nduga dan Lanny Jaya. Ke-12 kabupaten ini dapat dikatakan mempunyai struktur ekonomi masing-masing berada pada sektor pertanian, karena

kontribusinya terhadap perekonomian wilayah rata-rata mencapai 27% (lihat Tabel 2.20).

Tabel 2.20. Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Se Papua Tahun 2017 (%)

Kabupaten Kota	Lapangan Usaha																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Merauke	27,06	1,68	4,04	0,06	0,14	14,39	13,93	7,86	1,31	7,82	2,33	2,88	1,56	9,47	2,44	1,80	1,23	100,00
Jayawijaya	14,60	1,42	2,18	0,08	0,04	12,49	16,26	16,90	0,68	6,88	1,49	6,35	2,06	12,04	2,89	2,22	1,42	100,00
Jayapura	22,18	2,07	4,91	0,04	0,18	13,83	12,42	15,81	1,37	5,51	1,35	4,61	2,18	8,21	2,13	1,53	1,66	100,00
Nabire	17,90	22,76	1,57	0,06	0,05	11,18	16,81	5,88	0,48	2,83	2,01	2,93	1,04	9,51	2,13	1,61	1,26	100,00
Kepulauan Yapen	23,25	0,58	4,05	0,07	0,14	6,49	17,68	9,35	0,84	3,60	3,19	5,99	1,43	14,72	3,73	2,16	2,73	100,00
Biak Numfor	22,32	0,90	3,78	0,22	0,15	6,37	15,70	10,46	0,79	4,05	5,02	4,71	2,40	17,37	2,85	1,81	1,11	100,00
Paniai	10,39	40,89	0,37	0,00	0,01	25,19	3,28	2,26	0,20	0,58	0,19	1,18	0,32	11,57	1,68	1,23	0,67	100,00
Puncak Jaya	27,16	1,10	0,53	0,01	0,00	28,34	7,27	2,33	0,22	0,78	0,16	1,97	0,20	21,30	3,50	3,83	1,31	100,00
Mimika	1,80	87,00	0,15	0,01	0,01	2,33	2,14	1,12	0,27	1,73	0,44	0,62	0,43	1,39	0,18	0,16	0,23	100,00
Boven Digoel	26,36	1,30	26,38	0,00	0,00	23,09	5,31	1,71	0,22	0,30	0,83	1,30	0,17	8,94	1,95	1,49	0,65	100,00
Mappi	25,45	0,34	0,70	0,01	0,00	32,48	6,66	2,10	0,23	0,53	0,70	1,65	0,10	21,98	3,69	2,45	0,93	100,00
Asmat	22,58	0,02	2,49	0,01	0,05	28,41	6,49	2,34	0,27	0,61	0,21	1,90	0,55	21,36	7,91	3,74	1,07	100,00
Yahukimo	23,44	0,85	0,57	0,01	0,00	21,91	5,28	4,76	0,31	1,02	0,36	3,29	0,27	27,93	6,09	2,54	1,36	100,00
Pegunungan Bintang	22,44	1,05	0,11	0,01	0,00	28,82	4,23	3,18	0,32	0,72	1,16	1,34	0,24	29,66	3,59	2,08	1,05	100,00
Tolikara	27,62	0,47	0,22	0,01	0,00	19,09	5,93	5,54	0,32	1,13	0,14	2,32	0,21	26,29	5,78	3,77	1,15	100,00
Sarmi	34,18	1,61	2,26	0,04	0,07	17,48	9,05	6,10	0,61	2,81	1,12	2,95	0,56	14,31	3,17	2,16	1,54	100,00
Keerom	33,62	1,08	5,53	0,04	0,00	27,03	7,46	0,97	0,91	1,03	1,20	1,54	0,05	13,49	2,79	2,11	1,17	100,00
Waropen	28,27	0,76	1,14	0,03	0,01	28,16	6,23	1,81	0,21	0,48	0,50	5,13	0,26	17,73	6,11	1,40	1,77	100,00
Supiori	29,39	0,35	0,59	0,07	0,00	26,96	3,82	0,30	0,23	0,61	0,95	2,56	0,08	20,90	6,45	3,78	2,96	100,00
Mamberamo Raya	22,68	2,29	0,29	0,00	0,00	19,68	9,89	3,09	0,63	0,00	0,09	1,71	0,17	24,87	7,83	4,21	2,58	100,00
Nduga	26,08	0,36	0,10	0,00	0,00	23,75	11,38	1,05	0,07	0,01	0,00	2,85	0,12	21,95	5,78	4,16	2,36	100,00

Kabupaten Kota	Lapangan Usaha																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Lanny Jaya	22,72	1,85	0,07	0,00	0,00	21,98	9,98	3,27	0,06	0,00	0,00	4,21	0,08	22,65	6,67	5,14	1,31	100,00
Mamberamo Tengah	17,28	1,34	0,09	0,00	0,00	23,84	10,10	5,54	0,02	0,01	0,05	2,05	0,11	28,52	5,32	3,64	2,08	100,00
Yalimo	27,45	0,51	0,11	0,00	0,00	18,20	11,19	2,79	0,08	0,01	0,00	1,10	0,09	28,04	4,76	3,21	2,47	100,00
Puncak	22,14	0,12	0,02	0,01	0,00	28,32	10,79	0,57	0,22	0,14	0,04	2,35	0,18	33,90	0,50	0,45	0,25	100,00
Dogiyai	28,62	2,75	0,06	0,00	0,00	10,40	11,68	0,99	0,29	0,45	0,00	9,81	0,00	31,66	0,68	2,23	0,38	100,00
Intan Jaya	25,22	0,36	0,28	0,00	0,00	33,32	7,06	0,92	0,02	0,01	0,00	0,33	0,08	26,00	3,08	1,88	1,45	100,00
Deiyai	25,13	1,06	0,33	0,02	0,00	31,39	7,86	0,73	0,05	0,04	0,16	1,63	0,07	23,31	3,94	3,28	1,01	100,00
Kota Jayapura	5,59	0,38	2,59	0,06	0,14	20,04	15,94	5,25	2,03	10,31	4,15	5,27	3,32	14,07	4,51	3,93	2,39	100,00
Jumlah Kabupaten & Kota	**10,98**	**41,73**	**1,96**	**0,03**	**0,05**	**10,98**	**7,85**	**4,22**	**0,69**	**3,60**	**1,38**	**2,39**	**1,10**	**8,57**	**1,99**	**1,47**	**1,00**	**100,00**
Papua	**10,80**	**41,78**	**1,94**	**0,03**	**0,05**	**10,90**	**8,00**	**4,24**	**0,67**	**3,56**	**1,39**	**2,36**	**1,11**	**8,56**	**2,06**	**1,51**	**1,03**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Kode Lapangan Usaha

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya

Untuk kabupaten yang lain, meskipun kontribusi sektor pertaniannya diatas 25%, namun bukan yang paling dominan dalam perekonomian wilayah, sehingga struktur ekonomi daerah-daerah tersebut tidak pada sektor pertanian. Sebagai contoh di Kabupaten Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Intan Jaya dan Deyiai yang memiliki kontribusi sektor pertanian lebih dari 25%, akan tetapi struktur ekonominya adalah sektor kontruksi, oleh karena peranan sektor kontruksi terlihat yang paling besar, diatas 30%.

Termasuk juga untuk Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak dan Dogiyai, struktur ekonominya bukan pada sektor pertanian, akan tetapi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Pada umumnya 3 (tiga) sektor yang telah diidentifikasi di atas, yaitu pertanian, kontruksi, dan adminitrasi pemerintahan mendominasi perekonomian wilayah hampir seluruhan kabupaten di Provinsi Papua, terkecuali di Kabupaten Mimika sektor pertambangan terlihat yang menguasai pangsa PDRB, dan menjadi penyebab adanya ketimpangan sektoral yang begitu tinggi di Kabupaten Mimika, serta di Provinsi Papua secara keseluruhan.

Sektor industri sepertinya belum banyak berperan bagi perekonomian wilayah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, terkecuali untuk Kabupaten Boven Digoel, sektor industri tampak sudah menjadi *prime mover* ekonomi wilayah, dengan kontribusinya mencapai 26,38% per tahun. Andalan sektor industri Kabupaten Boven Digul selama ini adalah pengolahan kayu dan kelapa sawit, yang tampaknya masih perlu diperbaiki strukturnya, terutama dalam kaitan mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua, sebagaimana yang ditunjukan pada Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2013-2017 sebesar 2,27%. Dimana pada

tahun 2017 tercatat pengeluaran per kapita rumahtangga di Papua kurang lebih sebesar Rp. 7 juta (lihat Gambar 2.60).

Gambar 2.60. Pengeluaran Per Kapita Riil di Provinsi Papua (juta rupiah)

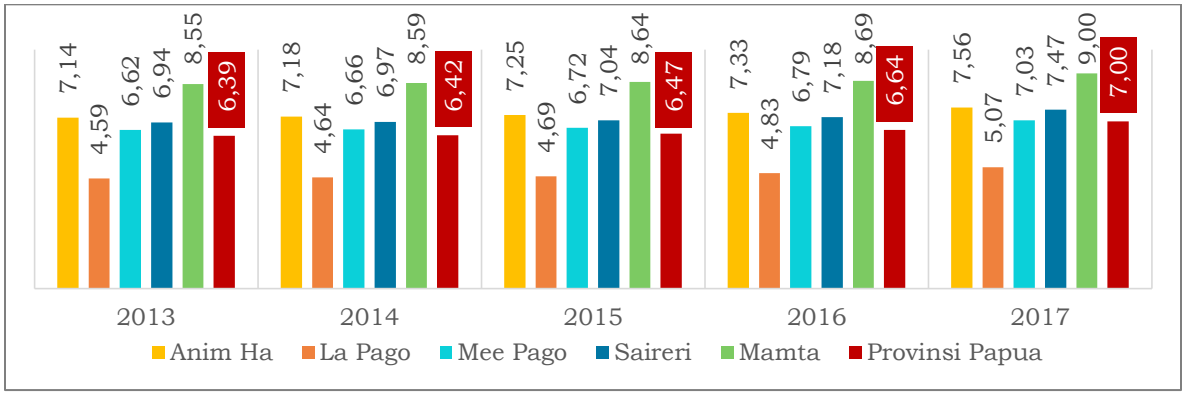

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Provinsi Papua dialokasikan pada pengeluaran makanan, dengan porsinya rata-rata sebesar 58,28% per tahun sepanjang periode 2013-2017. Berarti sisanya sebesar 41,72% dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan nonmakanan (lihat Gambar 2.61).

Gambar 2.61. Struktur Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Papua

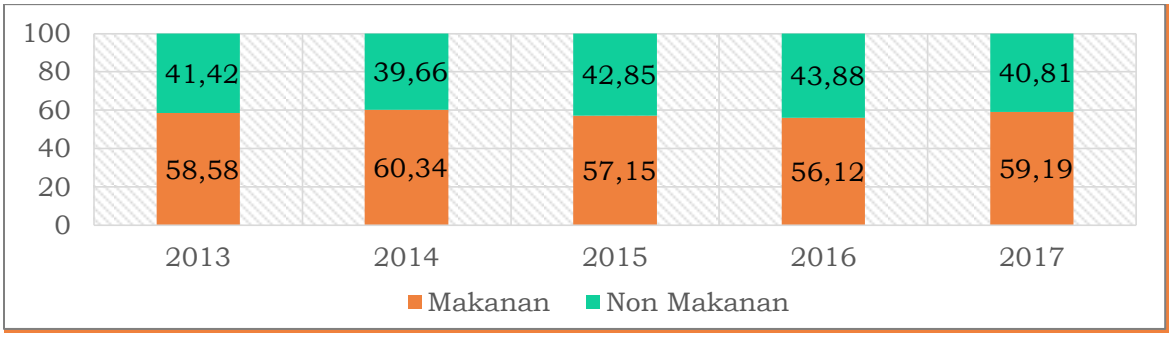

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Pola konsumsi penduduk Papua untuk makanan lebih dominan dibelanjakan pada makanan dan minuman jadi (15,54%). Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein lebih besar dialokasikan pada umbi-umbian dan padi-padian, masing-masing sebesar 13,61% dan 10,06%. Serta untuk pemenuhan vitamin, lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, dengan alokasi pengeluarannya sebesar 12,68%. Adapun untuk

nonmakanan, pengeluaran masyarakat lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumahtangga, proporsinya bisa mencapai 62,80% dari total pengeluaran. Menyusul kemudian untuk aneka barang sebesar 21,28%. Paling rendah untuk keperluan pesta dan upacara, sebesar 2,26% (lihat Gambar 2.6262).

Gambar 2.62. Komposisi Pengeluaran Per Kapita Papua Tahun 2017 (%)

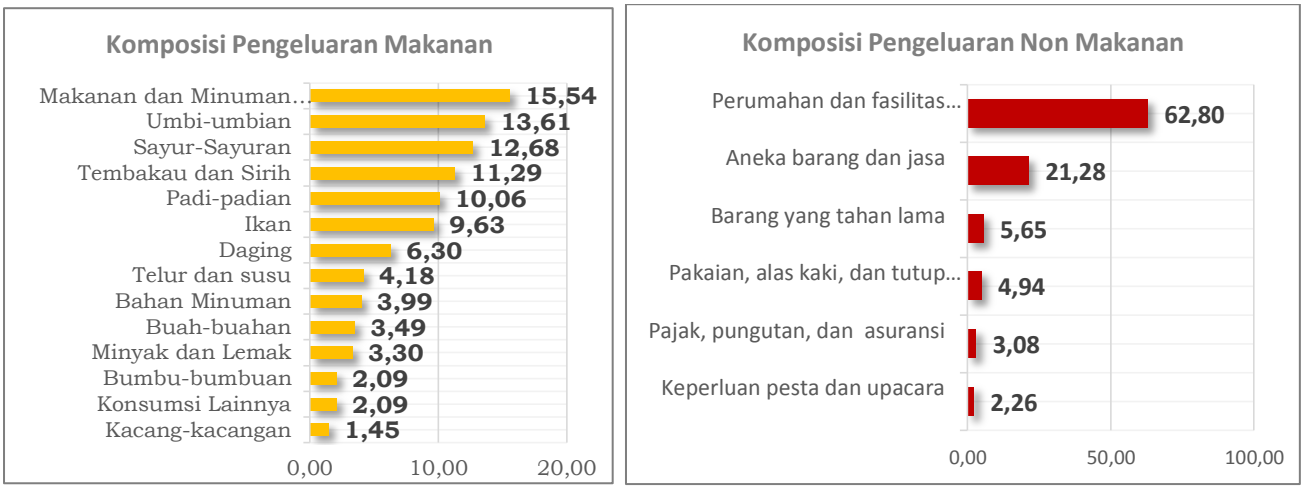

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selanjutnya bila dilihat menurut kabupaten/kota, sepanjang tahun 2013-2017 ada 2 (dua) wilayah yang terindikasi mempunyai pengeluaran per kapita paling tinggi di Provinsi Papua, yakni Kota Jayapura dengan rata-rata sebesar Rp. 14.322 ribu per tahun, dan Kabupaten Mimika sebesar Rp. 11.087 ribu per tahun. Sedangkan yang terendah selama itu adalah Kabupaten Nduga hanya sebesar Rp. 3.694 ribu per tahun.

Gambar 2.63. Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017 (ribu rupiah)

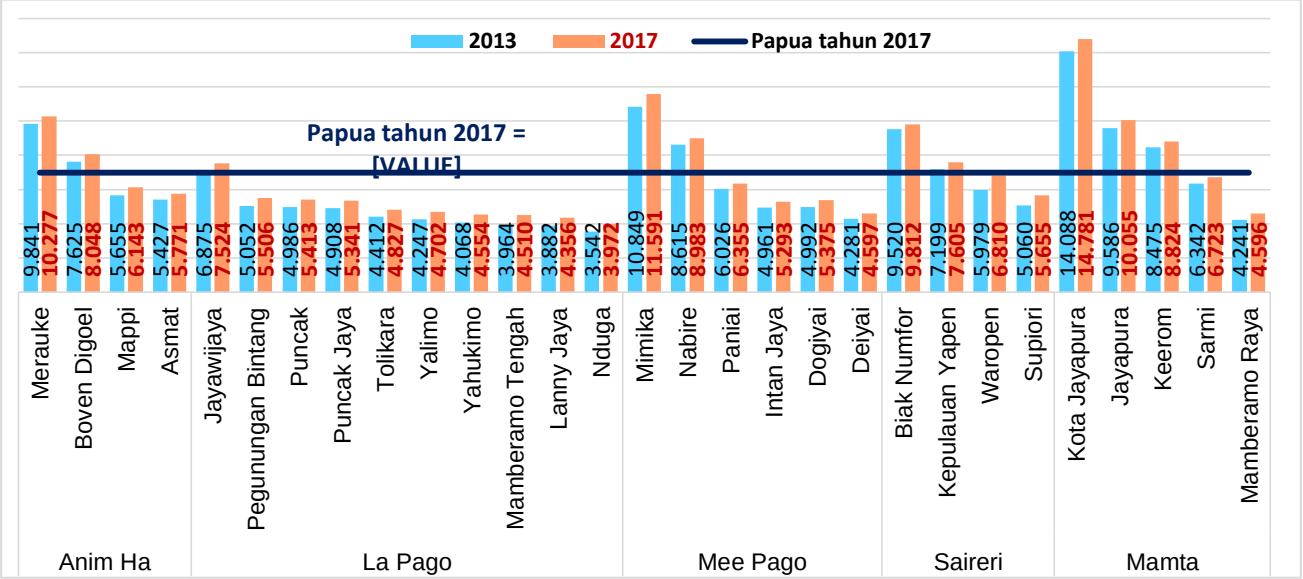

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sementara jika diamati per wilayah adat, terpetakan pada wilayah adat Anim Ha yang paling tinggi pengeluaran per kapita di tahun 2017 adalah Kabupaten Merauke yakni sebesar Rp. 9.994 ribu, kemudian untuk La Pago adalah Kabupaten Jayawijaya, sebesar Rp. 7.524 ribu, Mee Pago adalah Kabupaten Mimika sebesar Rp. 11.591 ribu, Saireri adalah Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 9.812 ribu, dan di Mamta adalah Kota Jayapura sebesar Rp. 14.781 ribu.

2.3.2. Nilai Tukar Petani

NTP (Nilai Tukar Pertani) di Provinsi Papua sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang serta jasa yang dikonsumsi petani. Pada Gambar 2.6464 diuraikan perkembangan NTP Provinsi Papua selama tahun 2013–2017.

Gambar 2.64. Nilai Tukar Petani di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

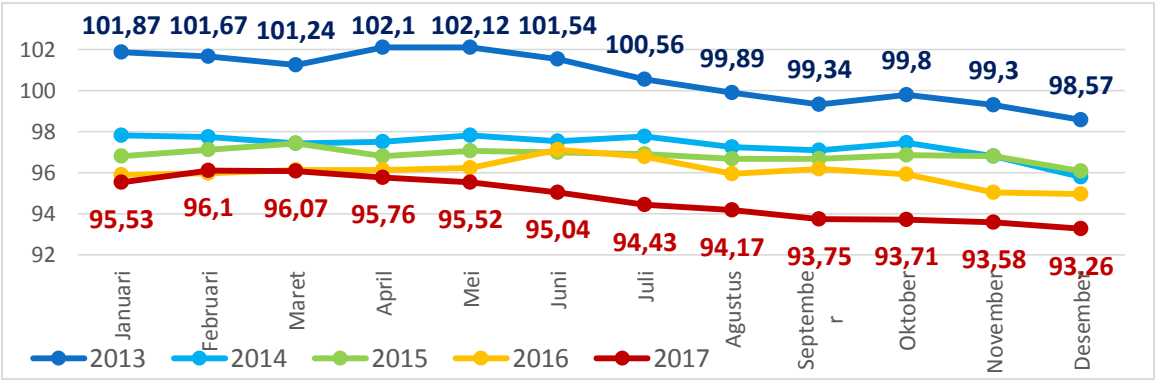

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, NTP Papua menunjukkan kecenderungan yang terus menerus turun, hingga sampai Desember 2017 hanya sebesar 93,26%, padahal Januari 2013 bisa mencapai 101,87%. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa kondisi petani di Papua mengalami defisit terus menerus, mulai Agustus 2013, yakni kenaikan harga produksinya lebih rendah dibandingkan kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani mengalami penurunan lebih jauh dari pengeluarannya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan para petani semakin berkurang dibanding tingkat kesejahteraan sebelumnya.

Permasalahan rendahnya NTP antara lain disebabkan oleh (1) skala usaha budi daya pertanian yang relatif kecil; (2) harga komoditas berfluktuasi, terutama pada saat panen raya; (3) pembangunan infrastruktur yang belum merata sehingga menyebabkan harga jual rendah dan harga kebutuhan lain tinggi; (4) aplikasi teknologi yang belum optimal, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya permodalan petani yang mengakibatkan produktivitas rendah (5) daya saing komoditas pertanian relatif rendah; (6) laju pertumbuhan harga konsumsi dan harga sarana produksi lebih tinggi dari laju pertumbuhan harga komoditas; (7) dari sisi konsumsi rumah tangga, pertumbuhan pengeluaran untuk bahan makanan, makanan jadi, perumahan dan sandang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan. Akibat berbagai masalah ini, membuat NTP di Provinsi Papua selama ini paling rendah di Indonesia bersama Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Aceh.

Gambar 2.65. Nilai Tukar Petani di Indonesia pada Desember 2017 (%)

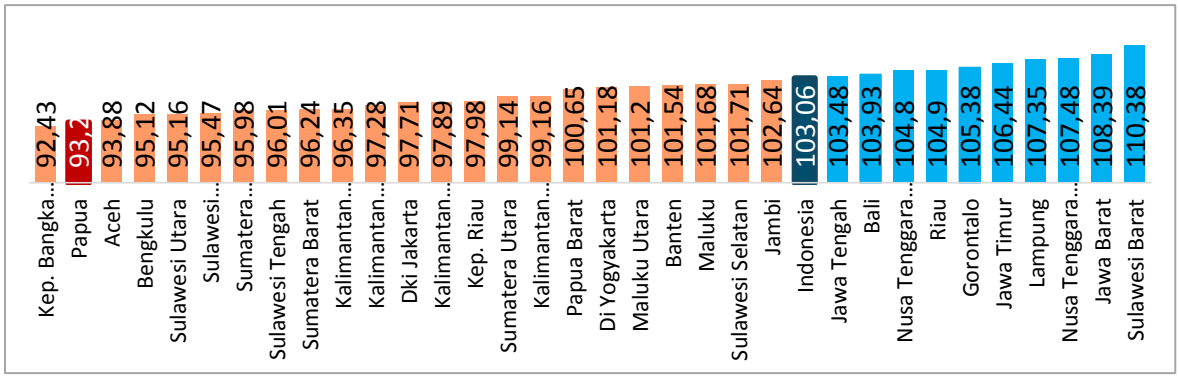

Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Apabila diamati berdasarkan sub usaha pertanian dan perikanan, terlihat bahwa nelayan di Provinsi Papua lebih sejahtera dibandingkan petani tanaman pangan, perkebunan, hortikulura, peternakan dan pembudidayaan ikan. Hal ini tergambarkan dari perkembangan NTN (Nilai Tukar Nelayan) yang selalu lebih tinggi dari angka 100 selama tahun 2013-2017, dengan kecenderungannya yang terus meningkat, dimana pada tahun 2017 tercatat NTN Provinsi Papua sebesar 103,75%.

Gambar 2.66. Nilai Tukar Petani dan Nelayan Provinsi Papua (%)

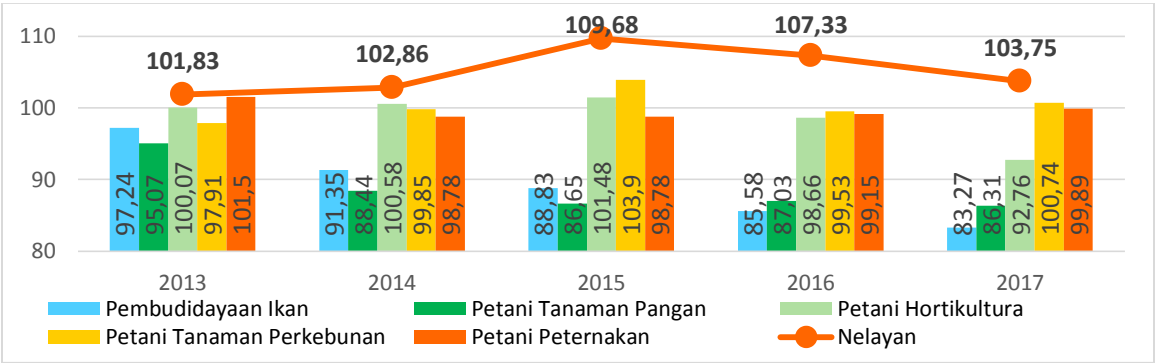

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Hal ini jauh berbeda dengan usaha pembudidayaan ikan, yang dikenal juga dengan sebutan petani tambak ikan, terlihat yang paling rendah tingkat kesejahteraannya diantara semua usaha pertanian dan perikanan. Untuk periode yang sama, NTP petani tambak ikan terus dibawah angka 100, bahkan cenderung menurun, dimana pada tahun 2017 NTP petani tambak hanya 83,27% turun 13,79% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 97,24%. Hal yang sama juga terjadi untuk petani tanaman pangan, selain mengalami

penurunan setiap tahun, juga nilainya paling rendah, serta jauh dibawah 100%, rata-rata NTP tanaman pangan sebesar 88,70%.

2.3.3. Produktivitas total daerah

Ukuran produktifitas daerah dapat menvisualisasikan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dalam menghasilkan satu satuan nilai tambah atau PDRB. Perkembangan produktivitas daerah Provinsi Papua selama tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,85% per tahun, serta rata-rata produktifitas Rp. 79,53 juta per tenaga kerja per tahun. Lihat Tabel 2.211 di bawah ini.

Tabel 2.21. Produktifitas Total Daerah per Tenaga Kerja (juta rupiah/orang)

Tahun	Pertanian	Industri	Jasa	Produktifitas Total Daerah
2013	11.47	634.28	139.71	71.66
2014	12.64	701.03	136.69	75.05
2015	12.29	722.52	166.00	77.92
2016	14.11	676.55	134.80	85.44
2017	13.82	666.01	154.53	87.59
Rata-rata Produktifitas Per tahun	12.86	680.08	146.35	79.53
Rata-rata Pertumbuhan (%)	4.77	1.23	2.55	2.85

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Oleh karena pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian pada umumnya sangat rendah (SD/tidak tamat SD/tidak sekolah) menyebabkan produktifitas daerah di sektor tersebut paling rendah diantara semua sektor. Rata-rata per tahun selama periode 2013-2017 hanya mencapai Rp. 12,86 juta per tenaga kerja per tahun. Beda dengan sektor industri yang mencapai Rp. 680,08 juta per tenaga kerja per tahun, dan sektor jasa sebesar Rp. 146,35 juta per tenaga kerja per tahun. Namun demikian, pertumbuhan produktifitas daerah di sektor pertanian tampak lebih tinggi dibandingkan industri dan jasa. Tingkat pertumbuhan produktifitas daerah sektor pertanian bisa mencapai 4,77% per tahun sepanjang tahun 2013-2017, jauh di atas sektor industri sebesar 1,25% per tahun dan sektor jasa sebesar 2,85% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi di sektor pertanian lebih cepat dibandingkan sektor industri dan jasa.

2.3.4. Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB

Sebagai suatu wilayah yang terbuka, aktifitas perdagangan ekspor dan impor Provinsi Papua terlihat sangat berfluktuatif. Hal ini ditandai dengan variasi perubahan Net Ekspor (selisih ekspor dan impor) yang naik turun selama periode 2013-2017. Sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 2.67, net ekspor Provinsi Papua mengalami defisit sebanyak 2 kali, yakni di tahun 2013 sebesar Rp. 11,59 triliun, dan tahun 2015 sebesar Rp. 1,11 triliun. Namun untuk tahun 2014, 2016 dan 2017 semuanya mengalami surplus, dimana yang terbesar terjadi pada tahun 2014 mencapai Rp. 6,02 triliun.

Melalui perbandingan antara net ekspor dengan PDRB dapat ditemukan bagaimana daya saing ekonomi suatu daerah jika dihadapkan pada kinerja perdagangannya. Terlihat disini daya saing ekonomi Provinsi Papua masih sangat rendah yang diindikasikan rasio net ekspor PDRB selama periode 2013-2017 rata-rata dibawah batas minimum yaitu -0,42%.

Gambar 2.67. Net Ekspor Daerah dan Rasionya Terhadap PDRB

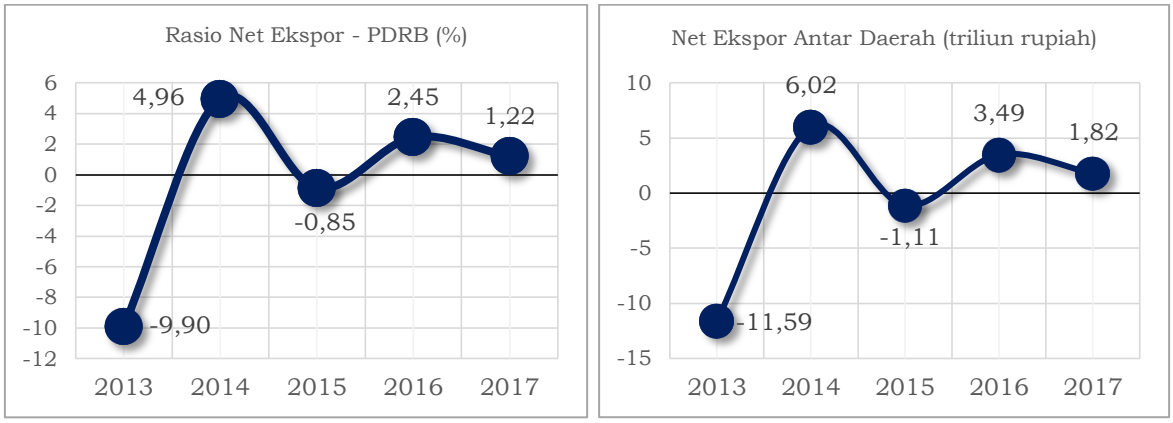

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Ketergantungan perekonomian terhadap satu sektor saja yakni sektor pertambangan membuat perdagangan regional Provinsi Papua belum stabil. Tinggi rendahnya net ekspor sangat bergantung pada kinerja produksi di sektor pertambangan yakni bijih tembaga dan emas yang dikelola oleh PT. Freeport Indonesia. Fenomena yang terjadi di tahun 2013 dan 2015 ketika ada penurunan ekspor tembaga secara drastis oleh PT. Freeport Indonesia membuktikan hal tersebut. Rasio net ekspor PDRB Provinsi Papua langsung turun sampai ke titik nadir -9,90% tahun 2013 dan -0,85% tahun 2015. Untuk itu,

memang sudah sepatutnya perekonomian daerah tidak hanya ditopang oleh satu atau dua sektor saja. Membangun dan mengembangkan industri subtitusi impor dan promosi ekspor berbasis pertanian dan berkelanjutan menjadi salah satu jalan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing kinerja perdagangan dimasa mendatang.

2.3.5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR

Ketersediaan dana perbankan dalam upaya meningkatkan daya saing investasi regional sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kinerja perbankan di suatu daerah perlu dijaga dan ditingkatkan agar tidak kolaps (jatuh). Terkait dengan hal ini, salah satu indikator yang dapat menunjukan dengan baik bagaimana kondisi kinerja perbankan suatu daerah adalah rasio pinjaman terhadap simpanan di bank, atau dalam konteks perbankan disebut *Loan to Deposi Ratio* disingkat LDR, meskipun mulai tahun 2015 cara perhitungan LDR telah mengalami perubahan. Sebagian kalangkan perbankan mengatakan batas aman LDR adalah 85%, atau toleransinya antara 85% - 100%.

Tabel 2.22. Simpanan dan Kredit yang Disalurkan Sektor Perbankan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Tahun	Indikator Perbankan	Kelompok Bank			Total Bank
		Bank Pemerintah	Bank Swasta Nasional	Bank Perkreditan Rakyat	
2013	Kredit (juta rupiah)	15,119,851	3,260,913	451,170	18,831,934
	Simpanan (juta rupiah)	21,977,198	6,479,949	224,667	28,681,814
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	68.80	50.32	200.82	65.66
2014	Kredit (juta rupiah)	17,318,451	3,210,030	-	20,528,481
	Simpanan (juta rupiah)	26,420,175	7,296,942	251	33,717,117
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	65.55	43.99	-	60.88
2015	Kredit (juta rupiah)	18,863,362	3,395,402	778	22,259,542
	Simpanan (juta rupiah)	29,104,180	7,128,072	294	36,232,546
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	64.81	47.63	264.63	61.44
2016	Kredit (juta rupiah)	21,145,894	3,171,884	857,702	25,175,480
	Simpanan (juta rupiah)	29,104,180	7,128,072	345,672	36,577,924
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	72.66	44.50	248.13	68.83
2017	Kredit (juta rupiah)	23,193,087	3,382,726	976,556	27,552,369
	Simpanan (juta rupiah)	31,099,076	6,846,209	495,431	38,440,716
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	74.58	49.41	197.11	71.67

Sumber: Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat, 2018 (data diolah)

Perkembangan LDR di Provinsi Papua jika diperhatikan secara keseluruhan masih sangat aman, karena berada di bawah batas 85%, dengan kecenderungan yang terus mengalami peningkatan, yang menandakan semakin banyak kredit yang disalurkan. Pada tahun 2013, posisi LDR perbankan di Provinsi Papua sebesar 65,66%, kemudian di tahun 2017 naik menjadi 71,67%. Sehingga rata-rata LDR di Provinsi Papua selama periode tahun 2013-2017 adalah 65,70% per tahun.

Jika diperhatikan menurut jenis bank, terpetakan bahwa semua bank pemerintah dan swasta di Provinsi Papua dalam posisi LDR yang sangat aman, rata-rata masih dibawah 60%. Akan tetapi untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat), kondisinya sangat memprihatinkan, karena rasio LDR BPR setiap tahunnya jauh di atas nilai 100, bahkan lebih dari 200% per tahun (sangat tidak aman), yang mengindikasikan jumlah kredit (pinjaman) jauh lebih besar dibandingkan dana pihak ketiga yang disimpan. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka dipastikan dalam lima tahun mendatang banyak BPR yang kolaps. Padahal daya jangkau BPR ini ke pengusaha golongan lemah, dan masyarakat berpendapatan rendah atau miskin di daerah perdesaan sangat tinggi sekali. Oleh karena itu perlu adanya penguatan, pembinaan dan pendampingan dari pemerintah provinsi melalui kebijakan fiskal untuk menjaga dan melindungi BPR agar tidak kolaps dimasa mendatang. Terlebih lagi jika melihat proporsi penyaluran kredit oleh bank di Provinsi Papua selama ini kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sangat rendah sekali, di bawah 15 triliun rupiah per tahun, dan sekitar 1,4% saja kontribusinya secara nasional (lihat Gambar 2.68), maka BPR menjadi satu-satunya alternatif terbaik untuk meningkatkan pemberian kredit bagi UMKM di Provinsi Papua.

Gambar 2.68. Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua

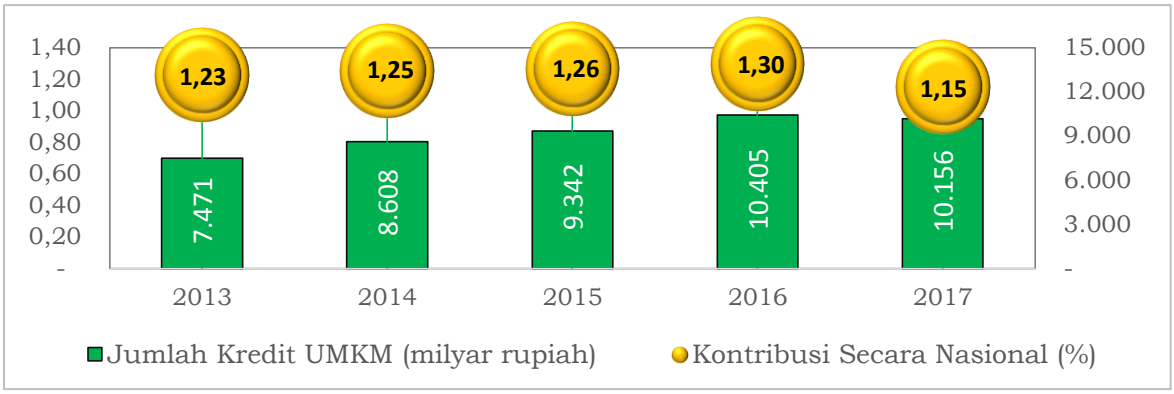

Sumber: Bank Indonesia, 2018 (data diolah)

2.3.6. Rasio ketergantungan

Terdapat kecenderungan pertumbuhan penduduk usia produktif di Provinsi Papua lebih cepat dibandingkan penduduk usia non produktif. Jika diamati berdasarkan kelompok usia produktif 15-64 tahun, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok usia ini proporsinya cenderung meningkat. Tahun 2013 penduduk usia produktif mencapai 66,83% dan tahun 2016 meningkat menjadi 68,23% dari total penduduk Papua, hal ini berarti jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dari jumlah penduduk usia non produktif.

Tabel 2.23. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (ribu orang)

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017	Rata² Pertumbuhan (% per thn)
0 – 4	328,5	329,3	330,0	331,6	333,1	0,35
5 – 9	318,6	319,8	321,3	321,8	322,5	0,30
10 – 14	315,1	315,4	316,0	316,1	316,1	0,08
15 – 19	309,6	310,9	311,6	312,7	314,0	0,35
20 – 24	300,1	303,9	306,9	309,3	311,3	0,92
25 – 29	282,5	286,9	292,0	297,1	302,1	1,69
30 – 34	271,7	273,6	275,5	278,6	281,7	0,91
35 – 39	261,9	264,8	267,3	268,2	269,5	0,72
40 – 44	224,1	233,6	241,8	249,3	255,2	3,30
45 – 49	167,1	177,9	188,6	199,1	209,3	5,79
50 – 54	110,4	120,3	130,6	140,6	150,9	8,13
55 – 59	64,1	70,9	78,1	86,3	94,9	10,31
60 – 64	35,0	38,4	42,5	47,1	52,2	10,51
65 – 69	19,9	21,0	22,5	24,7	23,8	4,58

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017	Rata² Pertumbuhan (% per thn)
70 – 74	13,0	13,4	13,7	13,8	15,6	4,66
75 +	10,9	10,9	11,0	11,1	13,1	4,70
Total	3.032,5	3.091,0	3.149,4	3.207,4	3,265.2	1.87

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dampak dari semakin meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, menyebabkan rasio ketergantungan terlihat mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Jika menggunakan data proyeksi yang bersumber dari BPS, terlihat bahwa rasio ketergantungan yang cenderung menurun dari 53,8% tahun 2010 turun menjadi 42,2% pada tahun 2035, sedangkan berdasarkan estimasi terlihat gap yang cukup besar, yaitu tahun 2010 rasio ketergantungan mencapai 32,1% turun menjadi 23,2% tahun 2035. Semua ini menggambarkan terjadinya bonus demografi di Provinsi Papua antara tahun 2020-2030 (lihat Gambar 2.699).

Gambar 2.69. Proyeksi Bonus Demografi di Provinsi Papua

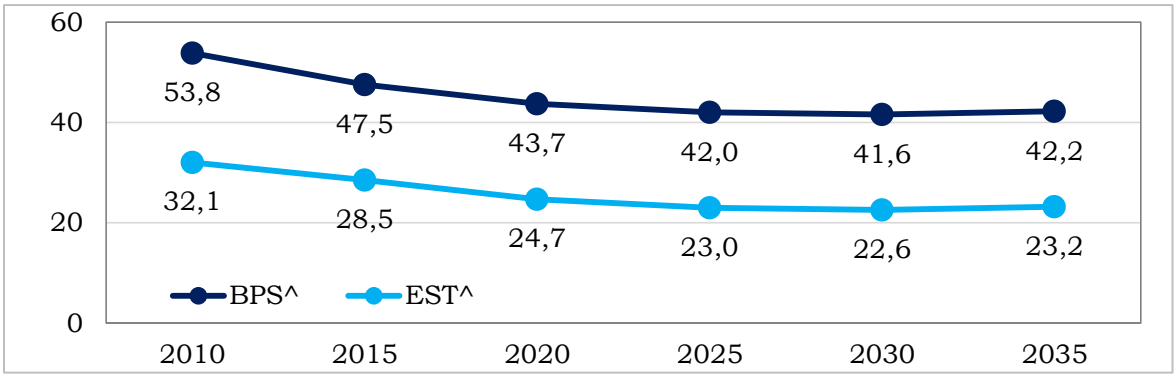

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Bonus demografi yang akan terjadi di Provinsi Papua pada tahun 2020-2030 harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas. Adanya bonus demografi menandakan bahwa penduduk usia produktif (15-64) lebih banyak dibandingkan penduduk yang nonproduktif (0-14 dan lebih dari 64 tahun), sehingga merupakan modal yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik dan berkualitas. Akan tetapi mereka ini merupakan penduduk yang produktif untuk bekerja, membutuhkan pendidikan dan

kesehatan yang lebih baik, dan pangan lebih banyak, karenanya perluasan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih banyak harus diwujudkan pada saat itu.

2.3.7. Angka kriminalitas yang Tertangani

Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor merupakan syarat mutlak yang harus ditunjukan oleh pemerintah Provinsi Papua, agar daya saing investasi regional dapat terus meningkat setiap tahun. Salah satu cara untuk mendukung hal tersebut adalah melalui penanganan penyelesaian kejahatan. Meskipun bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun pemerintah daerah Papua dapat memfasilitasinya melalui kebijakan fiskal untuk memperkuat dan mendukung penanganan kejahatan yang dilakukan oleh POLRI (Polisi Republik Indonesia).

Gambar 2.70. Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Papua dan Indonesia (%)

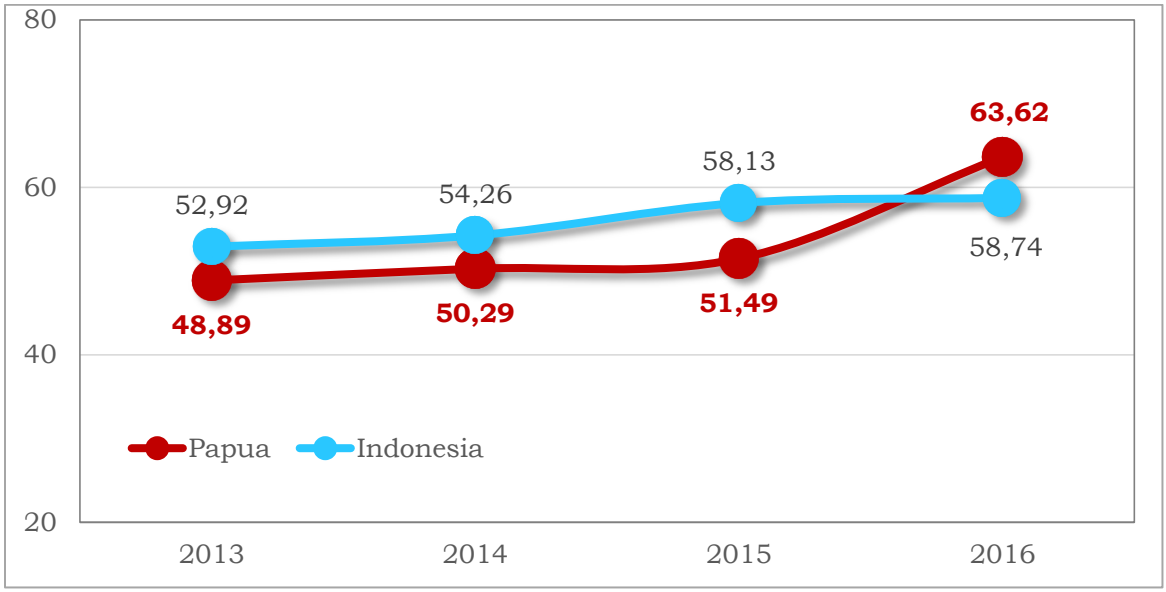

Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Berdasarkan indikator keamanan *Clearance Rate* (Persentase Penyelesaian Kejahatan) dalam Gambar 2.70, penyelesaian kejahatan di Provinsi Papua relatif lebih baik dibandingkan tingkat nasional, terutama pada tahun 2016, persentasenya dapat meningkat dan lebih tinggi dibandingkan secara nasional yaitu 63,62%, dengan rata-rata kenaikan sekitar 3,68% per tahun selama periode 2013-2016. Fenomena ini mengindikasikan bahwa

tingkat keamanan di Provinsi Papua setiap tahunnya semakin membaik, yang mana hal ini merupakan hasil kesigapan POLRI bersama pemerintahan daerah dalam menangani atau menyelesaikan kejahatan yang selama ini terjadi di wilayah Papua.

2.3.8. Daya Saing Investasi

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang merupakan rasio antara tambahan output dengan tambahan modal dapat dijadikan suatu indikator penentu keberhasilan dalam meningkatkan daya saing investasi. Dengan adanya indikator ini, para penyusun rencana pembangunan ekonomi bisa mengetahui berapa investasi yang diperlukan agar ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pakar ekonomi biasanya menggunakan nilai ICOR moderat antara 2 – 4 poin sebagai indikasi iklim investasi di suatu wilayah dalam kondisi yang menguntungkan.

Gambar 2.71. Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2014 dan 2017

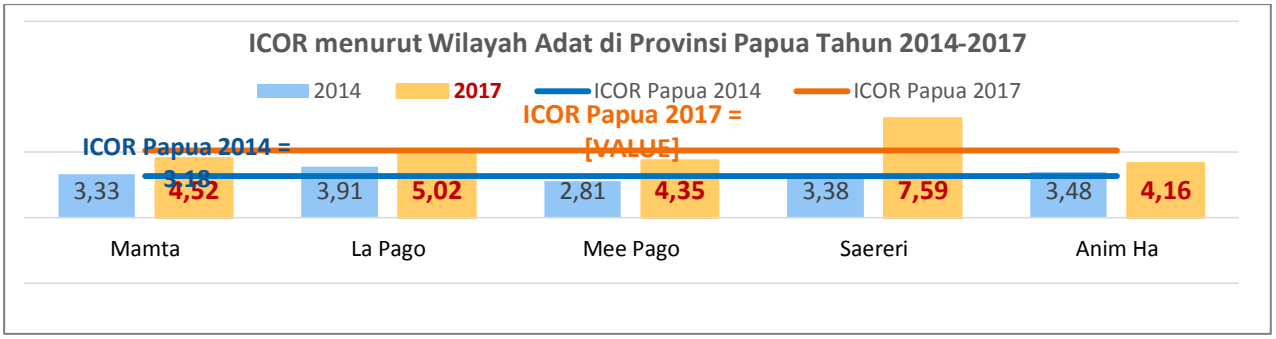

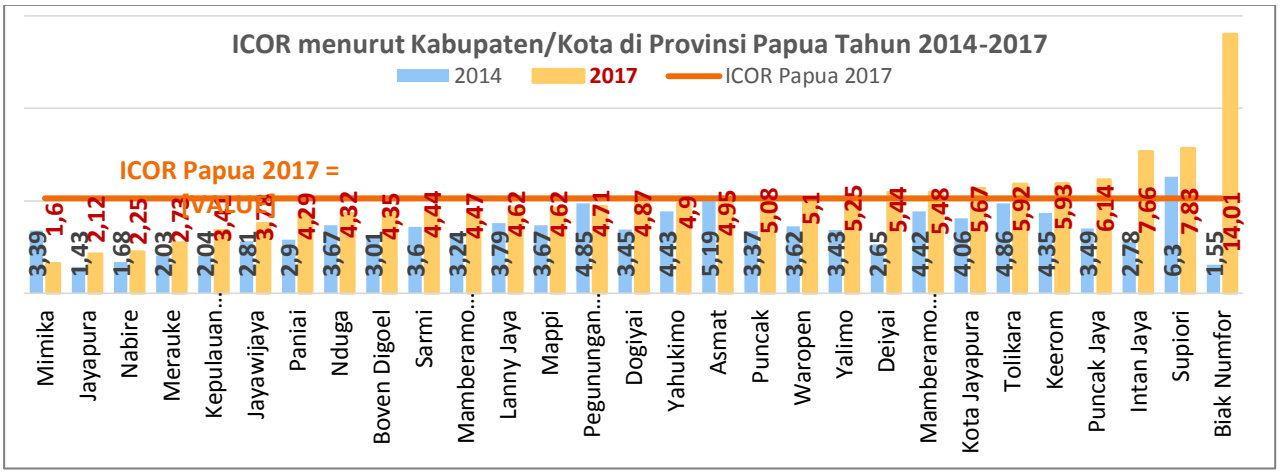

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua belum mampu menciptakan dan mempertahankan iklim investasi yang dapat menguntungkan investor. Fakta ini terekam pada nilai ICOR di setiap daerah yang cenderung lebih besar dari 4 poin, dan mengalami kenaikan rata-rata dalam interval 0,15% - 14% per tahun selama periode 2013-2017. Sehingga secara keseluruhan ICOR Provinsi Papua sebesar 5,13 pada tahun 2017, dan mengalami kenaikan sekitar 0,25% per tahun jika dibandingkan tahun 2014. ICOR sebesar 5,13 mempunyai arti bahwa untuk mencipatakan nilai PDRB sebesar 1 rupiah diperlukan tambahan investasi sebesar 5,13 rupiah.

Dalam konteks kewilayahan, dapat katakan bahwa wilayah adat yang dapat memberikan keuntungan lebih baik bagi para investor adalah wilayah adat Anim Ha. Karena secara rata-rata ICOR untuk wilayah Anim Ha paling rendah, dan mendekati batas tertinggi ICOR moderat yakni sebesar 4,16 poin. Sementara untuk wilayah adat lainnya terlihat belum menguntungkan, terutama di wilayah adat Saireri dan La Pago masing-masing sebesar 7,59 poin dan 5,02 poin. Adapun untuk kabupaten/kota secara terpisah, teridentifikasi 6 kabupaten yang terlihat lebih menguntungkan para investor untuk berinvestasi yakni Kabupaten Jayawijaya dengan ICOR sebesar 3.78 poin, Kepulauan Yapen sebesar 3.41 poin, Merauke sebesar 2.73 poin, Nabire sebesar 2.25 poin, Jayapura sebesar sebesar 2.12 poin, dan yang paling rendah Mimika sebesar 1.60 poin.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahtaeraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada: (1) layanan urusan pemerintahan wajib palayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan palayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayananan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

2.4.1.1. Pendidikan

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk suatu daerah merupakan asset yang potensial dalam upaya pengembangan daya saing daerah dalam berbagai aspek pembangunan. Kualitas penduduk suatu daerah merupakan penentu utama dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Namun asset tersebut membutuhkan perhatian khusus, jika potensi tersebut tidak dikekola dengan baik, sebaliknya justru akan menjadi beban suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia yang besar di Provinsi Papua harus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas secara sistematis salah satunya melalui pendidikan.

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Gambar 2.72. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua

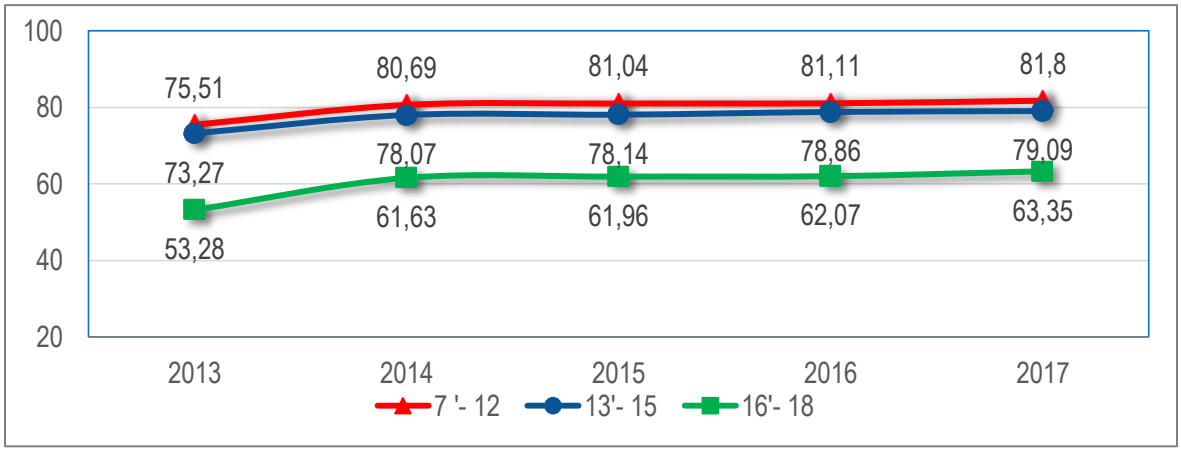

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Papua terlihat mengalami perkembangan yang cukup berarti sepanjang tahun 2013-2017, walaupun dalam perjalanannya sempat turun. Angka partisipasi sekolah Provinsi Papua, memang belum mencapai angka yang ideal, terlihat dari akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan 2013 untuk usia 7-12 tahun tercatat 75,514% artinya masih terdapat 24,49% penduduk usia 7-12 yang tidak bersekolah. Tahun 2017, terlihat ada perkembangan positip untuk usia 7-12 tahun angka partisipasi sekolah meningkat menjadi 81,80%. Demikian juga untuk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun terlihat ada perkembangan angka partisipasi sekolah namun angkanya lebih rendah dari penduduk usia 7-12 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Kasar provinsi Papua pada setiap jenjang pendidikan terlihat bervariasi. APK jenjang pendidikan Sekolah Dasar sepanjang tahun 2013-2017 terlihat mengalami peningkatan, dengan rata-rata mencapai 91.98%. Kemudian jenjang pendidikan SMP dan SMA juga terlihat meningkat setiap tahunnya, dengan masing-masing mencapai rata-rata SMP (72.77%) dan SMA/SMK (63.35%), namun untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK terlihat jauh lebih rendah yaitu sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 82.2% dan 67.94%. Kondisi ini merefleksikan bahwa daya serap penduduk usia sekolah memanfaatkan fasilitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan tanpa melihat batas usia di provinsi Papua masih rendah.

Gambar 2.73. Angka Partisipasi Pendidikan di Provinsi Papua

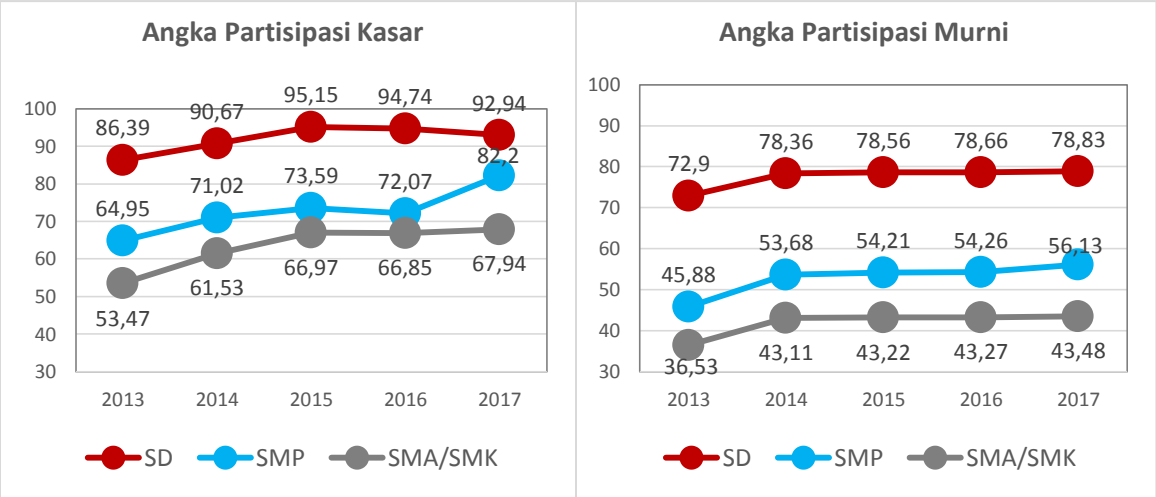

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selain itu, Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya di provinsi Papua terlihat semakin meningkat angkanya tetapi belum mencapai hasil yang memuaskan. Bisa jadi disebabkan karena ada yang *drop out* atau masih berada di jenjang SMP. Terlihat angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan SD sebesar 72.9% tahun 2013, meningkat menjadi 78,36% pada tahun 2014 dan sampai dengan tahun 2017 meningkat lagi sebesar 78.83%. Angka partisipasi murni ditingkat SMP dan SMA/SMK sampai dengan tahun 2017 juga meningkat masing-masing sebesar 56.13% dan 43.48. meskipun demikian nilai rata-rata capaian APM setiap jenjang pendidikan SD masih mendominasi jika dibandingkat tingkat SMP dan SMA/SMK. Hal ini mengidikasikan bahwa masih rendahnya proporsi penduduk usia sekolah di Provinsi Papua yang sekolah tepat waktu atau sesuai dengan jenjang pendidikan ideal. Masih ada ketimpangan penduduk yang cukup tinggi terhadap akses pendidikan.

Tabel 2.24. Angka Partisipasi Pendidikan di Kabupaten/Kota Tahun 2017

Kabupaten/Kota	7 - 12		13 - 15		16 - 18	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
Merauke	116.99	95.65	94.2	68.2	91.07	67.13
Jayawijaya	97.4	88.09	98.09	71.2	103.4	70.67
Jayapura	110.55	93.94	100.54	71.57	131.83	68.06
Nabire	105.17	89.72	92.18	68.12	92.02	60.89
Kepulauan Yapen	108.91	93.97	94.08	65.55	87.91	56.23

Kabupaten/Kota	7 - 12		13 - 15		16 - 18	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
Biak Numfor	115.9	91.64	104.38	71.13	106.17	64.59
Paniai	86.07	72.52	94.08	55.99	39.4	22.73
Puncak Jaya	89.13	73.69	55.89	28.46	47.62	18.18
Mimika	104.14	91.87	125.32	73.15	119.56	68.98
Boven Digoel	100.2	83.48	106.19	67.65	58.96	29.84
Mappi	119.11	85.68	57.44	35.96	26.39	15.16
Asmat	100.35	81.34	58.23	36.45	41.42	18.11
Yahukimo	77.56	60.4	47.98	22.73	28.44	16.03
Pegunungan Bintang	86.86	67.28	53.04	28.24	42.59	26.28
Tolikara	62.87	60.46	73.33	50.85	48.66	32.09
Sarmi	111.46	93.78	93.2	75.79	71.37	48.83
Keerom	101.89	87.68	95.5	69.54	81.1	62.88
Waropen	110.33	91.29	78.19	69.41	109.41	64.97
Supiori	110.56	94.25	101.86	66.32	86.88	57.24
Mamberamo Raya	112.15	97.6	69.17	52.65	54.43	49.38
Nduga	66.45	56.95	47.77	30.67	12.69	6.46
Lanny Jaya	72.87	68.85	87.48	67.74	51.56	43.67
Mamberamo Tengah	88.13	85.85	71.03	70.31	79.18	59.91
Yalimo	91.77	83.34	78.46	53.32	42.4	30.14
Puncak	58.82	48.88	35.71	18.76	19.04	12.41
Dogiyai	102.49	84.24	81.59	64.45	49.06	40.7
Intan Jaya	74.73	61.74	40.84	12.61	25.31	12.01
Deiyai	81.26	59.51	53.91	41.42	45.96	39.86
Kota Jayapura	105.23	93.28	108.69	80.85	105.25	62.75
Papua	92.94	78.83	82.2	56.13	67.94	43.48

Sumber: Indikator Pendidikan Provinsi Papua, 2014-2017

Jika dilihat antar kabupaten/kota, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 2.24 di atas, terlihat masih terdapat kesenjangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan dan Angka Partispasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan antar wilayah pembangunan. APK tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI, diduduki oleh Kabupaten Mappi dengan angka 119.11% kemudian diikuti Kabupaten Merauke sebesar 116.99%, Kabupaten Biak Numfor sebesar 115.9% dan seterusnya. Sedangkan terdapat 13 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai APK di bawah 100% di antaranya adalah Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Paniai, Deiyai, Yahukimo, Intan Jaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara dan Puncak. Selain itu, APM tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah Kabupaten Mamberamo Raya yaitu sebesar 97.6%, kemudian diikuti Kabupaten Merauke dan Supiori masing-masing sebesar 95.65% dan 94.25%. tedapat juga daerah dengan capaian APM terendah di antaranya adalah Kabupaten Deiyai (59.51%), Nduga (56.95%) dan Puncak (48.88). Terlihat selisih antara APK dan APM pada masing-

masing kabupaten. Oleh karena APM menunjukan anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu maka bila semuanya bersekolah tepat waktu maka nilainya mencapai 100. Biasanya angka APM akan lebih rendah dari APK dikarenakan nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan. Jadi selisih antara APK dan APM menggambarkan proporsi murid yang terlambat sekolah atau terlalu cepat sekolah.

APK dan APM untuk jenjang SMP/MTS yang tertinggi di Kabupaten Mimika, yang terlihat mencolok dibandingkan daerah kabupaten lainnya di Provinsi Papua. APK dan APM Kabupaten Mimika memiliki nilai masing-masing 125.32% dan 73.15% sedangkan kabupaten Puncak memiliki APK dan APM terendah dengan nilai masing-masing 35.71% dan 18.76%. Pada jenjang SMA/SMK/MA angka partisipasi kasar tertinggi dipduduki oleh kabupaten Jayapura dengan angka sebesar 131.83% dan angka partisipasi murni tertinggi dipduduki oleh kabupaten Jayawijaya dengan nilai mencapai 70.67%. Sedangkan kabupaten dengan APK dan APM terendah yaitu kabupaten Nduga dengan nilai 12.69% dan 6.46%.

Berdasarkan APK dan APM per wilayah kabupaten/kota, terlihat jelas bahwa Provinsi Papua selama ini mengalami ketimpangan *with in* dan *with out* dalam pembangunan pendidikan. Dikatakan ketimpangan *with in* karena sebagian besar daerah di Papua mempunyai angka APM yang rendah, bahkan diantaranya ada yang dibawah 50, terutama untuk jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA, seperti Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mamberamo Raya. Dimana kondisi ini disebabkan rasio murid baik itu terhadap sekolah maupun guru masih banyak yang berada di bawah standar nasional. Sedangkan dikatakan *with out* karena ketimpangan pembangunan pendidikan juga terjadi antarwilayah, terutama ketimpangan dalam distribusi guru. Semua faktor ini akhirnya mengakibatkan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Papua masih belum bisa mencapai program nasional wajib belajar sembilan tahun.

2) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APTS) paling tinggi di Provinsi Papua Tahun 2017 adalah APTS SMP yaitu sebesar 1,21% atau sebanyak 1.532 orang, kemudian diikuti APTS SMP sebesar 0,93% atau sebesar 866 orang dan yang paling rendah adalah APTS SD yaitu sebesar 0,56% atau sebanyak 2.521 orang. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan APTS per jenjang pendidikan SD di Provinsi Papua, terlihat paling tinggi berada di Kabupaten

Mamberamo Raya sebesar 6,06%, Pegunungan Bintang sebesar 2,76%, Lanny Jaya sebesar 2,98%, Membramo Tengah yaitu sebesar 1,91 persen dan Puncak sebesar 1,68 persen. Dari hasil tersebut jika dipetakan dalam wilayah adat maka ada terdapat 2 wilayah yang menjadi sebaran APTS tertinggi yaitu Mamta dan La Pago.

Tabel 2.25. Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	SD			SMP			SMA/ SMK		
		Siswa	Putus Sekolah	APTS	Siswa	Putus Sekolah	APTS	Siswa	Putus Sekolah	APTS
Mamta	Jayapura	20.068	69	0,34	8.456	92	1,09	7.196	12	0,17
	Sarmi	6.603	43	0,65	2.347	22	0,94	1.571	2	0,13
	Keerom	8.453	40	0,47	2.469	25	1,01	1.954	10	0,51
	Memberamo Raya	6.959	422	6,06	1.617	30	1,86	593	29	4,89
	Kota Jayapura	30.984	70	0,23	13.733	29	0,21	9.966	71	0,71
La Pago	Jaya Wijaya	25.428	48	0,19	7.385	160	2,17	6.570	164	2,50
	Puncak Jaya	4.501	25	0,56	1.001	-	0,00	809	9	1,11
	Yahukimo	43.249	75	0,17	5.451	24	0,44	1.663	23	1,38
	Pegunungan Bintang	871	24	2,76	212	11	5,19	658	5	0,76
	Tolikara	1.607	-	0,00	3.638	8	0,22	1.094	-	0,00
	Nduga	5.069	14	0,28	570	14	2,46	148	-	0,00
	Lanny Jaya	15.341	457	2,98	3.995	239	5,98	1.888	36	1,91
	Membramo Tengah	4.825	92	1,91	834	29	3,48	334	2	0,60
	Yalimo	7.769	45	0,58	2.611	1	0,04	801	19	2,37
	Puncak	3.698	62	1,68	868	2	0,23	332	-	0,00
Mee Pago	Nabire	22.493	103	0,46	8.305	54	0,65	7.525	93	1,24
	Paniai	21.003	34	0,16	3.944	441	11,18	1.070	3	0,28
	Mimika	35.441	75	0,21	11.479	14	0,12	8.622	80	0,93
	Dogiyai	17.011	99	0,58	1.996	2	0,10	884	-	0,00
	Deiyai	7.086	41	0,58	1.562	24	1,54	924	5	0,54
	Intan Jaya	4.486	14	0,31	659	2	0,30	50	13	26,00
Saereri	Biak Numfor	23.286	16	0,07	9.674	28	0,29	7.825	39	0,50
	Kepulauan Yapen	15.021	68	0,45	5.953	38	0,64	3.651	92	2,52
	Waropen	4.492	12	0,27	1.705	9	0,53	1.168	27	2,31
	Supiori	4.093	3	0,07	1.594	9	0,56	1.261	8	0,63
Anim Ha	Merauke	30.573	101	0,33	1.163	122	10,49	675	104	15,41
	Boven Digoel	11.781	25	0,21	3.144	12	0,38	1.922	2	0,10

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	SD			SMP			SMA/ SMK		
		Siswa	Putus Sekolah	APTS	Siswa	Putus Sekolah	APTS	Siswa	Putus Sekolah	APTS
	Mappi	25.298	389	1,54	5.144	75	1,46	3.180	13	0,41
	Asmat	18.692	55	0,29	2.593	16	0,62	1.261	5	0,40
Papua		**448.483**	**2.521**	**0,56**	**126.477**	**1.532**	**1,21**	**93.127**	**866**	**0,93**

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2014-2017 (data diolah)

Kemudian, APTS SMP untuk jenjang pendidikan SMP tercatat paling tinggi terdapat di Kabupaten Paniai (11,18%), Merauke (10,49%), Pegunungan Bintang (5,19%), Lanny Jaya (5,98%) dan Mamberamo Tengah (3,48%). Adapun masing-masing kabupaten tersebut tersebar di beberapa wilayah adat aitu Mee Pago, Anim Ha dan La Pago. Selain itu, pada jenjang pendidikan menengah jika dilihat menurut kewilayahan Kabupaten Intan Jaya (Mee Pago) memiliki nilai APTS tertinggi bahkan di atas 20%. Kemudian diikuti dengan Kabupaten Merauke (Anim Ha) sebesar 15,41%, Mamberamo Raya (Mamta) sebesar 4,89% dan kabupaten lainnya yang berada di bawah 3%.

3) Angka Melanjutkan Sekolah

Melanjutkan dari APTS di atas, angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK terlihat cukup baik, namun perlu ditingkatkan lebih optimal lagi. Dari data yang tersaji di bawah ini tercatat sepanjang tahun 2015-2017 angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP terlihat sudah cukup baik dan cenderung terjadi peningkatan setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2017 angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP sebesar 86,17% yang pada tahun sebelumnya sebesar 83,33% (2016).

Tabel 2.26. Angka Melanjutkan SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK

URAIAN	2015	2016	2017
Lulusan SD	52.658	48.828	54.891
Siswa Baru SMP	39.550	40.690	42.685
ANGKA MELANJUTKAN SD KE SMP	75,11	83,33	86,17
Lulusan SMP	30.881	33.792	36.480
Siswa Baru SMA/SMK	26.503	31.054	32.295
ANGKA MELANJUTKAN SMP KE SMA/SMK	85,82	91,9	88,53

Sumber: Indikator Pendidikan Provinsi Papua, 2014-2017

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan angka melanjutkan sekolah SMP ke SMA/SMK terlihat mengalami flkutuatif, namun cenderung meningkat. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2016-2017 sebesar 3%, namun secara keseluruhan masih terlihat cukup baik dalam rentan waktu tiga tahun terakhir.

4) Perkembangan Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.26 di bawah ini, terlihat bahwa jumlah sekolah jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK di Provinsi Papua terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan peningkatan jumlah sekolah bernilai positif. Artinya, penambahan sekolah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang cenderung semakin melek terhadap pendidikan. Sedangkan pada pendidikan sekolah dasar sepanjang tahun 2013-2017 terlihat cenderung berkurang sampai dengan tahun 2017 (lihat Tabel 2.277).

Tabel 2.27. Jumlah Gedung Sekolah Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (unit)

Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
Sekolah Dasar	2.829	2.982	2.415	2.277	2.474
Sekolah Menengah Pertama	540	582	582	587	645
Sekolah Menengah Atas	197	202	212	211	225
Sekolah Menengah Kejuruan	93	94	117	130	131
Jumlah	3.659	3.860	3.326	3.205	

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan perkembangan jumlah sekolah di Provinsi Papua selama lima tahun terakhir terlihat semakin menurun (bernilai negatif). Adapun Menurunnya jumlah sekolah yang paling dominan adalah sekolah dasar yaitu pada tahun 2013 adalah sebanyak 2.829 unit dan terus menurun hingga tahun 2017 berjumlah 2.474 unit.

Persebaran sekolah baik pada semua jenjang pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah di Provinsi Papua. Jika dicermati pada Gambar 2.74**Error!**

eference source not found., tercatat sangat bervariasi jumlah sekolah di masing-masing daerah di Provinsi Papua. Distribusi sekolah dasar di Provinsi Papua jika diperhatikan paling banyak terdapat di Kabupaten Merauke (197 unit) dan daerah dengan jumlah sekolah dasar paling sedikit adalah Kabupaten Nduga (22 unit). Untuk jenjang pendidikan SMP, paling banyak terdapat di Kabupaten Mimika (53 unit), dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Puncak (6 unit). Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah terdistribusi terbanyak ada di Kabupaten Mimika (40 Unit) dan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Intan Jaya (1 unit).

Gambar 2.74. Jumlah Sekolah pendidikan SD, SMP dan SMA Tahun 2017

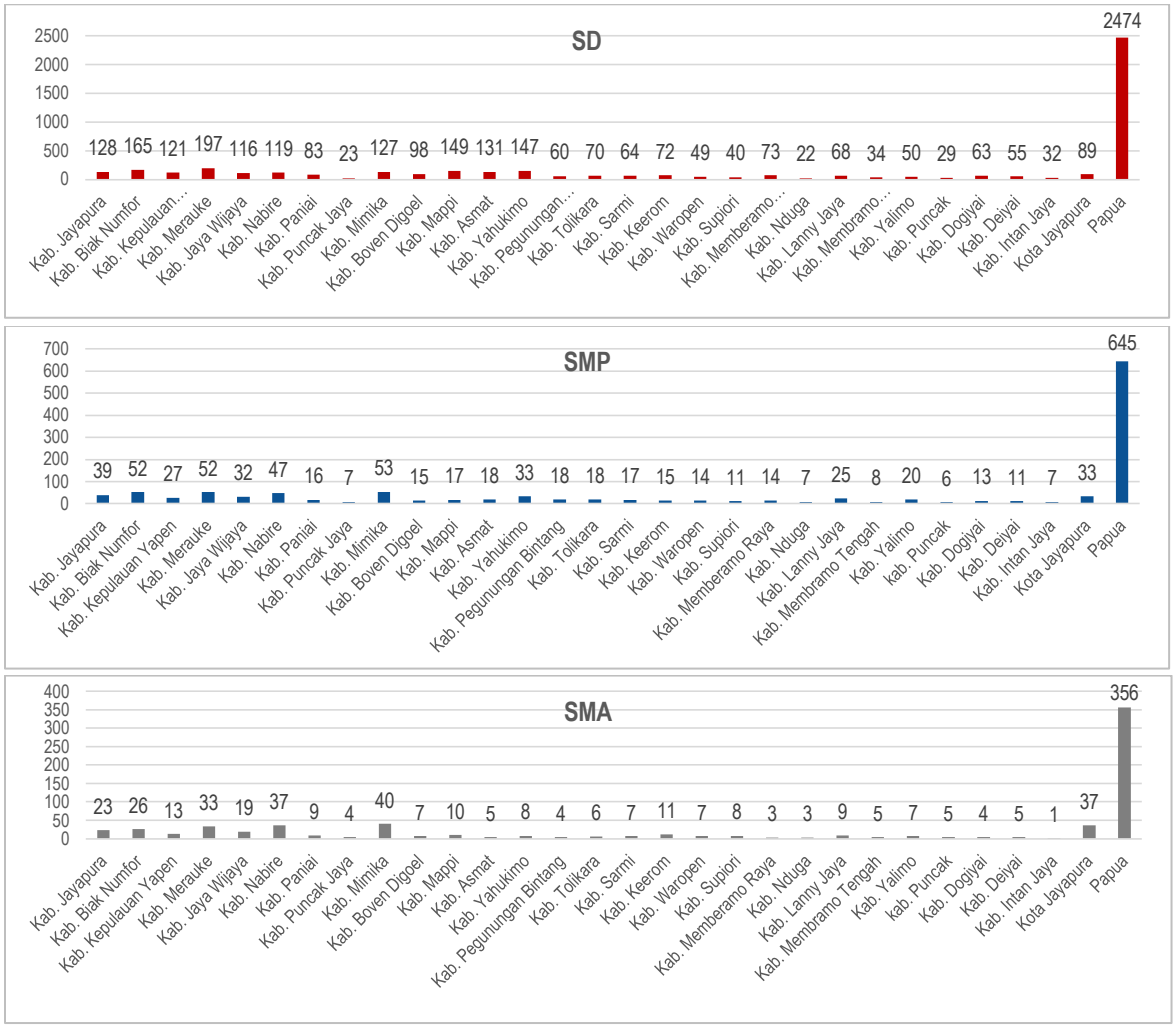

Sumber: DAPODIK 2017 (data diolah)

5) Perkembangan Guru dan Murid

Selain itu, dengan samakin banyaknya jumlah sekolah sehingga kebutuhan guru juga semakin bertambah untuk semua jenjang pendidikan. Berbeda dengan kondisi jumlah sekolah pada tabel di atas, pertumbuhan perkembangan jumlah guru terlihat mencapai angka 17,69% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pendidikan sekolah dasar memiliki jumlah guru sampai dengan tahun 2017 mencapai 16.208 orang, kemudian untuk SMP mencapai 7.547 orang, pendidikan SMA sebesar 4.203 orang dan SMK mencapai 2.860 orang (lihat Tabel 2.28). Untuk tenaga guru di provinsi Papua, terlihat mengalami perkembangan yang pesat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16.23 % pertahun. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai oleh tenaga guru SD yaitu sebesar 26.34 % yang diikuti oleh tenaga guru SMA (18.88%), SMP (16.12%) dan SMK (11.65%).

Tabel 2.28. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua

Jenjang Pendidikan	2013 (org)	2014 (org)	2015 (org)	2016 (org)	2017 (org)	Rata² growth (%)
Sekolah Dasar	12.348	11.997	8.310	17.667	16.208	17,69
Sekolah Menengah Pertama	5.060	7.089	7.331	7.687	7.547	11,64
Sekolah Menengah Atas	2.586	3.671	3.971	4.230	4.234	14,19
Sekolah Menengah Kejuruan	2.214	3.077	2.502	2.869	2.860	8,66
Jumlah	22.208	25.834	22.114	32.453	30.849	10,93

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Dengan semakin meleknya masyarakat terhadap di bidang pendidikan berdampak juga terhadap penambahan jumlah murid sepanjang tahun 2013-2017. Jika dilihat pada Tabel 2.28 di bawah ini perkembangan jumlah murid per jenjang pendidikan secara keseluruhan semakin bertambah pesat, hal tersebut dpat dilihat dari nilai rata-rata pertumbuhan yang mencapai angka 3,69%. Dalam Tabel 2.29, terlihat bawah di semua jenjang pendidikan terjadi penambahan murid setiap tahunnya. Rata-rata penambahan jumlah murid paling banyak terlihat pada rata-rata pertumbuhan jenjang pendidikan SMA dan SMK yaitu masing-masing sebesar 5,95 persen dan 5,73 persen. Sedangkan jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama masing-masing mencapai 3,07 dan 4,62 persen. Meskipun pertumbuhan sekolah dasar hanya mencapai 3,07 persen, namun dari sisi jumlah murid pendidikan sekolah dasar paling dominan jumlah muridnya yaitu mencapai 448.483 orang sampai dengan tahun 2017. Kemudian diikuti dengan SMP sebesar 126.477 orang, lalu 61.786 orang untuk SMA, serta 31.341 orang untuk SMK.

Tabel 2.29. Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	2013 (org)	2014 (org)	2015 (org)	2016 (org)	2017 (org)	Rata² growth (%)
Sekolah Dasar	399.444	382.292	412.187	445.243	448.483	3,07
Sekolah Menengah Pertama	106.482	101.392	115.296	123.823	126.477	4,62
Sekolah Menengah Atas	49.252	48.514	53.851	59.126	61.786	5,95
Sekolah Menengah Kejuruan	25.892	26.174	25.588	33.144	31.341	5,73
Jumlah	581.070	558.372	606.922	661.336	668.087	3,69

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Seiring dengan adanya peningkatan jumlah guru dan murid di Provinsi Papua pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) juga sangat berdampak terhadap ketersediaan guru dan persebarannya selama ini. Sepanjang tahun 2013-2017, terlihat bahwa rasio ketersediaan guru terhadap murid untuk pendidikan dasar rata-rata sudah sesuai dan memenuhi aturan. Sampai dengan tahun 2017 rata-rata satu orang guru dapat memberikan pelajaran hingga mencapai 24 orang untuk satu kelasnya, sedangkan ketentuan yang berlaku efektifnya satu orang guru paling banyak memberikan pelajaran yaitu sebanyak 25 orang per kelas.

Jika dilihat berdasarkan kewilayahan di Provinsi Papua, rata-rata rasio guru terhadap murid dikabupaten/kota nilainya sangat bervariasi. Rata-rata wilayah adat Mamta, Saereri dan Anim Ha memiliki rasio guru terhadap murid cukup ideal, meskipun di antara ketiganya masih terdapat daerah dengan rasio yang cukup tinggi di antaranya Mamberamo Raya, Mappi dan Asmat. Sedangkan pada wilayah adat La Pago dan Mee Pago didominasi oleh daerah yang memiliki rasio guru terhadap murid dapat dikatakan cukup tinggi, meskipun tidak semua masuk dalam kategori belum ideal. Adapun daerah dengan rasio guru terhadap murid cukup tinggi di antaranya adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Paniai, Dogiyai dan Deiyai.

Tabel 2.30. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Wilayah Adat	Kabupaten/kota	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua		23,87	21,84	22,44	24,20
Mamta	Jayapura	17,28	15,10	15,03	16,30
	Sarmi	20,79	14,10	14,18	15,27
	Keerom	13,14	13,17	13,62	14,47
	Mamberamo Raya	30,26	22,94	26,84	30,85
	Kota Jayapura	22,63	19,87	19,52	19,80
La Pago	Jayawijaya	20,51	27,81	27,26	29,97
	Puncak Jaya	15,79	26,06	25,57	26,97
	Yahukimo	48,12	59,88	60,22	62,44
	Pegunungan Bintang	8,64	23,12	33,80	46,88

Wilayah Adat	Kabupaten/kota	2014	2015	2016	2017
	Tolikara	51,10	41,59	39,63	37,54
	Nduga	31,39	33,44	27,05	32,04
	Lanny Jaya	34,18	39,64	37,02	35,54
	Mamberamo Tengah	41,56	36,08	25,95	26,69
	Yalimo	90,25	28,15	27,05	29,57
	Puncak	20,26	21,18	20,11	23,91
Mee Pago	Nabire	21,85	16,93	17,12	17,91
	Paniai	20,16	30,10	31,84	37,51
	Mimika	26,97	19,31	19,23	20,41
	Dogiyai	43,95	30,18	35,85	39,43
	Intan Jaya	25,09	31,50	29,20	20,99
	Deiyai	34,18	14,89	17,28	31,18
Saereri	Kepulauan Yapen	22,51	18,25	19,29	21,71
	Biak Numfor	21,52	17,56	17,85	19,95
	Waropen	7,30	11,39	11,98	12,78
	Supiori	15,95	13,65	14,41	17,50
Anim Ha	Merauke	20,89	17,37	17,75	18,69
	Boven Digoel	26,64	18,19	19,00	18,89
	Mappi	39,10	29,58	29,70	32,87
	Asmat	33,26	28,17	27,68	31,58

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Selanjutnya, pada pendidikan menengah di Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio guru terhadap murid sudah cukup ideal meskipun terbilang cukup rendah. Dalam rentan waktu lima tahun terakhir, rata-rata rasio guru terhadap murid terbilang cukup rendah, rata-rata guru dapat mengajar mencapai 12 siswa setiap tahunnya. Paling tinggi rasio guru terhadap murid yaitu pada tahun 2016 yaitu satu orang guru dapat mengajar 13 siswa.

Tabel 2.31. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua		11,07	12,27	13,22	13,13
Mamta	Jayapura	11,88	13,38	13,95	14,19
	Sarmi	7,90	9,88	12,63	12,77
	Keerom	5,01	8,88	9,63	10,23
	Mamberamo Raya	21,22	9,86	13,88	16,03
	Kota Jayapura	7,82	12,33	13,13	8,62
La Pago	Jayawijaya	26,61	17,49	18,82	18,35
	Puncak Jaya	11,70	13,73	16,68	15,26
	Yahukimo	9,43	13,97	11,69	12,99
	Pegunungan Bintang	6,77	7,59	10,89	11,15
	Tolikara	8,73	14,83	14,80	17,93

	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
	Nduga	3,46	3,00	5,31	6,17
	Lanny Jaya	16,29	24,64	21,47	21,70
	Mamberamo Tengah	4,05	7,36	4,42	6,19
	Yalimo	51,89	14,08	11,54	13,35
	Puncak	3,35	5,02	4,56	6,04
Mee Pago	Nabire	16,01	12,02	12,23	10,97
	Paniai	10,68	14,51	21,57	15,63
	Mimika	13,00	10,44	12,08	10,86
	Dogiyai	7,72	11,89	11,63	10,78
	Intan Jaya	4,50	5,00	4,13	9,63
	Deiyai	11,96	5,06	7,39	9,47
Saereri	Kepulauan Yapen	9,81	15,29	15,98	16,07
	Biak Numfor	14,59	13,41	14,26	14,54
	Waropen	6,07	7,48	8,63	9,42
	Supiori	4,90	8,16	8,06	10,78
Anim Ha	Merauke	12,36	12,32	13,45	13,48
	Boven Digoel	6,98	10,20	9,76	10,22
	Mappi	16,49	15,33	18,53	16,48
	Asmat	21,67	10,63	10,41	10,60

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Berdasarkan data kewilayahan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2014-2017 tercatat bahwa rata-rata sudah memenuhi peraturan yang berlaku, meskipun terlihat masih cukup rendah baik pada wilayah Mamta (12 siswa/guru), La Pago (13 siswa/guru), Mee Pago (11 siswa/guru), Saereri (11 siswa/guru) dan Anim Ha (13 siswa/guru). Untuk sebaran guru berkualifikasi pendidikan DIV dan S1 di Provinsi Papua terbilang masih cukup rendah. Dari data pada tabel di bawah ini, terilihat untuk sekolah dasar sebarannya masih di bawah 60%, SMP sudah cukup baik berkisar antara 84-87% dan pendidikan menengah yang memiliki sebaran cukup rendah meskipun pada tahun 2016 telah mencapai 95% namun turun di tahun 2017 sebesar 60%.

Tabel 2.32. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2017

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA

	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Papua	54,94	58,89	84,36	87,21	94,71	59,68
Jayapura	65,73	73,77	89,35	91,90	96,91	61,14
Sarmi	77,04	71,92	89,10	91,67	97,06	69,92
Keerom	73,98	75,96	85,57	84,95	96,81	69,11
Memberamo Raya	18,56	20,67	82,50	85,86	94,59	100,00
Kota Jayapura	79,11	83,10	91,87	93,01	96,70	55,93
Jaya Wijaya	45,92	53,89	82,26	86,82	95,33	64,80
Puncak Jaya	28,03	55,24	86,57	90,16	97,62	58,49
Yahukimo	26,25	38,70	76,97	75,00	97,67	76,56
Pegunungan Bintang	54,35	48,25	95,65	92,05	100,00	59,32
Tolikara	44,17	47,34	54,35	63,09	94,92	81,97
Nduga	34,02	41,12	52,94	62,32	84,62	75,00
Lanny Jaya	20,71	29,71	42,86	69,12	90,00	93,10
Membramo Tengah	23,40	26,35	50,88	68,75	92,31	100,00
Yalimo	28,74	43,00	56,73	68,75	92,11	61,67
Puncak	36,76	40,31	86,05	91,94	96,36	70,91
Nabire	55,00	58,84	88,26	90,28	96,29	57,00
Paniai	45,90	46,61	81,58	82,21	86,89	57,38
Mimika	69,63	72,98	92,98	94,09	94,33	38,92
Dogiyai	44,41	37,57	83,59	86,03	95,24	53,66
Deiyai	25,07	28,35	75,47	79,12	92,31	55,06
Intan Jaya	53,57	67,00	87,50	95,38	100,00	100,00
Biak Numfor	42,44	54,32	75,00	82,45	89,57	67,47
Kepulauan Yapen	58,96	60,22	85,15	86,15	95,73	64,33
Waropen	51,42	53,18	85,28	85,96	88,46	62,10
Supiori	74,81	83,71	86,78	92,31	91,06	85,47
Merauke	57,36	62,70	90,91	92,71	93,43	52,04
Boven Digoel	59,82	55,61	84,95	89,52	93,24	48,94
Mappi	34,90	34,34	86,91	84,78	97,86	68,39
Asmat	47,54	50,87	92,50	88,32	97,22	90,76

Sumber: Kemendikbud RI (2017) dan Bappeda Papua (2018)

Secara kewilayahan, pada jenjang pendidikan sekolah dasar terlihat bahwa sebaran guru berpendidikan DIV dan S1 belum merata. Sedangkan pada tingkat sekolah menengah pertama sebaran guru berpendidikan tinggi sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa daerah yang sebarannya masih terbilang cukup rendah. Sedangkan, pendidikan menengah tercatat terdapat beberapa daerah dengan sebaran mencapai angka sempurna sampai tahun 2017 di antaranya adalah Kabupaten Intan Jaya, Membramo Tengah dan Memberamo Raya. Namun masih terdapat juga daerah yang memiliki kualifikasi guru berpendidikan tinggi bahkan sangat rendah di Provinsi papua. Secara keseluruhan, sebaran kualifikasi guru berpendidikan tinggi baik pada pendidikan dasar dan menengah masih perlu diperhatikan. Rata-rata sebaran guru berpendidikan DIV dan S1 yang cukup rendah paling banyak terdapat pada daerah yang sulit akses tepatnya pada beberapa wilayah pegunungan tengah.

6) Angka Melek Huruf

Berdasarkan data yang diperoleh, angka melek huruf untuk penduduk usia > 15 tahun di Provinsi Papua cenderung meningkat setiap tahunnya, namun perlu upaya yang optimal dalam memberantas buta aksara di Provinsi Papua. Dengan rata-rata cenderung meningkat setiap tahunnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Jika dilihat lebih jauh lagi, masih terdapat beberapa daerah dengan angka melek huruf untuk penduduk usia 15 tahun ke atas masih di bawah 50% yang kebanyakan tersebar di wilayah adata La Pago dan Mee Pago (lihat Gambar 2.75).

Gambar 2.75. Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun (%)

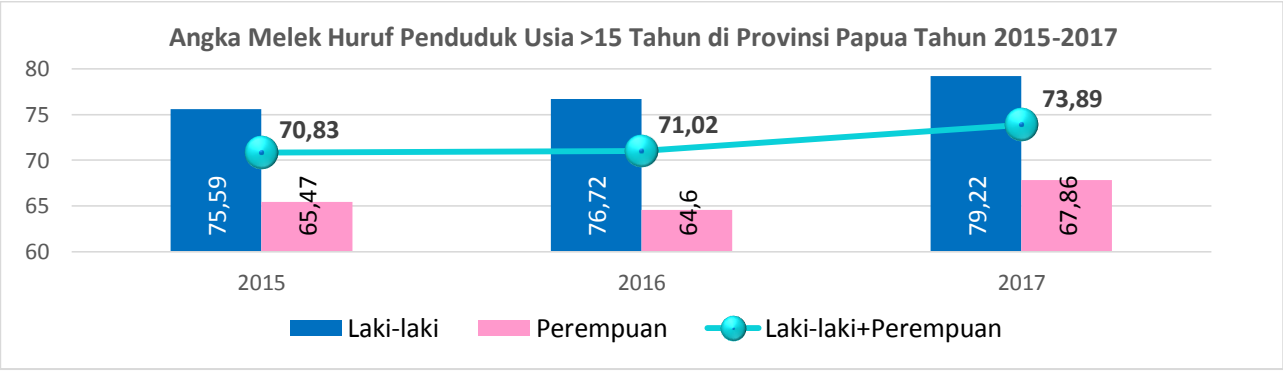

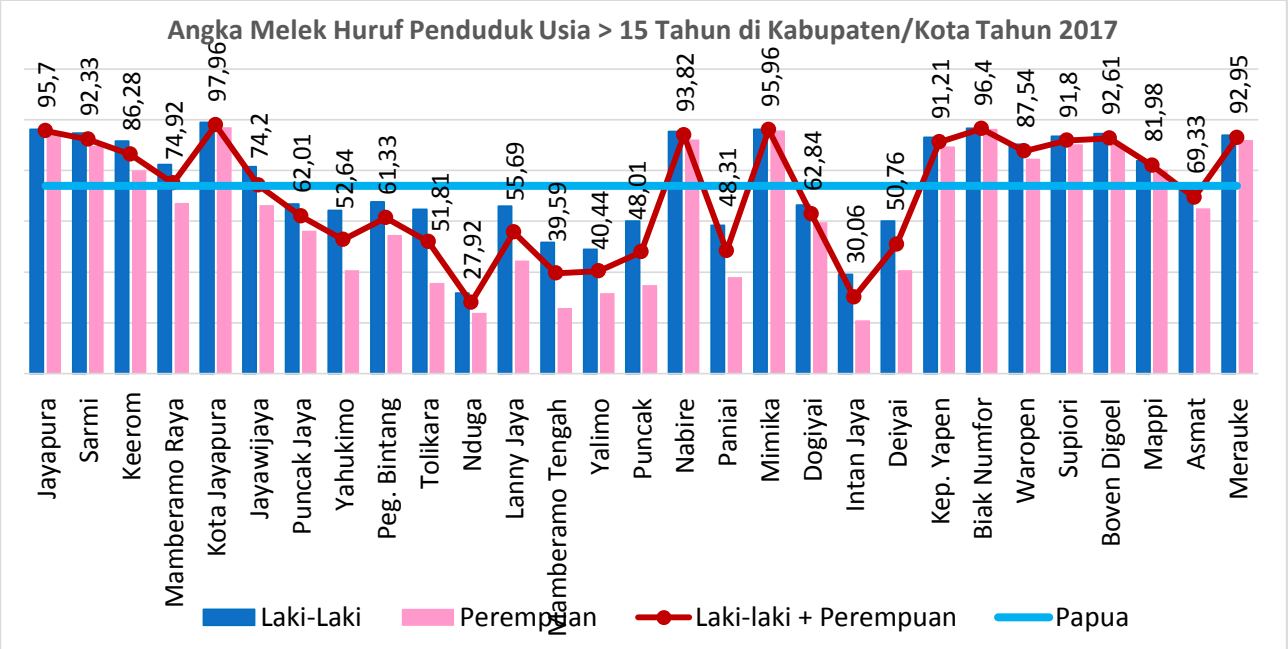

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Jika dilihat berdasarkan data kewilayahan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2017 terdapat 13 kabupaten/kota dengan capaian > 90%. Di antaranya adalah Kabupaten Merauke, Jayapura, Sarmi, Keerom, Kota Jayapura, Lanny Jaya, Nabire, Mimika, Deiyai, Kep. Yapen, Biak Numfor, Supiori dan Boven Digoel. Sedangkan daerah lainnya masih capaiannya masih di bawah 90%. Selain itu, terdapat juga daerah dengan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun yang capaiannya di bawah 60% yang rata-rata tersebar di wilayah adat La Pago dan Mee Pago.

2.4.1.2. Kesehatan

1) Angka kematian Bayi (AKB)

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Berdasarkan Gambar 2.76, diketahui bahwa Provinsi Papua memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun cukup pesat hingga tahun 2017. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua merupakan akumulasi dari 29 kabupaten/kota yang tersebar di 5 wilayah adat. Tercatat pada tahun 2013 kasus AKB mencapai hingga 54 kasus AKB, kemudian turun di tahun 2014 sebanyak 8 kasus namun kembali mengalami kenaikan

yang cukup pesat di tahun 2015 sebesar 44 kasus. Namun dalam dua tahun terakhir kasus AKB mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 8 kasus tahun 2016 dan 7 kasus di tahun 2017.

Gambar 2.76. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

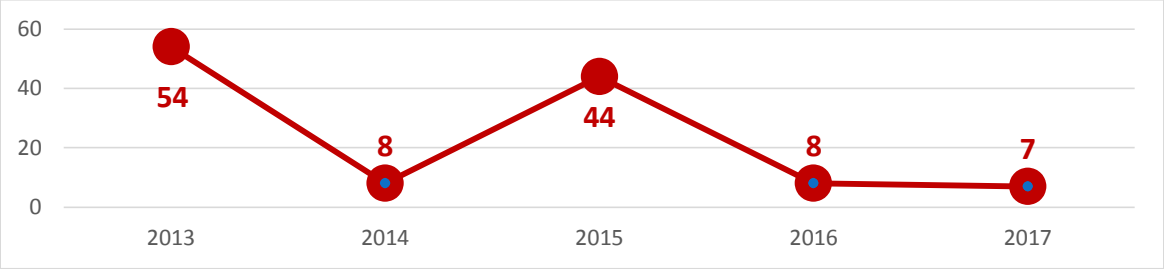

Sumber: Provinsi Papua

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Gambar 2.77. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

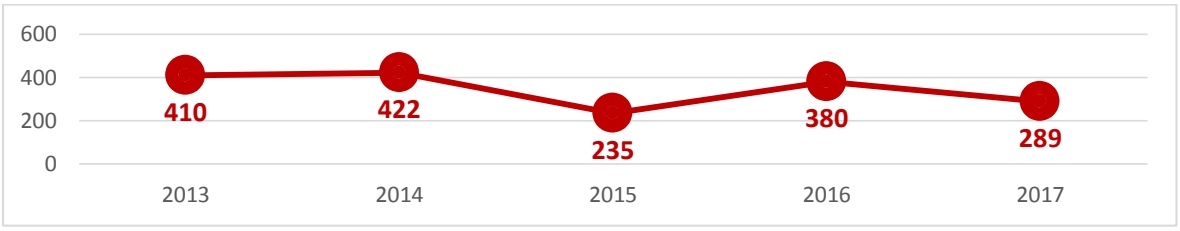

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi dan cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2013 kasus AKI mencapai 410 kasus, sampai dengan tahun

2017 kasus AKI menurun hingga tersisa 289 kasus (lihat Gambar 2.77). Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengurangi kasus AKI di Provinsi Papua untuk tahun-tahun yang akan datang.

Gambar 2.78. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)

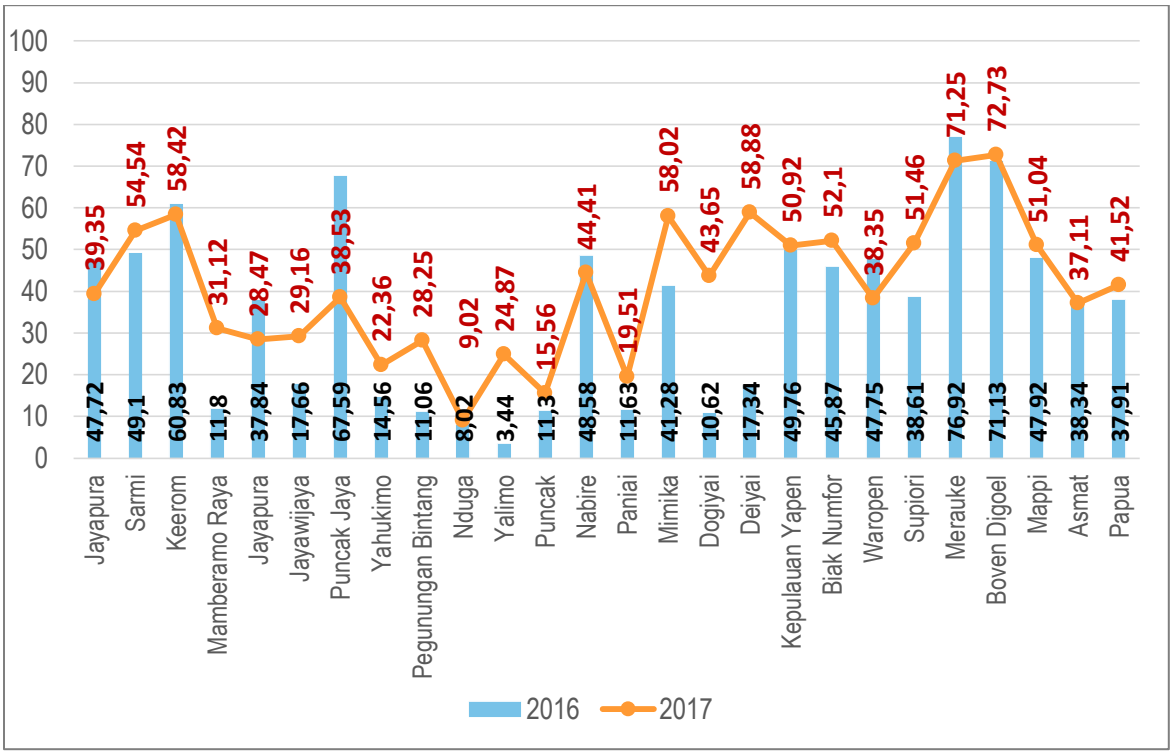

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 – 2018 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2.78, diketahui bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua secara keseluruhan dapat dikatakan masih cukup rendah untuk kondisi dua tahun terakhir. Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua pada dua tahun berturut-turut masih di bawah 50 persen. Berdasarkan akumulasi dari 29 kabupaten/kota, cakupan pertolonah persalinan oleh tenaga kesehatan terbilang masih rendah. Adapun cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di masing-masing wilayah adat masih terbilang cukup rendah, bahkan ada beberapa daerah dengan persentase di bawah 20 persen pada kondisi di tahun 2017.

3) Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal yang mutlak untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Papua. Sampai dengan tahun 2016 cakupan puskesmas per 10.000 penduduk sebesar 16 unit untuk 10.00 penduduk di Papua. Berdasarkan pada tabel di atas, banyak terjadi perubahan-perubahan terhadap penambahan unit puskesmas di hampir semua daerah di Provinsi Papua. Hal tersebut terlihat dari selisih kondisi pada tahun 2012 dengan kodisi di tahun 2016 dan perubahan tersebut terlihat di setiap masing-masing wilayah adat baik Mamta, Saereri, La Pago, Mee Pago maupun Anim Ha.

Gambar 2.79. Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2016

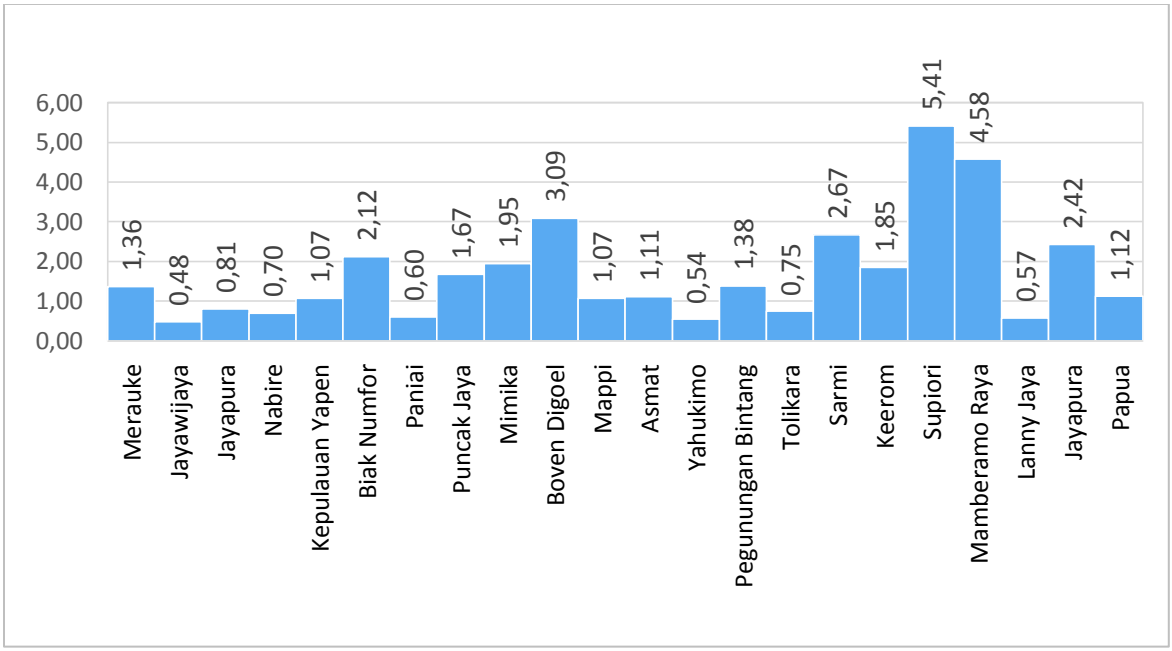

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Sebaran puskesmas di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016 dapat dikatakan belum terdistribusi secara merata ke 29 kabupaten/kota. Terdapat ketimpangan distribusi ketersediaan puskesmas di 29 kabupaten/kota di Papua, khususunya di wilayah adat La Pago dan Mee Pago yang tercatat rata-rata dalam pelayanan kesehatan 10.000 penduduk adalah sebanyak 2-18 unit puskesmas saja. Meskipun tidak semua kabupaten memiliki ketersediaan puskesmas yang terbilang cukup rendah di dua wilayah adat tersebut.

Gambar 2.80. Cakupan Puskesmas per 10.000 Penduduk di Provinsi Papua

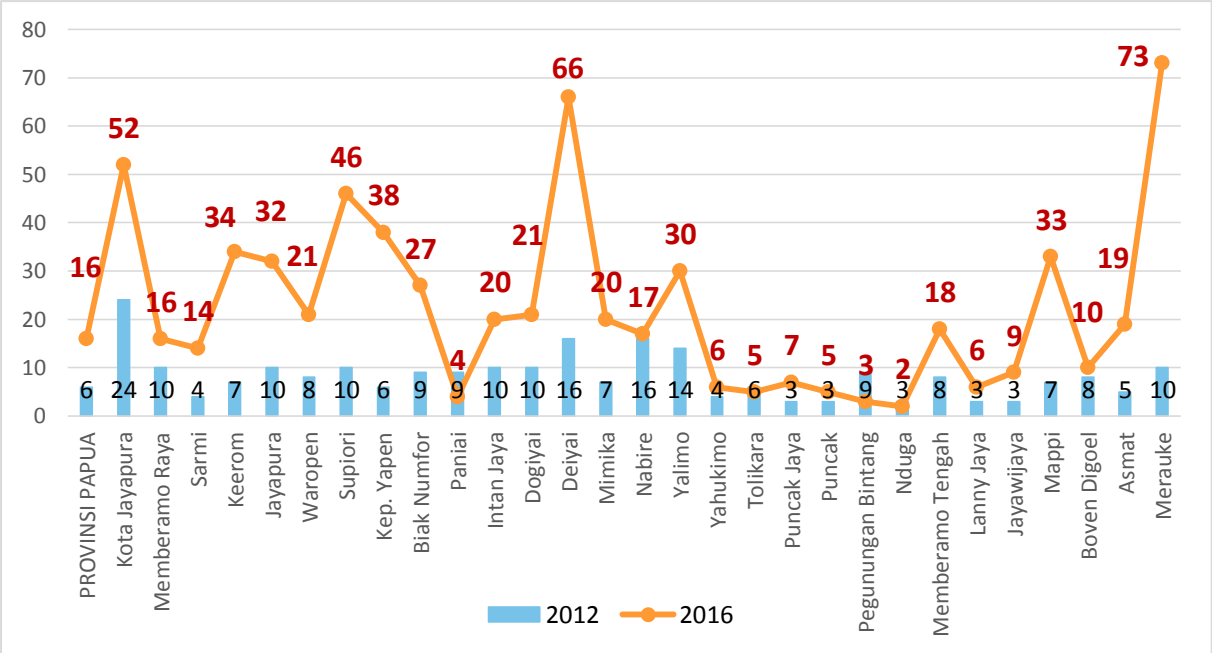

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Gambar 2.81. Rasio Dokter dan Tenaga Medis per 100.000 Penduduk

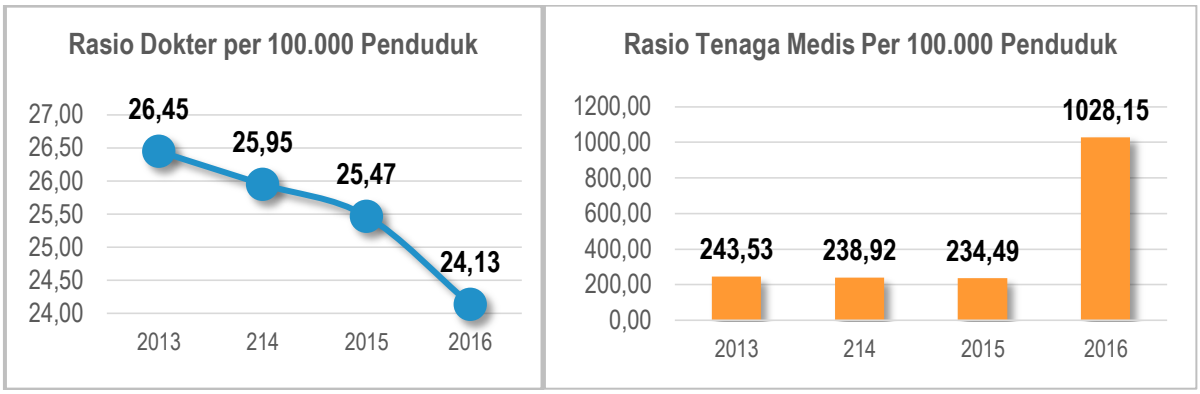

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Dari Gambar 2.81, diketahui bahwa ketersediaan tenaga dokter di Provinsi Papua terlihat memiliki tren yang terus mengalami penurunan yang tidak signifikan hingga di tahun 2016 yaitu sebesar 24,13 dokter per 100.000 penduduk di seluruh Papua. Pada tahun 2013 tercatat rasio dokter per 100.000 penduduk adalah sebesar 26 dokter per 100.000 penduduk, kemudian tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan sampai dengan tahun 2016.

Ketersediaan tenaga medis juga merupakan salah satu pelengkap dari berjalannya sektor kesehatan yang optimal. Dari Gambar 2.8181, diketahui bahwa perkembangan ketersediaan tenaga medis di Provinsi Papua terlihat terus mengalami peningkatan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2013-2015, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015-2016. Sampai dengan tahun 2016, rasio ketersediaan mencpai 1.028 orang untuk 100.000 penduduk.

4) Perkembangan Penanganan Penyakit Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit endemis di Provinsi Papua, meskipun nilainya tidak terlalu signifikan di semua wilayah di 29 kabupaten/kota di Papua. Dari gambar yang terlihat di bawah ini, situasi penyakit malaria di Provinsi Papua terbilang cukup tinggi bahkan tercatat paling tinggi pada tingkat nasional. Selain itu, penyakit malaria di Provinsi Papua cenderung meningkat sepanjang tahun 2013-2017.

Gambar 2.82. Angka Penderita Malaria di Provinsi Papua Dan Indonesia Tahun 2013-2017

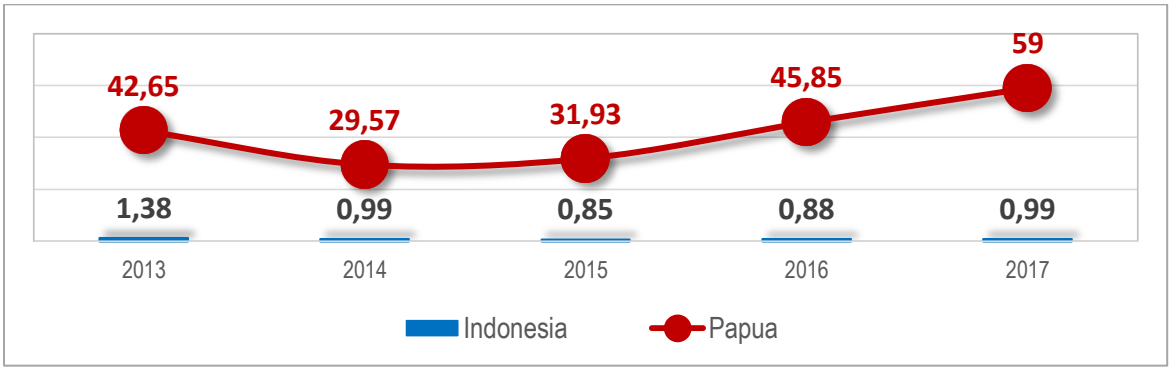

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2017
Keterangan: Annual Parasite Incidence (API) atau angka penderita malaria per 1.000 penduduk.

Pada tahun 2013 tercatat kasus penderita penyakit malaria mencapai 43 kasus per 1.000 penduduk, meskipun pada tahuan 2013-2014 sempat mengalami penurunan, namun kembali terjadi paningkatan hingga tahun 2017 yaitu sebesar 59 kasus penyakit malaria per 1.000 penduduk di Provinsi Papua. Angka Penderita Malaria tertinggi di papua terdapat pada beberapa daerah seperti Merauke, Mappi,Asmat dan Boven Digoel, Supiori, Waropen, Kepulauan Yapen, Intan Jaya, Paniai, Nabire, Deiyai, Mimika, Puncak Jaya, Yalimo Pegunungan Bintang, Yahukimo, Kota Jayapura, Jayapura, Mamberamo Raya, Keerom dan

Sarmi dengan kisaran 6,60- 404,65%. Sedangkan daerah dengan angka penderita malaria terendah adalah Lanny Jaya, Tolikara dan Puncak dengan kisaran API sebesar 0,23 sampai dengan 0,59%.

Gambar 2.83. Angka Penderita Malaria DI Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2013-2017

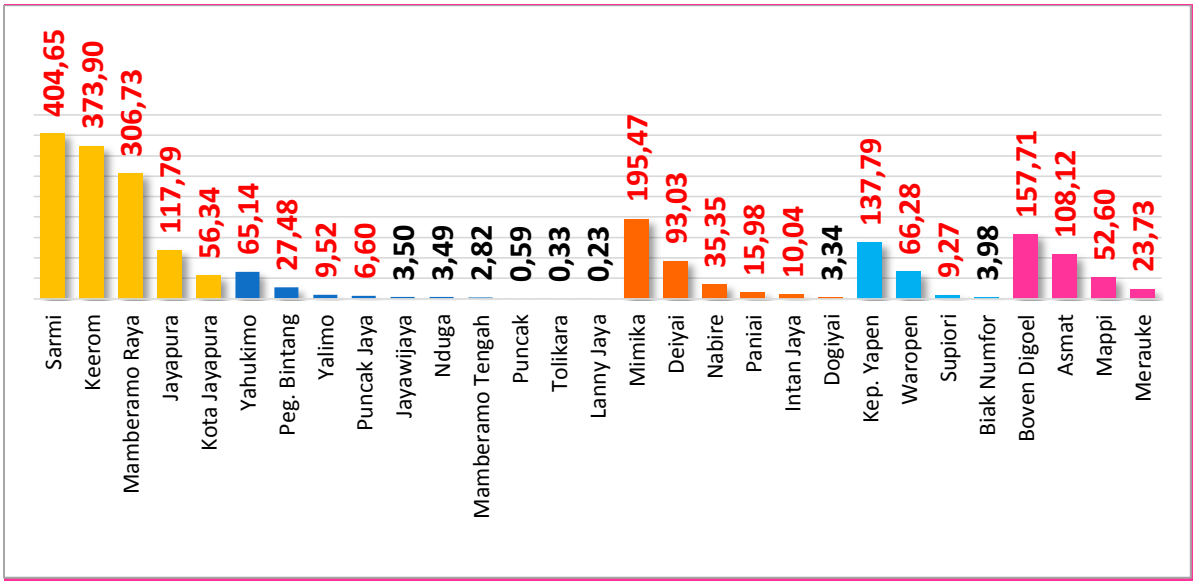

Sumber: Balai Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2018 (data diolah)

5) Perkembangan Penanganan Penyakit HIV/AIDS

Perkembangan HIV/AIDS di Provinsi Papua terlihat terus mengalami peningkatan baik penderita HIV, AIDS bahkan kasus kematian. Tercatat sampai dengan tahun 2016 triwulan ke IV terdapat 9.969 kasus pengidap HIV, 17.004 pengidap AIDS dengan 1.883 kasus kematian (lihat Gambar 2.8484).

Gambar 2.84. HIV/AIDS di Provinsi Papua (orang)

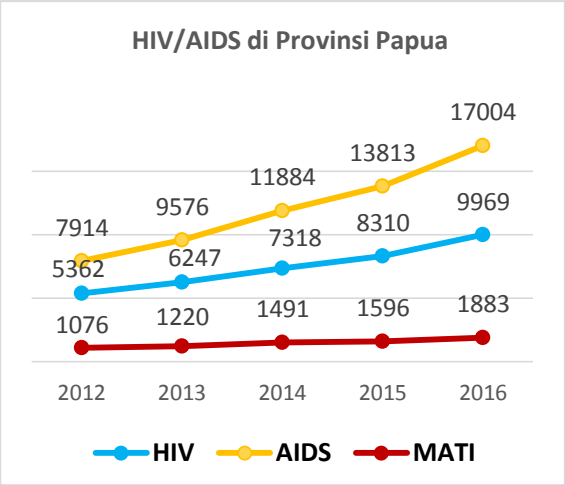

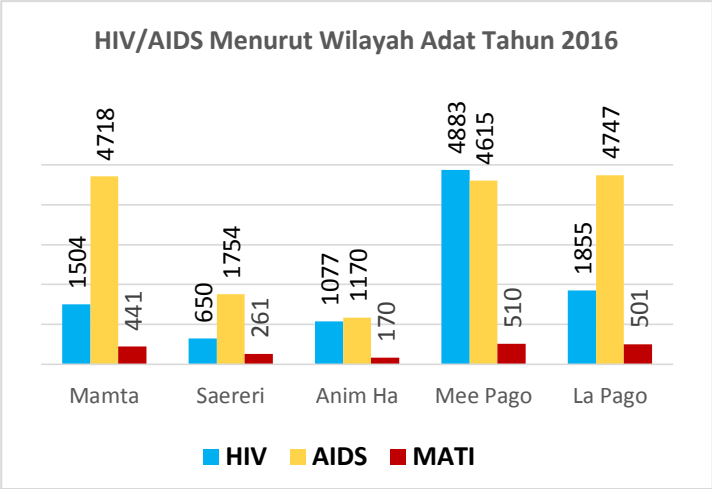

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Gambar 2.85. HIV/AIDS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

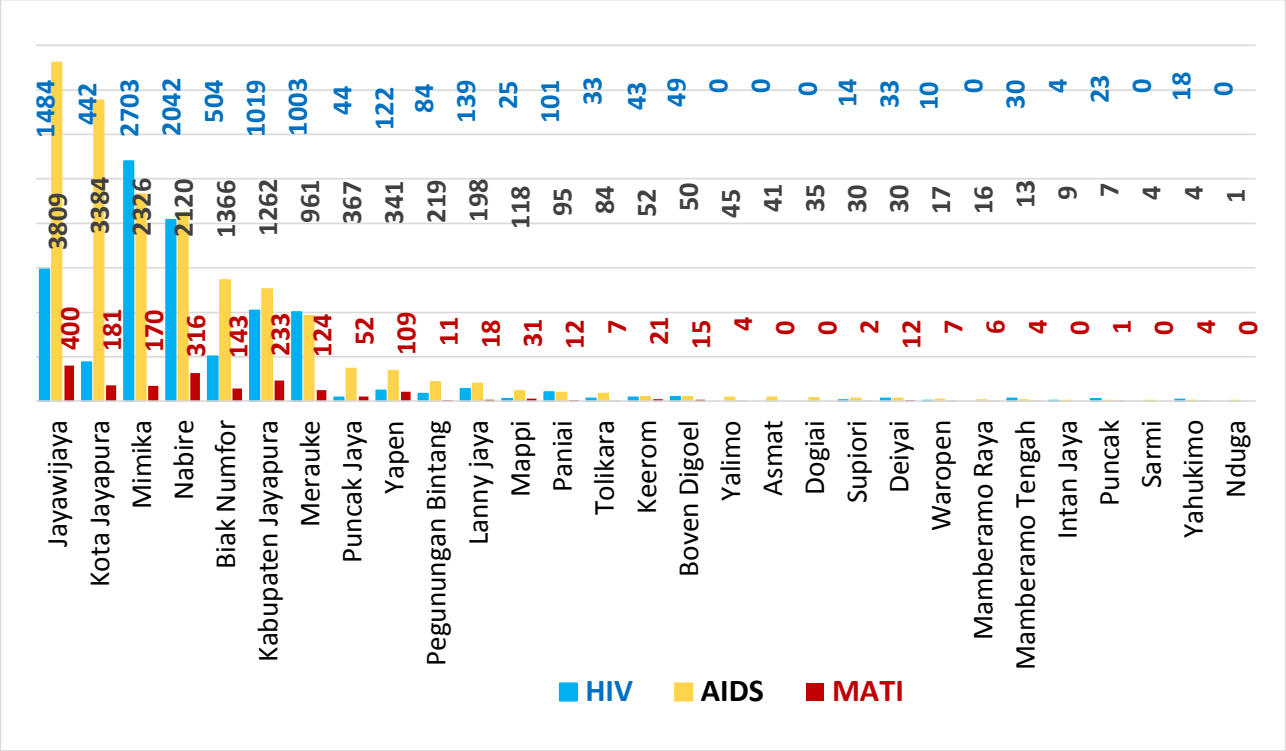

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Secara keseluruhan, kasus pengidap HIV/AIDS dan kematian atas penyakit tersebut ada tersebar di 29 kabupaten/kota dengan jumah yang bervariasi. Sedangkan daerah dengan kasus pengidap HIV terbanyak sampai dengan tahun 2016 adalah wilayah Mee Pago yaitu sebesar 9.766 kasus, kemudian pengidap AIDS terbanyak adalah wilayah La Pago adalah sebesar 9.494 kasus dan kasus kematian HIV/AIDS adalah wilayah Mee Pago adalah sebanyak 1.020 kasus.

6) Perkembangan Penanganan Ibu Hamil

Cakupan kunjungan K4 merupakan indikator penting yang dapat menggambarkan tingkat pemeriksaan yang didapatkan oleh ibu saat masa kehamilan. Secara umum, cakupan kunjungan K4 di Provinsi Papua mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2012-2017. Namun demikian, terdapat 4 dari 5 wilayah adat dengan rata-rata cakupan K4 di bawah rata-rata provinsi. Meskipun demikian, persebaran capaian Kunjungan K4 di Mamta sangat timpang. Capaian Kunjungan K4 tertinggi dimiliki oleh Kota Jayapura dengan persentase mencapai 73,7% pada akhir tahun 2017. Persentase tersebut sepuluh kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan persentase Kunjungan K4 di Mamberamo Raya sebagai yang terendah.

Gambar 2.86. Cakupan Kunjungan K4 di Provinsi Papua

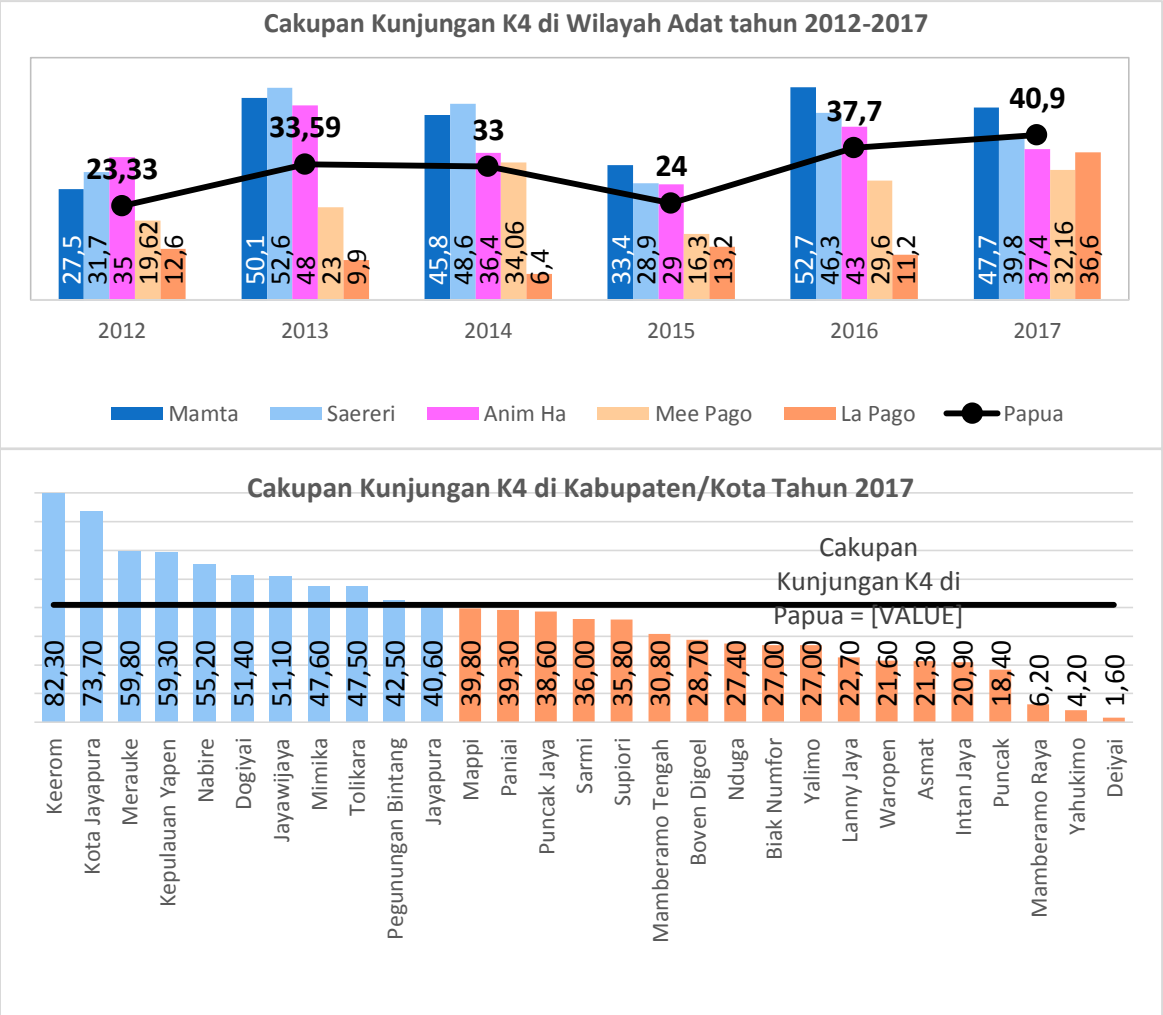

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Aksesibiltas dan Mobilitas Daerah

Lima kabupaten/kota dengan jalan provinsi terpanjang di Papua terdapat di Kabupaten Merauke 419,10 km (14,17%), Kabupaten Jayapura 384,10 km (12,99%), Kabupaten Kepulauan Yapen 175,01 km (5,92%), Kabupaten Biak Numfor 172 km (5,82%), dan Kabupaten Mimika 162,10 km (5,48%).

Berdasarkan jenis permukaannya, panjang jalan di Papua yang sudah dilapisi aspal sepanjang 1.025,18 km (34,66%) dan yang belum dilapisi aspal atau jalan lainnya

sepanjang 1.932,46 km (65,34%). Jalan aspal terpanjang terdapat di Kabupaten Merauke 229,10 km (22,35%), Kabupaten Jayapura 178 km (17,36%), Kabupaten Biak Numfor 164,40 km (16,04%), Kota Jayapura 96,38 km (9,40%), dan Kabupaten Kepulauan Yapen 58 km (5,66%).

Gambar 2.87. Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Tahun 2016

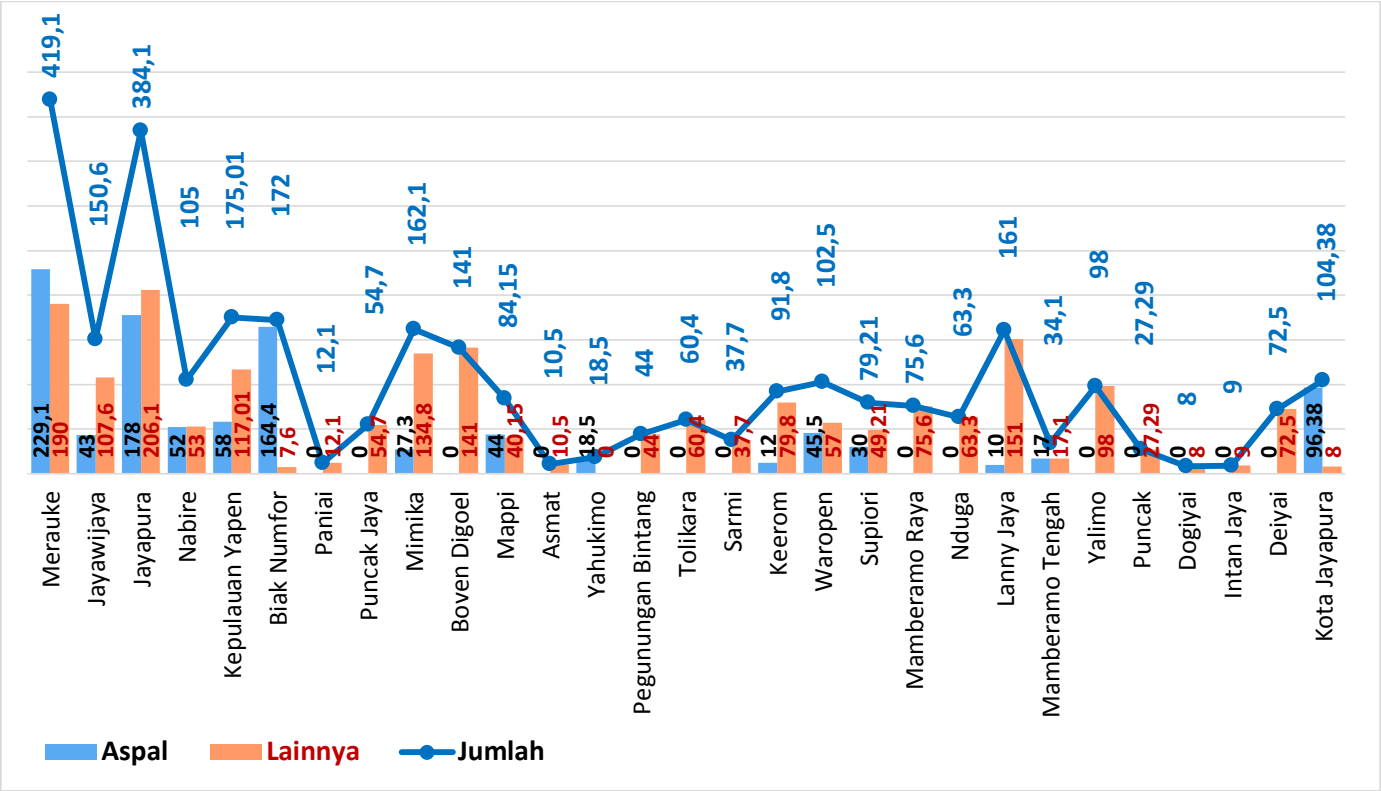

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Pada tahun 2016, sepertiga dari panjang jalan provinsi di Papua berada dalam kondisi baik yaitu sepanjang 1.014,78 km (34,31%), kondisi sedang sepanjang 378,60 km (12,80%), sisanya dengan persentase yang cukup besar (52,89%) berada dalam kondisi rusak dan rusak berat. Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, dan Kota Jayapura merupakan kabupaten yang kondisi jalan provinsinya sudah baik secara umum, dimana persentase panjang jalan kondisi baik lebih besar dari jalan kondisi sedang, rusak, dan rusak berat. Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten

Lanny Jaya, dan Kabupaten Yalimo merupakan kabupaten yang lebih dari 75% jalannya berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Gambar 2.88. Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Papua Tahun 2016 (km)

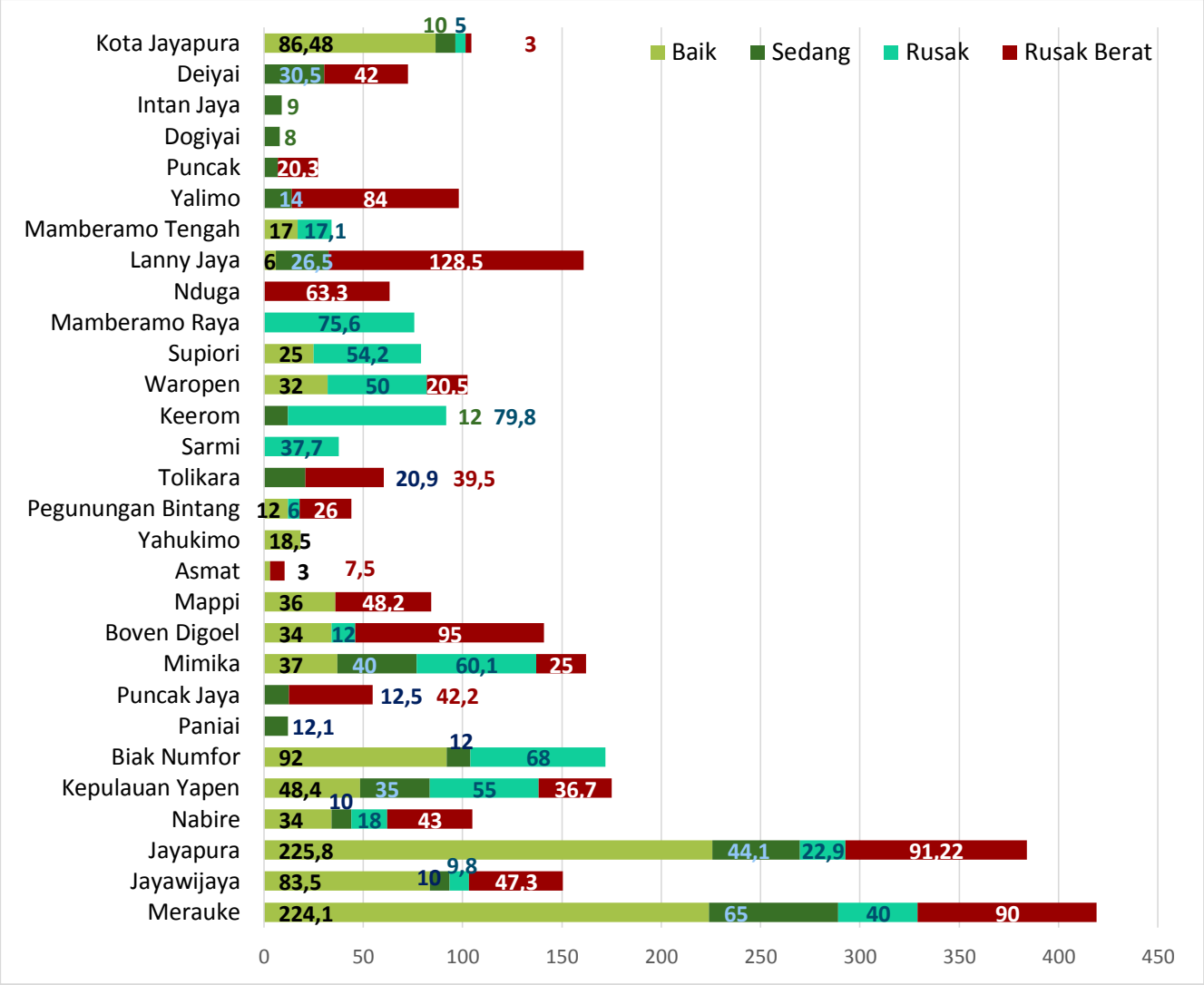

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa pembangunan infrastruktur jalan selama ini belum mampu menaikan rasio mobilitas penduduk secara maksimal di Provinsi Papua.

Peningkatan jalan dari tahun 2013-2016 tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk, sehingga tidak dapat menaikan rasio mobilitas terutama dalam empat tahun terakhir. Rasio mobilitas tahun 2013 sebesar 0.00118 km/jiwa turun menjadi 0.00047 km/jiwa di tahun 2014 kemudian terlihat menurun lagi di tahun 2015 yaitu dari 0.00094 km/jiwa menjadi 0.00092 km/jiwa di tahun 2016 dengan rata-rata penduduk dapat mengakses jalan sebesar 0,00088 km/jiwa.

Gambar 2.89. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

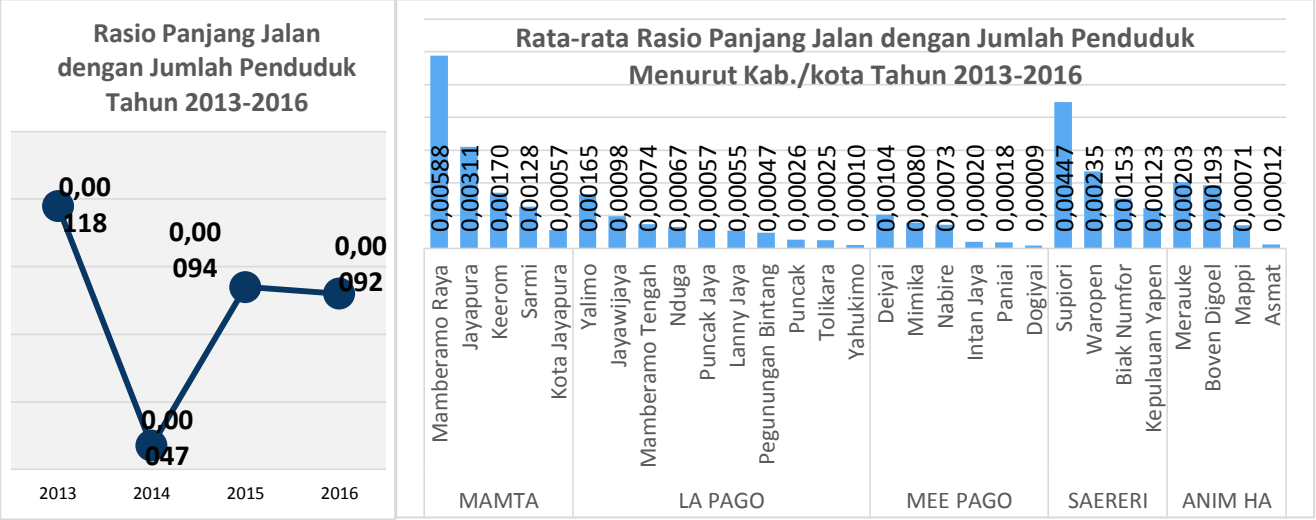

Sumber: Papua Dalam Angka 2018

Berdasarkan kabupaten/kota maka posisi pertama mobilitas penduduk terhadap panjang jalan di Papua yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya (Mamta) dengan nilai rata-rata sebesar 0,00588 km/jiwa, selanjutnya adalah Kabupaten Supiori (Saereri) 0,00447 km/jiwa, Kabupaten Jayapura (Mamta) sebesar 0,00311 km/jiwa. Adapun daerah yang memiliki aksesibilitas penduduk paling rendah adalah Kabupaten Dogiyai (Mee Pago), Yahukimo (La Pago) dan Asmat (Anim Ha) yang masing-masing memiliki rasio mobilitas di bawah 0,00015 km/jiwa.

Gambar 2.90. Akses terhadap Sarana Pendidikan dan Kesehatan

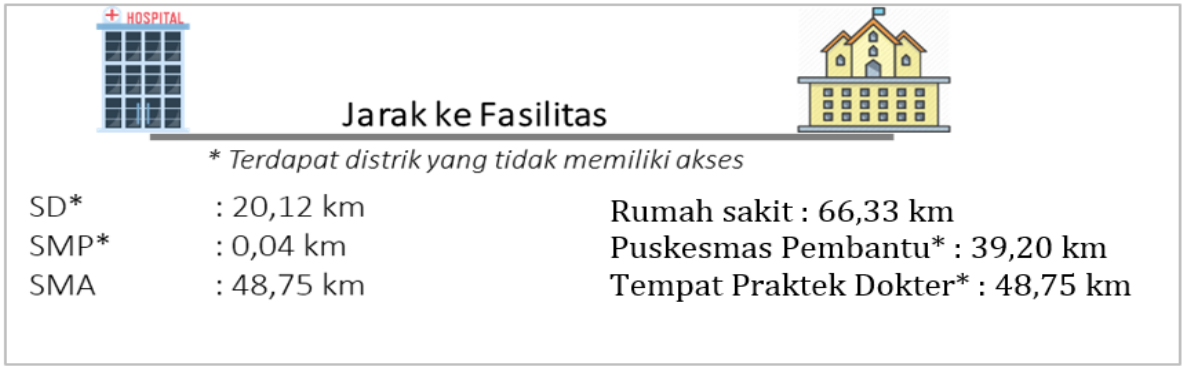

Sumber : data diolah (2018)

Penyediakan akses yang baik diperlukan untuk membuat masyarakat di setiap distrik dapat mengakses pelayanan dasar, berupa pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat praktik dokter, puskesmas dan rumah sakit. Berdasarkan data Podes tahun 2014, diketahui bahwa jarak rata- rata yang harus ditempuh oleh setiap desa di Provinsi Papua cukup beragam untuk setiap jenis sarananya. Rata-rata jarak untuk menempuh sarana pendidikaan berupa sekolah dasar (SD) adalah 20,12 km. Jarak ini cukuplah jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Begitu pun jarak yang harus ditempuh untuk mengakses Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu rata- rata 48,75 km. Berbeda dengan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai SMP, relative lebih dekat yaitu sektiar 0,04 km. Hal ini menunjukkan bahwa akses yang ada masih perlu diperbaiki.Tidak jauh berbeda dengan sarana pendidikan, akses menuju sarana kesehatan pun harus ditempuh dengan jarak yang relative jauh. Untuk mencapai rumah sakit, jarak yang harus ditempuh dari setiap distrik rata- rata adalah sekitr 66,33 km.

Berdasarkan data yang tercantum pada tahun 2014 di dalam Potensi Desa, bukan hanya jarak yang di tempuh relatif jauh dibandingkan dengan wilayah lainnya, akan tetapi diketahui pula bahwa masih terdapat beberapa distrik yang masih belum dapat mengakses sarana pendidikan dan juga kesehatan. Terdapat 20% distrik yang masih belum memiliki akses berupa jaringan jalan yang memadai untuk mencapai SD, 31,37% yang belum memiliki akses ke SMP. Sedangkan untuk akses ke SMA, 96,1% sudah memiliki akses meskipun masih beragam jaraknya. Berbeda dengan sarana pendidikan, distrik yang ada di

Provinsi Papua sudah relative memiliki akses yang lebih baik ke sarana kesehatan. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa ternyata 96% distrik sudah memiliki akses ke tempat praktik dokter, 88,7% memiliki akses ke Puskesmas dan 96,5% sudah memiliki akses ke Rumah sakit.

Dalam meningkatkan konektivitas di daerah jembatan juga merupakan salah satu penujang utama dalam dalam memudahkan adanya aksesibilitas dan mobilisasi daerah. Berdasarkan kondisi jembatan, Gambar 2.91 menunjukan jembatan dalam kondisi baik (28,45%), sedang (18,16%), rusak ringan (21,55%), rusak berat (19,58%), kritis (10,61%) dan runtuh/putus (1,64%).

Gambar 2.91. Jumlah Jembatan berdasarkan Kondisi Tahun 2016

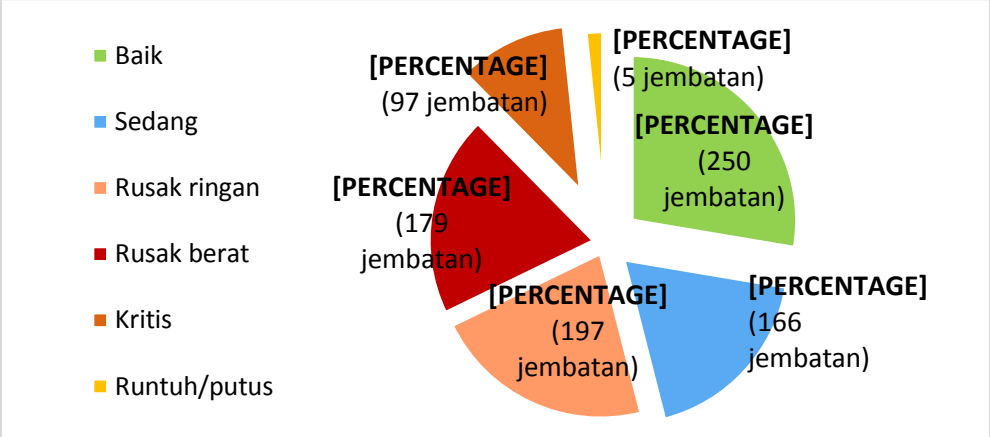

Sumber: Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, 2017 (data diolah)

2) Akses Terhadap Air Bersih dan Air Minum

Secara keseluruhan persentase penduduk berakses air bersih di Provinsi Papua selama tahun 2013-2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Terlihat bahwa sampai dengan tahun 2016 penduduk yang memiliki akses air bersih sebesar 38,47%, yang artinya masih terdapat 61,53% lebih penduduk yang belum memiliki akses terhadap air bersih.

Dari kewilayahan di Provinsi Papua tercatat terdapat 4 (empat) daerah dengan persentase penduduk berakses air bersih cukup tinggi di antaranya adalah Kabupaten

Puncak Jaya (La Pago), Mimika (Mee Pago), Kepulauan Yapen (Saereri) dan Kota Jayapura (Mamta) yang memiliki nilai di atas 70% (lihat Gambar 2.92). Sedangkan beberapa daerah lainnya memiliki penduduk berakses air minum masih di bawah 70%, bahkan terdapat beberapa daerah yang penduduknya berakses air bersih cukup rendah yang rata-rata didominasi oleh daerah di wilayah adat La Pago.

Selanjutnya jika dilihat pada Gambar 2.93, persentase penduduk yang berakses air minum pada tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan yang lebih baik, meskipun terbilang masih cukup rendah. Pada tahun 2013 tercatat penduduk yang dapat berakses air minum adalah sebesar 24,75%, kemudian meningkat sampai dengan tahun 2017 sebesar 28,34%. Dari 29 kabupaten/kota terdapat beberapa daerah yang persentase penduduk berakses air minum cukup tinggi di ataranya adalah Kota Jayapura (Mamta) dan Kabupaten Mimika (Mee Pago) yaitu masing-masing sebesar 89,85 dan 90,12%. Sedangkan daerah lain khususnya di wilayah La Pago memiliki persentase akses air minum bisa dibilang sangat rendah dan beberapa terdapat di daerah Mee Pago.

Gambar 2.92. Penduduk Berakses Air Bersih di Provinsi Papua

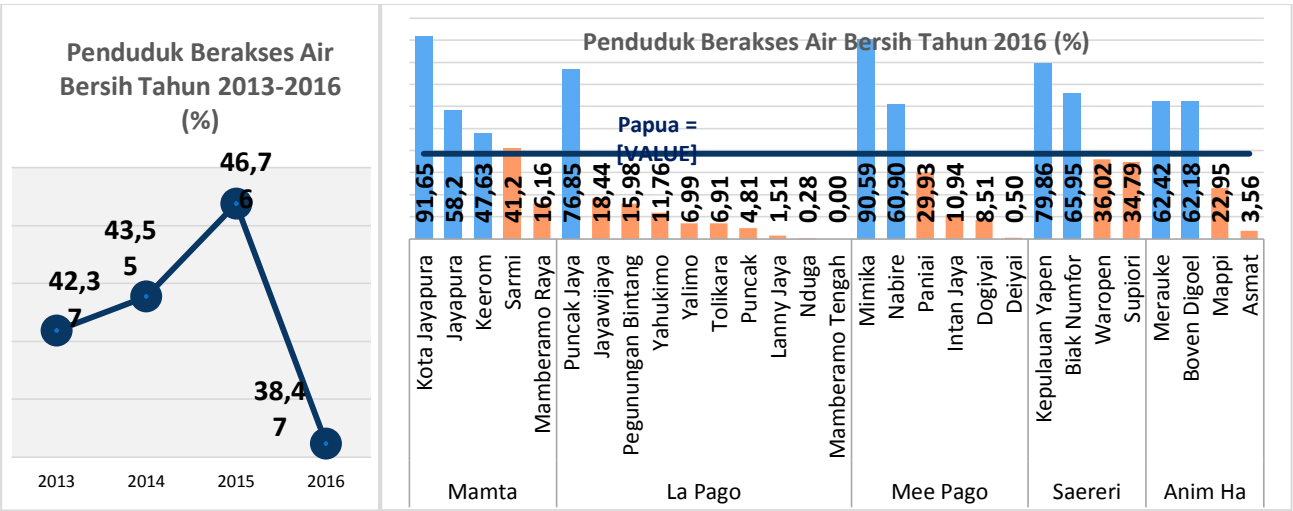

Sumber: IKP, 2017 (data diolah)

Gambar 2.93. Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Provinsi Papua

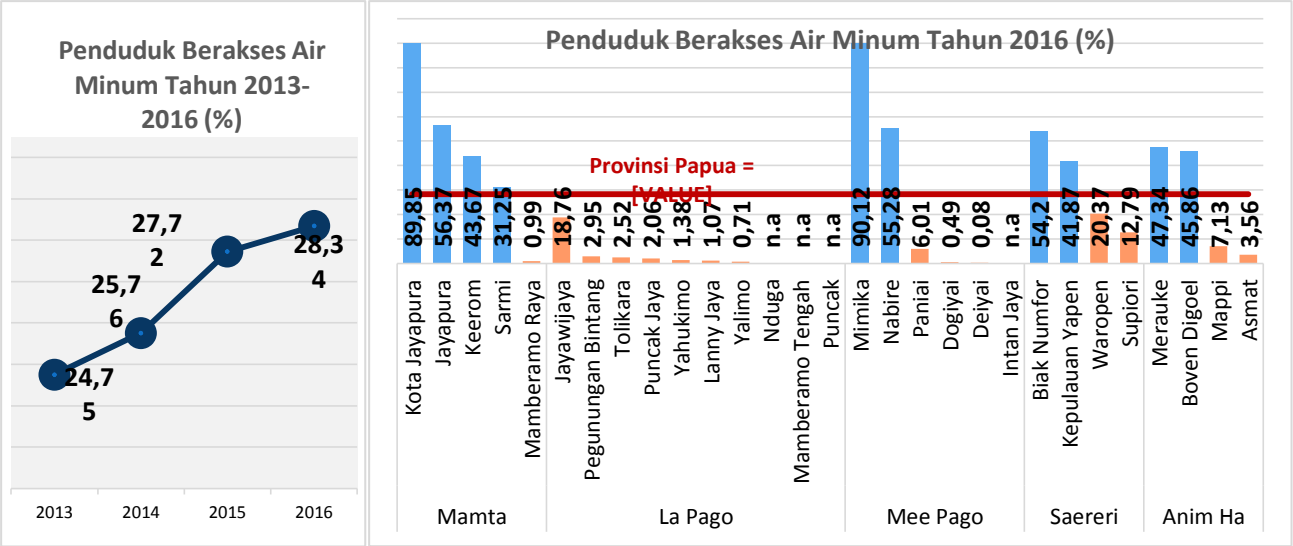

Sumber: IKP, 2017

Berdasarkan Gambar 2.94, juga diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Papua memperoleh sumber air minum yang berasal dari mata air terlindung/tak terlindung (53,12%) serta air hujan (21,94%). Terdapat pula sumber-sumber lainnya seperti air sumur timba, sungai, danau, dan kolam namun tidak menjadi dominasi untuk sumber air minum di Provinsi Papua. Berbeda dengan air minum, untuk kebutuhan memasak/ mencuci/ mandi dan sebagainya, dominasi masyarakat Papua memanfaatkan sumber air sungai/danau/kolam (50,91%), dan mata air (29,41%).

Gambar 2.94. Sumber Air Minum, Mandi, dan Cuci Dominan

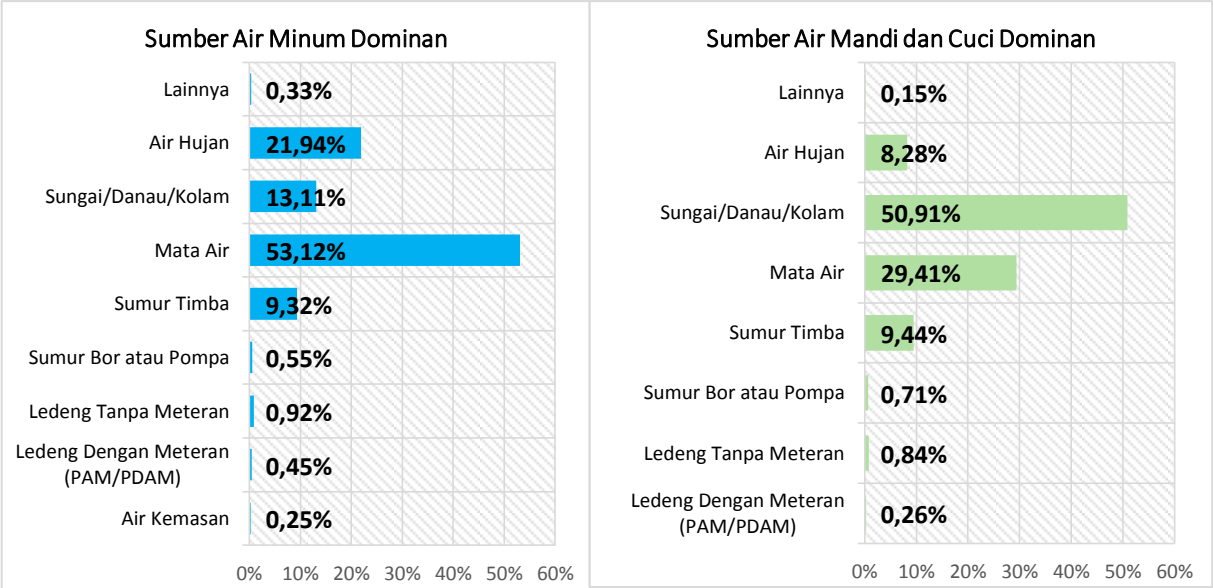

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Jumlah perusahaan air bersih di Provinsi Papua pada tahun 2014 tercatat menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 8 perusahaan yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota. Kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 19 liter per detik (1,15%) yaitu dari 1.642 liter per detik menjadi 1.661 liter per detik. Sedangkan untuk kapasitas produksi efektif pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 119 liter per detik (10,79%) yaitu dari 1.102 liter per detik menjadi 983 liter per detik.

Jumlah pelanggan air bersih di Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 perusahaan air bersih mempunyai pelanggan sebanyak 42.547 pelanggan dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 65.265 pelanggan. Pelanggan non niaga (rumah tangga dan pemerintah) merupakan pengguna dengan jumlah terbesar yaitu sebanyak 59.747 pelanggan atau sebesar 91,55 persen dari total pelanggan pada tahun 2014. Kabupaten Nabire (30,87%) dan Kota Jayapura (43,65%) merupakan wilayah dengan jumlah pelanggan PDAM terbesar di Provinsi Papua.

Gambar 2.55. Persentase Pelanggan PDAM di Provinsi Papua Tahun 2014

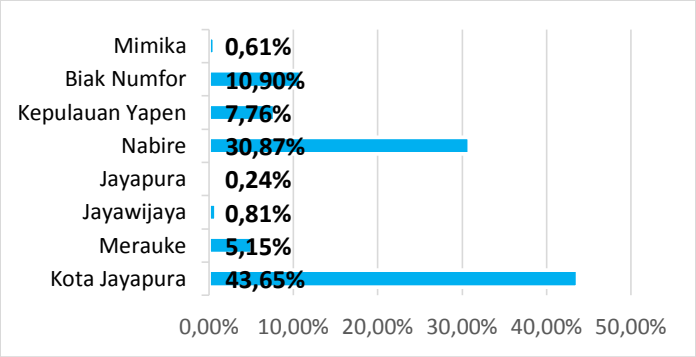

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Volume air bersih yang disalurkan kepada pelanggan pada tahun 2014 adalah sebesar 15,41 juta meter kubik, sedangkan pada tahun 2013 volume air bersih yang disalurkan adalah sebesar 14,40 juta meter kubik. Ini berarti selama periode 2013 sampai dengan 2014 air bersih yang disalurkan mengalami pertumbuhan sebesar 7,04%. Berdasarkan kelompok pengguna, pelanggan non niaga (rumah tangga dan pemerintah) merupakan pengguna air bersih terbesar selama tahun 2014 yaitu sebesar 12,6 juta meter kubik.

3) Akses Terhadap Infrastruktur Air Limbah

Pada tahun 2015, Provinsi Papua beserta beberapa provinsi di Indonesia tergolong pada kategori tinggi untuk persentase rumah tangga yang tidak memiliki jamban layak, yakni >50%. Persentase ini tergolong cukup tinggi ika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat yang berkisar 45-49% (lihat Gambar).

Gambar 2.95. Persentase Rumah Tangga dengan Jamban Tidak Layak Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2015

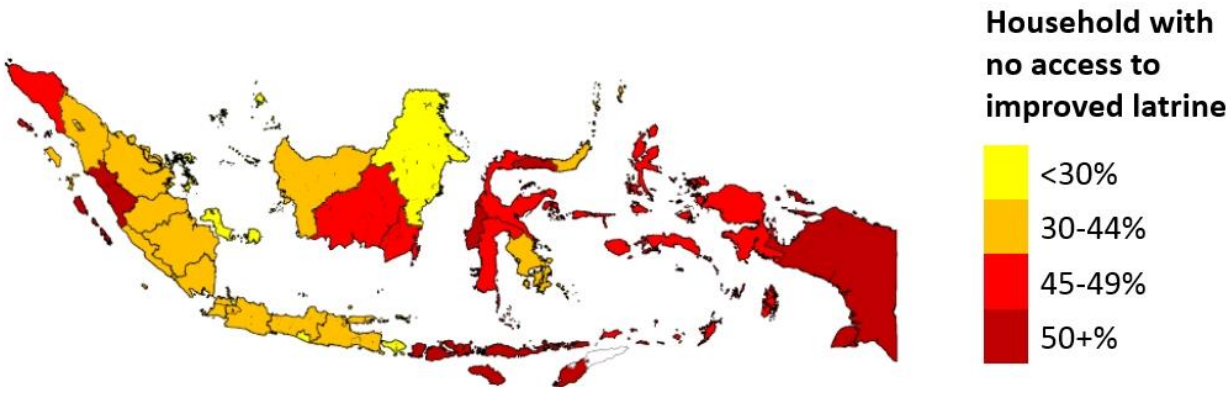

Sumber: *Millenium Challenge Account* Indonesia, 2018

Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar setiap tahun terlihat meningkat. Pada tahun 2013 untuk rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri sebanyak 45,07% dan meningkat hingga 55,73% pada tahun 2017. Peningkatan tersebut menunjukkan salah satu keberhasilan pemerintah dalam memberikan kesadaran akan pentingnya fasilitas buang air besar bagi masyarakat guna peningkatan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.57. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Sendiri	45,07	46,16	56,18	56,09	55,73
Bersama	13,94	11,63	12,52	7,33	8,19
Umum	3,15	2,94	3,23	3,12	4,87
Ada, ART Tidak Menggunakan	n.a	n.a	n.a	0,36	0,37
Tidak Ada	37,84	39,27	28,07	33,10	30,84

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Statistik Kesejahteraan Rakyat (2013-2017)

Pada tahun 2017, sebagian besar atau 56% penduduk telah memiiki fasulitas buang air besar yang hanya digunakan untuk 1 rumah tangga sendiri. Namun demikian, pada tahun 2017 masih juga terdapat 31% rumah tangga yang tidak memiliki akses ke fasilitas buang air besar. Di samping itu, terdapat pula sebagian kecil fasilitas buang air besar yang digunakan secara bersama dengan sistem komunal baik dalam bentuk MCK umum ataupun digunakan bersama dengan rumah tangga lain. Berdasarkan jenis kloset yang digunakan, 62% penduduk menggunakan jenis kloset leher angsa. Penggunaan lengsengan dengan/tanpa tutup menunjukkan prosentase yang cukup kecil yakni hanya sekitar 13% saja untuk digunakan sebagai kloset. Terdapat pula penggunaan cemplung/cubluk (25%) untuk jenis kloset lainnya di tahun 2017. Adapun berdasarkan jenis tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan, 51% penduduk telah memiliki tangka septik sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Penduduk yang membuang tinja ke IPAL hanya berkisar 2% saja. Terdapat 37% penduduk, yang membuang akhir tinja ke lubang tanah, pantai, kebun, lapang, kolam, sawah, sungai, danau, laut, maupun di tempat terbuka lainnya sehingga mencemari lingkungan.

Gambar 2.96. Kondisi Ketersediaan Infrastruktur Air Limbah Domestik di Provinsi Papua Tahun 2017

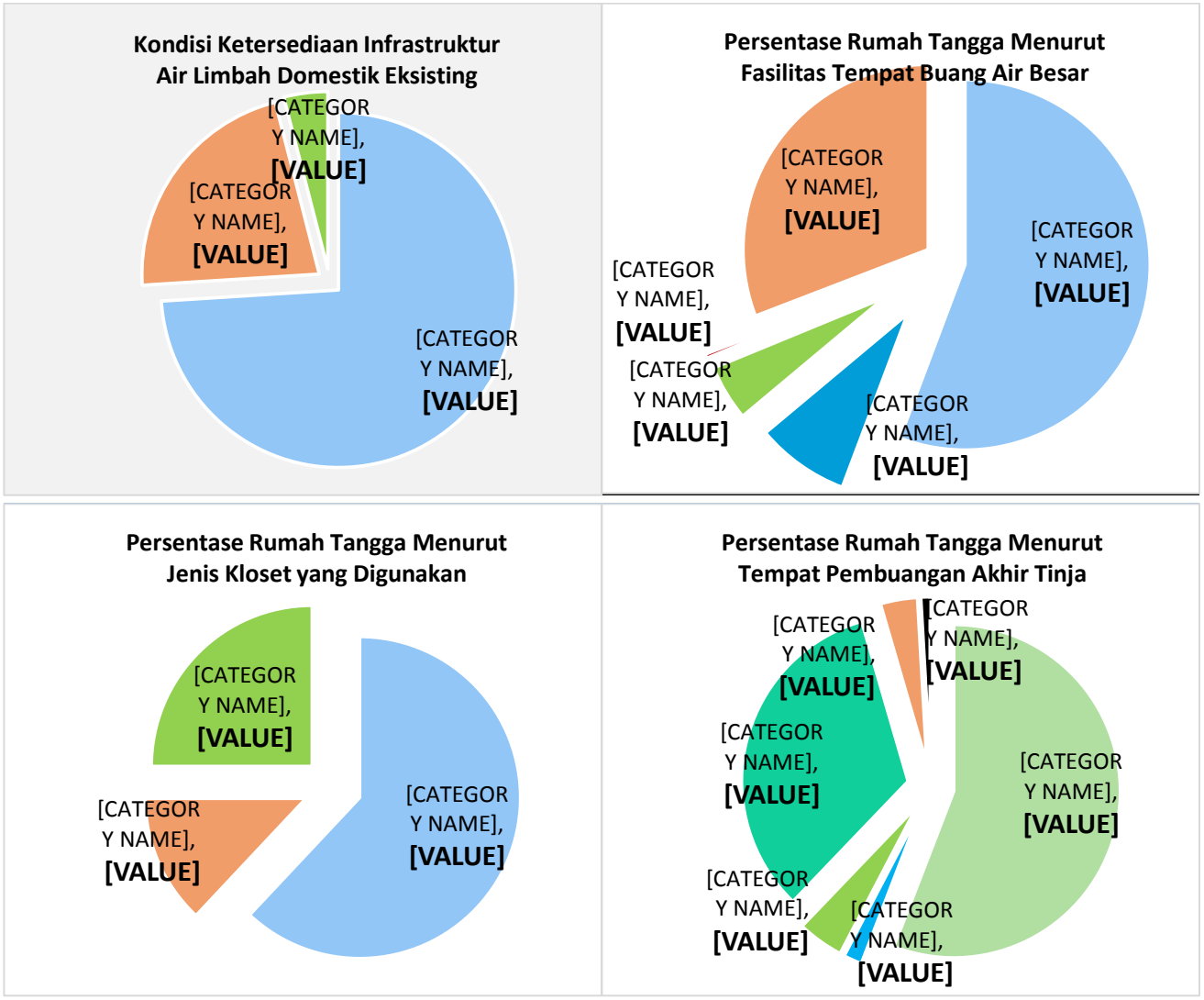

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

4) Persampahan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2005-2025, pembangunan infrastruktur persampahan sejalan dalam mendukung misi ke-III pembangunan jangka panjang Provinsi Papua, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah. Pengembangan infrastruktur persampahan, pembangunan jangka panjang Provinsi Papua diarahkan pada peningkatan kualitas dan

kuantitas pelayanan yang terintegrasi antar wilayah yang didukung sistem pengelolaan berbasis masyarakat untuk mempertahankan kualitas lingkungan.

Masih rendahnya implementasi dari 3R (*Reuse, Recycle* dan *Reduce*) terhadap sumber sampah baik di sumber maupun di tempat pengumpulan sampah menjadi salah satu indikasi pengelolaan sampah yang belum baik. Di samping itu terbatasnya sarana persampahan di masing-masing distrik menjadi salah satu kendala yang cukup besar. Provinsi Papua mengalami tren penurunan keterangkutan sampah ke TPA dari tahun 2013 yang semula sebesar 12,33% menjadi 9,38% pada tahun 2018. Hal tersebut meningkatkan ketidakterolahan sampah domestik dari 74% pada tahun 2013 menjadi 80% pada tahun 2018 (lihat Gambar 2.97).

Gambar 2.97. Kondisi Penanganan Sampah di Provinsi Papua 2013-2018

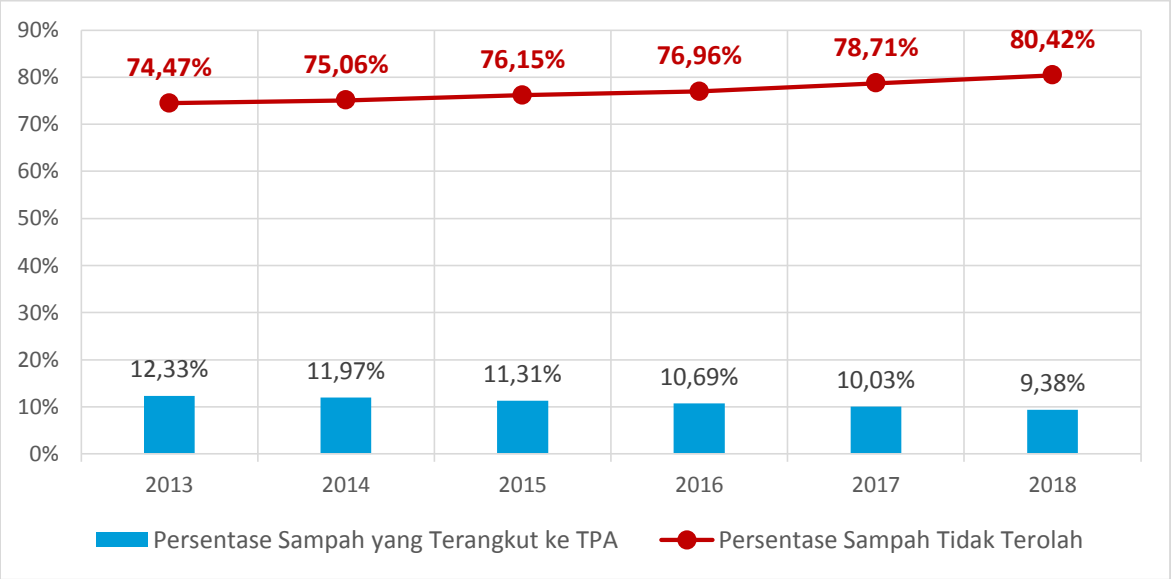

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Pengelolaan sampah di Provinsi Papua saat ini masih mengandalkan sistem swadaya atau tidak tersentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan TPS yang hanya tersebar di 1% dari total distrik saja di Provinsi Papua (lihat Gambar 2.99). Oleh karena keterbatasan pelayanan persampahan tersebut, maka hanya 0,65% kampung saja yang membuang sampah ke tempat sampah lalu diangkut. Sebanyak 22,1% kampung mengelola sampah secara dominan di dalam lubang atau dibakar, dan masih terdapat

6,85% desa lainnya yang membuang sampah ke badan air. Namun demikian, sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat di sumber sangatlah kecil. Pada tahun 2018 hanya 0,40% saja sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat di sumber, sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 2.98.

Gambar 2.98. Tempat Buang Sampah Dominan (Kiri); Persentase Sampah yang Dikelola secara Mandiri oleh Masyarakat di Sumber (Kanan)

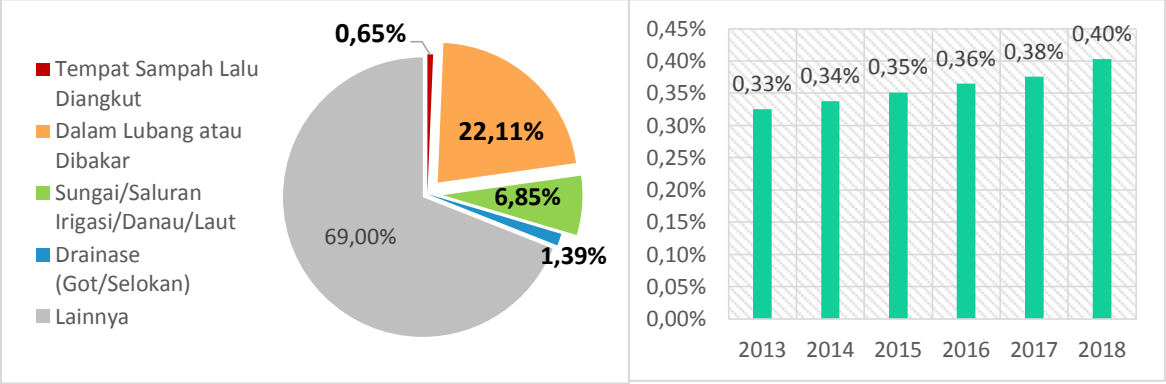

Sumber: Podes Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Gambar 2.99. Ketersediaan Infrastruktur Persampahan Domestik Papua

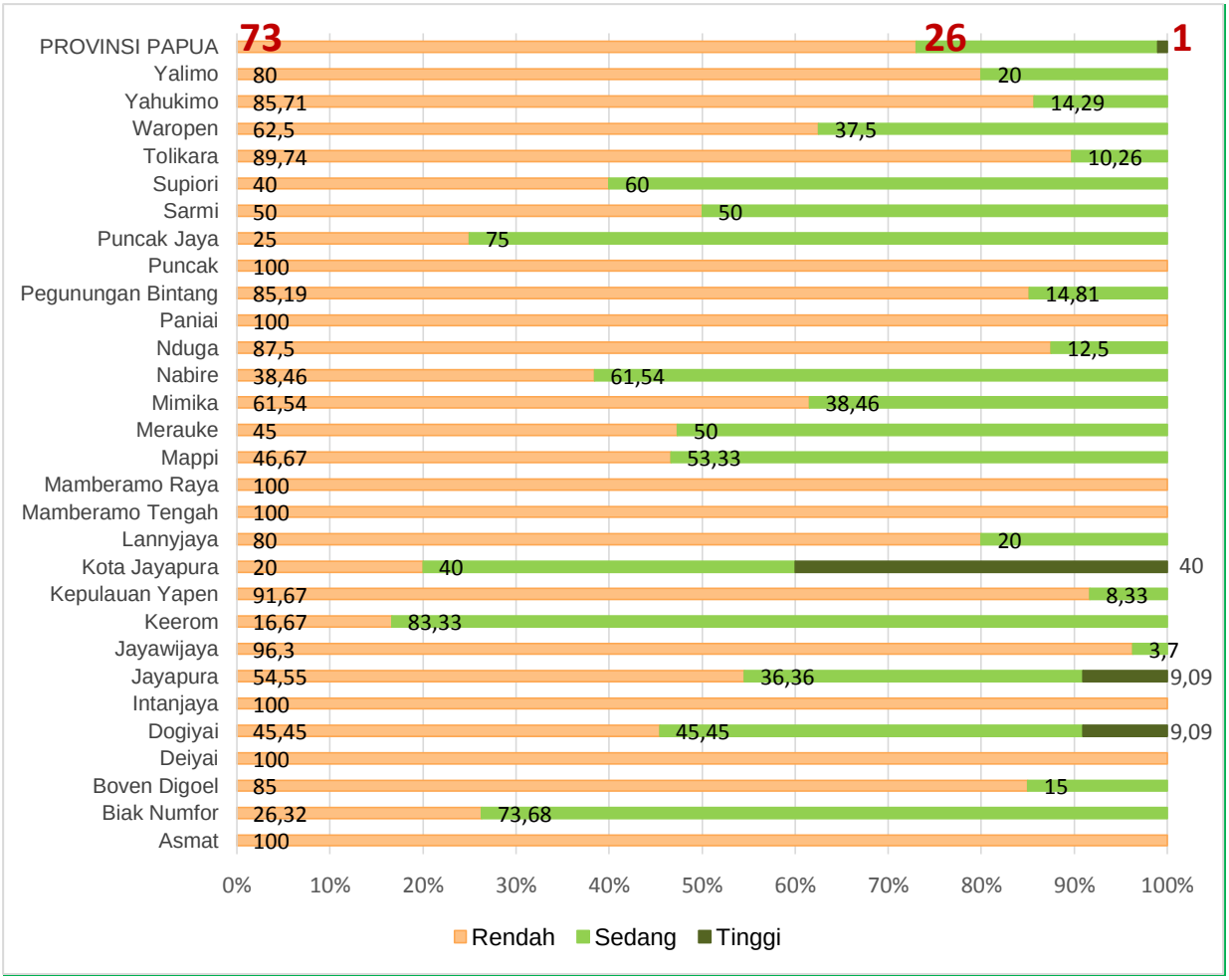

Sumber: Podes Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 2.99, sebagian besar distrik di Provinsi Papua (73%) memiliki status "rendah" dalam penyediaan infrastruktur persampahan domestik. Namun demikian, perlu dipikirkan pula upaya peningkatan pada 26% distrik dengan status penyediaan eksisting "sedang" dan upaya pemeliharaan status "tinggi" bagi distrik-distrik yang telah memiliki kategori cukup baik dalam penyediaan persampahan domestik eksisting. Adapun kabupaten dengan jumlah distrik lebih dari 50% yang berstatus "rendah" berada di hampir semua kabupaten kecuali Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kota Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Supirori. Penilaian rendah tersebut disebabkan karena masih banyaknya penggunaan drainase (got/selokan) dan

sungai/saluran irigasi/danau/laut sebagai tempat buang sampah bagi sebagian besar keluarga di masing-masing distrik. Pembuangan sampah ke badan air merupakan tindakan yang akan mencemarkan badan air yang akan berpengaruh ke ekosistem secara keseluruhan.

5) Tempat Ibadah

Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,93% pertahun. Tercatat sampai dengan tahun 2017 rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk adalah sebesar 27 unit. Artinya untuk 10.000 penduduk dapat dilayani oleh 27 unit tempat ibadah. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, terdapat beberapa daerah dengan perbandingan yang cukup tinggi terhadap 10.000 penduduk dan sebaran rumah ibadah di 29 kabupaten/kota sepanjang tahun 2013-2017 sangat bervariasi.

Tabel 2.33. Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua	22,45	22,02	24,65	23,76	26,63
MAMTA					
Jayapura	41,62	40,78	49,01	39,52	47,95
Sarmi	32,71	31,74	31,34	34,72	51,30
Keerom	40,06	39,33	37,39	36,78	70,16
Mamberamo Raya	21,81	21,45	22,85	24,04	0,90
Kota Jayapura	22,65	22,53	22,13	28,21	18,39
LA PAGO					
Jayawijaya	26,79	26,65	26,37	26,11	19,45
Puncak Jaya	20,89	20,66	29,83	28,39	19,01
Yahukimo	24,16	23,74	29,89	29,42	29,57
Pegunungan Bintang	29,15	28,57	30,12	29,79	27,90
Tolikara	27,53	27,05	26,35	25,11	25,26
Nduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Lanny Jaya	13,78	13,01	12,86	0,00	14,04
Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00	19,49	18,53
Yalimo	23,31	22,23	21,74	0,00	20,06
Puncak	0,00	0,00	0,00	24,64	24,95
MEE PAGO					
Nabire	33,07	32,95	35,53	40,69	36,66
Paniai	29,26	29,05	28,73	14,10	9,81
Mimika	36,81	36,27	35,85	35,75	26,33
Dogiyai	12,54	12,33	12,15	14,71	113,58
Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
SAERERI					
Kepulauan Yapen	27,29	26,79	27,32	22,92	36,73
Biak Numfor	19,70	19,42	24,28	27,68	19,77
Waropen	17,76	17,56	17,07	18,18	43,08
Supiori	26,48	25,95	25,36	22,76	35,59
ANIM HA					
Merauke	18,44	18,34	52,30	34,82	22,79
Boven Digoel	31,82	31,58	53,81	51,45	41,54
Mappi	50,61	49,43	48,80	70,94	22,39
Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.4.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kondisi perumahan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 memiliki trend yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Peningkatan jumlah rumah layak huni terjadi pada tahun 2013-2015 yaitu sebesar 4.025 unit (2015), namun terjadi penurunan jumlah unit sampai dengan tahun 2017 (1.878 unit). Secara kumulatif total rumah layak huni yang terbangun hingga tahun 2017 sebanyak 13.685 unit (lihat Gambar 2.100). Perbandingan ketersediaan rumah layak huni untuk 100.000 penduduk di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2017 adalah 58 unit/100.000 penduduk.

Gambar 2.100. Kondisi Rumah Layak Huni di Provinsi Papua

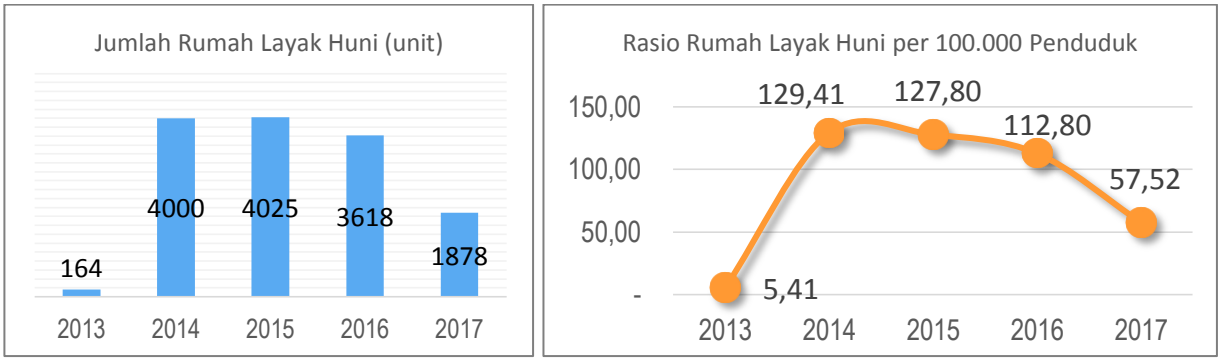

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan

tentram, tertib, dan teratur. Perlindungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentraman dan ketertiban umum, karena mencakup persiapan dan pembekalan masyarakat dalam penangangan bencana, maupun keikutsertaan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Gambar 2.101. Kondisi Penyenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua

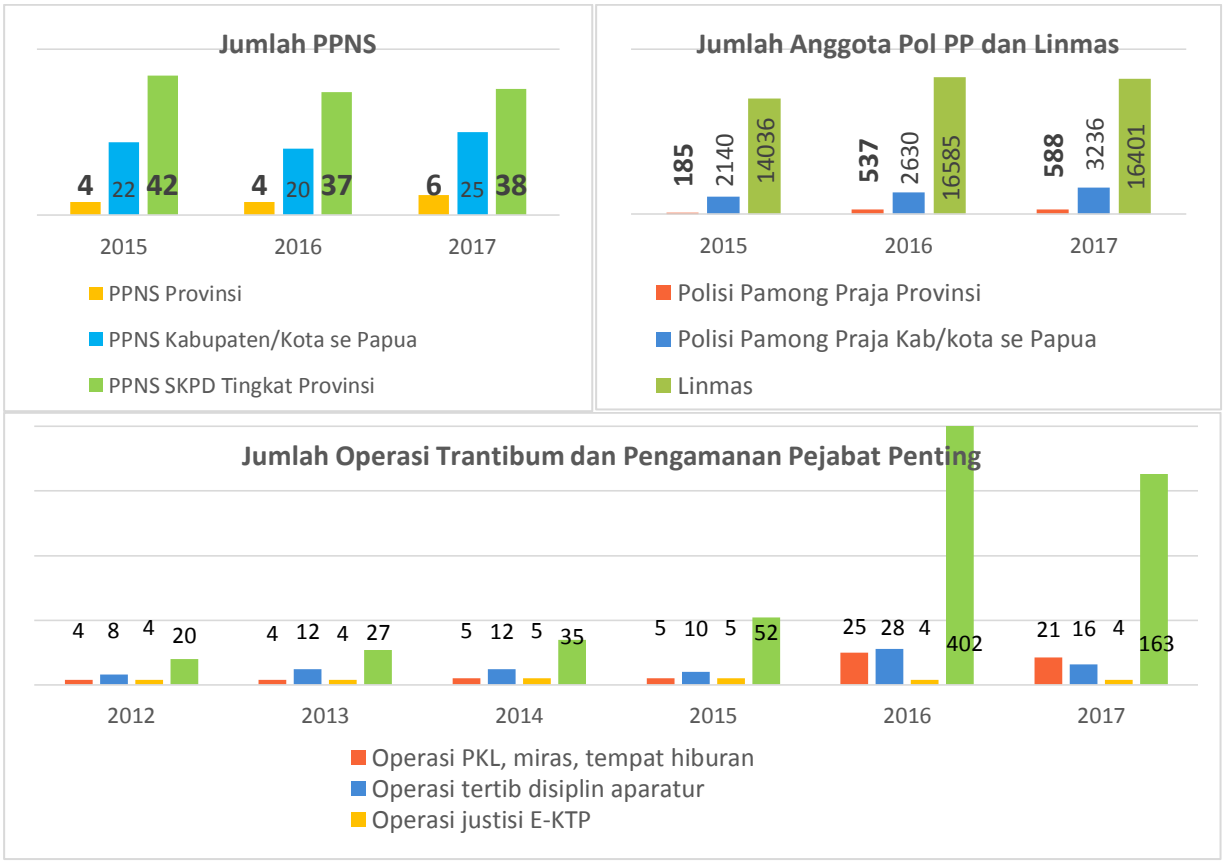

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.101 diketahui bahwa terdapat peningkatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Papua pada rentang tahun 2012-2017. Hal ini terindikasi berdasarkan peningkatan jumlah PPNS, peningkatan anggota Polisi Pamong Praja, peningkatan jumlah operasi trantibum, serta peningkatan pengamanan pejabat penting.

2.4.1.6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua. Hal ini terindikasi melalui tingginya jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan pecandu narkoba pada rentang tahun 2013-2017 (lihat Gambar 2.102).

Gambar 2.102. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2017 (orang)

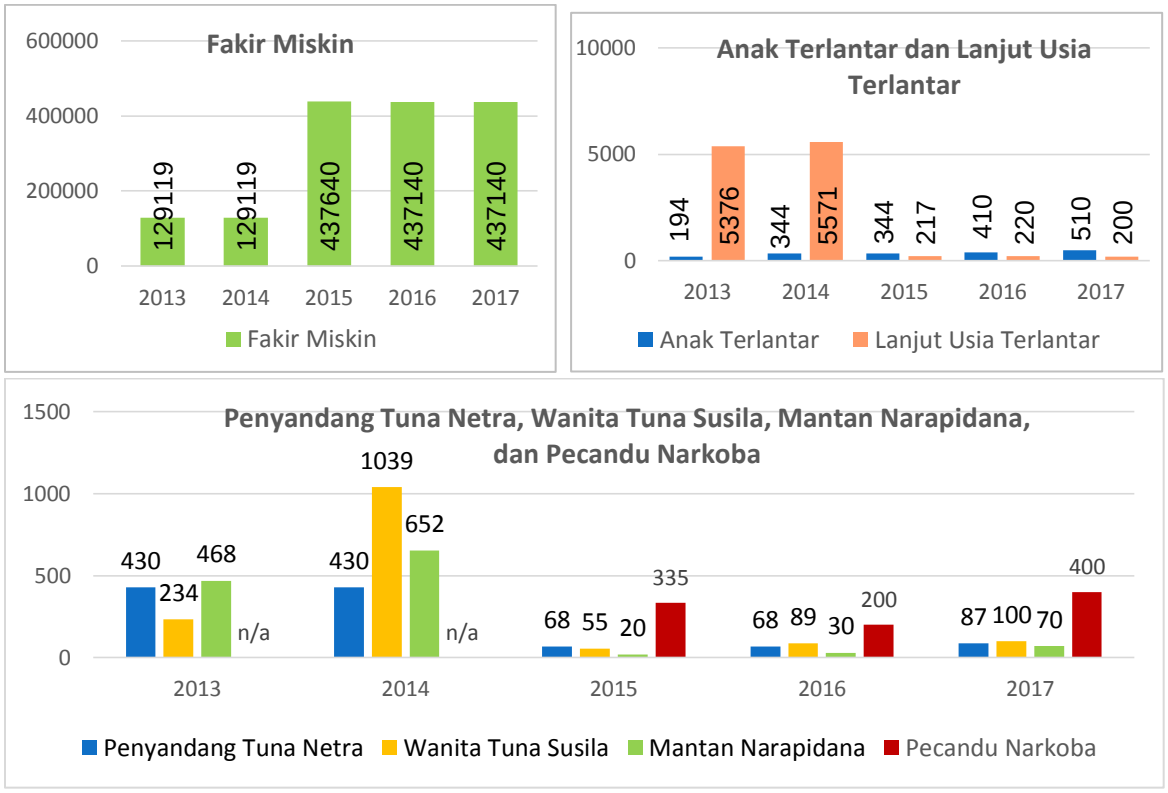

Sumber: Bappeda Papua 2018

Pada lima tahun terakhir, jumlah anak terlantar mengalami peningkatan dari 194 anak (tahun 2013) menjadi 510 anak (tahun 2017). Peningkatan juga terjadi pada jumlah fakir miskin dari 129.119 orang (tahun 2013) menjadi 437.140 orang (tahun 2017).

Peningkatan ini tergolong tinggi karena secara agregat meningkat 3 kali lipat dalam rentang waktu 5 tahun. Trend yang relatif menurun terjadi pada lanjut usia terlantar, yaitu 5376 orang (tahun 2013) menjadi 200 orang (tahun 2017).

Kondisi yang fluktuatif namun cenderung meningkat terjadi pada penyandang tuna netra, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan pecandu narkoba. Jumlah wanita tuna susila pada tahun 2014 sebanyak 1.039 orang dan berkurang menjadi 55 orang pada tahun 2015. Namun, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi 100 orang. Berkurangnya jumlah wanita tuna susila pada tahun 2015 dikarenakan peraturan Bupati Kabupaten Jayapura untuk menutup lokasi prostitusi Tanjung Elmo.

Jumlah mantan narapidana di Provinsi Papua pada tahun 2013 sebanyak 468 jiwa meningkat menjadi 652 jwa pada tahun 2014. Namun terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 20 jiwa dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 70 jiwa. Adapun jumlah pecandu narkoba yang teridentifikasi pada tahun 2015 sebanyak 335 orang, kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 200 orang namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 400 orang. Kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan penyalahgunaan Napza di Papua karena masih banyak para pecandu narkoba yang belum teridentifikasi.

2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.2.1. Tenaga Kerja

Angka perselisihan pengusaha dengan pekerja pada tahun 2013 sebesar 69% meningkat pada tahun 2015 menjadi 139%. Namun pada tahun 2017 angka perselisihan pengusaha dengan pekerja menurun hingga 24%. Penurunan perselisihan pengusaha dan kerja ini dapat disebabkan karena peningkatan kompetensi atau *capacity building* yang dilakukan terhadap tenaga kerja di Provinsi Papua (lihat Gambar 2.103).

Gambar 2.103. Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja Per Tahun (%)

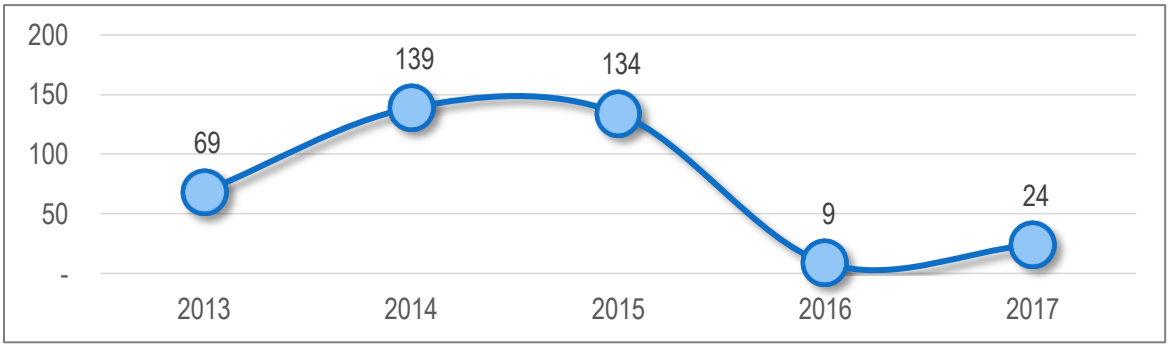

Sumber: Bappeda Papua 2018

Pada Gambar 2.104 dapat terlihat bahwa Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 940 jiwa dan menurun hingga 100 jiwa pada tahun 2016, namun kembali meningkat menjadi 1.487 jiwa pada tahun 2017.

Gambar 2.104. Kondisi Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja

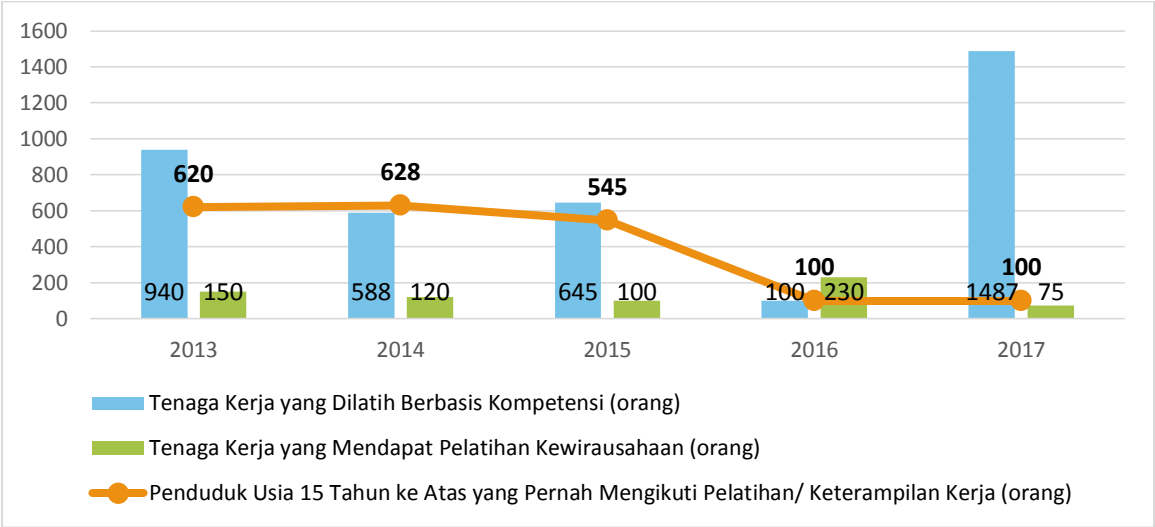

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2013 sebanyak 150 orang kemudian meningkat pada tahun 2016 sebanyak 230 orang. Namun pada tahun 2017 menurun menjadi 75 orang tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Penurunan tersebut mungkin dikarenakan banyak tenaga kerja pada tahun sebelumnya yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Adapun penduduk usia 15

tahun keatas yang pernah mengikuti pelatihan/ keterampilan kerja pada tahun 2013 sebanyak 620 orang namun terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017 berjumlah sebanyak 100 orang. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan atau keterampilan kerja, sehingga pemerintah bersama lembaga pelatihan perlu melakukan invasi pelatihan keterampilan kerja.

2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan dan Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan gender (IPG) yang dihitung dengan menggunakan harapan hidup, harapan pendidikan dan indeks disribusi pendapatan merupakan indeks kemampuan pencapaian dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks pemberdayaan gender tercatat memiliki nilai cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2014-2015 terlihat menurun sebesar 1%, namun kembali terjadi kenaikan bahkan sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya, pada indeks pembangunan gender juga terlihat cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2014-2015 terlihat menurun walaupun tidak signifikan perubahnnya, namun kembali terjadi kenaikan bahkan sampai dengan tahun 2017 (lihat Gambar 2.105).

Gambar 2.105. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

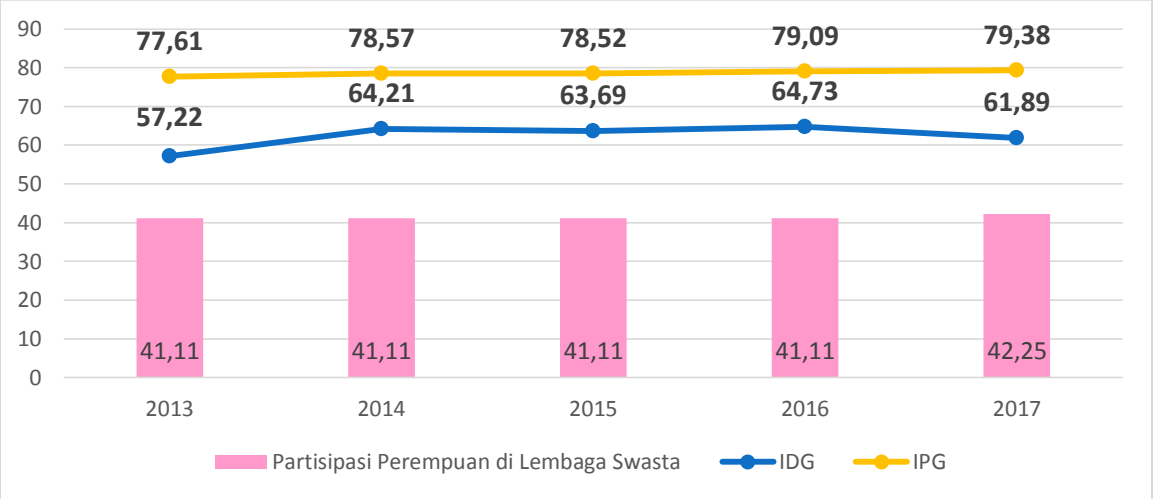

Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Membangun daerah tidak terlepas dari tiga pilar utama yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Strategi pembangunan selama ini sudah diarahkan dalam memberdayakan masyarakat secara umum dan peningkatan peran swasta terhadap urusan-urusan masyarakat yang belum optimal dilakukan pemerintah daerah. Peran lembaga swasta dalam menyerap lapangan tenaga kerja perempuan di Provinsi Papua selama ini terbilang cukup tinggi. Meskipun peningkatannya belum begitu signifikan, namun terlihat partisipasi perempuan terlihat sudah tinggi. Sampai dengan tahun 2017 partisipasi perempuan pada sektor swasta mencapai 42,25%. Selain variabel di atas, berikut ini adalah variabel partisipasi angkatan kerja khusus perempuan pada semua sektor lapangan usaha di Provinsi Papua yang akan disajikan perbandingan data tahun 2013 dengan kondisi pada tahun 2017.

2) Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Papua untuk perbandingan tahun 2013 dan tahun 2017 mengalami peningkatan pada masing-masing daerah di 29 kabupaten/kota. Tercatat Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua secara keseluruhan meningkat dari 696,618 orang di tahun 2013 menjadi 722,644 orang pada tahun 2017 atau meningkat sebesar sebesar 3,60 persen. Secara kewilayahan, terdapat beberapa daerah yang juga mengalami peningkatan di antaranya terdapat 18

kabupaten/kota, sedangkan 11 daerah lainnya mengalami penurunan meskipun tidak begitu signifikan perubahannya.

Gambar 2.106. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Papua

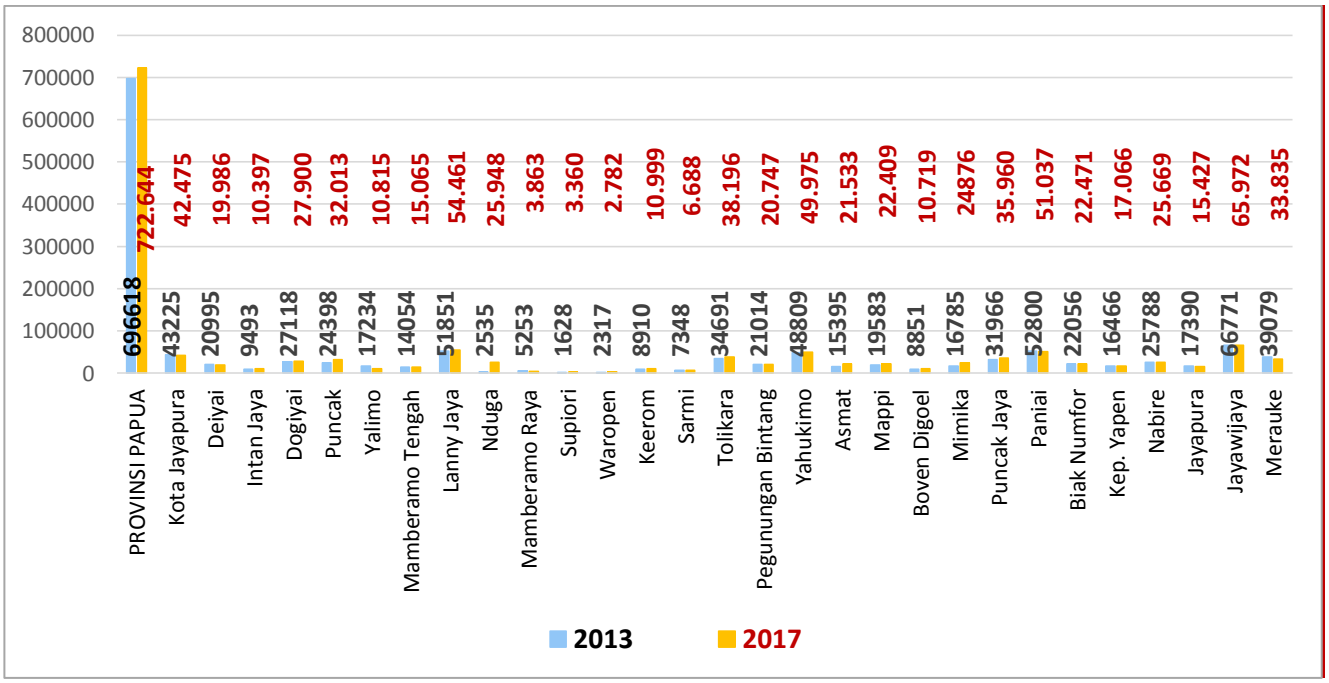

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2017

3) Tingkat Pendidikan Perempuan

Partisipasi perempuan dalam jenjang pendidikan yang tergambarkan melalui Angka Partisipasi Purni (APM) Perempuan yang terlihat bervariasi. Tercatat sampai dengan tahun 2017 APM perempuan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah sebesar 78,36%, ini berarti masih terdapat 21.64% perempuan yang belum mengenyam pendidikan sekolah dasar. Sedangkan APM perempuan pada pendidikan menengah pertama sebesar 58,71%, kemudian pendidikan menengah sebesar 40,91%.

Tabel 2.34. APM Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SMP			APM SMA		
	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P
MAMTA									

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SMP			APM SMA		
	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P
Jayapura	94,24	94,39	94,30	66,72	70,18	68,65	69,52	77,56	73,22
Sarmi	95,14	100,00	97,34	68,74	89,91	79,44	38,79	57,37	47,15
Keerom	85,29	89,05	87,16	58,81	73,56	65,99	71,25	54,55	63,37
Mamberamo Raya	97,37	96,73	97,07	33,38	46,65	40,34	61,36	51,69	57,01
Kota Jayapura	92,80	92,78	92,79	74,57	90,99	82,96	61,84	61,79	61,82
LA PAGO									
Jayawijaya	81,91	93,24	87,28	71,94	84,94	78,82	78,69	52,48	66,90
Puncak Jaya	66,10	71,54	68,83	25,85	19,86	23,13	10,38	0,00	6,60
Yahukimo	69,26	60,72	64,78	16,99	20,10	18,36	11,61	9,73	10,67
Pegunungan Bintang	59,43	64,92	62,10	21,86	25,08	23,01	24,29	23,13	23,68
Tolikara	60,54	58,35	59,50	44,41	51,58	47,22	37,64	13,31	28,77
Nduga	59,69	48,44	55,06	29,33	17,66	24,84	1,70	0,00	1,13
Lanny Jaya	69,89	56,97	64,81	67,79	70,83	69,38	38,61	58,14	44,71
Mamberamo Tengah	88,67	84,89	87,30	72,71	58,34	66,16	53,85	78,37	65,20
Yalimo	89,20	70,53	81,33	36,69	63,42	48,71	25,75	20,26	22,75
Puncak	48,88	37,36	43,14	12,17	16,69	13,96	16,71	11,39	13,82
Nabire	89,69	89,20	89,44	65,61	76,95	70,36	53,34	76,89	65,05
Paniai	64,06	77,65	69,97	55,77	55,91	55,81	23,86	12,85	17,99
MEE PAGO									
Mimika	94,00	90,80	92,39	70,36	79,18	74,82	84,49	58,02	70,92
Dogiyai	86,40	85,60	86,02	66,78	57,43	61,89	43,82	42,03	42,86
Intan Jaya	72,37	46,20	63,16	12,64	11,47	12,08	18,65	5,47	9,84
Deiyai	73,27	40,89	54,29	21,71	17,63	20,93	45,23	0,00	33,31
SAERERI									
Kepulauan Yapen	92,21	95,44	93,88	65,99	62,21	64,13	63,73	50,26	56,75
Biak Numfor	86,02	91,63	88,76	80,57	68,81	74,86	60,51	68,78	64,19
Waropen	94,63	88,57	91,39	66,90	73,67	69,99	67,58	62,55	64,94
Supiori	95,34	87,95	91,61	67,10	73,37	71,26	30,10	36,48	33,08
ANIM HA									
Merauke	96,66	97,93	97,34	74,32	71,90	73,16	78,88	66,34	72,89
Boven Digoel	78,02	83,10	80,44	43,38	83,35	64,96	18,41	28,17	23,94
Mappi	87,28	91,54	89,33	30,43	39,17	35,26	11,24	19,93	15,91
Asmat	77,08	82,74	79,91	34,90	45,40	38,50	24,25	18,94	21,34
Papua	**78,93**	**78,36**	**78,66**	**50,45**	**58,71**	**54,26**	**45,32**	**40,91**	**43,27**

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

4) Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja melainkan ditentukan juga oleh terwujudnya kerukunan yang aman dan damai yang dimulai dari lingkungan keluarga masyarakat. Sepanjang tahun 2013-2016 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Papua masih terjadi. Meskipun kondisi KDRT di Provinsi Papua memiliki trend menurun, namun angkanya masih terbilang cukup tinggi. Dalam Gambar 2.107, dketahui bahwa pada rentang waktu empat tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya menurun hingga 7,54% per tahun. Pada tahun 2013 jumlah KDRT adalah sebesar 604 kasus dan terus menurun hingga 492 kasus di tahun 2016.

Gambar 2.107. Jumlah KDRT Provinsi Papua Tahun 2013-2016

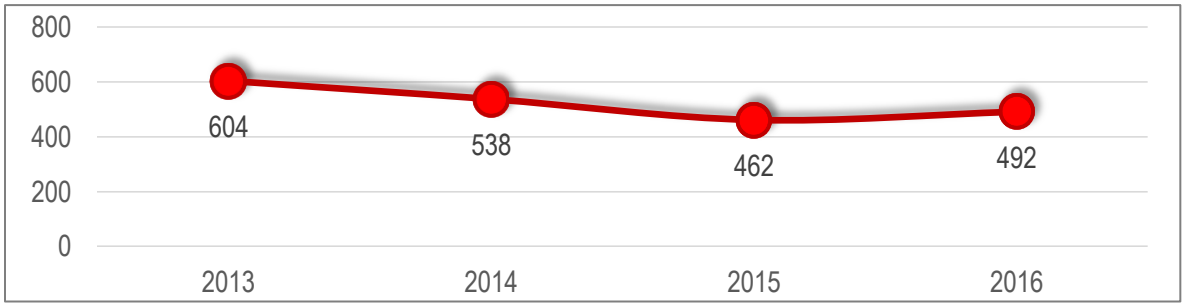

Sumber: Statistik Kriminal BPS RI, 2017 (data diolah)

2.4.2.3. Pangan

1) Tingkat Konsumsi Pangan

Konsumi kalori atau protein adalah banyaknya kalori atau protein yang benar-benar dikonsumsi per orang per hari. Rata-rata wanita memerlukan asupan sebanyak 2000 kalori per harinya, sedangkan pria rata-rata membutuhkan asupan sebanyak 2500 kalori per hari.

Gambar 2.108. Proporsi Penduduk Di Provinsi Papua dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar = 2.100 Kkal/kapita/hari)

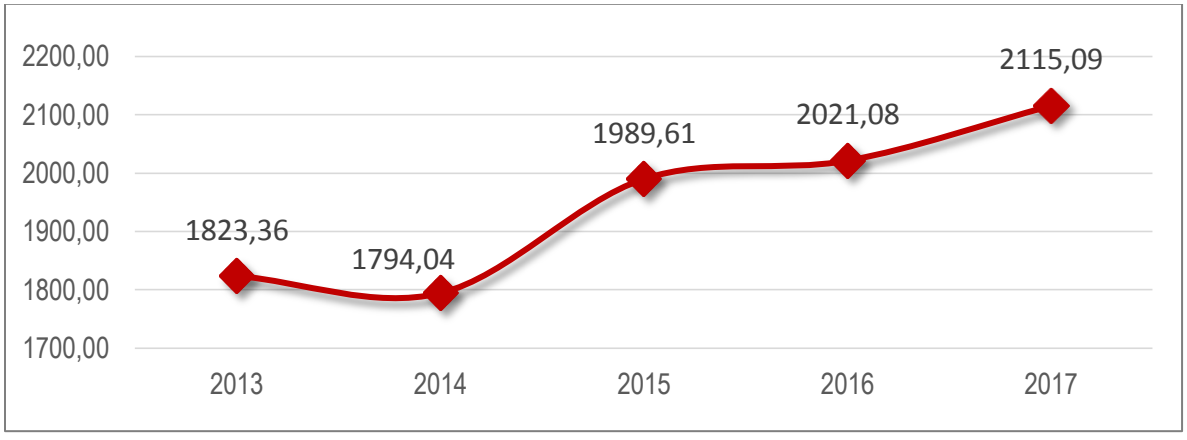

Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2.108, asupan kalori Provinsi Papua dalam rentang waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2013 asupan kalori mencapai 1.823 kkal/kapita/hari dan terus mengalami peningkatan sampai dengan

tahun 2017 menjadi 2.115 kkal/kapita/hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa asupan kalori di Provinsi Papua telah memenuhi standar yang ditentukan.

2.4.2.4. Pertanahan

Kondisi pertanahan khususnya di Provinsi papua sering menjadi masalah yang serius, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pertanahan. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terdapat penurunan peralihan tanah di Provinsi Papua dari 7.057 hektar pada tahun 2016 menjadi 5.887 hektar pada tahun 2017. Adapun proporsi luas peralihan tanah dengan jual-beli mengalami peningkatan dari 87,96% pada tahun 2016, menjadi 88,51% pada tahun 2017 (lihat Tabel 2.35).

Tabel 2.35. Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)

Tahun	Jual beli	Pewarisan	Hibah	Tukar menukar	Lelang	Total
2016	6.208	559	254	6	30	7057
2017	5.211	451	197	3	25	5887

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017

Berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) nomor : SK.6979/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2017 target alokasi untuk Provinsi Papua seluas ±729.116 hektar, yang berasal dari :

1. Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas ± 190.119 hektar
2. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif seluas ± 362.336 hektar
3. Program pemerintah untuk pencadangan percetakan sawah baru seluas ± 9.053 hektar
4. Pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ± 97.421 hektar
5. Pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas ± 57.219 hektar
6. Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas ± 1.666 hektar

7. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ±11.302 hektar

2.4.2.5. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu penting di Provinsi Papua ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua, yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tabel 2.36. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Tahun	IKU	IKA	IKTL	IKLH
2013	88.67	58.00	97.28	82.91
2014	84.24	54.67	97.44	80.65
2015	84.24	80.00	79.35	81.01
2016	89.60	76.00	79.17	81.35
2017	90.91	77.33	78.18	81.47
Rata2 Pertumbuhan Provinsi Papua	**0.54**	**5.51**	**- 6.03**	**- 0.45**
Kontribusi Terhadap Nasional Tahun 2017	**1.12**	**6.32**	**- 9.22**	**2.07**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Dalam Tabel 2.36 diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Papua memiliki trend dengan pertumbuhan yang negatif (-0,45%). Sementara dua dari tiga indikator pembentuk IKLH Provinsi papua yaitu IKU dan Indeks Kualitas Air (IKA) memiliki pertumbuhan yang positif dan cenderung meningkat. Adapun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) memiliki trend yang cenderung menurun dengan rata-rata sebesar 6,03% setiap tahunnya. Selanjutnya kontribusi IKLH Provinsi Papua untuk tahun 2017 tercatat untuk IKU sebesar 1,12%, IKA sebesar 6,32%, IKTL sebesar -9,22% dan secara keseluruhan kontribusi IKLH Provinsi Papua terhadap Nasional yaitu sebesar 2,07%.

2.4.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase anak yang memiliki akte lahir di beberapa kabupaten sampai saat ini terbilang masih cukup rendah. Sampai dengan tahun 2017, terdapat 6 kabupaten dengan jumlah anak yang memiliki akte lahir mencapai 2% sampai dengan 6,9%. Secara kewilayahan hampir sebagian besar daerah di Provinsi Papua, persentase anak yang memiliki akte lahir masih rendah. Berdasarkan Tabel 2.37, terdapat 3 (tiga) wilayah yang rata-rata persentase anak berakte di atas 50% di antaranya ialah wilayah Mamta, Saereri dan Anim Ha.

Tabel 2.37. Persentase Anak, Bayi dan Balita Berakte Kelahiran Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Kapamilikan Akta Kelahiran		
		Semua anak	Anak < 5 tahun	Anak< 1 tahun
Mamta	Jayapura	75,00	53,90	41,10
	Keerom	81,80	63,20	45,60
	Mamberamo Raya	6,70		
	Sarmi	64,10	43,10	38,10
	Kota Jayapura	88,80	67,80	47,40
La Pago	Jayawijaya	33,40	31,10	17,10
	Lanny Jaya	22,60	27,90	24,90
	Mamberamo Tengah	4,10	6,90	n.a
	Nduga	n.a	n.a	n.a
	Pegunungan Bintang	32,30	33,60	32,80
	Puncak	74,30	67,00	66,20
	Puncak Jaya	45,50	50,00	74,00
	Tolikara	38,50	29,60	n.a
	Yahukimo	3,10	4,00	23,00
	Yalimo	3,00	2,80	0,00
Mee Pago	Deiyai	2,00	3,60	n.a
	Dogiyai	37,50	12,90	n.a
	Intan Jaya	6,90		n.a
	Mimika	70,00	48,40	23,00
	Nabire	80,30	65,50	38,40
	Paniai	16,00	20,80	12,90
Saereri	Biak Numfor	53,70	40,80	46,20
	Supiori	70,40	46,50	51,50
	Waropen	64,98	52,96	48,99
Anim Ha	Asmat	24,00	20,00	n.a
	Boven Digoel	66,80	58,60	37,90
	Mappi	40,70	20,80	17,80
	Merauke	83,26	72,36	69,63

Sumber: SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017 – BPS`

Persentasae penduduk berbasis NIK di beberapa kabupaten terlihat masih rendah pada tahun 2017. Terlihat persentase penduduk yang memiliki NIK terendah sebesar

0,50% di kabupaten Nduga dan 4,50% di kabupaten Mamberamo Tengah, juga untuk kepemilikan NIK semua anak terlihat masih sangat rendah pada beberapa kabupaten yang diantaranya adalah kabupaten Puncak sebesar 3,40%, Mamberamo Tengah sebesar 4,10%, Deiyai sebesar 5,20% dan Yahukimo sebesar 5,80%. Apabila dilihat berdasarkan kewilayahan di Provinsi Papua tercatat sebanyak 4 (empat) wilayah yang memiliki persentase penduduk dan anak memiliki NIK mencapai 50% yaitu, Mamta, Mee Pago, Saereri dan Anim Ha.

Tabel 2.38. Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Kepemilikan NIK			
		Semua Orang	Semua Anak	Anak di Bawah 5 Tahun	Anak di Bawah 1 Tahun
Mamta	Jayapura	93,70	87,80	74,80	61,50
	Keerom	90,90	80,60	62,10	34,00
	Mamberamo Raya	75,90	53,70	34,60	39,60
	Sarmi	90,00	79,20	59,70	49,40
	Kota Jayapura	96,30	91,00	78,70	63,10
La Pago	Jayawijaya	70,90	66,90	55,20	17,60
	Lanny Jaya	51,90	56,20	67,60	0,00
	Mamberamo Tengah	4,50	4,10	6,90	27,80
	Nduga	0,50			
	Pegunungan Bintang	65,40	54,00	49,90	41,50
	Puncak	52,30	3,40	3,10	0,00
	Puncak Jaya	64,90	58,40	51,60	59,50
	Tolikara	33,30	16,80	15,80	
	Yahukimo	13,20	5,80	5,30	0,70
	Yalimo	25,80	22,10	32,90	34,20
Mee Pago	Deiyai	44,70	5,20	9,00	10,70
	Dogiyai	46,10	42,90	35,10	22,60
	Intan Jaya	43,00	23,70	16,80	
	Mimika	91,20	79,30	59,00	43,90
	Nabire	87,50	78,20	65,10	35,00
	Paniai	45,70	19,40	20,30	4,90
Saereri	**Biak Numfor**	82,40	64,30	43,30	16,00
	Supiori	86,40	74,40	58,80	47,50
	Waropen	93,08	89,03	71,95	50,38
Anim Ha	**Asmat**	75,10	54,00	37,30	28,90
	Boven Digoel	93,60	92,70	85,60	62,40
	Mappi	86,10	74,00	47,40	37,10
	Merauke	94,64	88,88	74,35	56,67

Sumber: SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017 - BPS

2.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua dapat tercermin dalam pelayanan pemerintah kampung yang mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2013 tingkat pelayaan pemerintah kampung kepada masyarakat mencapai 45%, dan mengalami peningkatan menjadi 70% pada tahun 2017. Peningkatan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam peningkatan pelayanannya kepada masyarakat, yang juga dapat ditinjau berdasarkan peningkatan kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintah kampung, peningkatan tertib pengelolaan dokumen administrasi pemerintah kampung, dan penyediaan infrastruktur perdesaan (lihat Gambar 2.109).

Gambar 2.109. Kondisi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

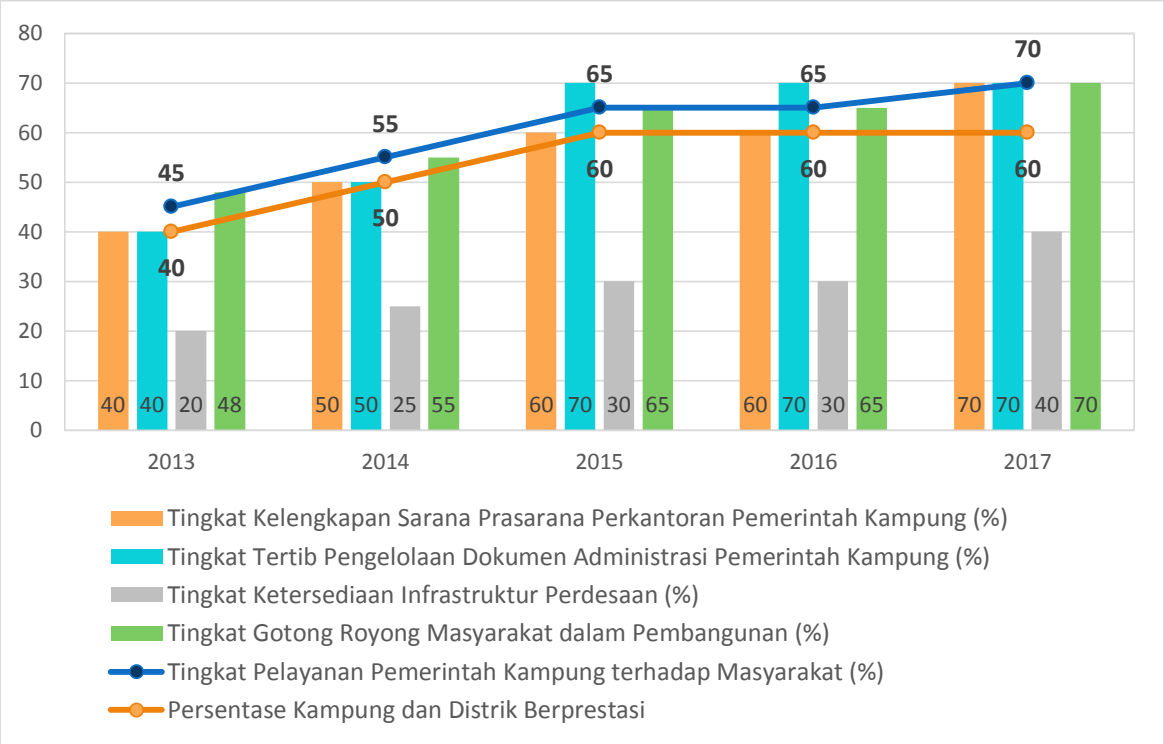

Sumber: Bappeda Papua 2018

Sebagai *outcome* peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung tersebut, terdapat trend peningkatan persentase kampung dan distrik berprestasi dari 40% pada tahun 2013 menjadi 60% pada tahun 2017. Selain itu, tingkat gotong royong masyarakat dalam pembangunan juga mengalami peningkatan dari 48% pada tahun 2013 menjadi

70% pada tahun 2017. Semangat masyarakat membantu pemerintah dalam pembangunan perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Hal tersebut kiranya dapat memacu pemerintah untuk bekerja lebih giat lagi dalam pembangunan, sehingga seluruh masarakat yang berada dipelosok dapat menikmati pembangunan yang sama.

Dalam Gambar 2.110 dapat terlihat bahwa jumlah swadaya masyarakat untuk mendukung program pemerintah khususnya program pemberdayaan masyarakat, menunjukkan angka yang sangat baik. Pada tahun 2013 jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat mencapai 70 program kemudian meningkat hingga 90 program pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Peran masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dengan swadaya masyarakat dalam mendukung program pemerintah, kiranya dapat mempercapat pembangunan di daerah, sehingga permasalahan kesenjangan dapat menurun.

Gambar 2.110. Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013-2017 (program)

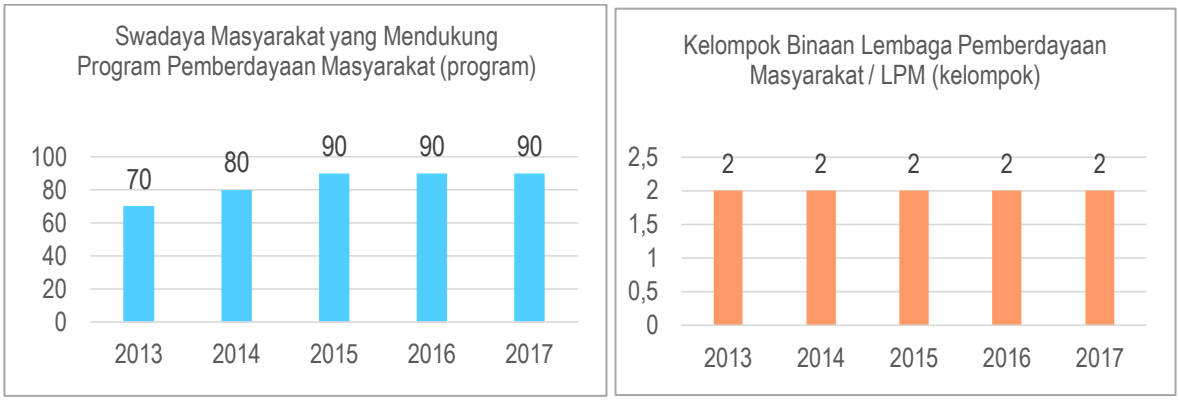

Sumber: Bappeda Papua 2018

Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 baru mancapai 2 kelompok. Kiranya di tahun-tahun kedepan lembaga pemberdayaan masyarakat kampug menambah lagi kelompok-kelompok binaan sehingga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah baik di sektor ekonomi dan sektor lainnya lebih banyak lagi.

Jumlah kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2013 sebanyak 5.615 kelompok PKK mampu

membentuk 2.529 kelompok binaan. Pada tahun 2017 jumlah kelompok PKK meningkat menjadi 7.724 kelompok dan menbinan 5.419 kelompok binaan (lihat Gambar 2.111). Peningkatan tersebut menunjukkan nilai yang positif, dengan meningkatnya jumlah kelompok PKK dan binaannya kiranya dapat melibatkan banyak masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat terutama perempuan dalam meningkatkan peran perempuan melalui PKK.

Gambar 2.111. Jumlah kelompok PKK dan binaan PKK

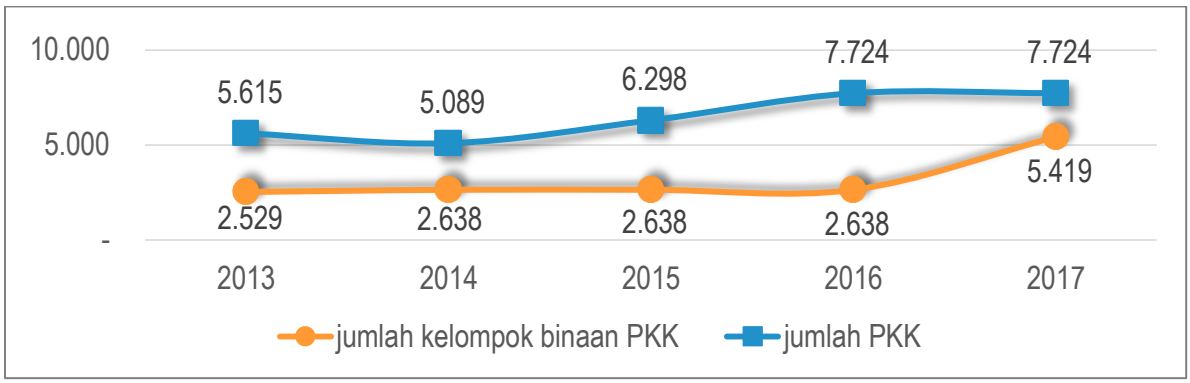

Sumber: Bappeda Papua, 2018

Melalui PKK kita dapat meningkatkan peran perempuan serta dapat menggali dan menggerakkan serta mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembinaan ini diharapkan dapat memberikan solusi dari berbagai permasalahan perempuan dan anak serta perbaikan kesejahteraan keluarga dan mampu memotifasi orang lain dan memberikan harapan bagi terbentuknya keluarga mandiri serta bermasyarakat dan menunjang program pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN ke Desa sebesar 10% *(on top)* dari dana transfer daerah secara bertahap. Alokasi anggaran tersebut kemudian diberi nama Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN -yang telah diubah dua kali, terakhir PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN-, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kembali ke Rekening Kas

Desa (RKD). Untuk mendapatkan penyaluran tersebut Desa harus telah menetapkan dokumen APBD dan laporan realisasi keuangan sebelumnya. Sedangkan daerah telah melaporkan konsolidasi laporan realisasi keuangan Desa tahun sebelumnya.

Tabel 2.39. Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua

	2015	2016	2017
APBD Provinsi	11.805.767.000	12.567.840.000	13.006.813.000
Dana Otsus	4.940.430.000	5.395.052.000	5.580.152.000
APBK	**2.442.885.205**	**3.776.642.791**	**4.629.699.579**
DD	**1.433.226.742**	**3.385.116.457**	**3.563.722.683**
Kampung	4.293	4.635	5.163
Penduduk	3.149.375	3.207.444	3.265.202
DD/kampung	333.852,02	730.337,96	690.242,63
DD/kapita	455,08	1.055,39	1.091,42
%DD terhadap APBK	59	90	77
%DD terhadap APBD provinsi	0,12	26,93	27,40
%DD terhadap Dana Otsus	29,01	62,74	63,86
%APBK terhadap APBD provinsi	20,69	30,05	35,59
%APBK terhadap dana otsus	49,45	70,00	82,97

Sumber: Data Dana Desa diolah dari DJPK Kementrian Keuangan dan APBDesa dari BPS Pemerintahan Desa tahun 2015, 2016 dan 2017

Sejak diimplemantasikan tahun 2015, Dana Desa memiliki komposisi -bauran dana- yang signifikan baik di tingkat Desa, kabupaten, maupun provinsi. Pada Tabel 2.39 dapat dilihat bahwa seiring dengan komitmen pemerintah untuk memenuhi mandate UU Desa agar alokasi Dana Desa secara bertahap mencapai 10% dari dana transfer daerah- jumlah alokasi Dana Desa di PRovinsi Papua terus meningkat, terakhir tahun 2017 mencapai 3,56 Trilyun Rupiah atau 63,86% terhadap total Dana Otsus dan 27,40 terhadap total APBD Provinsi Papua. Peningkatan DD juga diikuti oleh APB Kampung karena UU Desa juga mengamanatkan Kabupaten/Kota mengalokasikan 10% dari DAU, DBH dan Pajak Daerah untuk Desa.

Pada Gambar 2.112, Gambar 2.113, dan Gambar 2.114, dapat dilihat perkembangan APB Kampung dari tahun 2015 sampai tahun 2017, dimana pada tahun 2017 APBKampung mencapai 4,63 Trilyun atau 82,97% dari Dana Otsus dan 35,59,4% dari APBD Provinsi. Meskipun lokasi ADD juga meningkat, tetapi proporsi DD terhadap APBKampung tetap tinggi sebesar 76,98% pada tahun 2017.

Gambar 2.112. Perkembangan APBK, APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (Ribu Rupiah)

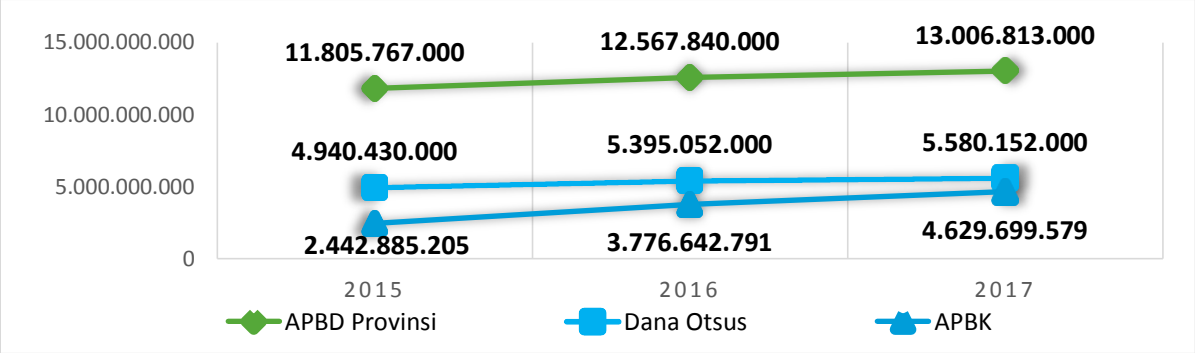

Gambar 2.113. Persentase Dana Desa terhadap APBD Provinsi, Dana Otonomi Khusus, dan APBK di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%)

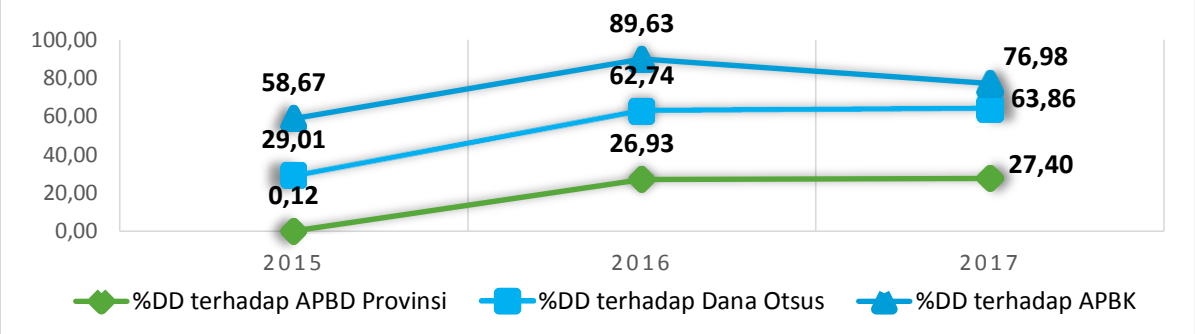

Gambar 2.114. Persentase APBK terhadap APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%)

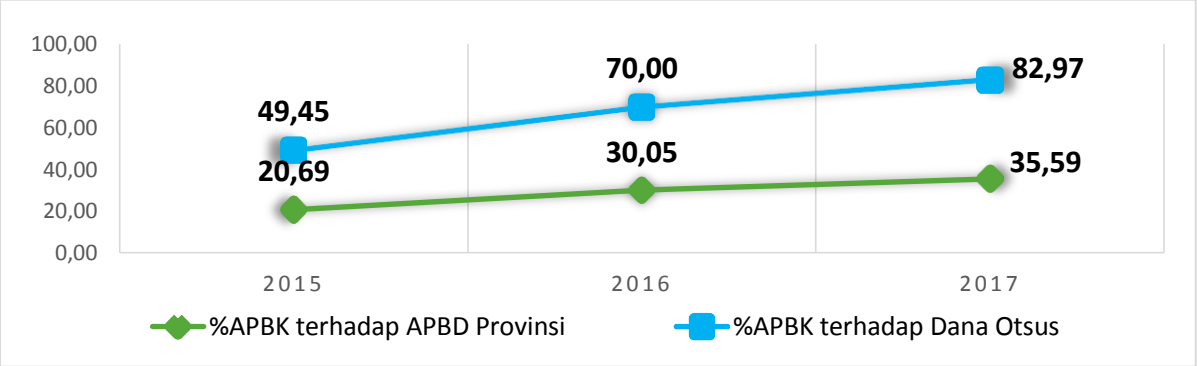

Dari uraian di atas, nampak bahwa kebijakan UU Desa dengan Dana Desa memberikan kontribusi terhadap alokasi sumber daya keuangan langsung ke kampung. Dengan kata lain, idealnya kampung perlu memiliki sumber daya keuangan untuk mendanai untuk mendanai kewenangan lokal kampung sesuai dengan prinsip susidiaritas.

2.4.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara keseluruhan pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Terlihat rata-rata pertumbuhan penduduk yang tersebar di 29 kabupaten/kota bertumbuh sebesar 1%. Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Papua cukup terkendali dan tidak mengalami perubahan yang cukup besar (lihat Tabel 2.40). Secara kewilayahan di Provinsi Papua, terdapat beberapa daerah dengan pertumbuhan paling tinggi di antaranya adalah Kabupaten Puncak Jaya (La Pago) dan Supiori (Saereri) yang mampu bertumbuh sebesar 3 (tiga) persen. Sedangkan daerah lainnya stabil memiliki pertumbuhan berkisar antara 1-2 persen setiap tahunnya.

Tabel 2.40. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua	1,97	1,93	1,89	1,84	1,8
Jayapura	1,97	0,5	1,7	1,95	1,77
Sarmi	2,01	0,79	2,82	1,94	1,86
Keerom	2,14	2,38	1,31	0,81	1,64
Mamberamo Raya	1,39	3,73	4,92	1,38	2,25
Kota Jayapura	1,59	1,16	2,83	1,87	1,7
Jayawijaya	0,99	0,51	1,08	1,89	1,23

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Puncak Jaya	3,92	1,13	1,79	3,88	3,18
Yahukimo	2,02	1,77	1,76	1,59	1,52
Peg. Bintang	2,04	2,01	1,43	1,12	1,33
Tolikara	1,98	1,76	2,98	1,88	2,09
Nduga	1,9	7,73	1,78	1,82	1,18
Lanny Jaya	2	5,91	1,19	1,25	1,09
Mamberamo Tengah	1,9	6,35	2,03	0,81	1,69
Yalimo	2,09	4,87	2,27	1,51	1,75
Puncak	1,96	1,59	2,08	1,83	2,18
Nabire	1,99	0,36	1,74	1,87	1,61
Paniai	2,03	0,72	1,1	1,85	1,71
Mimika	2,5	1,48	1,19	1,94	2,35
Dogiyai	1,85	1,67	1,51	1,76	1,27
Intan Jaya	1,9	3,24	2,47	3,01	2,15
Deiyai	1,98	2,27	1,99	1,79	2,25
Kepulauan Yapen	1,81	2,05	1,57	1,87	2,03
Biak Numfor	2,04	0,56	2,46	1,89	2,04
Waropen	1,84	3,04	2,42	1,44	2,35
Supiori	1,79	1,84	5,19	1,65	3,34
Merauke	1,99	1,67	1,45	1,58	1,54
Boven Digoel	1,88	1,46	2,83	2,62	2,37
Mappi	1,84	2,03	2,32	1,87	1,15
Asmat	2,02	1,9	2,27	1,96	2,87

Sumber: BPS Provinsi Papua (diolah)

Secara demografis, tujuan berencana adalah untuk menurunkan angka kelahiran sehingga dapat menekan pertumbuhan jumlah penduduk, dengan jumlah anak yang dianjurkan pemerintah sebanyak 2 (dua) orang sehingga anggota keluarga sebanyak 4 (empat) orang. Secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Papua juga tidak memiliki perubahan yang cukup pesat. Rata-rata jumlah anggota keluarga adalah sebesar 4 (empat) orang dalam setiap rumah tangga.

Berdasarkan kabupaten/kota di Papua, terdapat 11 daerah yang memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga di atas rata-rata provinsi di antaranya ialah Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Kota Jayapura, Nduga, Yalimo, Intan Jaya, Supiori, Boven Digoel dan Asmat yaitu rata-rata 5 (lima) orang. Sedangkan daerah lainnya memiliki rata-rata jumlah anggora keluarga di bawa rata-rata provinsi.

Gambar 2.115. Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

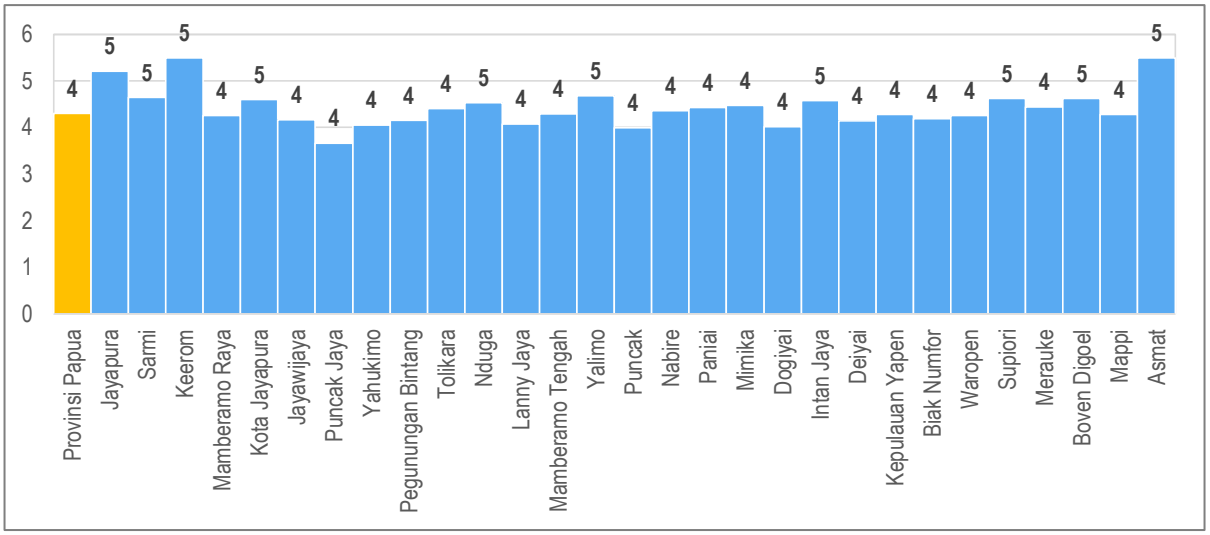

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2. Keluarga Berencana

Persentase pasangan usia subur (PUS) dalam menyukseskan program keluarga berencana dapat terdeteksi melalui partisipasinya menjadi akseptor KB. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran PUS selain bersumber dari kesadarannya sendiri juga dipengaruhi oleh kemampuan layanan pemerintah khususnya para aparatur yang berperan di dalam pelaksanaan program tersebut.

Tabel 2.41. Rasio Akseptor KB

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Mamta	Jayapura	95,46	51,63	22,08	37,55	86,33
	Sarmi		131,70	123,24	51,51	20,96
	Keerom	53,80	45,63	45,63	31,68	100,00
	Mamberamo Raya	100,00	33,41	33,41	100,00	100,00
	Kota Jayapura	87,84	95,16	95,16	85,35	98,34
La Pago	Jayawijaya	5,73	8,62	5,45	92,02	84,34
	Puncak Jaya	100,00	19,19	19,19	72,71	42,86
	Yahukimo		31,06	31,06	15,46	7,55
	Pegunungan Bintang	100,00	80,14	75,11	45,03	37,81
	Tolikara		10,13	10,13	100,00	100,00
	Nduga	100,00	65,05	65,05	100,00	100,00
	Lanny Jaya	100,00	45,35	45,35	9,78	68,14
	Mamberamo Tengah		80,74	80,74	55,42	100,00

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
	Yalimo	100,00	97,31	97,31	38,40	58,99
	Puncak		81,43	81,43	41,87	86,11
Mee Pago	Nabire	51,17	52,88	52,88	41,35	100,00
	Paniai	100,00	94,18	94,22	62,15	100,00
	Mimika	90,52	21,00	21,00	75,09	100,00
	Dogiyai	100,00	96,59	96,59	20,88	100,00
	Intan Jaya		23,71	23,71	27,14	100,00
	Deiyai		29,36	29,36	14,53	100,00
Saereri	Kepulauan Yapen	100,00	35,62	35,62	68,97	65,21
	Biak Numfor	57,16	19,49	19,47	63,13	53,92
	Waropen	100,00	11,21	11,21	44,93	50,70
	Supiori	44,37	15,42	15,42	22,33	82,24
Anim Ha	Merauke	100,00	9,84	9,84	54,60	61,56
	Boven Digoel		13,34	13,34	32,91	38,63
	Mappi	100,00	31,49	31,49	100,00	100,00
	Asmat		49,85	49,85	82,03	65,52
	Papua	**82,94**	**37,03**	**33,38**	**55,32**	**79,37**

Sumber: Papua Dalam Angka 2014-2018

Pada Tabel 2.41 tercatat rasio akseptor KB di Provinsi Papua menunjukkan kondisi yang cenderung semakin meningkat. Secara keseluruhan di Provinsi Papua terdapat 18 daerah yang menunjukkan rasio akseptor KB cenderung semakin meningkat. Sedangkan 11 daerah lainnya terlihat memiliki nilai yang cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2.42. Jumlah PUS yang Tidak ber-KB

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Papua	40.608	218.477	231.160	181.876	41.122
Jayapura	1.334	18.990	30.590	40.304	3.600
Sarmi		-292	-214	1.941	1.938
Keerom	4.357	6.246	6.246	13.446	0
Mamberamo Raya	0	2.077	2.077	0	0
Jayapura	3.865	1.705	1.703	4.911	1.016
Jayawijaya	856	24.673	25.528	1.319	683
Puncak Jaya	0	11.362	11.362	524	424
Yahukimo		5.214	5.214	4.058	2.840
Pegunungan Bintang	0	600	752	1.311	875
Tolikara		17.441	17.441	0	0
Nduga	0	866	866	0	0
Lanny Jaya	0	2.005	2.005	14.633	582
Mamberamo Tengah		251	251	794	0
Yalimo	0	36	36	2.294	269
Puncak		179	179	1.645	71
Nabire	10.555	10.994	10.994	24.812	0
Paniai	0	640	636	2.485	0
Mimika	7.777	16.520	16.680	14.069	0
Dogiyai	0	46	46	4.484	0
Intan Jaya		4.113	4.113	145	0

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Deiyai		2.394	2.394	4.224	0
Kepulauan Yapen	0	5.500	5.500	2.786	2.728
Biak Numfor	10.926	20.866	20.870	11.508	11.434
Waropen	0	6.433	6.433	1.663	841
Supiori	938	2.233	2.233	2.021	100
Merauke	0	44.578	44.578	21.718	10.999
Boven Digoel		7.916	7.916	4.020	2.380
Mappi	0	3.513	3.513	0	0
Asmat		1.378	1.378	761	342

Sumber: Papua dalam angka 2015-2018

2.4.2.9. Perhubungan

1. Transportasi Darat

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Provinsi Papua pada tahun 2016 mencapai 1:214 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan sebanyak 214 unit kedaraaan. Hal ini berbeda dengan tahun 2013, yaitu sepanjang 1 km dapat diakses oleh 391 unit kendaraan baik roda empat, roda dua dan kendaraan lainnya.

Gambar 2.11616 menunjukkan adanya perubahan di masing-masing wilayah di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016. Dari data statistik yang diperoleh Kota Jayapura memiliki perbandingan yang paling besar di antara beberapa kabupaten lainnya yaitu mencapai 1;1,896 yang berarti bahwa dalam 1 km diakses oleh 1,896 unit kendaraan, jika dibandingkan dengan tahun 2014 berarti terjadi penambahan unit kendaraan baik roda empat, dua dan lainnya. Selain itu, terdapat juga kabupaten lain yangt ercatat secara statistik memiliki rasio panjang jalan terhadap kendaraan meningkat di antaranya adalah Kabupaten Sarmi, Yahukimo, Kepulauan Yapen, Jayawijaya dan Merauke yang menandakan adanya peningkatan unit kendaraan. Sedangkan daerah lainnya seperti Kabupaten Waropen, Keerom, Mappi, Paniai, Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura memiliki nilai rasio yang menurun. Hal tersebut mengindikasikan adanya penambahan ruas jalan selama ini.

Gambar 2.116. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

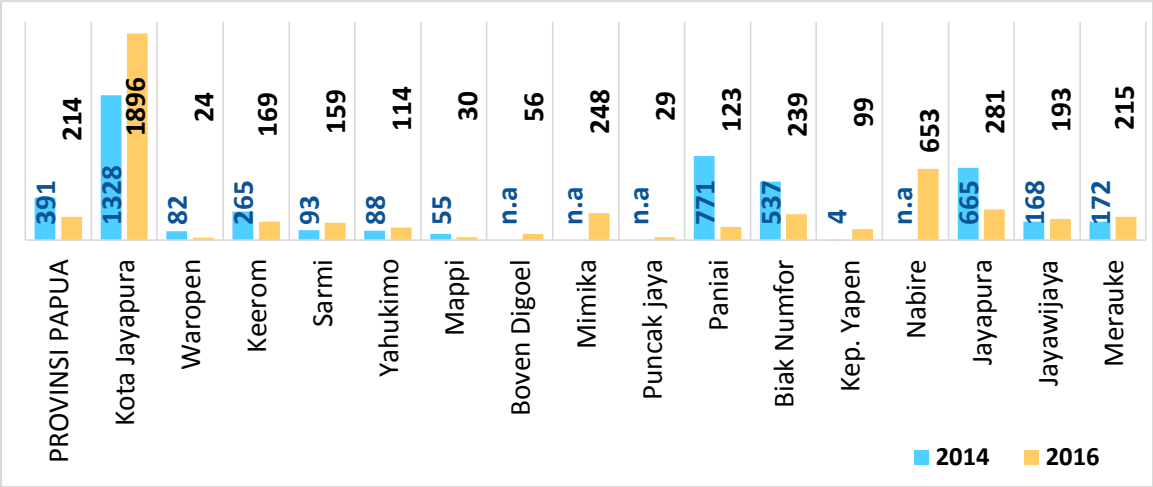

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2015-2018 (data diolah)

Dalam pelayanan transportasi darat di Provinsi Papua, terdapat 5 terminal tipe C, yaitu:

- Entrop di Kota Jayapura;
- Wamena di Kabupaten Jayawijaya;
- Oyehe di Kabupaten Paniai;
- Merauke di Kabupaten Merauke; dan
- Biak di Kabupaten Biak Numfor.

2.4.2.10. Komunikasi dan Informatika

Hingga awal 2018, total BTS yang telah didirikan tiga operator di seluruh wilayah Papua sebanyak 4.644 unit. Dengan jumlah terbanyak dibangun oleh Telkomsel. Anak perusahaan Telkom itu mengoperasikan 4.461 unit BTS. Jumlah tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan BTS milik Indosat 137 unit BTS, dan XL 46 unit BTS. Dengan jumlah BTS seperti itu, Telkomsel menjadi perusahaan yang mendominasi, yakni 96,06%. Bandingkan dengan Indosat Ooredoo 2,95% dan XL Axiata 0,99%.

Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam di Indonesia mencapai 56,92% pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 mencapai 58,3%. Sedangkan di wilayah Provinsi Papua mencapai 32,04% dan meningkat menjadi 34,24%. Sementara proporsi individu yang menggunakan internet di Indonesia mencapai 21,96% pada tahun 2015,

meningkat menjadi 25,37% pada tahun 2016. Di Provinsi Papua proporsi individu yang menggunakan internet sebesar 8,98% pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi 11,62% pada tahun 2016.

Gambar 2.117. Individu yang Menggunakan Telepon Genggam dan Internet

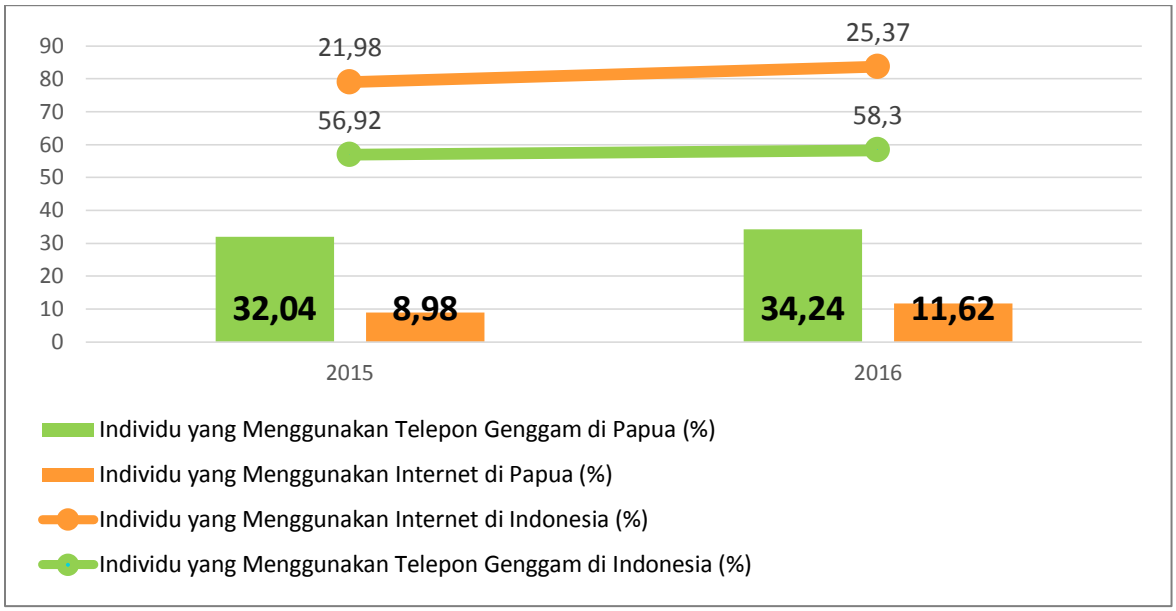

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2015-2016 (data diolah)

2.4.2.11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Berdasarkan data stitistik koperasi yang diperoleh di Provinsi Papua tercatat sampai dengan tahun 2016 koperasi yang aktif adalah sebesar 52,48% yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Secara kewilayahan tercatat 4 Kabupaten dengan koperasi yang masih aktif di atas 80 persen di antaranya adalah Kabupaten Supiori (85,19%), Mimika (81,41%), Pegunungan Bintang (96,26%) dan Kabupaten Yahukimo (98,31%). Sedangkan daerah lainnya memiliki koperasi aktif berada pada kisaran 20-75%.

Gambar 2.118. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016

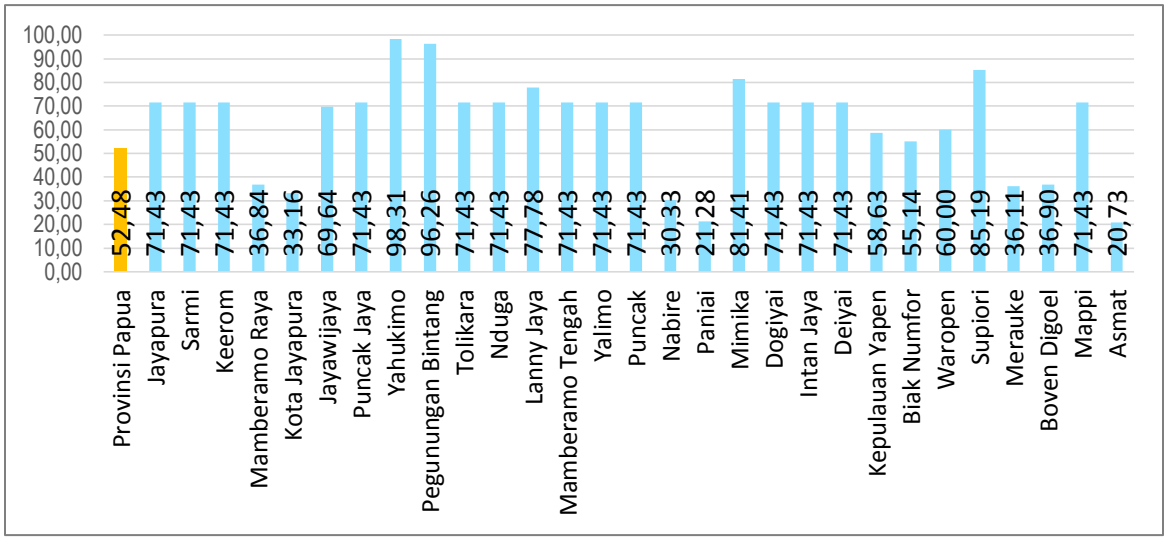

Sumber: Dinas Koperasi Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.4.2.12. Penanaman Modal

Dalam mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Provinsi Papua masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Data di atas menunjukkan sepanjang tahun 2013-2016 jumlah investor baik PMDN maupun PMA di Provinsi Papua memiliki nilai rata-rata pertumbuhan terlihat semakin menurun hingga 37,74% setiap tahunnya. Meskipun demikian nilai investasi memiliki baik PMDN dan PMA terlihat cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Walaupun tidak konsisten mengalami peningkatan, namun tercatat hingga tahun 2016 nilai investasi mencapai Rp. 122,55 triliun. Jika dipilah berdasarkan kewilayahan, terdapat 2 (dua) kabupaten dengan jumlah investor terbanyak yaitu Kabupaten Jayapura (Mamta) dan Kabupaten Merauke (Anim Ha).

Tabel 2.43. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)

Kabupaten/ Kota	2013		2014		2015		2016	
	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)
Papua	168	109.304.355	186	38.874.752	200	94.044.386	87	122.549.122
Jayapura	17	1.281.963	17	15.650.852	18	11.942.907	13	14.636.407

Kabupaten/ Kota	2013		2014		2015		2016	
	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)
Sarmi	3	573.49	6	726.00	7	578.34	4	578.34
Keerom	9	5.208.126	11	3.384.978	11	5.903.366	9	5.903.366
Mamb. Raya	3	347.66	3	695.32	3	347.66	3	347.66
Jayapura	11	1.589.534	12	1.000.000	12	9.924.848	2	10.167.243
Jayawijaya	2	1.65	2	-	2	1.65	-	1.65
Yahukimo	3	-	3	-	3	-	3	-
Peg. Bintang	1	-	1	-	1	-	1	-
Nabire	3	-	22	221.94	24	1.585.245	4	2.689.474
Paniai	39	91.76	3	1.762.067	5	12.284.190	1	10.400.867
Mimika	5	25.02	40	1.540.124	42	29.145.320	6	44.786.011
Deiyai	-	-	-	-	-	-	1	-
Kep. Yapen	-	105.92	-	-	1	50.00	1	291.61
Biak Numfor	18	7.978.398	5	-	5	101.51	1	124.67
Waropen	6	-	6	-	5	-	4	-
Merauke	30	91.462.088	33	11.138.252	39	14.548.865	20	23.773.819
Boven Digoel	12	537.24	13	2.630.218	13	7.505.484	6	8.723.005
Mappi	4	-	7	125.00	7	125.00	7	125.00
Asmat	1	-	1	-	1	-	1	-

Sumber: Papua dalam angka 2015-2017

Rasio daya serap tenaga kerja dari perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi Papua setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2013 dari rata-rata satu perusahaan menyerap 250 tenaga kerja menurun hingga tahun 2017 sebesar satu perusahaan menyerap 78 tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan bertambahnya jumlah perusahaan dan penurunan jumlah tenaga kerja di Provinsi Papua sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 tidak proporsional.

Tabel 2.44. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Dari Perusahaan PMA Dan PMDN

Indikator	2013	2014	2015	2016
Perusahaan				
PMDN	66	78	78	87
PMA	102	108	122	126
Jumlah Perusahaan	**168**	**186**	**200**	**213**

Tenaga Kerja				
PMDN	41.031	42.154	14.805	14.881
PMA	971	1.028	1.033	1.701
Jumlah Tenaga Kerja	**42.002**	**43.182**	**15.838**	**16.582**
Rasio	**250**	**232**	**79**	**78**

Sumber: Papua dalam angka 2015-2017 (diolah)

2.4.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan

Dengan semakin banyaknya event olahraga baik pada tingkat kabupaten, nasional maupun internasional dalam beberapa tahun terakhir tercatat klub olahraga di Provinsi Papua juga kian bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan klub-klub olahraga berbagai cabang olaharaga sepanjang tahun 2013-2017 rata-rata bertumbuh sebesar 4,98% per tahunnya. .

Gambar 2.119. Capaian Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

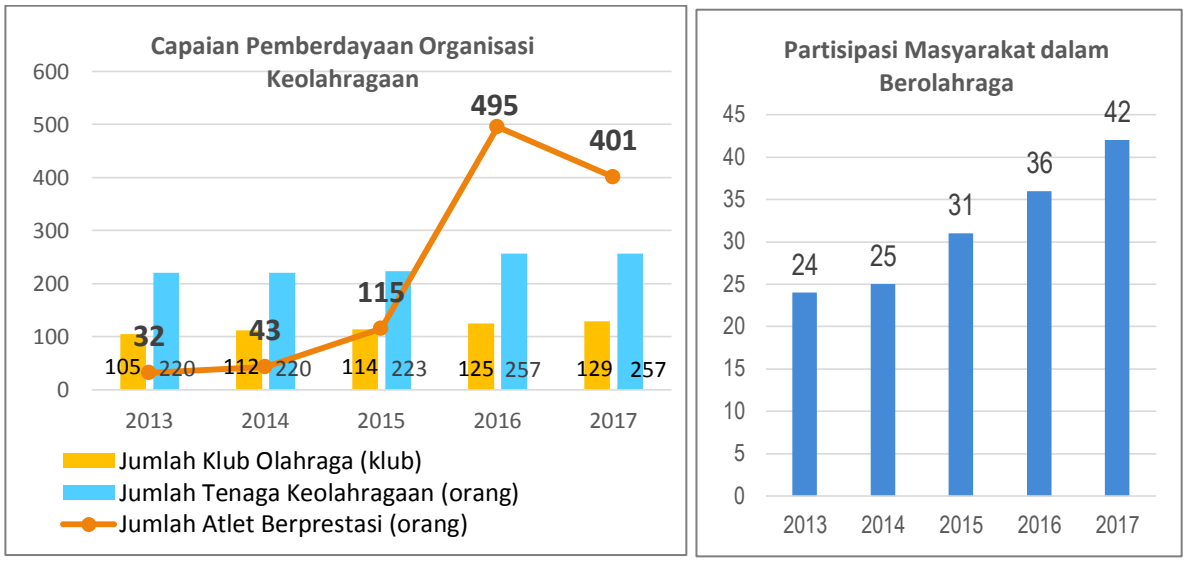

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Sampai dengan tahun tahun 2017 secara keseluruhan tercatat klub olahraga di Provinsi Papua ada 129 klub dengan berbagai macam cabor. Jumlah tenaga dan keolahragaan yang berkualitas Provinsi Papua secara konsisten juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 tercatat ada sebanyak 220 orang tenaga keolahragaan dan terus meningkat sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 257 orang. Bertambahnya klub-klub olahraga tersebut diikuti dengan semakin bertambahnya atlet-atlet yang berprestasi di bidang olahraga baik pada ajang kabupaten, nasional maupun internasional dalam waktu beberapa tahun terakhir ini.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah atlet berprestasi di Provinsi Papua maningkat sangat pesat. Tercatat rata-rata pertumbuhan atlet yang berprestasi hingga mencapai 35,38% setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2017 jumlah atlet yang berprestasi tercatat sebanyak 401 orang, meskipun sempat menurun dari tahun sebelumnya yang mencatata sebanyak 495 orang. Selanjutnya, partisipasi masyarakat di Provinsi Papua selama ini juga terus mengalami peningkatan dalam bidang olahraga. Adanya partisipasi masyarakat dalam berolahraga di Provinsi Papua terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat Gambar 2.119).

1. Organisasi Kepemudaan

Dalam meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan di Provinsi Papua selama ini, terdapat beberapa indikator dalam peningkatan peran serta kepemudaan di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.45. Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Pemuda	43	43	44	47	47
Jumlah Lembaga dan Organisasi Kepemudaan Terbina	32	32	32	30	33
Organisasi pemuda yang aktif	32	32	32	32	32
Jumlah Pelatihan Kewirausahaan untuk Kelompok Pemuda	45	45	45	30	115

Sumber: Provinsi Papua

Dari beberapa indikator di atas terlihat semuanya mengalami peningkatan yang positif. Tercatat organisasi pemuda di Provinsi Papua terus bertambah dari tahun-ke tahun, sampai dengan tahun 2017 ada sebanyak 47 oraganisasi pemuda yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga konsisten melakukan pembinaan maupun kegiatan pelatihan lainnya terhadap lembaga maupun organisasi kepemudaan, pada tahun 2017 sudah ada 33 lembaga/oraganisasi yang terbina dan 115 kelompok usaha yang diberdayakan.

2. Sarana dan Prasarana Olahraga

Dalam menunjang capaian olahraga terus konsisten, perlu juga didukung dengan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Provinsi Papua saat ini memiliki sarana dan prasarana olahraga terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2017. Tercatat sarana olahraga masyarakat dan ruang publik bermutu sampai dengan tahun 2017 ada sebanyak 186 unit, kemudian gedung olaraga 15 unit dan sarana olahraga untuk pusat pertandingan sebanyak 176 unit

Tabel 2.46. Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	175	175	175	186	186
Jumlah Gedung olahraga	8	10	10	15	15
Jumlah sarana olahraga untuk pusat pertandingan	175	175	175	175	176

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017

2.4.2.14. Statistik

Kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Di Provinsi Papua selain didukung dengan adanya instansi BPS, Provinsi Papua juga saat ini memiliki pusat data pembangunan yang merupakan salah satu unit di bawah Bappeda yaitu Pusat Data Dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua, yang disingkat PUSDALISBANG.

PUSDALIBANG Provinsi Papua adalah Wadah yang berfungsi sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah. Selain itu Pusat Data dan Analisa Pembangunan berfungsi untuk : (1) menjembatani jaringan-jaringan dengan pemangku kepentingan pembangunan, (2) mendukung dipergunakannya data dan informasi tersebut oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, (3) mendorong pengembangan kapasitas dan secara proaktif menyebarkan data dan informasi (terutama dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran) kepada publik dan pemerintah.

Muatan utama dari produk PUSDALISBANG adalah statistik hasil-hasil pembangunan dari penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua, penyediaan data SIPD, analisis data statistik kinerja pembangunan, dan penyajian data statistik secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Selama tahun 2016-2018, PUSDALISBANG Provinsi Papua telah menghasilkan beberapa dokumen statistik dan analisis pembangunan, antara lain : (1) Infografis Potret Capaian Pembangunan Papua, (2) Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (3) Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (4) Pencapaian Indikator Makro Provinsi Papua, (5) Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Papua. Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, PUSDALISBANG Provinsi Papua juga telah mengembangkan *e-Government* yang dapat diakses melalui website : https://pusdalisbang.papua.go.id/pusdalisbang_devel.

2.4.2.15. Kebudayaan

Untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Papua, saat ini telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya berupa museum dan gedung-gedung kesenian. Dimana museum yang terbesar ada 2 (dua) gedung yang berlokasi di Kota Jayapura yaitu Museum Negeri Papua yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Museum Loka Budaya yang dikelola oleh Universitas Cenderawasih.

Koleksi seni budaya Papua pada Museum Negeri Papua kurang lebih sebanyak 3.447 koleksi yang meliputi benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, fisiologi, keramik, seni rupa, profil manusia, peta, dan diorama. Museum ini dilengkapi fasilitas sebagai berikut, ruang Pameran Tetap, ruang Pameran Temporer, ruang Auditorium, ruang Perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Penyimpanan Koleksi, ruang Bengkel/ Preparasi, dan ruang Administrasi. Sedangkan koleksi utama dari Museum Loka Budaya adalah benda-benda etnografi yang berasal dari 270-an suku di Papua yang terdiri atas: peralatan dapur; peralatan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup seperti peralatan bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan; busana dan perhiasan tubuh; peralatan perang; peralatan membayar harta (mas kawin, denda,dll); benda-benda sakral; alat transportasi dan alat-alat musik.

Dalam Dokumen Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat sudah ada 17 Karya Budaya yang merupakan warisan suku-suku asli Papua. Mulai dari Yosim Pancar, Ukiran Asmat, hingga Pokem yang merupakan salah satu kemahiran dan kerajinan tradisional Papua. Selengkapnya perkembangan WBTB Papua dapat dilihat pada Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.47. Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda Papua

Tahun	No	Nama Karya Budaya	Asal Daerah	Kategori
2013	67	Yosim Pancar	Papua	Seni Pertunjukan
2013	68	Ukiran Asmat	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2013	69	Barappen	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan
2013	70	Tifa	Papua	Seni Pertunjukan
2013	77	Noken	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	119	Papeda	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Tahun	No	Nama Karya Budaya	Asal Daerah	Kategori
2015	120	Tomako Batu	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	121	Koteka	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	141	Wor Biak	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
2016	142	Elha	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	143	Aker	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	144	Honai	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	145	Khombow	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	146	Terfo	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2017	142	Ndambu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
2017	143	Yu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
2017	144	Pokem	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018

Salah satu keberhasilan pemerintah provinsi dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian budaya Papua adalah mempatenkan Noken sebagai salah satu warisan dunia. Dimana pada tahun 2011 Noken Papua telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia yang membutuhkan pelindungan mendesak. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradat. Walaupun Noken berbentuk seperti halnya tas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam benda dan peralatan, namun masyarakat Papua sendiri tidak menyebut noken sebagai tas. Bagi masyarakat Papua, Noken memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tas yang diproduksi pabrik, baik secara bahan, jenis, model maupun bentuk Noken.

Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu sebesar 75 persen dalam rentang waktu empat tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2013 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 80 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 75 persen dan terus bertahan sampai dengan tahun 2017. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang.

Gambar 2.120. Tingkat Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di Kalangan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

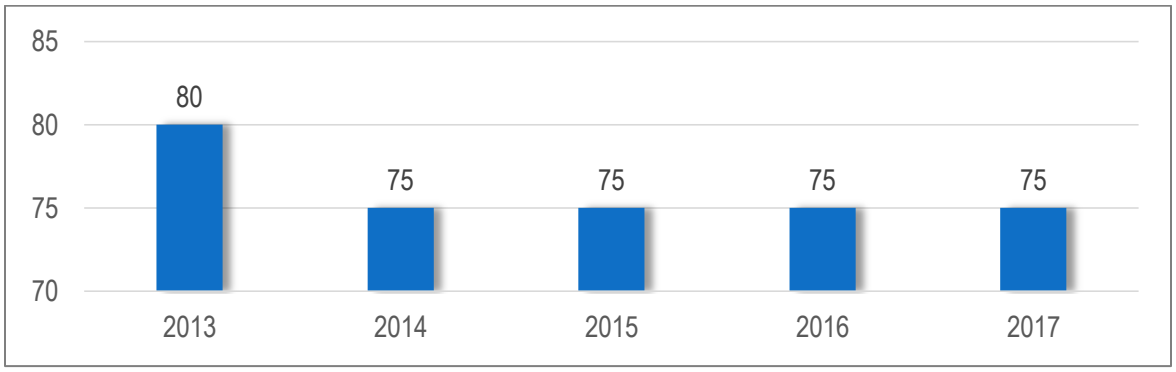

Sumber: Pemerintah Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.4.2.16. Perpustakaan

Sepanjang tahun 2013-2016 gedung perpustakaan di Provinsi Papua mengalami peningkatan dan tersebar di 29 kabupaten/kota. Tercatat peningkatan jumlah gedung perpustakaan dimulai dari tahun 2013 sebanyak 23 unit kemudian meningkat sampai dengan tahun 2017 sebesar 321 unit. Hal tersebut menunjukan bahwa dengan semakin meningkatnya perpustakaan di Provinsi Papua dapat memberikan ruang kepada siapa saja untuk mendapatkan pelayanan tersebut.

Gambar 2.121. Kondisi Perpustakaan di Provinsi Papua

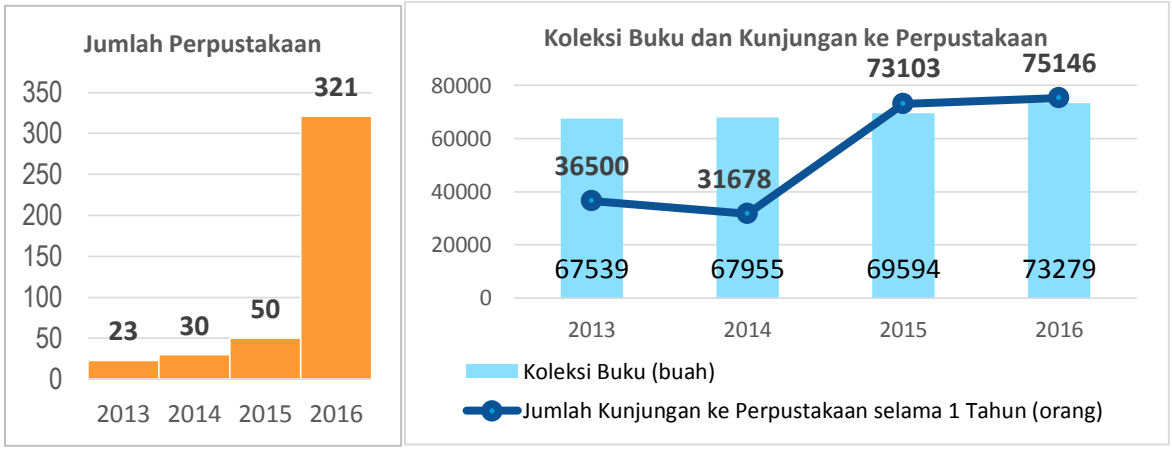

Sumber: Provinsi Papua

Selain itu, koleksi buku yang tersedia juga mengalami peningkatan dalam rentan waktu empat tahun terakhir. Tercatat rata-rata peningkatan koleksi buku di Provinsi Papua

meningkat sebesar 5,24% setiap tahunnya, meskipun terlihat ada penurunan jumlah koleksi buku 11,70 persen dari tahun 2013-2014 dan 27,88 persen di tahun 2015-2016. Selanjutnya, dengan semakin banyaknya perpustakaan yang dibuka ini membuat jumlah kunjungan ke perpustakaan juga terlihat terus mengalami peningkatan. Tercatat sampai dengan tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 75,146 pengunjung. Dengan rata-rata pertahun meningkat sebesar 14,72%.

2.4.2.17. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Perangkat daerah (PD) yang menerapkan arsip secara baku merupakan perangkat yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar. Berdasarkan Gambar 2.122, diketahui bahwa perangkat daerah (PD) yang telah menenrapkan arsip secara baku baru mencapai 24 PD, dengan kata lain masih terdapat beberapa OPD yang belum menerapkan arsip masing-masing PD secara baku.

Gambar 2.122. Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku

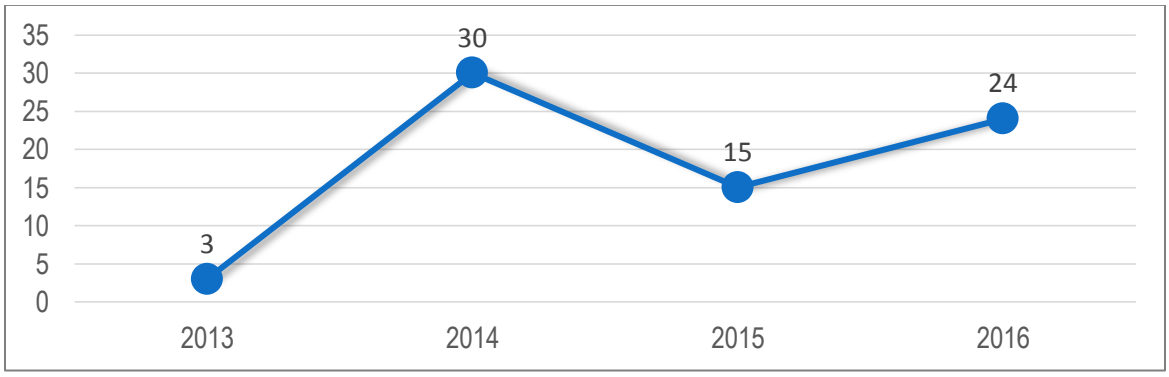

Sumber: Pemerintah Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.4.3. Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.1. Pariwisata

Potensi pariwisata di Provinsi Papua sangat beragam jenisnya yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Objek wisata di Papua terbagi atas dua kelompok yaitu wisata alam dan wisata buatan. Tercatat objek wisata alam di Provinsi Papua terdiri dari 120 objek, dan objek wisata buatan sebanyak 13 objek (lihat Gambar 2.123).

Gambar 2.123. Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Tamu di Provinsi Papua

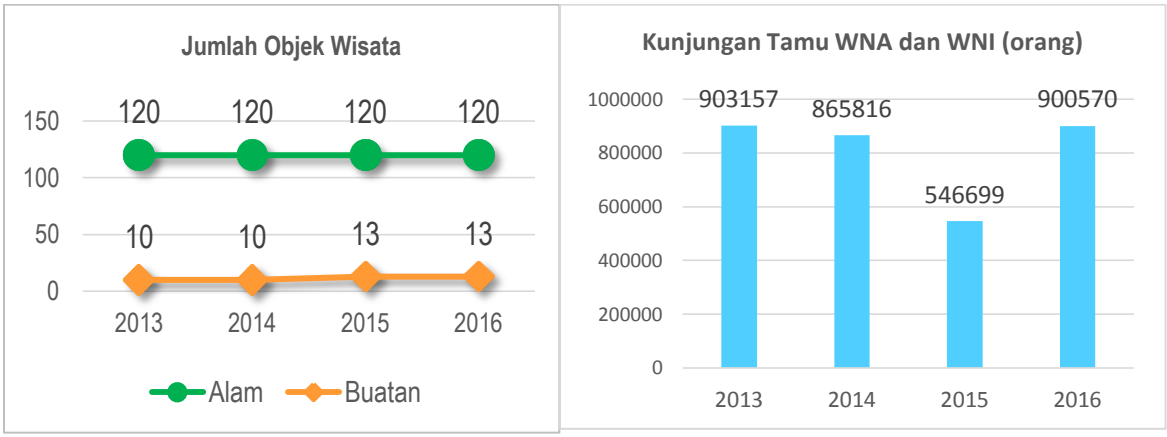

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.12423, diketahui bahwa kunjungan wisata di Provinsi Papua cenderung mengalami penurunan baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Sebaran kunjungan wisatawan di Papua tidak terlepas dari adanya event-event yang dilaksanakan hampir ada di setiap tahun di berbagai daerah di Papua. Tercatat sampai dengan tahun 2016 jumlah wisatawan dalam negeri maupun mancanegara mencapai 900,570 orang atau meningkat sebesar 39,29% dari tahun sebelumnya. Selain itu, lama kunjungan wisatawan di papua sangat beragam dalam rentan waktu empat tahun terakhir, tercatat rata-rata lama kunjungan berkisar antara 2-6 hari setiap tahunnya.

Gambar 2.124. Jumlah Tamu WNA dan WNI Tahun 2016 (orang)

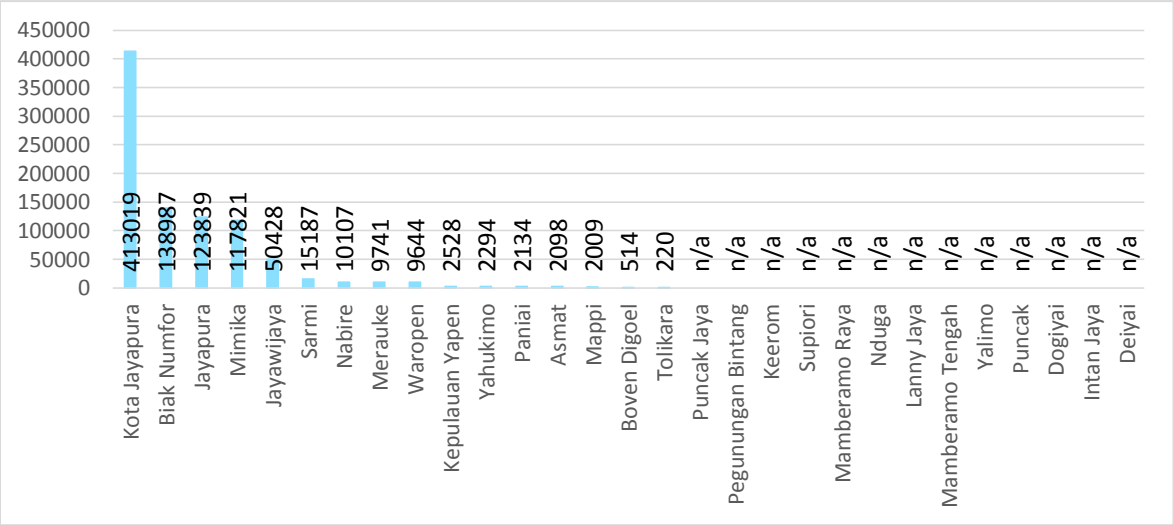

Sumber: Statistik BPS

2.4.3.2. Pertanian

Perkembangan pertanian di Provinsi Papua dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Papua dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Papua. Berdasarkan Tabel 2.48, diketahui bahwa rata-rata produktifitas pertanian terus mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat pada produktifitas total di Papua terus menurun dari 9,82 ton/ha di tahun 2013 menjadi 7,37 ton/ha di tahun 2016 dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Rata-rata setiap tahunnya produktifitas berkurang hingga mencapai 8,65%. Hal ini disebabkan juga oleh produksi total pertanian yang terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,16% khususunya pada tanaman padi sawah yang setiap tahunnya memiliki jumlah produksi menurun paling tinggi yaitu sebesar 12,32% per tahunnya.

Tabel 2.48. Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Pertanian Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata[2]
Luas Panen (Hektar)						
Padi Sawah	38.338	40.138	38.977	51.730	55.004	44.837
Jagung	3.002	2.951	2.736	3.342	3.464	3.099
Kacang Kedelai	3.750	3.258	2.761	5.723	6.282	4.355
Kacang Tanah	1.951	1.994	2.268	2.902	3.187	2.460
Ubi Kayu	3.171	3.729	3.822	3.463	3.559	3.549

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata[2]
Ubi Jalar	30.980	33.041	36.091	35.863	37.656	34.726
Total	81.192	85.111	86.655	103.023	109.152	93.027
Produksi (Ton)						
Padi Sawah	338.988	356.515	374.949	224.945	243.328	307.745
Jagung	7.034	6.948	6.666	8.143	8.550	7.468
Kacang Kedelai	4.609	3.821	3.523	7.964	9.082	5.800
Kacang Tanah	2.045	2.043	2.498	3.308	3.729	2.725
Ubi Kayu	38.900	45.512	46.388	45.059	47.112	44.594
Ubi Jalar	405.521	411.893	446.952	469.441	492.913	445.344
Produktifitas (Ton/Hektar)						
Padi Sawah	8,84	8,88	9,62	4,35	4,42	7,22
Jagung	2,34	2,35	2,44	2,44	2,47	2,41
Kacang Kedelai	1,23	1,17	1,28	1,39	1,45	1,30
Kacang Tanah	1,05	1,02	1,10	1,14	1,17	1,10
Ubi Kayu	12,27	12,20	12,14	13,01	13,24	12,57
Ubi Jalar	13,09	12,47	12,38	13,09	13,09	12,82

Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Secara keseluruhan terdapat empat komoditi dengan produktifitas mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu Jagung, Kacang Kedelai, Kacang Tanah dan Ubi Kayu. Sedangkan padi sawah dan ubi jalar mengalami penurunan hingga mencapai masing-masing sebesar 27,86 dan 0,07%. Namun secara nilai produksi terlihat bahwa hampir semua jenis komoditi ini terus menglami perbaikan, kecuali padi sawah.

Dalam bidang perkebunan, secara keseluruhan luas panen untuk 12 komoditi di Provinsi Papua tercatat pada tahun 2013 sebesar 99.182 ha dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2017 sebesar 257,059 ha atau meningkat sebesar 61.42%. Produktivitas tanaman perkebunan di Provinsi Papua secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2013 adalah sebesar 400 ton/ha naik menjadi 441 ton/ha atau meningkat sebesar 9,35%. Jika dilihat per komoditi, tanaman cengkeh dan karet memiliki produktivitas tertinggi yaitu bisa mencapai di atas 90-95% yaitu pada tahun 2013 ke tahun 2017. Kemudian diikuti oleh komoditi pinang dan mente yang memiliki produktivitas berkisar antara 40-60% untuk tahun 2013 ke tahun 2017. Sedangkan komoditi lainnya hanya mampu meningkat di bawah 20% untuk tahun 2013-2017 (lihat Tabel 2.499).

Tabel 2.49. Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata²
Luas Panen (Hektar)						
Kakao	32.491	33.590	34.950	35.223	34.130	34.077
Kopi	7.852	9.765	10.067	11.839	10.906	10.086
Kelapa	23.576	31.416	27.305	125.486	25.063	46.569
Karet	4.158	4.297	4.387	6.707	8.659	5.642
Karet	14.244	17.795	14.244	14.244	14.244	14.954
Sagu	7.014	12.716	13.516	35.486	155.675	44.881
Pinang	2.999	3.304	3.882	4.435	4.245	3.773
Mente	4.831	4.831	4.796	5.100	2.351	4.382
Cengkeh	575	576	576	30	323	416
Lada	47	45	45	45	42	45
Kapuk Randu	741	799	799	816	853	802
Jarak Pagar	654	658	664	605	568	630
Total	99.182	119.792	115.231	240.016	257.059	166.256
Produksi (ton)						
Kakao	9.757	9.639	10.133	10.297	10.732	10.112
Kopi	1.472	1.771	2.009	3.101	2.503	2.171
Kelapa	15.583	14.157	15.320	15.993	16.136	15.438
Karet	3.285	3.285	3.342	3.342	6.990	4.049
Karet	812	13.802	8.121	8.121	8.121	7.795
Sagu	7.319	42.793	24.959	26.618	66.593	33.656
Pinang	457	921	602	1.107	1.117	841
Mente	573	574	584	593	709	607
Cengkeh	5	3	3	3	47	12
Lada	11	6	6	6	7	7
Kapuk Randu	86	35	35	35	110	60
Jarak Pagar	281	278	278	278	276	278
Produktifitas (Kilogram/Hektar)						
Kakao	300,30	286,96	289,93	292,34	314,44	296,79
Kopi	187,47	181,36	199,56	261,93	229,51	211,97
Kelapa	660,97	450,63	561,07	127,45	643,82	488,79
Karet	790,04	764,49	761,80	498,29	807,25	724,37
Karet	57,01	775,61	570,13	570,13	570,13	508,60
Sagu	1043,48	3365,29	1846,63	750,10	427,77	1486,65
Pinang	152,38	278,75	155,07	249,61	263,13	219,79
Mente	118,61	118,82	121,77	116,27	301,57	155,41
Cengkeh	8,70	5,21	5,21	100,00	145,51	52,92
Lada	234,04	133,33	133,33	133,33	166,67	160,14
Kapuk Randu	116,06	43,80	43,80	42,89	128,96	75,10
Jarak Pagar	429,66	422,49	418,67	459,50	485,92	443,25

Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

2.4.3.3. Kehutanan

Secara keseluruhan total luas kawasan di Provinsi Papua adalah sebesar 32.757.059 Ha yang terdiri atas hutan produksi (terbatas), hutan produksi (tetap), hutan produksi

(dapat dikonversi), hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, areal lainnya dan kawasan perairan (lihat Gambar 2.12520).

Gambar 2.125. Distribusi Penyebaran Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua Tahun 2016

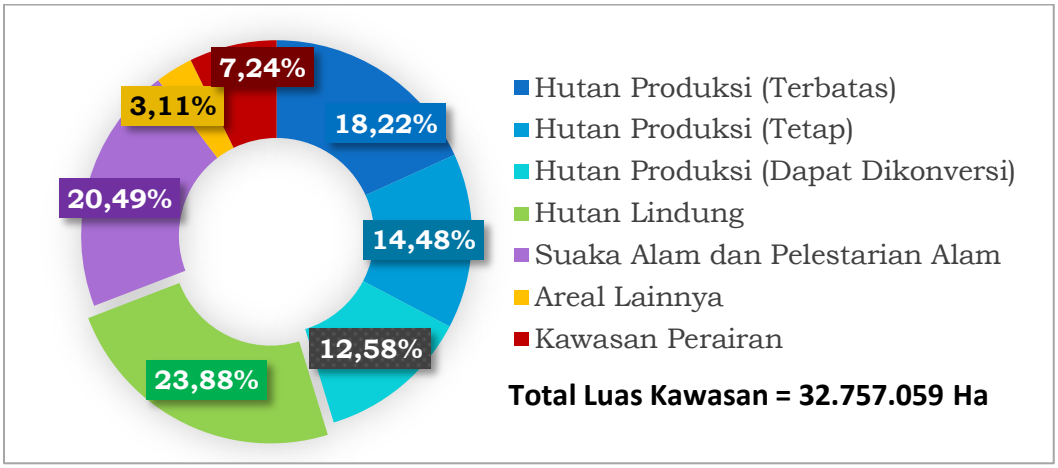

Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Dengan luas kawasan hutan yang cukup luas, di dalamnya terdapat beberapa potensi hasil hutan yang cukup banyak di antaranya ialah produksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu kapis dan verner dengan jumlah produksi yang berbeda-beda setiap jenisnya sepanjang tahun 2013-2017 (lihat Tabel 2.5050). Produksi kayu bulat dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2014-2015 sempat mengalami peningkatan sebesar 58,79% dan kemudian kembali terjadi penurunan hingga di tahun 2017 yaitu dengan nilai produksi sebesar 439,11 m^3. Selain itu, produksi kayu gergajian dan kayu lapis juga tercatat mengalami penurunan jumlah produksi terkecuali untuk verner yang terlihat mengalami peningkatan di tahun 2016-2017 sebesar 48,29% atau sebesar 302,85 m^3.

Tabel 2.50. Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua (m^3)

Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu Lapis	Verner
2013	578.440.360	465.516.793	213.840.594	-
2014	479.582.120	471.751.917	243.660.310	-

2015	1.163.665.550	526.274.724	279.573.630	-
2016	949.705.300	443.587.206	124.145.276	156.601.043
2017	439.119.900	124.022.400	-	302.848.336

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.4.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Luas Areal Pertambangan

Luas lahan pertambangan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2016 tercatat adalah sebesar 3,35 juta ha yang terdiri atas kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penambangan liar. Sepnjang tahun 2013-2016 luas areal penambangan terus meningkat dengan rata-rata 33,55% setiap tahunnya. Meningkatnya luas areal pertambangan di Provinsi Papua didominasi oleh kegiatan eksplorasi yang meningkat pesat pada tahun 2015-2016.

Tabel 2.51. Luas Areal Pengunaan Lahan Pertambangan (ha)

Uraian	2013	2014	2015	2016
Eksplorasi	100,204	100,204	3,023,359	3,257,179
Eksploitasi	100,204	100,402	100,402	100,402
Area Penambangan Liar	789	789	`789	789
Total	201,197	201,395	3,123,761	3,358,370

Sumber: Bappeda Papua, 2018

2. Potensi Sumber Daya Mineral

Jumlah cadangan berubara yang terdata di Provinsi Papua pada tahun 2013 mencapai 185,9 juta ton dan pada tahun 2016 meningkat mencapai 455,9 juta ton. Peningkatan tersebut disebabkan karena bertambahnya daerah yang ditemukan potensi sumber daya batubara di wilayah Papua. Perlu adanya perhatian dari permerintah Provinsi Papua untuk mengeksplorasi sumber daya batubara yang ada sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Adapun persentase pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Provinsi Papua hingga tahun 2016 baru mencapai 19% (lihat Gambar 2.126). Ekplorasi yang lebih mendalam perlu dilakukan pemerintah untuk

memaksimalkan sumberdaya sebagaimana kegunaannya. Namun pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan sumberdaya yang ada dan tidak merusak lingkungan.

Gambar 2.126. Jumlah Cadangan (*Reserve*) yang Terdata dan Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Batubara di Provinsi Papua

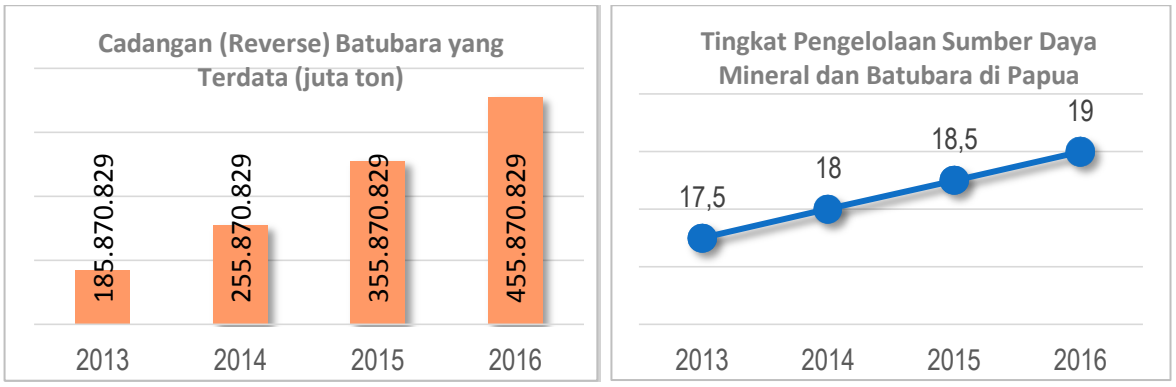

Sumber: Bappeda Papua, 2018

Jumlah cadangan tembaga dan emas yang telah diketahui di Provinsi Papua sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 terus menurun dari 1.651 juta ton biji tembaga pada tahun 2013 menurun hingga 1.498 juta ton tembaga pada tahun 2016. dan 27,21 juta ton bijih emas pada tahun 2013 menurun menjadi 25,29 juta ton bijih emas pada tahun 2016 (lihat Gambar 2.127).

Gambar 2.127. Potensi dan Jumlah Cadangan Tembaga dan Emas yang Sudah Diketahui (Juta Ton Bijih)

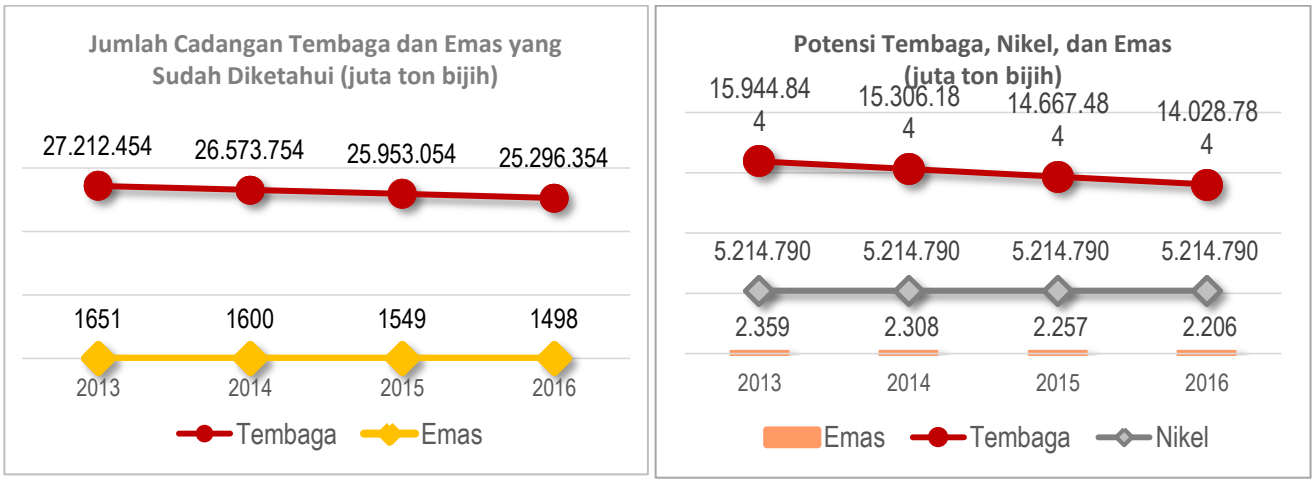

Sumber: Bappeda Papua, 2018

Potensi tembaga dan emas di Provinsi Papua menunjukkan penurunan sejak tahun 2013 sebanyak 15,94 juta ton bijih emas dan 2,36 juta ton bijih tembaga menurun menjadi 14,03 juta ton bijih tembaga pada tahun 2016 dan 2,20 juta ton bijih emas pada tahun 2016. Namun tidak untuk nikel yang angkanya sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 masih tetap sebanyak 5,21 juta ton bijih nikel. Hal ini menunjukkan untuk sumberdaya mineral seperti bijih nikel belum adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan untuk dilakukan eksplorasi yang lebih mendalam.

Berdasarkan Gambar 2.128, diketahui bahwa produksi sektor pertambangan seperti tembaga dan emas mengalami fluktuasi sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 dari 360,52 juta ton bijih emas sempat menurun menjadi 312,27 juta ton emas per tahun pada tahun 2014 kemudian naik kembali pada tahun 2015 menjadi 359,27 juta ton bijih emas dan produksi kembali menurun hingga 504 juta ton bijih emas pada tahun 2016.

Gambar 2.128. Total Produksi Tembaga dan Emas (Juta Ton Bijih)

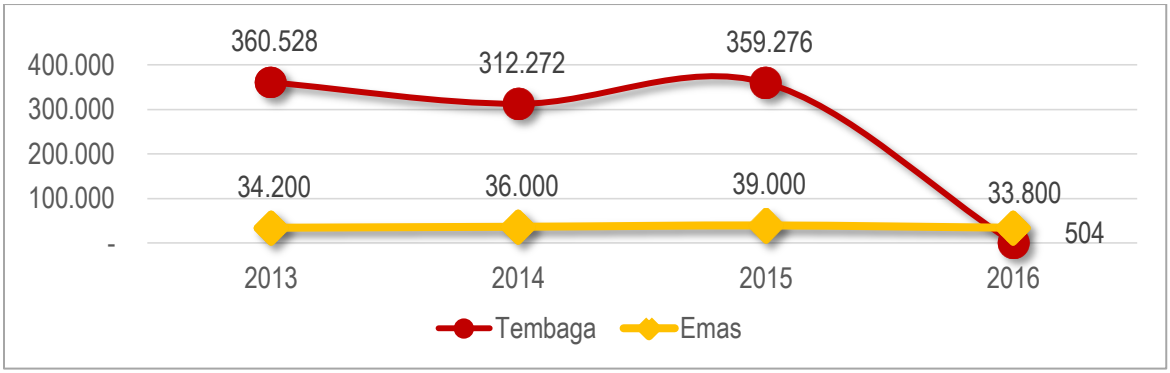

Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Penurunan produksi bijih emas dan tembaga pada tahun 2014 disebabkan adanya negosiasi ulang kontrak sumber daya alam antara pemerintah Indonesia dengan PT. Feeport, kemudian pada tahun 2016 karyawan PT. Freeport melakukan mogok kerja yang mengakibatkan Produksi emas, dan temabga kembali menurun. Sedangkan produksi temabga terlihat sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 terus meningkat dari 34,2 juta ton bijih pada tahun 2013, namun pada tahun 2016 menurun hingga 33,8 juta ton bijih tembaga.

3. Ketersediaan dan Sumber Penerangan

Persentase rumah tangga di Provinsi Papua yang telah menggunakan listrik terlihat cukup rendah. Pada tahun 2013 rumah tangga yang menggunakan listrik baru mencapai 45,52% kemudian meningkat menjadi 55,82% pada tahun 2017. Dari data BPS terlihat rumah tangga menurut sumber penerangan yang paling rendah pada tahun 2013 terdapat di kabupaten Yahukimo, Tolikara, Lanny Jaya, Puncak, Intan Jaya dan Asmat. Pada tahun 2017 kabupaten dengan sumber penerangan listrik palinga rendah adalah Yahukimo, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Puncak, Dogiyai dan Intan Jaya.

Tabel 2.52. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013		2014		2015		2016		2017	
	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya
MAMTA										
Jayapura	93,81	6,19	88,81	11,19	96,01	3,99	99,78	0,22	97,07	2,93
Sarmi	77,70	22,30	74,92	25,08	88,60	11,40	79,14	20,86	81,85	18,15
Keerom	86,48	13,52	82,56	17,44	85,53	14,47	92,11	7,89	95,54	4,46
Mamberamo Raya	25,91	74,09	20,52	79,48	58,53	41,47	51,74	48,26	43,88	56,12
Kota Jayapura	100,00	0,00	100,00	0,00	96,23	3,77	99,48	0,52	99,88	0,12
LA PAGO										
Jayawijaya	30,63	69,37	37,18	62,82	50,69	49,31	48,71	51,29	57,93	42,07
Puncak Jaya	6,65	93,35	13,64	86,36	11,16	88,84	12,16	87,84	14,91	85,09
Yahukimo	2,78	97,22	7,57	92,43	3,76	96,24	5,79	94,21	2,90	97,10
Pegunungan Bintang	8,99	91,01	12,71	87,29	28,45	71,55	19,01	80,99	34,22	65,78
Tolikara	2,32	97,68	5,26	94,74	7,33	92,67	7,56	92,44	11,07	88,93
Nduga	1,86	98,14	5,71	94,29	n.a	n.a	11,18	88,82	6,49	93,51
Lanny Jaya	2,01	97,99	6,10	93,90	5,83	94,17	9,49	90,51	3,09	96,91
Mamberamo Tengah	14,36	85,64	11,69	88,31	8,02	91,98	86,93	13,07	38,92	61,08
Yalimo	30,40	69,60	49,57	50,43	48,76	51,24	37,02	62,98	85,83	14,17
Puncak	2,36	97,64	7,43	92,57	73,78	26,22	5,27	94,73	15,15	84,85
MEE PAGO										
Nabire	91,12	8,88	88,88	11,12	84,89	15,11	82,58	17,42	92,65	7,35
Paniai	26,87	73,13	25,18	74,82	13,97	86,03	22,92	77,08	31,97	68,03
Mimika	88,72	11,28	93,56	6,44	93,69	6,31	96,12	3,88	98,14	1,86
Dogiyai	31,62	68,38	14,20	85,80	19,07	80,93	18,58	81,42	3,61	96,39
Intan Jaya	1,30	98,70	6,01	93,99	10,55	89,45	9,87	90,13	11,06	88,94
Deiyai	41,86	58,14	52,31	47,69	49,33	50,67	49,70	50,30	44,65	55,35
SAERERI										
Kepulauan Yapen	59,66	40,34	57,93	42,07	75,65	24,35	65,49	34,51	70,40	29,60

Kabupaten/Kota	2013		2014		2015		2016		2017	
	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya
Biak Numfor	95,25	4,75	95,32	4,68	98,78	1,22	98,65	1,35	98,64	1,36
Waropen	62,45	37,55	61,12	38,88	73,50	26,50	87,72	12,28	93,03	6,97
Supiori	39,97	60,03	48,86	51,14	45,60	54,40	59,91	40,09	74,21	25,79
ANIM HA										
Merauke	89,54	10,46	86,67	13,33	94,37	5,63	93,89	6,11	94,70	5,30
Boven Digoel	73,99	26,01	77,63	22,37	73,41	26,59	69,60	30,40	91,64	8,36
Mappi	18,69	81,31	18,30	81,70	20,78	79,22	23,67	76,33	26,86	73,14
Asmat	9,57	90,43	17,72	82,28	21,97	78,03	18,18	81,82	81,29	18,71
Papua	**45,52**	**54,48**	**47,32**	**52,68**	**53,17**	**46,83**	**50,90**	**49,10**	**55,82**	**44,18**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2013-2017

2.4.3.5. Perdagangan

Volume ekspor menurut negara tujuan pada tahun 2013 mencapai 1.364 ton dengan jumlah volume ekspor paling tinggi benua wilayah Asia sebesar 1.115 ton. Pada tahun 2016 ekspor mencapai 1.259 juta ton.dengan benua tujuan ekspor terbesar adalah Asia sejumlah 1.144 juta ton.

Tabel 2.53. Volume Ekspor dan Impor Menurut Negara Tujuan (ton)

Negara Tujuan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Negara Tujuan (Ton)				Volume Impor Menurut Negara Asal (Ton)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
ASIA	**1.115**	**457.842**	**1.009.511**	**1.144.285**	**111.986**	**333.544**	**308.394**	**312.286**
Jepang	302	107.261	220.900	280.200	2.915	32	4	760
Korea Selatan	137	35.031	75.721	137.289	61.350	5.547	2.590	3.587
Filipina	100	9.152	111.000	163.200	-	3	171	1.469
Tiongkok	247	179.629	167.000	263.000	2.770	20.288	96	7.279
India	326	123.000	429.440	270.000				
Malaysia					30	54	36	44
Asia Lainnya	3	3.769	5.450	30.597	44.920	307.621	305.498	299.148
EROPA	**144**	**133.446**	**32.000**	**38.000**	**75**	**2.846**	**1.878**	**2.115**
Spanyol	144	113.446	32.000	38.000				
Inggris	15	-	15	-	32	240	74	86
Jerman	15	-	-	-	3	6	3	6
Swiss	15	-	-	-	27	199	142	194
Italia					3	601	217	395
Eropa Lainnya	15	20.000	-	-	9	1.799	1.442	1.434
AMERIKA	**-**	**1.108**	**11.655**	**12.551**	**11.453**	**14.545**	**10.435**	**11.085**

Negara Tujuan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Negara Tujuan (Ton)				Volume Impor Menurut Negara Asal (Ton)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Amerika Serikat	-	1.108	11.655	12.551	11.330	13.324	9.548	9.442
Kanada	-	-	-	-	78	957	753	1.461
Amerika Lainnya	-	-	-	-	46	264	135	182
OCEANIA	-	538	509	625	37.843	52.824	46.957	54.262
Australia	15	137	23	9	37.839	52.789	46.905	54.210
Selandia Baru	15	-	-	-	1	2	-	1
Oseania Lainnya	-	400	486	617	3	33	52	51
TIMUR TENGAH	**105**	**124.630**	**114.532**	**64.077**				
Saudi Arabia	85	83.074	93.225	39.081				
Uni Emirat Arab	8	18.416	11.562	12.510				
Timur Tengah Lainnya	12	23.140	9.745	12.485				
Negara Lainnya	-	-	-	-	-	26	5	15
Jumlah	**1.364**	**717.565**	**1.168.206**	**1.259.539**	**161.357**	**403.785**	**367.670**	**379.763**

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

Sedangkan volume impor menurut negara asal pada tahun 2013 mencapai 161.357 ton dengan jumlah volume impor paling tinggi benua wilayah Asia sebesar 111.986 ton. Dan pada tahun 2016 impor mencapai 379.763 ton.dengan benua tujuan impor terbesar adalah Asia sejumlah 312.286 ton.

Tabel 2.54. Volume Ekspor dan Impor Menurut Pelabuhan (ton)

Pelabuhan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Pelabuhan (Ton)				Volume Impor Menurut Pelabuhan (Ton)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Frans Kaisepo	5	18	4	365	15	15	-	-
Jayapura	236	18	662	68	1	15	10.225	9.233
Serui	20.750	44.017	40.408	30.894				
Merauke	30.351	27.551	41.609	45.245	690	44	417	-
Amamapare	1.850.274	1.051.376	782.958	1.179.368	160.649	391.197	356.982	370.483
Sentani	27.367	361	1	164	12	12.544	38	46
Bade	177.862	109.769	79.528	70.562	15	15	-	-
Kimaam	96.874	40.844	26.049	36.665	5	15	-	-
Ubrub					-	-	7	-
Nabire	15	15	15	15				
Wamena	4	7	15	15				
Numfoor	15	15	15	789				
Jumlah	**2.203.723**	**1.273.961**	**971.218**	**1.364.120**	**161.357**	**403.785**	**367.669**	**379.762**

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

Nilai ekspor menurut golongan barang yang paling tinggi pada tahun 2013 adalah bujuh tembaga dan koncentrat (HS26) senilai 2.608 miliyar US$ dan pada tahun 2016 jumlah nilai ekspor tertinggi menurut golongan barang adalah bijih tembaga dan konsetrat.

Tabel 2.55. Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Digit Provinsi Papua Tahun 2013 – 2016 (ton/US$)

Golongan Barang	Satuan	2013	2014	2015	2016
Bijih Tembaga dan Konsentrat (HS26)	Volume (kg)	1.179.327	525.741	1.015.240	1.114.400
	Nilai (US$)	2.608.595.385	1.376.498.241	1.831.814.111	1.907.955.250
Kayu dan Barang dari Kayu (HS44)	Volume (kg)	145.135	139.720	152.036	144.500
	Nilai (US$)	96.413.984	115.703.724	123.336.544	96.181.410
Ikan dan Hewan Air Lainnya (HS03)	Volume (kg)	39.415	51.511	1	6
	Nilai (US$)	21.953.394	33.762.797	713	59.166
Lemak Nabati & Hewani (HS15)	Volume (kg)	1	12	6	48
	Nilai (US$)	5.947	30.823	20.449	79.907
Lainnya	Volume (kg)	241	581	924	584
	Nilai (US$)	1.364.119.831	717.564.989	1.168.206.165	1.259.538.627
Jumlah	**Volume (kg)**	**1.364.120**	**717.565**	**1.168.206**	**1.259.539**
	Nilai (US$)	**2.728.043.282**	**1.529.674.059**	**2.007.516.930**	**2.008.078.061**

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

Andil ekspor Provinsi papua terhadap nilai ekspor Indonesia sebesar 1,49% dan pada tahun 2016 andil provinsi papua sebesar 1,38 persen dari nilai ekspor Indonesia. Sedangkan andil nilai impor papua sebesar 0,27 dari nilai impor Indonesia dan pada tahun 2016 andil Provinsi Papua 0,53 persen dari nilai impor Indonesia.

Tabel 2.56. Nilai Ekspor-Impor Provinsi Papua dan Indonesia (Juta US$) Tahun 2013-2016 (US$/%)

Tahun	Ekspor			Impor		
	Papua	Indonesia	Andil	Papua	Indonesia	Andil
2013	2.728,00	182.551,80	**1,49**	506,4	186.628,70	**0,27**
2014	1.529,70	176.292,50	**0,87**	1.014,50	178.178,80	**0,57**
2015	2.007,50	150.283,70	**1,34**	746,7	142.694,80	**0,52**
2016	2.008,10	145.186,20	**1,38**	721,3	135.652,90	**0,53**

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

2.4.3.6. Perindustrian

Jumlah unit usaha industri kecil menengah Provinsi Papua mencapai 2.290 unit pada tahun 2013 dan meningkat hingga 3.428 unit pada tahun 2015. Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah tersebut diiringi dengan peningkatan produktivitas industri pada tahun 2013 sebesar 91,89%, kemudian meningkat hingga 99,25% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 persentase peningkatan produktivitas industri mencapai 92,94%.

Gambar 2.129. Kondisi Perindustrian di Provinsi Papua

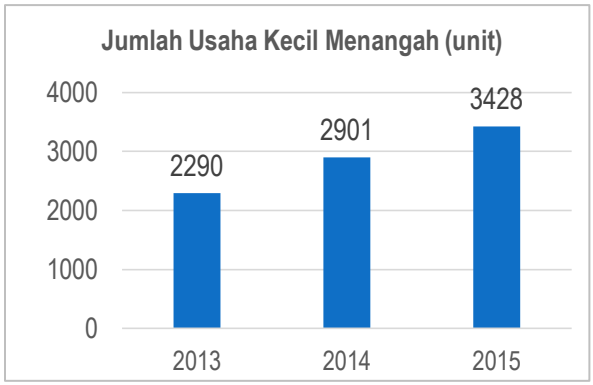

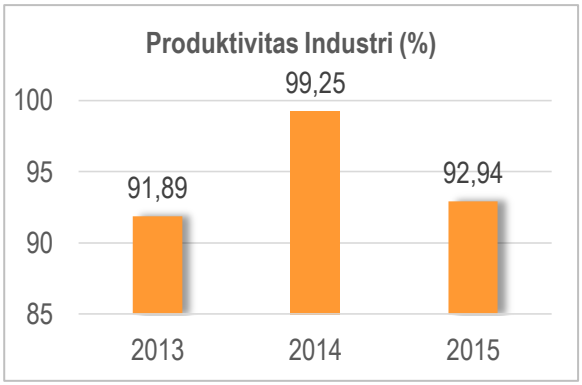

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

2.4.3.7. Kelautan dan Perikanan

Perahu/Kapal tangkap ikan terbagi 3 yaitu, kapal motor, perahu tak bermotor dan perahu motor tempel. Pada tahun 2013 jumlah perahu/kapal tangkap ikan sebanyak 6.953, pada tahun 2015 meningkat hingga 10.997 dan pada tahun 2011 sebanyak 11.356, namun pada tahun 2016 jumlah perahu/kapal tangkap ikan menurun menjadi 4.595.

Tabel 2.57. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan

Kabupaten/Kota	Kapal Motor				Perahu Tak Bermotor				Perahu Motor Tempel				Jumlah			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Merauke	747		83	171		417	574	-	462	661	114	132	1.209	1.078	771	303
Jayawijaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jayapura	7		3	-		515	408		483	9	156	44	490	524	567	44
Nabire	5	813	-	-		811	425	425		6	200	200	5	1.630	625	625
Kepulauan Yapen	15		-	-		875	1.965		872	19	764	764	887	894	2.729	764
Biak Numfor	201		1	-			2.981	-		206	32	60	201	206	3.014	60
Paniai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncak Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mimika	84	863	-	-		650	-	517	648	83	62	98	732	1.596	62	615
Boven Digoel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mappi	135	898	-	-			125	376		160	27	52	135	1.058	152	428
Asmat	32		-	-		625	499	499	620	42	-	-	652	667	499	499
Yahukimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tolikara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarmi	26	495	-	-	482	175	195	216	168	30	25	25	676	700	220	241
Keerom	-		-	-	-	620	-	-	-	32	-	-	-	652	-	-
Waropen	-		-	-		180	363		175	-	48	53	175	180	411	53
Supiori	-		-	-		425	622	222	421	-	20	39	421	425	642	261

Kabupaten/Kota	Kapal Motor				Perahu Tak Bermotor				Perahu Motor Tempel				Jumlah			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	63	803	-	-	798	515	1.563	644	509	69	101	58	1.370	1.387	1.664	702
Provinsi Papua	**1.315**	**3.872**	**87**	**171**	**1.280**	**5.808**	**9.720**	**2.899**	**4.358**	**1.317**	**1.549**	**1.525**	**6.953**	**10.997**	**11.356**	**4.595**

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Jumlah rumah tangga perikanan di Provinsi Papua sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 meningkat. Pada tahun 2015 sebanyak 232.157 rumah tangga perikanan yang terdiri dari perikanan laut dan perairan umum, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 233.563 rumah tangga perikanan.

Tabel 2.58. Jumlah Rumah Tangga Perikanan

Kabupaten/Kota	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Merauke	55.664	50.425	2.028	2.059	57.691	52.484
Jayawijaya	-	-	707	721	707	721
Jayapura	15.364	18.025	1.411	1.439	16.775	19.463
Nabire	10.678	13.248	61	63	10.738	13.310
Kepulauan Yapen	5.508	8.370	-	-	5.508	8.370
Biak Numfor	38.569	31.266	-	-	38.569	31.266
Paniai	-	-	205	211	205	211
Puncak Jaya	-	-	-	-	-	-
Mimika	21.561	20.661	75	96	21.636	20.757
Boven Digoel	-	-	62	63	62	63
Mappi	20.641	21.431	4.946	5.095	25.587	26.526
Asmat	5.818	6.443	99	104	5.917	6.547
Yahukimo	-	-	148	157	148	157
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-
Tolikara	-	-	-	-	-	-
Sarmi	1.156	1.216	-	-	1.156	1.216
Keerom			-	-	-	-
Waropen	13.141	18.052	941	955	14.082	19.007
Supiori	10.544	13.571	-	-	10.544	13.571
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-

Kabupaten/Kota	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Nduga	-	-	-	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	22.760	19.820	72	76	22.832	19.895
Provinsi Papua	**221.403**	**222.527**	**10.754**	**11.037**	**232.157**	**233.563**

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua mengalami penurunan dari 11.091 ton menurun manjadi 7.403 ton.

Tabel 2.59. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

Kab/Kota	Budidaya Laut		Tambak		Kolam		Keramba		Jaring Apung		Sawah		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Merauke	1	-	21	21	77	19	-	-	1	-	-	-	100	40
Jayawijaya	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	37	-
Jayapura	-	-	7	7	39	-	-	-	1.361	1.361	-	-	1.408	1.369
Nabire	-	-	600	600	342	356	-	-	-	-	-	-	942	956
Kepulauan Yapen	96	85	-	-	26	26	-	-	12	13	-	-	134	124
Biak Numfor	22	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	10
Paniai	-	-	-	-	250	260	-	-	-	-	-	-	250	260
Puncak Jaya	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Mimika	-	-	-	-	61	40	-	-	-	-	-	-	61	40
Boven Digoel	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	63
Mappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asmat	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	46	-
Yahukimo	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	71
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tolikara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keerom	-	-	-	-	253	203	-	-	-	-	-	-	253	203
Waropen	-	-	-	-	122	123	-	-	-	-	-	-	122	123
Supiori	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	-	13	918	918	6.568	3.052	-	-	186	157	-	-	7.672	4.139

Kab/Kota	Budidaya Laut		Tambak		Kolam		Keramba		Jaring Apung		Sawah		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Provinsi Papua	125	113	1.546	1.546	7.859	4.213	-	-	1.561	1.531	-	-	11.091	7.403

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

2.5. ASPEK OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

2.5.1. Kerangka Regulasi Otonomi Khusus Provinsi Papua

Undang-undang Otsus merupakan langkah maju bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena melalui Undang-undang ini Pemerintah mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua berbeda dengan provinsi yang lain. Melalui UU Otsus Papua di Provinsi Papua diberlakukan dua bentuk Peraturan Daerah, yakni: Peraturan Daerah Khusus yang disingkat Perdasus dibuat oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur yang dalam penetapannya harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRP dan Peraturan Daerah Provinsi yang disingkat Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur. Perdasus dan Perdasi mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Perdasus dan Perdasi pada tahapan implementasi, maka dibentuk Peraturan Gubernur.

Dalam rangka implementasi UU Otsus, setidaknya dibutuhkan penyusunan dan penetapan 11 (sebelas) Perdasus dan 18 (delapan belas) Perdasi. Kesebelas Perdasus dan Delapan belas Perdasi sebagai amanat langsung dari UU Otsus sebagaimana disebutkan di atas, dapat dilihat pada Tabel 2.6060 dan Tabel 2.611.

Tabel 2.60. Perdasus Perintah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001

NO.	PASAL	ASPEK YANG DIATUR
1.	Pasal 2 ayat (3)	Pengaturan lambang daerah.
2.	Pasal 4 ayat (9)	Tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur dalam pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah.
3.	Pasal 11 ayat (3)	Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.	Pasal 19 ayat (3	Keanggotaan dan jumlah anggota MRP
5.	Pasal 20 ayat (2)	Pelaksanaan tugas dan wewenang MRP
6.	Pasal 21 ayat (2)	Pelaksanaan hak MRP.
7.	Pasal 23 ayat (2)	Tata cara pelaksanaan kewajiban MRP.
8.	Pasal 34 ayat (7)	Pembagian lebih lanjut penerimaan bagi hasil bidang pertambangan

		minyak bumi, gas alam serta penerimaan khusus untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan
9.	Pasal 38	Usaha perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam
10.	Pasal 66 ayat (2)	Penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan
11.	Pasal 67.	Pelaksanaan pengawasan sosial dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang layak

Sumber: Hasil Elaborasi Tim Uncen, 2010

Tabel 2.61. Perdasi yang diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2001

NO	PASAL	ASPEK YANG DIATUR
1.	Pasal 24 ayat (2)	Tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua.
2.	Pasal 26 ayat (3)	Perangkat Pemerintah Provinsi
3.	Pasal 27 ayat (3)	Kewenangan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah setempat
4.	Pasal 29 ayat (3)	Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP dalam pembentukan Perdasus,
5.	Pasal 32 ayat (2)	Fungsi, tugas, wewenang, bentuk dan susunan keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc,
6.	Pasal 35 ayat (6)	Pelaksanaan bantuan dari dalam dan luar negeri.
7.	Pasal 36 ayat (1)	Perubahan dan perhitungan APBD Provinsi Papua
8.	Pasal 36 ayat (3)	Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya
9.	Pasal 41 ayat (2)	Tata cara penyertaan modal Pemprov. Papua
10.	Pasal 48 ayat (3)	Hal tertentu mengenai tugas kepolisian di Provinsi Papua
11.	Pasal 56 ayat (6)	Pelaksanaan pemberian bantuan dan/atau subsidi Pemprov dan Pemkab/Kota dalam bidang pendidikan
12.	Pasal 57 ayat (4)	Perlindungan dan pengembangan kebudayaan asli Papua oleh Pemprov.
13.	Pasal 59 ayat (5)	Kewajiban penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Pemprov.
14.	Pasal 60 ayat (2)	Perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan dan peningkatan gizi oleh Pemprov Papua & Pemkab/Kota
15.	Pasal 61 ayat (4)	Masalah kependudukan termasuk penempatan penduduk dalam rangka transmigrasi nasional,
16.	Pasal 62 ayat (4)	Masalah ketenagakerjaan
17.	Pasal 64 ayat	Masalah pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan

NO	PASAL	ASPEK YANG DIATUR
	(5)	berkelanjutan,
18.	Pasal 65 ayat (3)	Kewajiban Pemprov. di bidang social

Sumber: Hasil Elaborasi Tim DC Uncen, 2010

Sampai dengan tahun 2018, menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah merumuskan dan menetapkan perdasus dan perdasi sebagaimana yang diamanatkan UU Otsus. Bahkan ada beberapa Perdasus yang walaupun tidak diamanatkan secara langsung dalam UU Otsus, tapi karena itu dianggap penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar orang asli Papua, sehingga dirumuskan dan ditetapkan. Perdasus yang ditetapkan diluar amanat UU Otsus tapi berkaitan dengan hak-hak dasar orang asli Papua antara lain:

1. Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan adat Di Papua;
2. Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua;
3. Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
4. Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga masyarakat Adat Atas Tanah;
5. Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil; Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus; dan
6. Perdasus Nomor 10 Tahun 2014 tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung.

Untuk melaksanakan Perdasus dan Perdasi, perlu diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaanya berupa Peraturan Gubernur. Dalam pelaksanaannya sampai saat ini adanya beberapa Perdasus dan Perdasi yang yang penting bagi penyelenggaraan otonomi khusus di Papua, namun belum ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Gubernur. Sebagai ilustrasi, dapat diberikan beberapa masalah dalam implementasi UU Otsus, yaitu:

1. Perdasus tentang Lambang Daerah

2. Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Adat Atas Tanah. Bagi masyarakat hukum adat, pemerintah dan swasta dirasakan bahwa perdasus ini sangat penting karena berkaitan dengan pemetaan dan penetapan batas-batas wilayah masyarakat hukum adat, sehingga dapat diketahui kepemilikan hak ulayat dari wilayah-wilayah adat tersebut. Hal ini sangat penting bagi para Investor yang mau menanamkan modalnya di Papua karena kepemilikan hak ulayat jelas, bukan seperti yang terjadi selama ini dimana pihak investor kesulitan dalam melakukan hubungan dengan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat. Namun demikian, pemerintah provinsi belum juga membuat peraturan pelaksanaannya dengan instrumen hukum peraturan gubernur sehingga peraturan ini belum dapat dilaksanakan, bahkan oleh pemerintah provinsi sedang dilakukan perubahan terhadap Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tersebut.
3. Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil yang merupakan perda payung mengenai model pendidikan khusus bagi orang asli Papua yang secara personal maupun secara komunitas, diperlukan suatu perlakuan afirmatif yang tepat sasaran, sehingga orang asli Papua yang berada di daerah terpencil, terisolasi dan terpinggirkan dan mengalami masalah pendidikan memperoleh kesempatan yang layak untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas, bermartabat. Oleh karena sasaran Perdasus adalah orang asli Papua yang berada di daerah terpencil, maka orang asli yang dalam implementasinya harus ditindaklanjuti dengan pembentukan perda di tingkat kabupaten/kota sehingga dapat dilaksanakan di kabupaten/kota. Namun demikian hal tersebut belum dilaksanakan, pemerintah kabupaten/kota sendiri belum mengetahui keberadaan Perdasus Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil, karena pemerintah provinsi (dalam hal ini Dinas Pendidikan) belum melakukak sosialisasi tentang adanya perdasus tersebut. Selain dari itu, pemerintah provinsi sendiri juga belum membuat peraturan gubernur sebagai penjabaran dari perdasus tersebut.
4. Perdasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Usaha Perikanan.
5. Perdasi Pertambangan

Uraian pada bagian-bagian terdahulu menunjukan bahwa implementasi Otsus Papua sebagai instrumen akselerasi pembangunan di Papua masih memerlukan pembenahan dan atau peningkatan. Perlu dibangun komunikasi politik yang harmonis atas dasar saling membutuhkan dan saling percaya antara Pusat dan Daerah dan antara unsur Provinsi (DPRP – Gubernur – MRP), maupun antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Perlu dilakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional maupun lokal dengan menjadikan Undang-undang Otsus sebagai acuan utama (setelah disempurnakan sesuai tuntutan perubahan).

2.5.2. Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang berimplikasi terhadap penamaan kelembagaan pemerintahan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Pemerintah Daerah (Gubernur beserta perangkat daerah), dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Ketiga lembaga ini merupakan lembaga suprastruktur politik di tingkat provinsi yaitu DPRP disebut sebagai badan legislatif, Pemerintah Provinsi disebut sebagai badan eksekutif, sementara MRP sesuai rumusan awal yang diajukan Provinsi Papua dimaksudkan sebagai bagian dari DPRP dengan menggunakan sistem dua kamar (bikameral).

DPRP sebagai badan legislatif berwenang dalam melaksanakan fungsi di bidang legislatif, yang mencakup: (1) legislasi; (2) budgeting (penganggaran); dan (3) pengawasan. Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif berwenang dalam melaksanakan fungsi pemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan. Di samping itu sebagai wakil Pemerintah Pusat, Gubernur juga memiliki kewenangan melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua. Sedangkan MRP memiliki kewenangan melaksanakan fungsi tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Pola dan

mekanisme hubungan sinergis dengan tugas dan wewenang berbeda dalam rangka implementasi UU Nomor 21 Tahun 2001 oleh ketiga lembaga ini dapat digambarkan secara sederhana dalam Gambar 2.130.

Gambar 2.130. Mekanisme Hubungan Gubernur, DPRP dan MRP

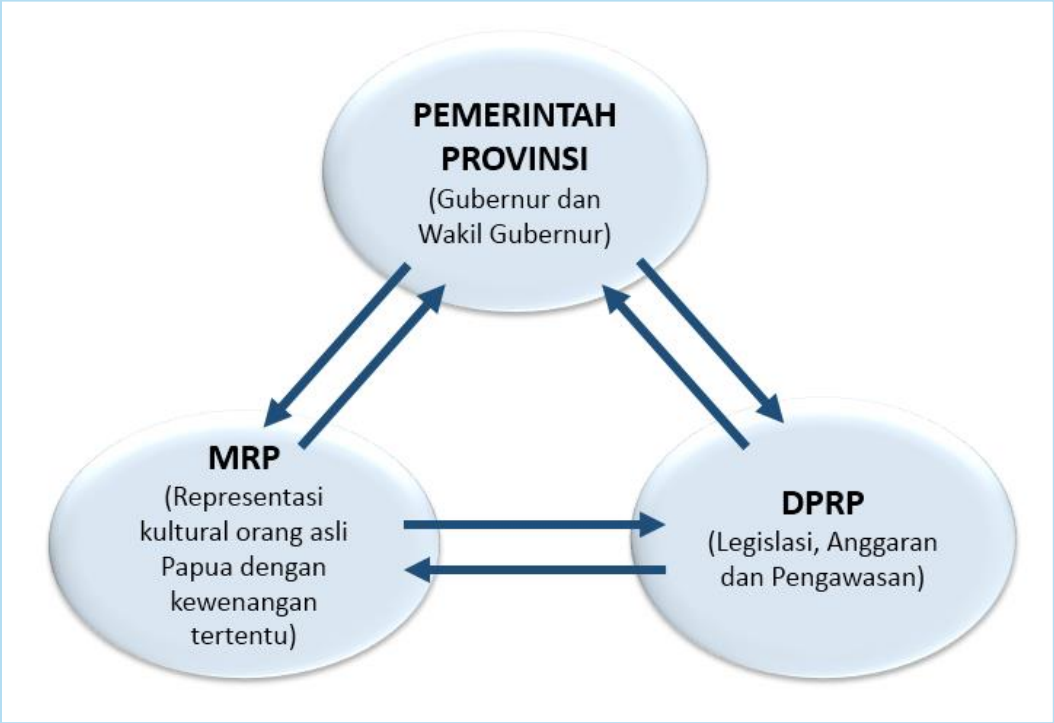

a. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Irian Jaya. Perubahan nomenklatur DPRD Provinsi menjadi DPRP sebagaimana tersebut di atas, diikuti pula dengan penambahan jumlah anggota, yaitu sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 jumlah anggota DPRP adalah 1¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penambahan 1¼ (satu seperempat) keanggotaan DPRP dimaksudkan untuk mengakomodir keterwakilan orang asli Papua sekaligus dalam rangka peningkatan kinerja lembaga perwakilan tersebut. yaitu diharapkan dengan adanya

penambahan jumlah keanggotaan akan semakin menambah bobot lembaga DPRP dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi rakyat, khususnya orang asli Papua.

Penambahan jumlah anggota DPRP dilakukan pertama kalinya dalam pemilihan umum tahun 2004. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum jumlah kursi DPRP dalam pemilihan umum tahun 2004, ditetapkan 56 (lima puluh enam) kursi yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 Ayat (2) huruf b, bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh 45 (empat puluh lima) kursi. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka jumlah anggota DPRP adalah 45 orang. Jumlah ini selanjutnya ditambah dengan 1¼ (satu seperempat) dari jumlah tersebut menjadi 56 orang. Dengan demikian maka seharusnya jumlah anggota DPRP yang dipilih adalah sebanyak 45 orang dan yang diangkat sebanyak 11 orang. Akan tetapi Komisi Pemilihan Umum saat itu secara langsung menambah kursi bagi DPRP dari unsur partai politik.

Kondisi ini berlangsung selama 3 (tiga) kali pemilihan umum legislatif yaitu tahun 2004, 2009, dan 2014. Pengisian alokasi kursi yang seharusnya diisi melalui jalur pengangkatan justru dilakukan melalui pemilihan umum, artinya kursi tersebut diperebutkan oleh partai politik peserta pemilihan umum secara bebas. Permasalahan ini akhirnya merambah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Penetapan Komisi Pemilihan Umum mengenai proses rekrutmen anggota DPRP untuk pengisian 11 (sebelas) kursi tambahan tersebut tidak memperhatikan filosofi dan pertimbangan penambahan kursi bagi DPRP sebagaimana yang terungkap dalam persidangan-persidangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang otonomi khusus Papua dan tercatat dalam Risalah sidang-sidang dimaksud.

Sekalipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, akan tetapi jumlah anggota DPRP yang diangkat baru dapat terealisasi pada tahun 2017, dan berdasarkan pada putusan tersebut maka jumlah alokasi kursi DPRP bertambah dengan adanya anggota DPRP yang diangkat. Oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “keanggotaan Dewan

Perwakilan Rakyat Papua periode 2009-2014 sebanyak 56 (lima puluh enam), ditambah 11 (sebelas) anggota yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Khusus pada tahun 2009. Dengan demikian alokasi kursi anggota DPRP meningkat menjadi 70 kursi, yaitu: 1¼ x 56 = 70 (tujuh puluh). Ke depan DPRP dari unsur yang diangkat harus diperkuat kewenangannya agar peran DPRP dalam perlindungan hak-hak orang asli Papua lebih optimal, salah satunya dengan memperkuat tugas dan wewenang dalam mengajukan usulan Perdasus.

b. Pemerintah Provinsi Papua

Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur. Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur. Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Eksistensi orang asli Papua dalam wilayah Provinsi Papua diberikan ruang di dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, oleh karenanya syarat utama untuk dapat dicalonkan menjadi Gubernur di Provinsi Papua adalah Warga Negara Republik Indonesia dari orang asli Papua.

Sesuai Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2001, perangkat daerah di Provinsi diatur dengan Perdasi, artinya berdasarkan kewenangan sebagaimana diarahkan dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2001 maka seluruh bidang pemerintahan yang menjadi urusan Provinsi Papua dapat dijabarkan dalam bentuk perangkat Daerah sesuai kemampuannya. Akan tetapi selama kurun waktu berlakunya UU No. 21 Tahun 2001 pembentukan perangkat daerah berpedoman pada undang-undang pemerintahan daerah yang umum yaitu dimulai sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Perangkat daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk kabupaten/kota dalam wilayahnya perlu diberikan penguatan melalui pengaturan perangkat daerah secara berbeda dan dalam jangka waktu tertentu. Idealnya pengaturan perangkat daerah diserahkan kepada Daerah Provinsi, selanjutnya Daerah Provinsi yang akan mengatur lebih lanjut perangkat daerah kabupaten/koa berdasarkan pada kewenangan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri.

c. Majelis Rakyat Papua (MRP)

MRP merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Ini berarti bahwa MRP memiliki kewenangan yang terbatas. MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP dengan masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun.

MRP harus diperkuat kewenangannya, yaitu diposisikan sebagai lembaga legislatif sebagaimana halnya DPR Provinsi, hanya dibedakan berdasarkan ruang lingkup kewenangannya, yaitu ruang lingkup kewenangan DPRP meliputi aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak penduduk, sedangkan kewenangan MRP hanya meliputi aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Dengan demikian badan legislatif di tingkat provinsi sebaiknya terdiri dari 2 (dua) kamar, yaitu DPR Provinsi yang merepresentasekan penduduk, dan MRP yang merepresentasekan orang asli Papua.

2.5.3. Kewenangan Otonomi Khusus Provinsi Papua

UU Nomor 21 Tahun 2001, secara umum dapat dikatakan memiliki bobot desentralisasi yang tinggi, namun dalam tataran implementasinya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kelemahan undang-undang tersebut yang berimplikasi pada tumpang tindihnya kewenangan Provinsi Papua dengan Pemerintah, dan tumpang tindih kewenangan Provinsi Papua dengan kabupaten/Kota. Artinya selama kurun waktu berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2001, kewenangan Provinsi Papua sama dengan provinsi/ kabupaten/kota lainnya di Indonesia, yang berbeda hanya dalam penerimaan dana otonomi khusus.

Overlapping dengan kewenangan Pemerintah, disebabkan rumusan kewenangan Pemerintah dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu pada kalimat: “kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sesuai Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014, mengatur bahwa: “penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan

keserasian hubungan antar susunan pemerintahan". Artinya kewenangan Provinsi Papua berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 dilaksanakan berdasarkan ke-3 kriteria tersebut.

Dalam konteks ini, maka sesuai amanah Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2001, kewenangan Provinsi Papua harus dijabarkan dengan instrumen hukum yang berbentuk Perdasus/Perdasi. Hal yang terjadi adalah ketika Perdasi/Perdasus tersebut diimplementasikan, ternyata bertentangan dengan undang-undang sektoral. Terjadinya pertentangan ini disebabkan rumusan norma yang kabur tersebut, sehingga norma, standar, prosedur dan kriteria terkait setiap bidang kewenangan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan undang-undang yakni undang-undang sektoral.

Terjadi perbedaan penggunaan istilah kewenangan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, dan istilah urusan atau wewenang berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 mau pun UU Nomor 23 Tahun 2014. Jika menggunakan istilah kewenangan maka Provinsi Papua memiliki kewenangan secara bulat atas urusan bidang pemerintahan tertentu, sedangkan menggunakan istilah urusan atau wewenang, maka kewenangan Provinsi Papua dibatasi oleh norma, standar, prosedur dan kriteria yang tertuang dalam undang-undang sektoral.

Disisi lain, terjadi juga tumpang tindih kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan rumusan Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001, menyebutkan bahwa: "kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan". Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, oleh kerena UU Nomor 23 Tahun 2014 menitikberatkan kewenangan pada Kabupaten/Kota, sementara UU Nomor 21 Tahun 2001 menitikberatkan kewenangan pada Provinsi. Penyelesaian persoalan kewenangan harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan ke depan.

2.5.4. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang

berkepanjangan sejak tahun 1962. Kehadiran UU Otsus bagi Provinsi Papua menjadi landasan legal yang kuat bagi pemerintah pusat dan Provinsi Papua, antara lain untuk:

1. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua secara adil dalam upaya mencapai kesejahteraan Orang Asli Papua, serta mendukung terwujudnya penegakan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua;
2. Menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Orang Asli Papua, agar dapat sejajar dengan daerah lain;
3. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak dasar penduduk asli Papua;
4. Mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua.

Keempat poin di atas merupakan cita-cita dari pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua yang harus diwujudkan bersama dengan masyarakat Orang Asli Papua.

Untuk mewujudkan ke-4 cita-cita Otsus tersebut, semenjak tahun 2002 pemerintah Provinsi Papua diberi dana transfer dari pemerintah pusat yang setara 2% dari DAU nasional yang disebut sebagai Dana Otonomi Khusus (DOK) Papua. Dimana jika dikalkulasi sampai dengan tahun 2016, secara kumulatif DOK tersebut kurang lebih sudah mencapai Rp. 47,905.38 juta. Dalam hal ini, pengelolaan DOK tersebut diatur sendiri oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Secara garis besarnya, pengaturan pengelolaan DOK yang dijalankan oleh pemerintah provinsi selama tahun 2002 - 2016 dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : (1) penggunaan DOK untuk kepentingan bersama yang disebut program strategis lintas kabupaten/kota atau Urusan Bersama, (2) penggunaan DOK yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dengan alokasinya yang mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu periode 2003-2005 dengan pembagian 60%-40% untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kemudian periode 2006-2012 dibagi 40%-60% untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan yang terakhir periode

2013-2016 dibagi sebesar 20%-80% untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian ke pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dilakukan setelah disisihkan dahulu dari total penerimaan DOK setara 2% DAU Nasional tersebut untuk penggunaan program strategis lintas kabupaten/kota (Urusan Bersama). Selengkapnya penerimaan DOK dan pembagiannya selama periode 2002-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.1316.

Gambar 2.131. Alokasi Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2002-2016

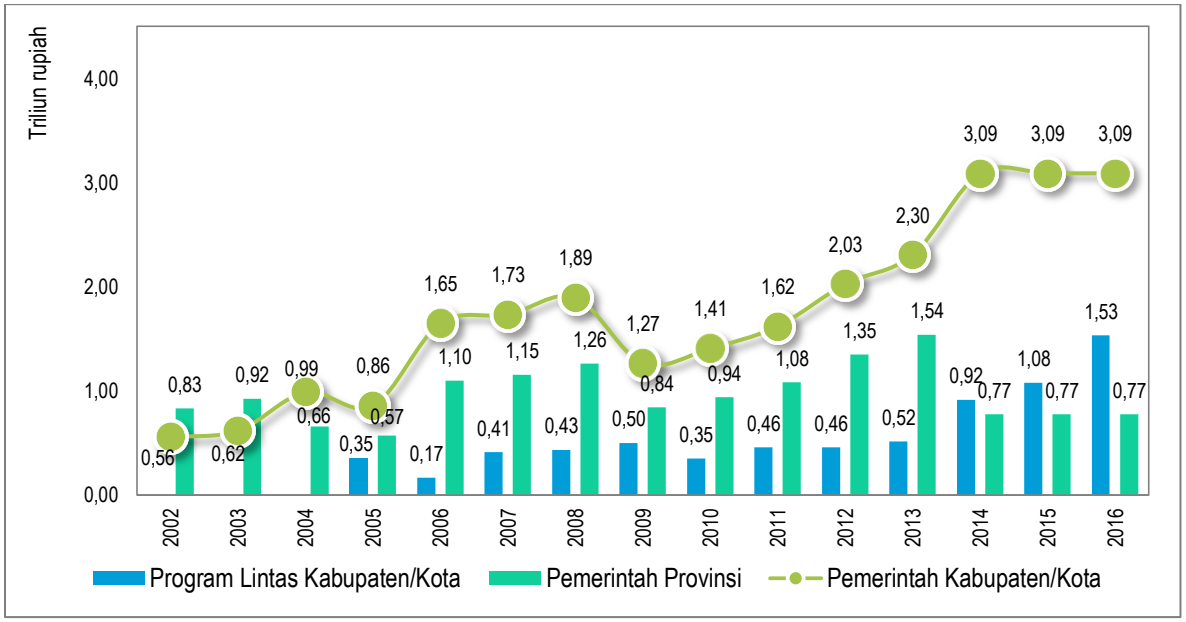

Sumber: BPKAD Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Keterangan: Pembagian Dana Otsus sudah dikeluarkan bagian dari Provinsi Papua Barat

Dari Gambar 2.1316 di atas terlihat bahwa secara keseluruhan pembagian DOK ke pemerintah kabupaten/kota jauh lebih besar dibandingkan ke pemerintah provinsi maupun untuk UB (Urusan Bersama). Selama tahun 2002-2016 total DOK yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota kurang lebih sebanyak Rp. 26,18 triliun, dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 15,74% per tahun. Setelah itu untuk pemerintah provinsi dengan total peneriman sekitar Rp. 14,56 triliun pada periode yang sama, dan pertumbuhannya sebesar 8,13% per tahun. Kemudian untuk program strategis lintas kabupaten/kota sebanyak Rp. 7,17 triliun, dengan pertumbuhannya mencapai 24,37% per tahun. Pertumbuhan total penerimaan DOK yang setara 2% DAU nasional adalah 12,42% per tahun sepanjang periode 2002-2016.

Tabel 2.62. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

Alokasi Dana Otsus Papua	Total 2002-2016 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan 2002-2016 (%)
Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota	7.168.140.478.400	24,37
Pemerintah Provinsi	14.561.495.136.220	8,13
Pemerintah Kabupaten/Kota	26.175.254.388.330	15,74
Total Dana Otsus Setara DAU 2%	47.904.890.002.950	12,42

Sumber: BPKAD Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.5.5. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan

Dalam penggunaannya, ada 4 sektor pembangunan yang menjadi sasaran utama dari pengelolaan dana Otsus yakni sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar. Keempat sektor tersebut merupakan akar penyebab dari rendahnya kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), tingginya tingkat kemiskinan pada OAP, rendahnya kualitas SDM OAP, dan tingginya kesenjangan pembangunan antara Provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia. Beranjak pada konsep berpikir tersebut, berikut ini disampaikan dinamika historis tingkat kemiskinan, struktur ekonomi, tingkat pengangguran dan orang bekerja, serta kualitas pembangunan manusia. Semuanya disajikan dalam rentang waktu sebelum dan saat dilaksanakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, perhatikan Gambar 2.132.

Gambar 2.132. Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua dan Indonesia

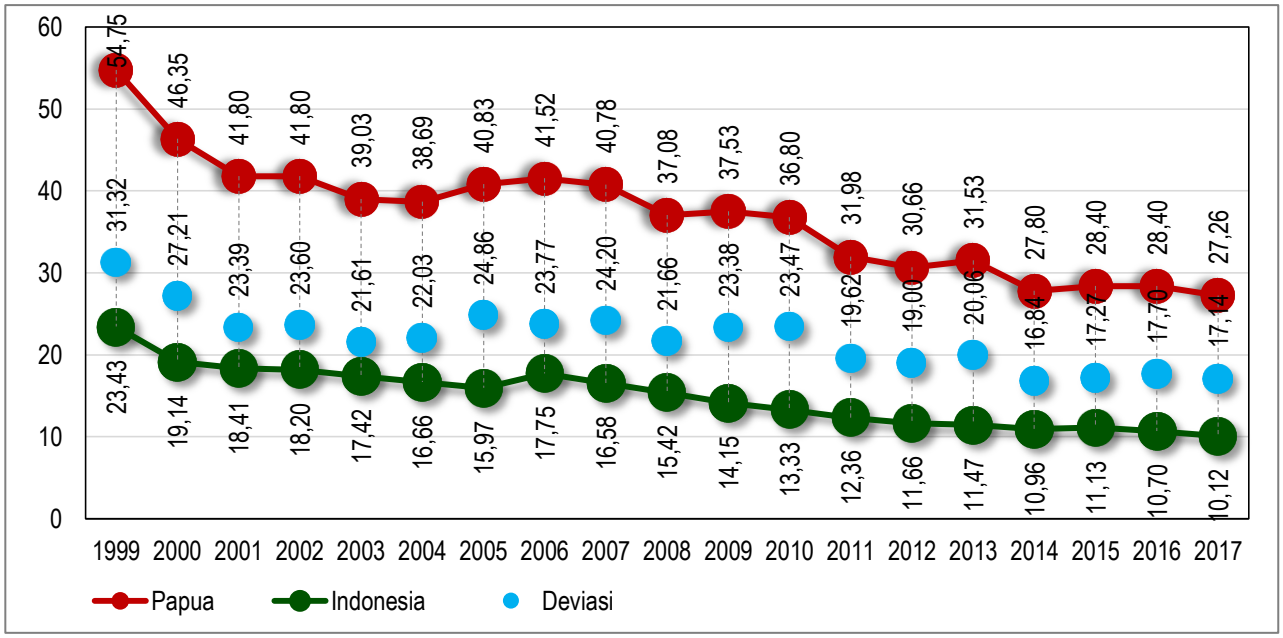

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Papua, 1999-2017 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2.132, pada tahun 1999 masa sebelum Otonomi Khusus, Provinsi Papua (waktu itu masih bernama Irian Jaya) membukukan tingkat kemiskinan yang paling tinggi sekali di Indonesia yakni 54,75%. Pada tahun 2001, ketika dimulai pelaksanan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, tercatat tingkat kemiskinan dapat diturunkan hingga mencapai 41,80%, atau turun sekitar 12,95%, dan tetap paling tinggi di Indonesia. Kemudian saat diberlakukan Otonomi Khusus tahun 2001 sampai dengan tahun 2017, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dapat diturunkan dengan sangat drastis sebesar -27,49% bila dibandingkan tahun 1999, dimana pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua menjadi 27,26%. Dengan demikian pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dapat dinyatakan berhasil dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Selain itu juga berhasil mengurangi kesenjangan persentase kemiskinan dengan tingkat nasional yakni dari periode 1999-2001 rata-rata sebesar 27,31% per tahun, menjadi 23,10% per tahun pada periode 2001-2005, kemudian sebesar 22,50% per tahun pada periode 2005-2012, dan semakin kecil pada periode 2013-2017 sebesar 17,80% per tahun. Atau dengan kata lain, secara keseluruhan untuk periode 2001-2017 pelaksanaan

Otonomi Khusus berhasil memperkecil kesenjangan kemiskinan dengan tingkat nasional kurang lebih sekitar 21% per tahun. Fakta ini mengindikasikan bahwa Otonomi Khusus mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan di Provinsi Papua yang lebih cepat dibandingkan daerah lainnya di Indonesia, khususnya selama periode 2013-2017 yang mampu mengurangi kesenjangan lebih cepat dibandingkan periode-periode masa Otonomi Khusus lainnya. Namun demikian perlu dicatat bahwa sampai sekarang kemiskinan di Provinsi Papua masih paling tinggi di Indonesia. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang lebih inovatif untuk lebih mempercepat penurunan kemiskinan dimasa mendatang.

2.5.6. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Perekonomian Wilayah

Salah satu keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah mengubah struktur ekonominya dari ekonomi yang ekstratif ke ekonomi manufaktur (pengolahan barang setengah jadi dan atau barang jadi). Ekonomi ekstratif merupakan perilaku ekonomi yang melakukan usaha penggalian, pengambilan atau pengolahan kekayaan yang disediakan alam, dimana hasil yang diambil dari alam tidak diolah atau tidak diusahakan kembali. Ekonomi yang ekstraktif ini lebih peduli pada keuntungan maksimal perusahaan tanpa memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Mengubah struktur ekonomi ekstratif ke ekonomi pengolahan terutama industri berbasis pertanian dan berkelanjutan dapat memberi dampak kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih tinggi yang ditandai dengan menurunnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang lebih cepat, meningkatnya pendapatan per kapita diluar sektor ekstratif, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan berkurangnya kerusakan lingkungan akibat pengurasan sumber daya yang berlebihan dari ekonomi ekstratif. Sebagaimana yang divisualisasikan pada Gambar 2.133, terlihat selama 22 tahun masa pembangunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat ekstratif masih mendominasi struktur ekonomi Provinsi Papua, rata-rata di atas 40%, namun dengan kecenderungan yang terus menurun.

Gambar 2.133. Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 1995-2017 (%)

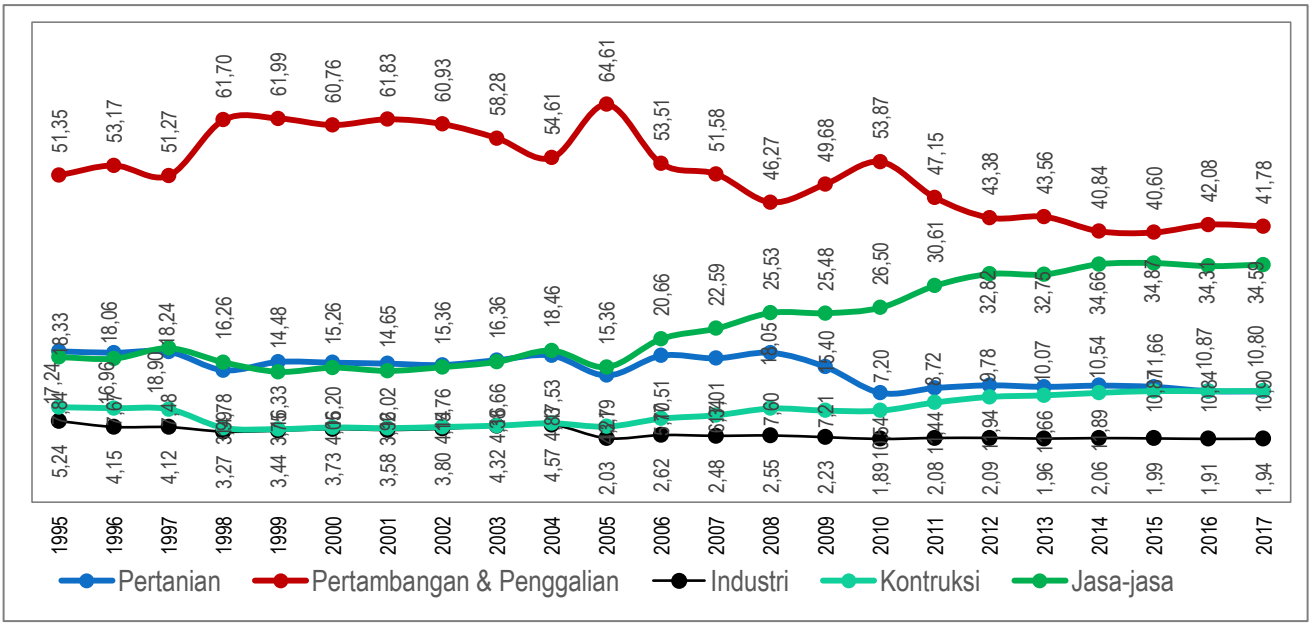

Sumber: BPS Provinsi Papua, 1997-2017 (data diolah)

Pelaksanaan Otonomi Khusus yang dimulai tahun 2001 sampai sekarang ini (tahun 2017), belum maksimal meningkatkan kontribusi sektor industri manufaktur dalam perekonomian wilayah, bahkan termasuk juga dalam mengangkat sektor pertanian yang lebih banyak menyerap lapangan usaha dan pekerjaan bagi penduduk miskin Orang Asli Papua. Kecenderungan kontribusi sektor industri manufaktur dan pertanian mengalami penurunan sejak tahun 2006 hingga tahun 2017, akibat terjadi redistribusi nilai tambah ke sektor jasa-jasa dan kontruksi. Kedua sektor tersebut selama periode 2006-2017 menguasai pangsa PDRB Provinsi Papua sekitar 19,21% per tahun, sementara sektor pertanian turun menjadi 13,23% per tahun dan industri manufaktur hanya 2,15% per tahun untuk periode yang sama.

Adanya penambahan APBD Provinsi Papua sejak diberlakukan Otonomi Khusus menyebabkan konsumsi pemerintah bertambah sangat tinggi, dimana penambahan tersebut lebih banyak difokuskan pada sektor-sektor jasa pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dimasa mendatang diperlukan adanya integrasi yang kuat, antara ketiga sektor strategis tersebut dengan sektor pertanian dan industri manufaktur, agar efek multiplier dari meningkatnya konsumsi pemerintah terhadap ketiga sektor strategis

tersebut lebih berdampak nyata terhadap pembangunan pertanian dan industri manufaktur.

2.5.7. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Tenaga Kerja dan Pengangguran

Keberhasilan Otonomi Khusus lainnya dalam pembangunan wilayah Papua dapat diamati juga pada peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Disini terbukti bahwa selama masa Otonomi Khusus (2001-2017) jumlah orang bekerja di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan, dan pengangguran dapat diturunkan lebih cepat. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.134 dan Tabel 2.63, saat Otonomi Khusus belum dilaksanakan jumlah orang yang terserap dalam lapangan kerja hanya mencapai 961.300 orang per tahun dengan pengangguran terbuka sekitar 4,49% per tahun. Kemudian di masa pelaksanaan Otonomi Khusus periode 2002-2005, jumlah orang bekerja meningkat menjadi 1.035.218 orang per tahun namun dengan pengangguran terbuka yang lebih tinggi sebesar 6,88% per tahun. Selanjutnya pada periode 2006-2012 jumlah orang bekerja bertambah menjadi 1.199.529 orang per tahun, serta pengangguran dapat diturunkan hingga 4,35% per tahun. Terakhir di periode 2013-2017, jumlah yang bekerja naik lebih besar menjadi 1.657.561 orang per tahun, dan tingkat pengangguran semakin direduksi hingga menjadi 3,59% per tahun.

Gambar 2.134. Jumlah Orang Bekerja dan Tingkat Pengangguran di Papua

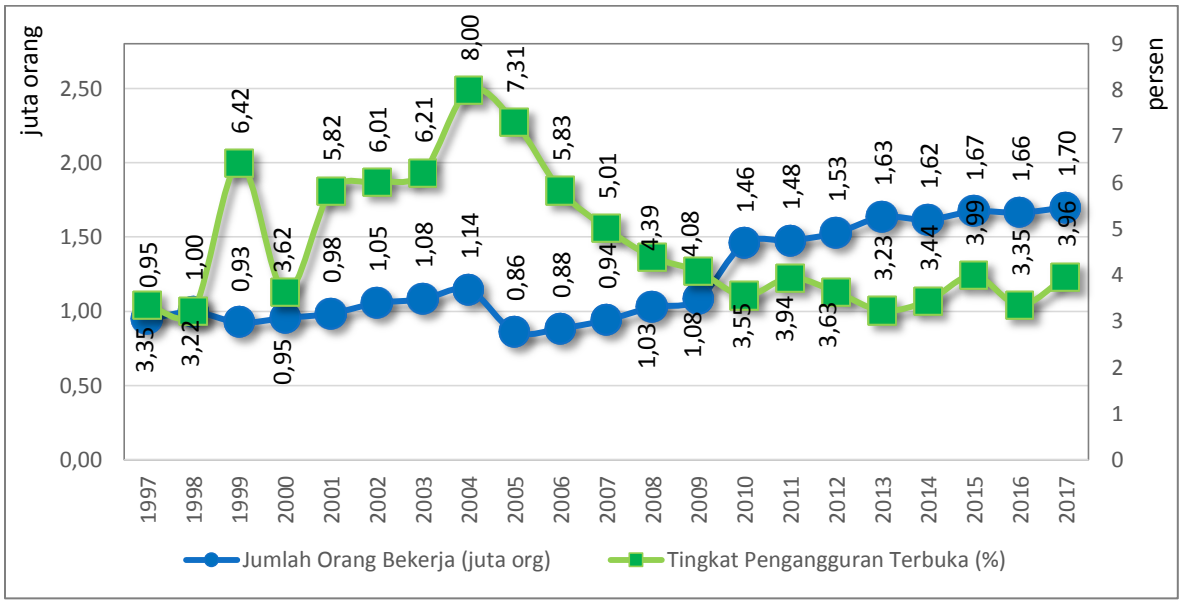

Sumber: BPS Provinsi Papua, 1997-2017 (data diolah)

Tabel 2.63. Rata-Rata Orang Bekerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Periode Pembangunan	Jumlah Orang Bekerja (orang/tahun)	Pengangguran (persen/tahun)
1997-2001	961.300	4,49
2002-2005	1.035.218	6,88
2006-2012	1.199.529	4,35
2013-2017	1.657.561	3,59

Sumber: BPS Provinsi Papua, 1997-2017 (data diolah)

Berdasarkan kedua data di atas terindikasi bahwa keberhasilan Otonomi Khusus dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Provinsi Papua mulai terasa pada periode 2006-2012, kemudian lebih meningkat lagi dampaknya selama periode 2013-2017. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa jumlah orang yang bekerja selama masa Otonomi Khusus ini masih lebih dominan pada tenaga kerja yang berpendidikan rendah sederajad SD, tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah (lihat kembali Gambar 2.34 dan Tabel 2.24 sebelumnya).

2.5.8. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia

Pada berbagai pembahasan sebelumnya telah diulas bagaimana begitu gencarnya pemerintah provinsi dan pusat selama ini membangun sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur di Papua. Dengan maksud agar kesejahteraan masyarakat Papua dapat ditingkatkan, dan kesenjangan pembangunan dengan wilayah lain di Indonesia dapat dikurangi. Dengan menggunakan kecenderungan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM selama masa sebelum dan sesudah dijalankan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, dapat digambarkan mengenai dampak dari kebijakan Otonomi Khusus tersebut terhadap peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Papua.

Dalam Gambar 2.135 berikut ini terlihat jelas bahwa sepanjang tahun 1996-2001 masa sebelum Otonomi Khusus, maupun periode 2002-2017 masa pelaksanan Otonomi Khusus, kualitas pembangunan manusia di Provinsi Papua selalu lebih rendah dibandingkan tingkat nasional. Kecenderungan ini terlihat dari IPM Provinsi Papua yang terus di bawah IPM nasional, dengan kesenjangannya yang relatif tidak berubah, yakni rata-rata sekitar 16,04 poin per tahun. Tetapi jika diperhatikan dari akselerasinya, terindikasi di masa Otonomi Khusus peningkatan IPM di Provinsi Papua lebih cepat dibandingkan periode sebelum Otonomi Khusus yang malah cenderung mengalami penurunan.

Gambar 2.135. IPM di Provinsi Papua dan Indonesia

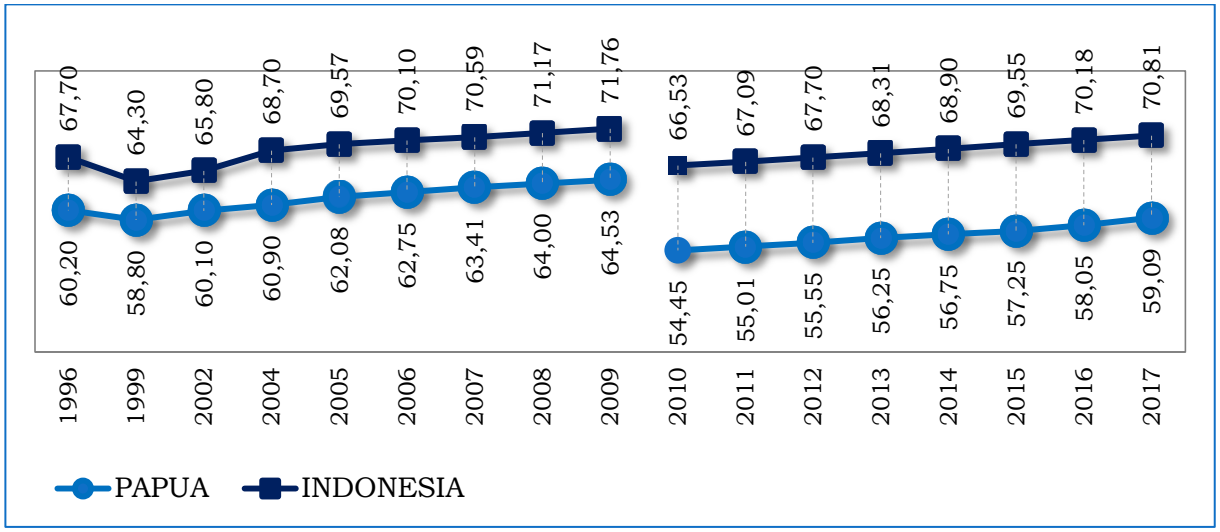

Sumber: BPS RI dan Provinsi Papua, 1999-2017 (data diolah)

Sepanjang periode 2002-2017, rata-rata kenaikan IPM sekitar 1,18% per tahun, sedangkan sebelum masa otonomi khusus yaitu tahun 1996-2002 IPM Provinsi Papua mengalami penurunan sekitar -0,03% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus mampu memperbaiki percepatan IPM Provinsi Papua, terutama di era tahun 2013-2017 yang tumbuh lebih cepat dibandingkan periode lainnya sebesar 1,24% per tahun (lihat Tabel 2.644).

Tabel 2.64. Rata-Rata Percepatan IPM Di Provinsi Papua Dan Indonesia

Periode	Papua	Indonesia
1996-2002	-0.03	-0.56
2003-2009	1.19	1.46
2010-2012	1.01	0.88
2013-2017	1.24	0.90
2002-2017	1.18	1.16

Sumber: BPS RI dan Provinsi Papua, 1999-2017 (data diolah)

2.5.9. Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Seperti pada pengelolaan keuangan daerah lainnya, pengelolaan dana Otonomi Khusus juga diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, hingga monitoring dan evaluasi. Secara makro, seluruh aspek pengelolaan dana Otonomi Khusus tersebut dapat diamati efektifitasnya melalui pengukuran elastisitas belanja terhadap indikator-indikator pembangunan yang dianggap merupakan hasil dampak dari pengelolaan dana Otonomi Khusus. Dan sesuai data hasil pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dihitung elastisitas belanja dari dana Otonomi Khusus Papua, khususnya terhadap tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, dan IPM yang dibagi berdasarkan 3 periode pengamatan mengikuti pola pembagian dana Otonomi Khusus yang dijalankan selama ini di Provinsi Papua (lihat Tabel 2.65)

Tabel 2.65. Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Papua

Pola Pembagian Provinsi - Kabupaten/Kota	Periode	Kemiskinan	LPE	IPM
Pola 60%-40%	2002-2005	-0.0112	**0.5530**	0.1462
Pola 40%-60%	2006-2012	**-0.1106**	-0.0303	0.0395
Pola 20%-80%	2013-2016	-0.0788	-0.1290	**0.1671**
Keseluruhan	2002-2016	-0.0701	0.0735	0.0935

Sumber: BPS RI dan Provinsi Papua, 1999-2017 (data diolah)

Jika diperhatikan pada dampaknya terhadap kemiskinan, pengelolaan dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua telah mengarah pada tanda yang sesuai yaitu negatif, dengan besaran elastisitasnya secara keseluruhan (2002-2016) sebesar -0,0701. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap terjadi kenaikan belanja dana Otonomi Khusus sebesar 1% mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0701% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Selanjutnya bila diperhatikan pada periode pembagian alokasi dana Otonomi Khusus, teridentifikasi bahwa pengelolaan dana Otonomi Khusus lebih efektif menurunkan kemiskinan pada periode 2006-2012 (pola 40%-60%) dibandingkan periode lainnya. Dimana terlihat nilai elastisitas belanja pada periode tersebut paling besar secara negatif yaitu -0,1106 yang bermakna bahwa pada masa itu setiap ada kenaikan belanja dana Otonomi Khusus sebesar 1% akan berdampak terhadap penurunan kemiskinan sebesar 0,1106%. Sementara di periode 2013-2016, dampaknya terhadap kemiskinan sebesar elastisitas -0,0788, dan periode 2002-2005 sebesar -0,0112.

Berbeda dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, ternyata pengelolaan dana Otonomi Khusus di periode 2003-2005 lebih efektif dibandingkan periode lainnya, oleh karena nilai elastisitas belanjanya lebih tinggi yakni 0,5530, yang berarti pada masa tersebut setiap ada kenaikan belanja dana Otonomi Khusus sebesar 1% memberi dampak terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sebesar 0,5530%. Secara keseluruhan (2002-2016) nilai elastisitas belanja Otonomi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua adalah 0,0735.

Terakhir, untuk dampaknya terhadap kenaikan IPM, terindikasi bahwa pengelolaan dana Otonomi Khusus di periode 2013-2016 yang paling efektif dibandingkan periode yang lain. Dalam hal ini, berdasarkan nilai elastisitasnya sebesar 0,1671 menandakan bahwa setiap terjadi kenaikan belanja Otonomi Khusus sebesar 1% akan direspon dengan kenaikan IPM sekitar 0,1671%, yang nyatanya jauh lebih tinggi jika dibandingkan secara menyeluruh untuk periode 2002-2016 yang memiliki elastisitas sebesar 0,0935. Terjadinya perbedaan efektifitas pengelolaan dana Otonomi Khusus tersebut menunjukan bahwa selama ini belum ditemukan pola pengelolaan keuangan dana Otonomi Khusus yang lebih tepat sasaran ke arah percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM sekaligus secara serentak dan simultan.

Perlu diperhatikan juga bahwa nilai elastisitas dari belanja Otonomi Khusus selama ini lebih kecil dari 1, atau bersifat inelastis yang berarti variasi perubahan input masih lebih besar dibandingkan perubahan output, tersirat disini ada inefisiensi dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus. Beberapa masalah yang membuat kondisi ini terjadi sebagian telah diungkap dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana Otonomi Khusus Papua yang dilakukan pada tahun 2016. Permasalahan yang dimaksud antara lain:

1. Data usulan kegiatan Otonomi Khusus kabupaten/kota dalam bentuk URD/RD, masih kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat langsung pada penduduk OAP (Orang Asli Papua). Fakta ini menandakan bahwa kabupaten/kota belum begitu optimal menterjemahkan amanat Otonomi Khusus. Hasil evaluasi juga mencatat bahwa kelemahan ini antara lain karena kurangnya pengarahan dan kendali program/kegiatan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota;
2. Salah satu kendala dalam menilai program/kegiatan yang dibiayai dana Otsus karena sebagian besar pemerintah daerah di wilayah Papua belum memperhatikan indikator kinerja *outcome* dan *impact* dalam perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah baru sebatas mengukur kinerja input dan output, dan masih kurang termotivasi merumuskan bagaimana pemanfaatan dan dampak kegiatan terhadap layanan yang disiapkan pemerintah. Sebagai akibatnya banyak suara OAP yang menyatakan belum melihat dampak Otsus;
3. Banyak kegiatan yang kurang mengungkapkan lokasi yang tepat. Fenomena ini banyak ditemukan dalam URD/RD dan dokumen RKA/DPA. Penyebabnya, karena belum optimalnya persiapan saat perencanaan seperti belum ada pembahasan lokasi, kurangnya data lapangan, kurangnya pengendalian, dan sebagainya.

Banyak rumah tangga OAP yang belum mengetahui adanya kegiatan-kegiatan yang bersumber pada dana Otonomi Khusus. Sebagian besar beranggapan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dijalankan selama ini bersumber dari dana desa atau APBD kabupaten/kota. Namun, ada kecenderungan rumah tangga OAP lebih mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan Prospek, Gerbang Mas, KPS dan perumahan rakyat berasal dari dana Otonomi Khusus

2.6. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.6.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan yang digunakan alm analisis ini menggunakan dua pendekatan yaitu dengan menggunakan daya dukung berbasis jasa ekosistem dan daya dukung berdasarkan kapasitas penyedian dan kebutuhan pada setiap wilayah kabupaten di seluruh Provinsi Papua.

2.6.1.1. Daya Dukung Penyediaan Pangan

a) . Berdasarkan Jasa Ekosistem

Sektor pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehingga ketersediaan bahan pangan menjadi aspek penting. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan dari air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

Tabel 2.66. Kualitas daya dukung penyediaan pangan di Provinsi Papua

No	Kelas Daya Dukung	Jumlah	
		Ha	%
1	Sangat Rendah	427,722	1.36
2	Rendah	2,334,590	7.44
3	Sedang	8,428,826	26.86
4	Tinggi	14,587,481	46.49
5	Sangat Tinggi	5,601,148	17.85
	Jumlah	31,379,766	100.00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Lahan yang berpotensi tinggi untuk penyedia bahan pangan di Provinsi Papua sebesar 46,49 %dari total luas lahan, yaitu seluas 14,587,481 ha. Luas lahan berpotensi sedang seluas 8,428,826 ha atau 26.86 %, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di atas. Hal ini menunjukkan bahwa Papua merupakan Provinsi yang kaya akan sumber pangan yang bermanfaat bagi manusia.

Jasa ekosistem penyediaan pangan adalah kontribusi ekosistem dalam penyediaan pangan tidak hanya bagi manusia namun juga bagi seluruh makhluk hidup. Jasa ekosistem penyediaan pangan ini terkait dengan kesejahteraan manusia dalam hal keamanan, akses terhadap bahan dasar untuk penghidupan yang layak dan kesehatan. Setiap kabupaten memiliki daya dukung yang berbeda dalam hal penyediaan pangan. Terdapat kabupaten yang mampu menghasilkan peran penyediaan pangan yang besar namun ada jugakabupaten yang hanya mampu menyediakan jasa penyediaan pangan yang relatif sedikit.

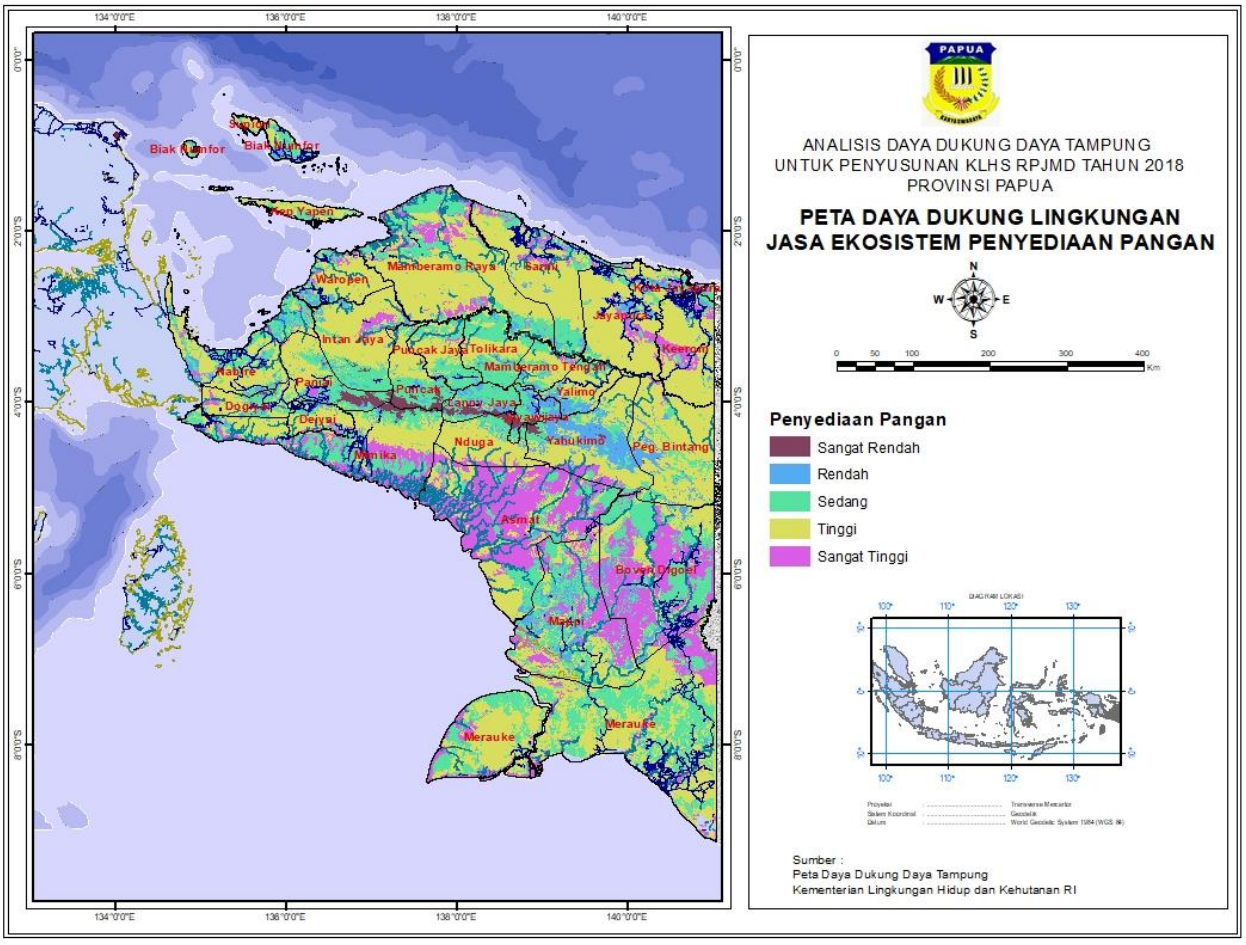

Gambar 2.136. Gambar Peta kualitas daya dukung penyediaan pangan Provinsi Papua

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Tata kelola sumberdaya manusia yang efektif terkait erat dengan upaya menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan seperti dalam TPB 2. Dalam kaitan tersebut diperlukan informasi terkait luas area yang memiliki tingkat penyedia pangan. Dalam tata kelola ini juga terkait dengan TPB 3 terkait upaya menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, dan tujuan 4 menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Berdasarkan Tabel 2.67 berikut di bawah ini terlihat bahwa setiap kabupaten memiliki daya dukung yang berbeda-beda dalam penyediaan pangan di Provinsi Papua.

Tabel 2.67. Kondisi daya dukung penyedian pangan per kabupaten

Kabupaten	Perkiraan Luas Daya Dukung Penyediaan Pangan									
	Sangat Tinggi (ha)		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
ASMAT	1,533,855	27.38	575,962	3.95	326,206	3.87	42,738	1.83	74	0.02
BIAK NUMFOR	3,724	0.07	52,852	0.36	120,906	1.43	44,008	1.89	4,281	1.00
BOVEN DIGOEL	908,759	16.22	445,130	3.05	930,135	11.04	101,494	4.35	960	0.22
DEIYAI	2,269	0.04	120,997	0.83	31,911	0.38	30,509	1.31	2,156	0.50
DOGIYAI	16,705	0.30	257,101	1.76	130,058	1.54	49,466	2.12	14,825	3.47
INTAN JAYA	4,490	0.08	200,619	1.38	222,701	2.64	26,337	1.13	11,373	2.66
JAYAPURA	112,828	2.01	985,397	6.76	245,809	2.92	167,295	7.17	3,306	0.77
JAYAWIJAYA		-	14,736	0.10	122,133	1.45	100,895	4.32	26,075	6.10
KEEROM	131,321	2.34	609,615	4.18	111,610	1.32	54,512	2.33	188	0.04
KEPULAUAN YAPEN	886	0.02	146,956	1.01	85,749	1.02	9,413	0.40	234	0.05
LANNY JAYA		-	14,199	0.10	193,845	2.30	91,476	3.92	69,683	16.29
MAMBERAMO RAYA	375,821	6.71	1,765,856	12.11	674,842	8.01	77,389	3.31	1,011	0.24
MAMBERAMO TENGAH	14,049	0.25	184,664	1.27	80,764	0.96	29,236	1.25	76	0.02
MAPPI	757,880	13.53	705,221	4.83	757,230	8.98	309,675	13.26	8,912	2.08
MERAUKE	533,167	9.52	2,163,691	14.83	1,578,493	18.73	51,647	2.21	26	0.01
MIMIKA	592,324	10.58	594,923	4.08	509,599	6.05	55,489	2.38	30,499	7.13
NABIRE	49,636	0.89	632,933	4.34	373,046	4.43	147,249	6.31	2,307	0.54
NDUGA	23,944	0.43	496,668	3.40	123,462	1.46	32,616	1.40	21,608	5.05
PANIAI	14,482	0.26	169,470	1.16	206,437	2.45	60,816	2.61	104,363	24.40
PEGUNUNGAN BINTANG	19,168	0.34	1,201,345	8.24	161,331	1.91	144,927	6.21	650	0.15
PUNCAK	34,707	0.62	339,770	2.33	279,089	3.31	54,519	2.34	90,999	21.28
PUNCAK JAYA	16,331	0.29	213,711	1.47	190,836	2.26	20,454	0.88	1,636	0.38
SARMI	157,110	2.80	840,984	5.77	357,741	4.24	53,503	2.29	193	0.05
SUPIORI	1,963	0.04	40,988	0.28	21,805	0.26	1,574	0.07	216	0.05
TOLIKARA	4,131	0.07	187,492	1.29	150,227	1.78	19,766	0.85	3,243	0.76
WAROPEN	124,814	2.23	763,427	5.23	143,000	1.70	51,899	2.22	941	0.22
YAHUKIMO	164,467	2.94	631,101	4.33	224,511	2.66	415,824	17.81	25,347	5.93
YALIMO	2,306	0.04	231,613	1.59	75,348	0.89	89,860	3.85	2,540	0.59
Grand Total	5,601,140	100.00	14,587,423	100.00	8,428,825	100.00	2,334,585	100.00	427,722	100.00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang memiliki daya dukung yang paling tinggi dalam penyediaan pangan disertai oleh Memberamo Raya, Asmat, Boven Digoel, Mappi, Mimika dan beberapa kabupaten lain seperti dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.137. Urutan daya dukung dalam penyediaan pangan per kabupaten

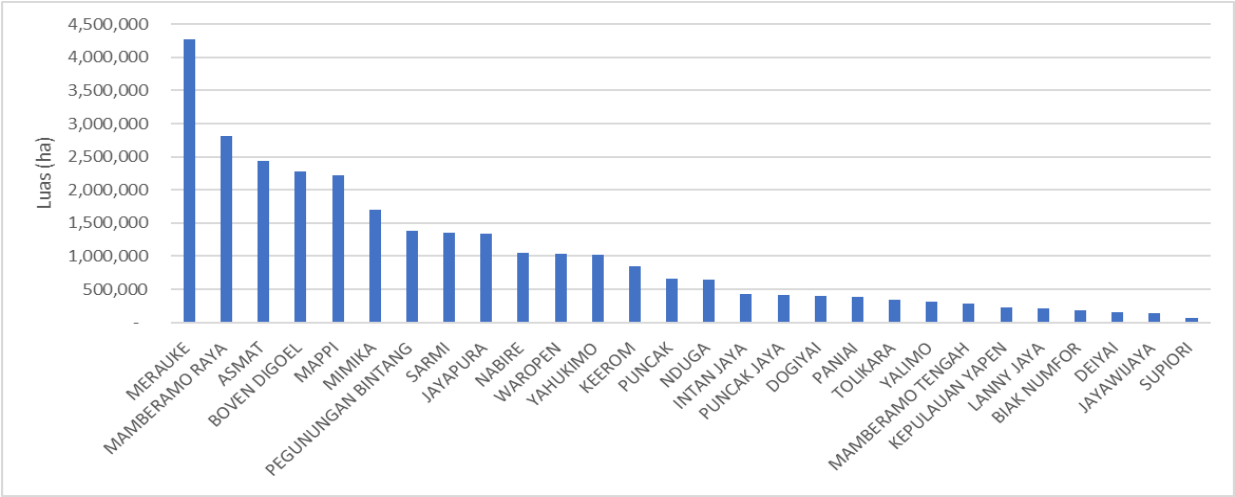

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Jika dilihat secara keseluruhan diperkirakan lahan sekitar 28.617.388 ha memiliki daya dukung yang baik dalam penyediaan pangan. Data lain menunjukan bahwa sekitar 80 % lahan dengan daya dukung tinggi dalam penyediaan pangan berada di 12 kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Dari informasi ini diperoleh gambaran dalam perumusan KRP perlu dilihat distribusi berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Daya dukung berdasarkan wilayah budaya ditunjukan dari kompisisi daya dukung sedang hingga sangat tinggi dari masing-masing wilayah adat dapat dilihat Gambar 3 sebagai berikut.

Gambar 2.138. Peta daya dukung penyediaan pangan per-wilayah budaya

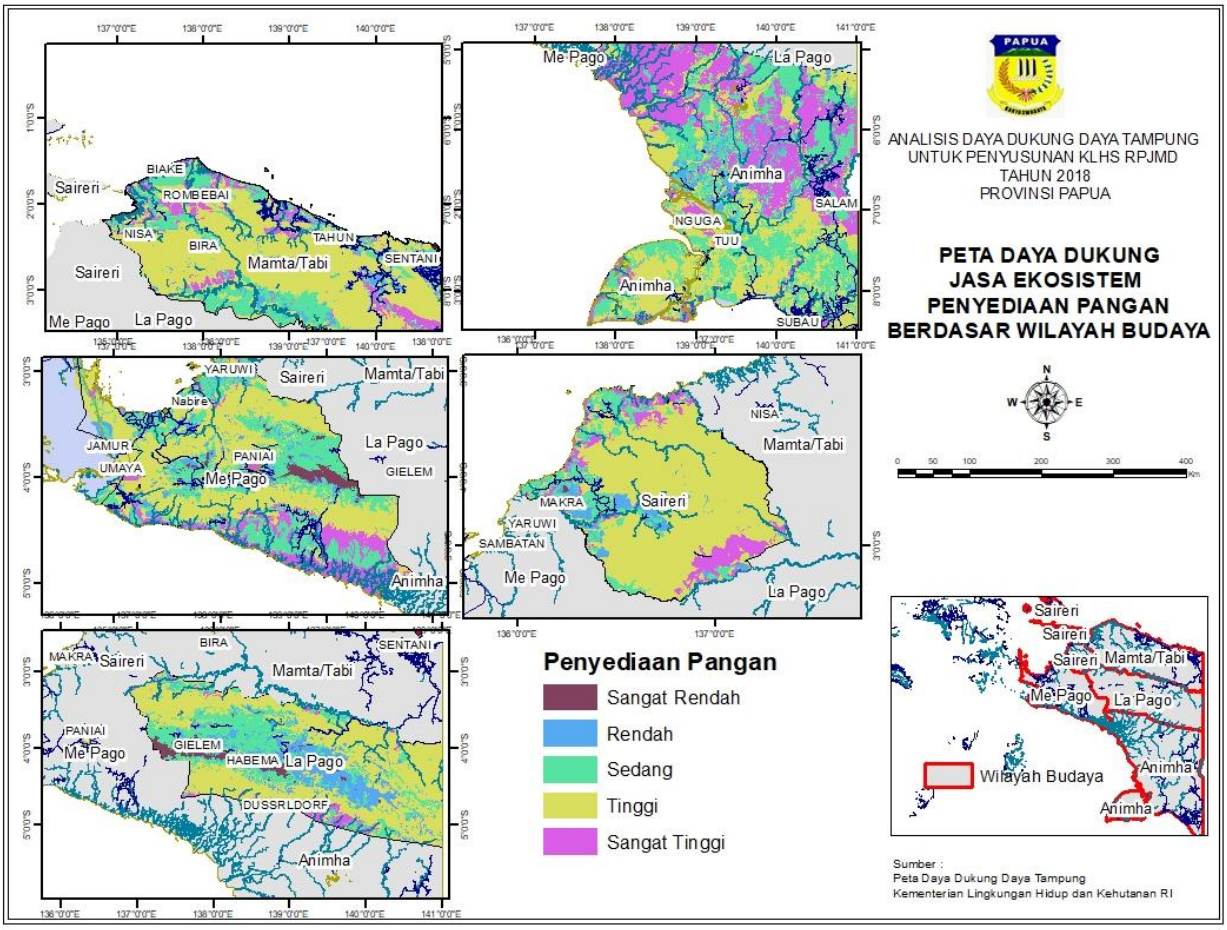

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Daya dukung penyediaan pangan pada kategori sangat tinggi terluas terdapat di wilayah budaya Ha Anim. Jika dibandingkan pada kateori tinggi maka wilayah budaya Mamta, Ha Anim dan Lapago juga memiliki daya dukung yang seimbang dari segi luasan.

Tabel 2.68. Tabel .... Kualitas daya dukung penyediaan pangan berdasar wilayah budaya

Wilayah Budaya	Daya Dukung Penyediaan Pangan (ha)			Jumlah (ha)
	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
I. Mamta	1,390,002	4,201,853	777,080	6,368,936
II. Saereri	371,460	1,004,223	131,388	1,507,071
III. Ha Anim	3,592,064	3,890,004	3,733,661	11,215,729
IV. Meepago	1,473,752	1,976,043	679,906	4,129,702
V. Lapago	1,601,547	3,515,299	279,105	5,395,951

Total	**8,428,825**	**14,587,423**	**5,601,140**	**28,617,388**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

b) Berdasarkan Kapasitas Riil Penyediaan dan Kebutuhan Pangan

Kapasitas kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi Papua diperhitungkan berdasarkan rata-rata kebutuhan kalori manusia per hari selama periode satu tahun yaitu sebesar 2500 KKal/hari. Hasil analisis di bawah ini memperlihatkan sebaran kebutuhan pangan di Provinsi Papua berdasarkan wilayah administrasi kabupaten, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya adalah kabupaten dengan kebutuhan pangan tertinggi sedangkan Kabupaten Mamberamo Raya sebagai kabupaten dengan kebutuhan pangan yang paling rendah.

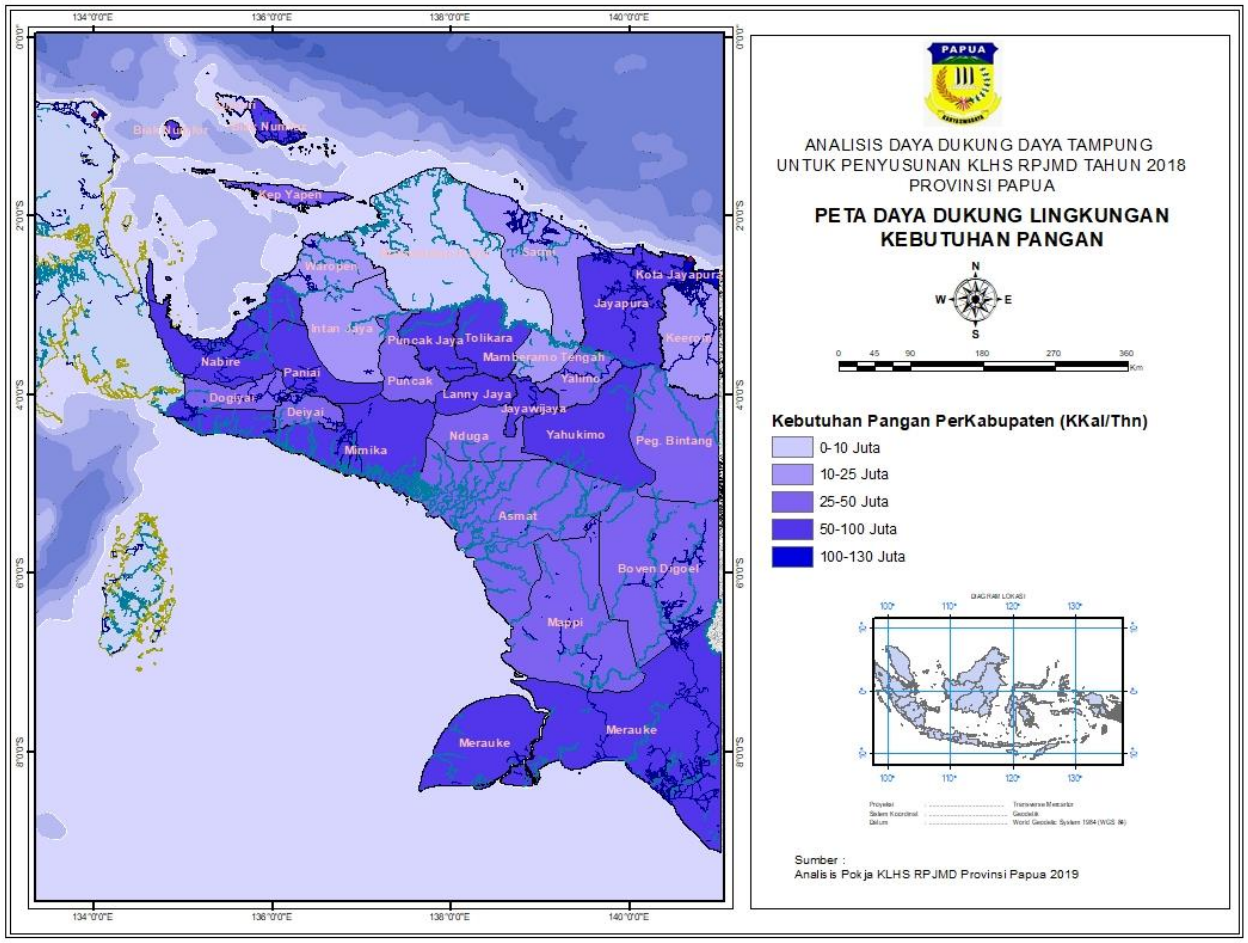

Gambar 2.139. Peta Kebutuhan Energi Pangan Per Kabupaten

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Sementara ketersediaan pangan di Provinsi Papua dinilai dengan mengkonversi nilai produksi tanaman pangan yang dikonsumsi di Provinsi Papua selama periode satu tahun (sagu, beras, jagung, singkong dan ubi jalar) per wilayah kabupaten terhadap nilai kalori dari setiap jenis tanaman pangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Merauke, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten dengan nilai ketersediaan energi pangan terbesar sedangkan kabupaten lainnya memiliki nilai ketersediaan energi pangan yang rendah.

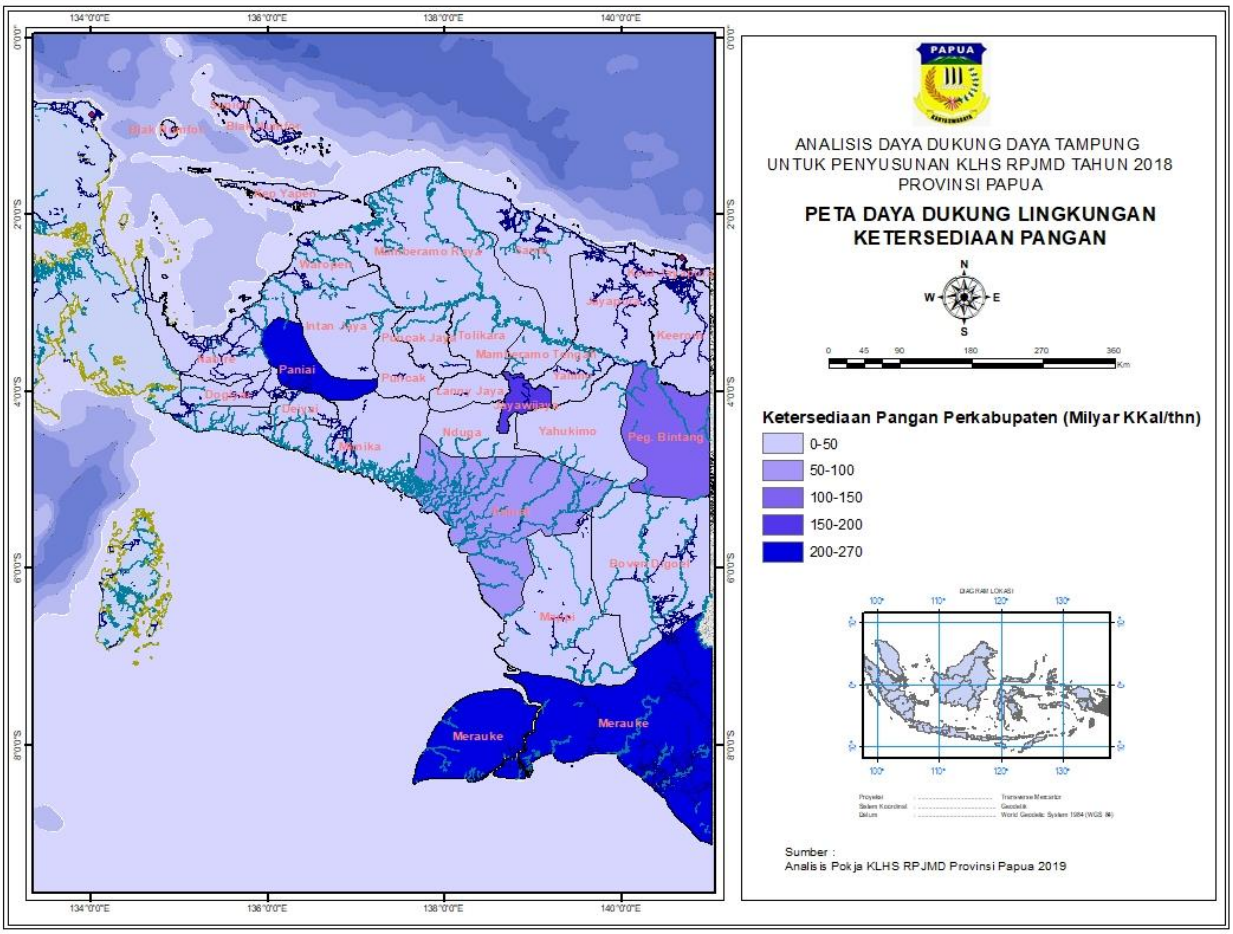

Gambar 2.140. Peta Ketersediaan Energi Pangan Per Kabupaten

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Nilai Saldo energi pangan adalah imbangan antara kebutuhan dan ketersediaan energi pangan. Dari hasil analisis dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah bahwa Kabupaten Lanny Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Memberamo Tengah dan Mamberamo Raya merupakan kabupaten yang defisit energi pangan sedangkan Kabupaten Jayawijaya, Merauke, Paniai dan Pegunungan Bintang merupakan kabupaten dengan surplus energi pangan terbesar.

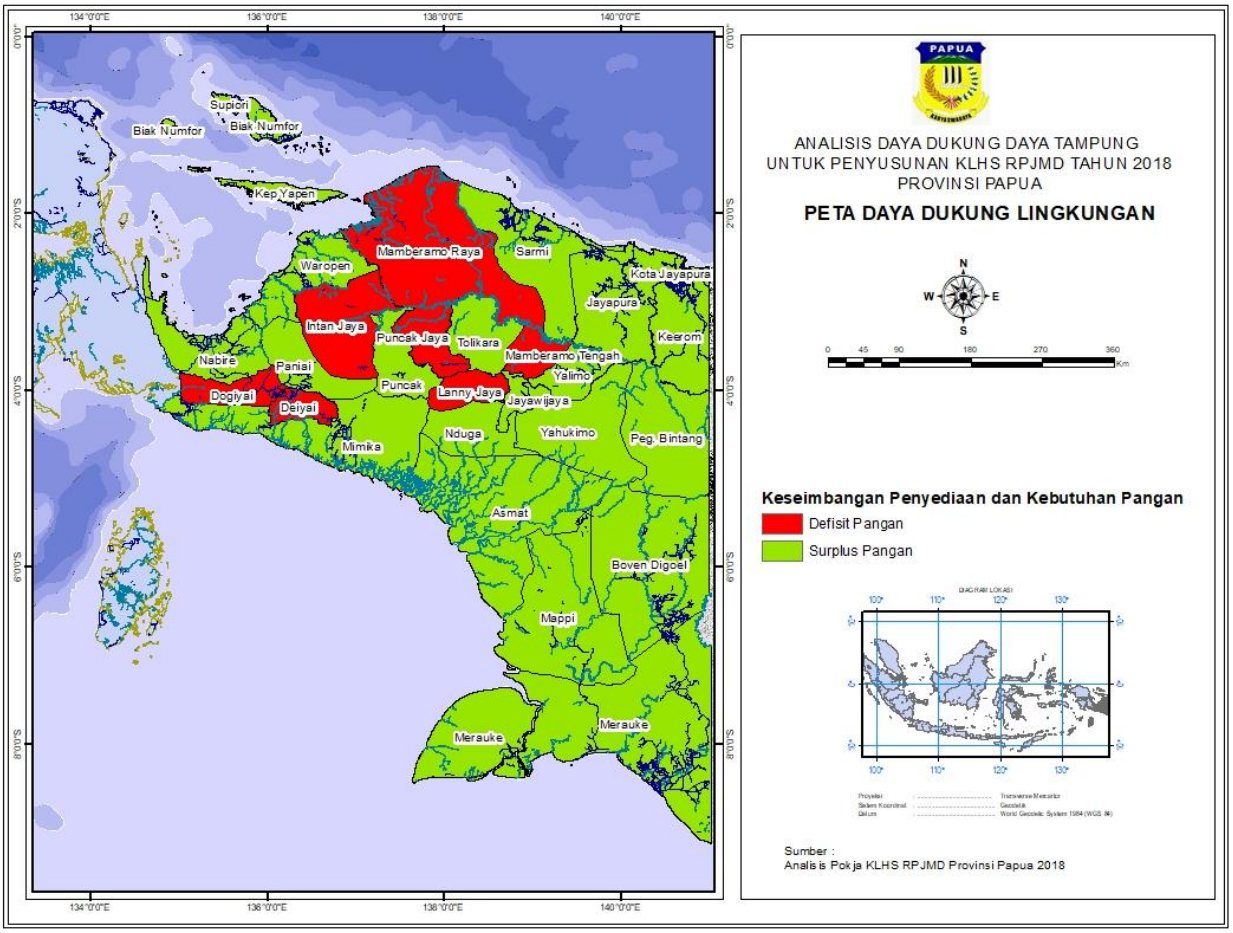

Gambar 2.141. Peta Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Energi Pangan

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Penjelasan keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan energi pangan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Beberapa kabupaten memiliki daya dukung pangan akan tetapi jika dilihat dari produksinya beberapa kabupaten tidak memiliki daya dukung pangan yang cukup.

Tabel 2.69. Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Energi Pangan (kkal/tahun)

No	Kabupaten	Ketersediaan Energi Pangan	Kebutuhan energi Pangan	Saldo Energi Pangan
1	Kabupaten Asmat	65.439.899.100	41.345.200	65.398.553.900
2	Kabupaten Biak Numfor	13.307.746.500	64.391.300	13.243.355.200

No	Kabupaten	Ketersediaan Energi Pangan	Kebutuhan energi Pangan	Saldo Energi Pangan
3	Kabupaten Boven Digoel	17.200.146.100	29.463.500	17.170.682.600
4	Kabupaten Deiyai	0	32.132.200	-32.132.200
5	Kabupaten Dogiyai	0	42.274.400	-42.274.400
6	Kabupaten Intan Jaya	0	21.501.900	-21.501.900
7	Kabupaten Jayapura	21.828.321.917	56.059.900	21.772.262.017
8	Kabupaten Jayawijaya	167.000.000.000	94.702.600	166.905.297.400
9	Kabupaten Keerom	16.276.468.300	24.483.500	16.251.984.800
10	Kabupaten Kep. Yapen	15.130.722.200	42.278.900	15.088.443.300
11	Kabupaten Lanny Jaya	0	78.627.100	-78.627.100
12	Kabupaten Mamberamo Raya	0	9.929.460	-9.929.460
13	Kabupaten Mamberamo Tengah	0	21.132.100	-21.132.100
14	Kabupaten Mappi	14.195.377.400	42.129.400	14.153.248.000
15	Kabupaten Merauke	255.000.000.000	99.409.900	254.900.590.100
16	Kabupaten Mimika	16.559.305.900	93.635.500	16.465.670.400
17	Kabupaten Nabire	26.381.156.138	64.571.100	26.316.585.038
18	Kabupaten Nduga	324.760.000	43.171.100	281.588.900
19	Kabupaten Paniai	268.000.000.000	75.737.200	267.924.262.800
20	Kabupaten Peg. Bintang	114.000.000.000	32.696.100	113.967.303.900
21	Kabupaten Puncak	30.683.364.600	47.981.700	30.635.382.900
22	Kabupaten Puncak Jaya	0	54.999.000	-54.999.000
23	Kabupaten Sarmi	11.101.600.400	17.003.800	11.084.596.600
24	Kabupaten Supiori	322.392.500	8.501.430	313.891.070
25	Kabupaten Tolikara	21.887.543.300	60.777.400	21.826.765.900
26	Kabupaten Waropen	4.622.277.800	13.118.800	4.609.159.000
27	Kabupaten Yahukimo	10.227.575.400	83.225.800	10.144.349.600
28	Kabupaten Yalimo	884.083.200	27.066.300	857.016.900
29	Kota Jayapura	26.408.123.923	130.694.000	26.277.429.923

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Kabupaten-Kabupaten yang mengalami defisit energi pangan perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Papua untuk memastikan capaian TPB No. 2 dan 3. Defisit energi pangan ini menjadi arahan dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan agar kebutuhan pangan dapat dicukupi secara mandiri jika jalur distribusi antar wilayah masih relatif sulit.

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk provinsi Papua sebesar 5,55 % pertahun hal ini juga menimbulkan dampak terhadap penambahan kebutuhan pangan tiap tahun.

Gambar 2.142 di bawah ini memperlihatkan proyeksi kebutuhan pangan yang meningkat akan tetapi masih berada jauh di bawah ketersediaannya.

Gambar 2.142. Proyeksi Kebutuhan Pangan

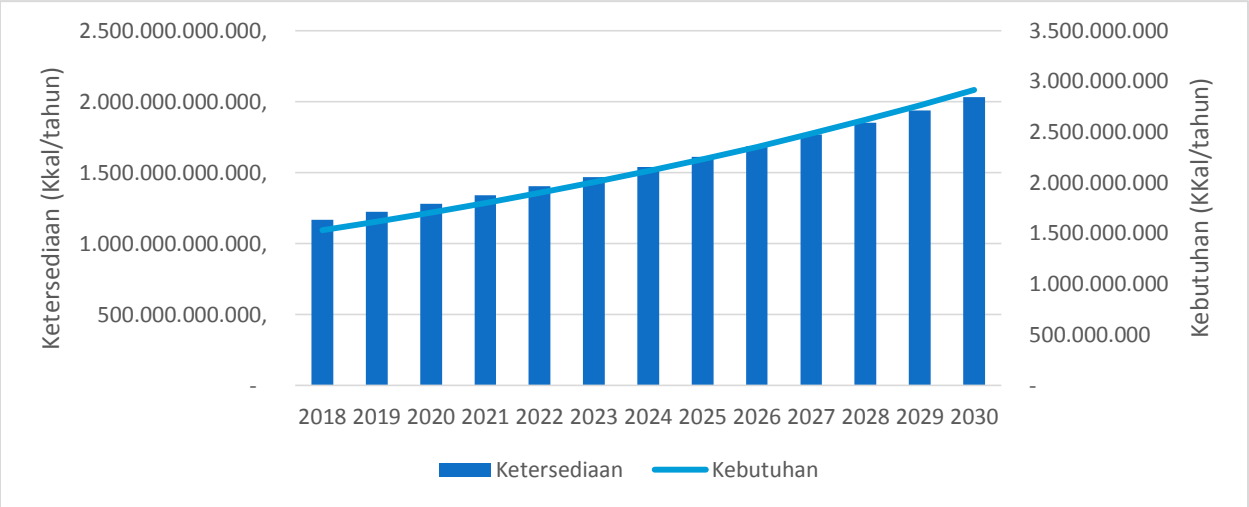

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Analisis yang mendukung daya dukung pangan selanjutnya adalah tanah. Tanah merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhitungkan dalam perhitungan daya dukung pangan tersebut karena seperti halnya didaerah lain, Provinsi Papua juga mengalami resiko kehilangan tanah sebagaimana dalam Gambar 2.143. Laju kehilangan tanah Provinsi Papua sangat rendah. Kehilangan tanah yang tinggi akibat erosi hanya terjadi di dataran tinggi dan curam. Selama 1990-2050, Prediksi tingkat kehilangan tanah meningkat dari 332,58 ton / ha / tahun menjadi 890,47 ton / ha / tahun. Tingkat kehilangan tanah oleh Wilayah Adat1990-2050 Umumnya, tingkat kehilangan tanah meningkat di semua wilayah adat selama periode analisis La Pago adalah mengalami kehilangan tanah tertinggi di semua periode analisis. Pada tahun 1990, tingkat kehilangan tanah adalah 497,44 ton / ha / tahun kemudian meningkat hingga 1,353.96 ton / ha / th pada tahun 2050. Ini karena, lokasi La Pago kebanyakan di dataran tinggi dengan berbagai daerah lereng. Sebaliknya, Animha adalah tingkat kehilangan tanah terendah selama analisis periode. Pada tahun 1990, tingkat kehilangan tanah adalah 30,67 ton / ha / tahun kemudian meningkat hingga 42,94 ton / ha / tahun. Animha terletak di bagian selatan Provinsi Papua dan didominasi oleh daerah datar.

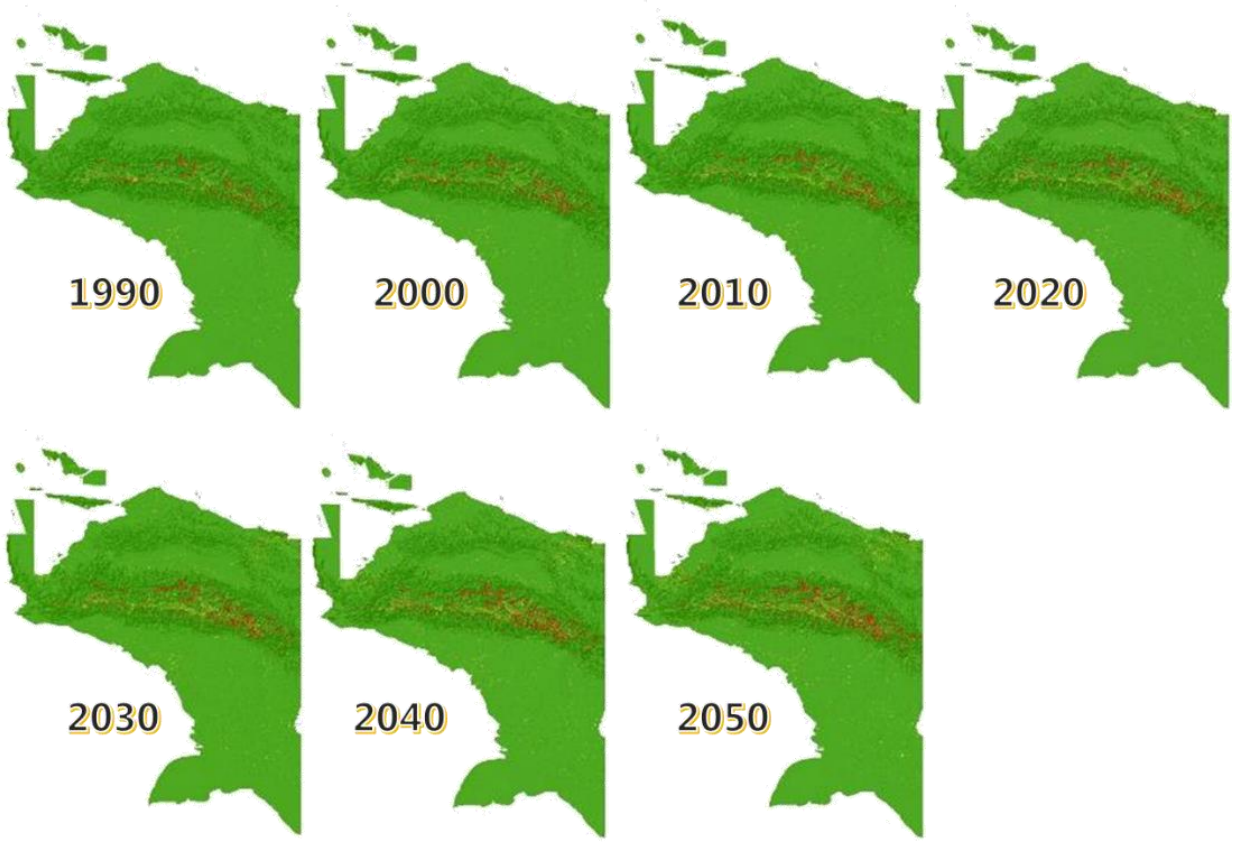

Gambar 2.143. Proyeksi Kehilangan Tanah

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

2.6.1.2. Daya Dukung/Daya Tampung Penyediaan Air

a) Berdasarkan Jasa Ekosistem

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Sebagian besar lahan di Provinsi Papua berpotensi sedang untuk menyediakan air bersih. Seluas 44,13 % lahan di kawasan ini mempunyai potensi sedang dan 25,88 % memiliki potensi tinggi untuk penyediaan air bersih. Lahan berpotensi tinggi luasnya mencapai 8.122.385 ha, sedangkan lahan

berpotensi sedang mencapai 13.848.258 dan ha lahan berpotensi rendah mencapai 6.859.414 ha (21,86 %) sebagaimana yang disajikan pada table berikut.

Tabel 2.70. Kualitas daya dukung penyediaan air Provinsi Papua

No	Kelas Daya Dukung	Jumlah	
		Ha	%
1	Sangat Rendah	2,338,457	7.45
2	Rendah	6,859,414	21.86
3	Sedang	13,848,258	44.13
4	Tinggi	8,122,385	25.88
5	Sangat Tinggi	211,182	0.67
Jumlah		**31,379,696**	**100.00**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat sehingga mempunyai peran penting dalam kehidupan. Penyediaan air bersih memiliki arti penting bagi kesejahteraan manusia dalam aspek keamanan, aspek kesehatan serta akses terhadap bahan dasar untuk penghidupan yang layak. Setiap tipe ekoregion yang ada di Provinsi Papua tersebut mampu menyediakan air bersih dalam berbagai tingkatan dan distribusi. Distribusi luas dan peran jasa ekosistem dalam penyediaan air bersih dapat dilihat Gambar 2.144 berikut.

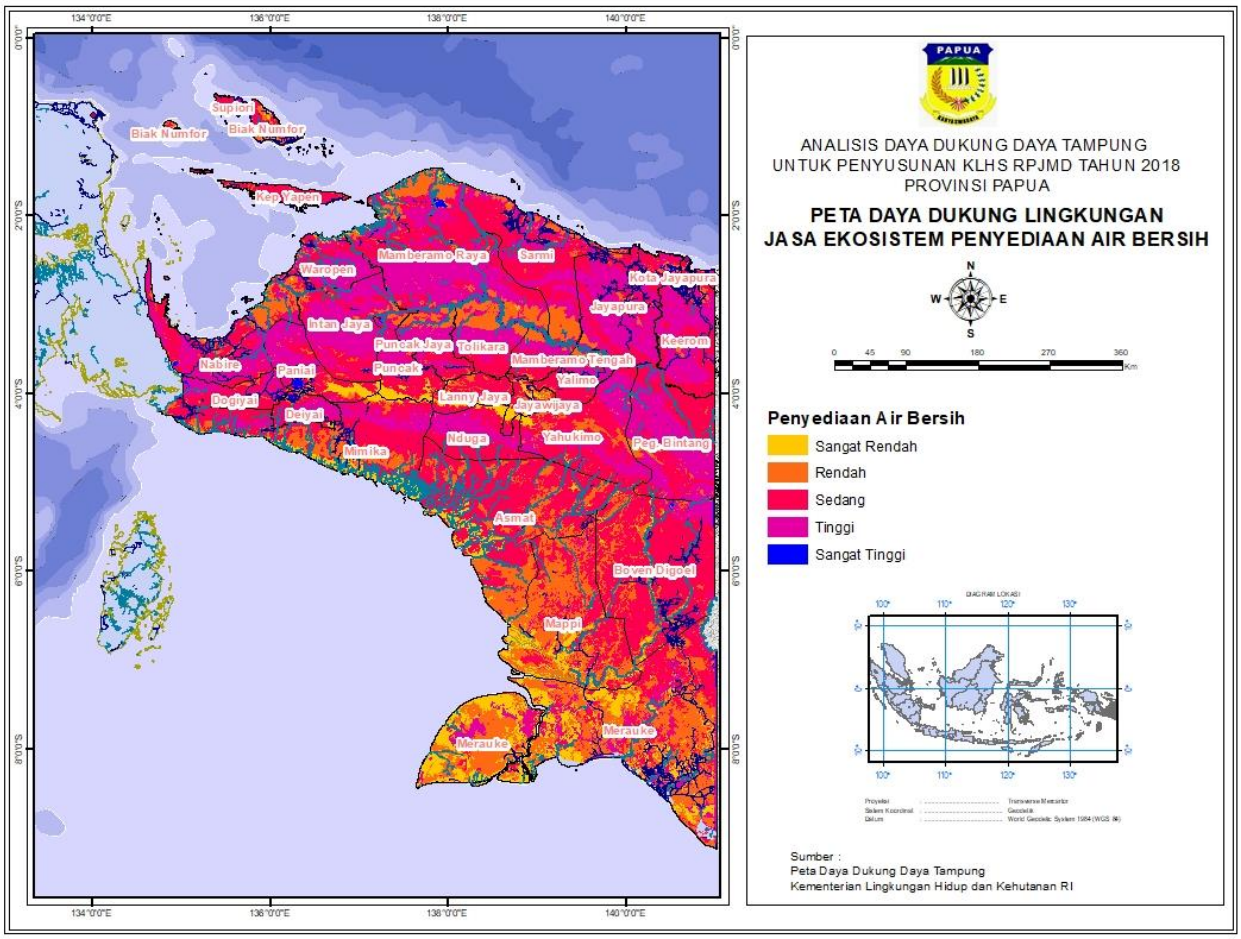

Gambar 2.144. Peta kualitas daya dukung penyediaan air Provinsi Papua

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Berdasarkan daya dukung wilayah, Provinsi Papua diperkirakan memiliki wilayah dengan luas sekitar 15.192.981 ha dengan luasan wilayah pada kategori tinggi terhadap penyediaan air dalam menopang kegiatan pembangunan. Merauke, Memberamo Raya, Mappi, Pegunungan Bintang, Jayapura, Waropen merupakan wilayah-wilayah yang memiliki wilayah terluas dalam penyediaan air.

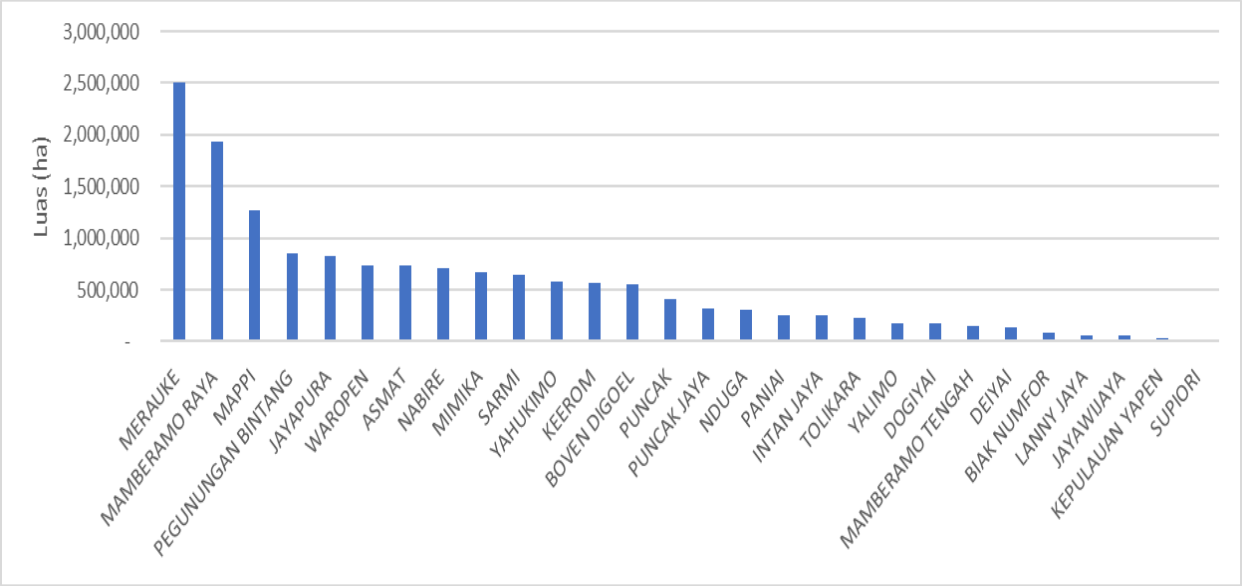

Gambar 2.145. Urutan daya dukung penyediaan air per Kabupaten

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Rincian daya dukung penyediaan air per kabupaten di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 2.71 berikut. Selain penyediaan air, upaya memperbaiki kualitas air sebagai upaya mendukung pengembangan sektor lain dapat dilihat pada Gambar 2.145 di atas. Gambar tersebut menunjukkan daya tampung terkait kemampuan dalam pemurnian air di Kabupaten Merauke, Memberamo Raya, Asmat, dan Boven Digoel.

Tabel 2.71. Kondisi daya dukung penyediaan air per kabupaten di Provinsi Papua

Kabupaten	Perkiraan Luas Daya Dukung Penyediaan Air									
	Sangat Tinggi (ha)		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
ASMAT	6,420	3.04	69,836	0.86	652,267	9.51	1,559,255	11.26	191,056	8.17
BIAK NUMFOR		-	834	0.01	85,644	1.25	116,678	0.84	22,615	0.97
BOVEN DIGOEL	16,727	7.92	119,084	1.47	417,455	6.09	1,780,802	12.86	52,410	2.24
DEIYAI	3,840	1.82	101,002	1.24	24,037	0.35	58,957	0.43	5	0.00
DOGIYAI	609	0.29	139,639	1.72	27,338	0.40	300,569	2.17		-
INTAN JAYA	263	0.12	231,858	2.85	19,169	0.28	210,929	1.52	3,302	0.14
JAYAPURA	16,260	7.70	691,367	8.51	116,879	1.70	685,007	4.95	5,122	0.22
JAYAWIJAYA	39	0.02	6,107	0.08	51,976	0.76	145,395	1.05	60,323	2.58
KEEROM	3,582	1.70	493,726	6.08	61,232	0.89	348,321	2.52	385	0.02
KEPULAUAN YAPEN	84	0.04		-	30,378	0.44	211,420	1.53	1,356	0.06
LANNY JAYA	293	0.14	433	0.01	61,018	0.89	215,362	1.56	92,098	3.94
MAMBERAMO RAYA	69,860	33.08	1,254,114	15.44	614,320	8.96	897,933	6.48	58,692	2.51
MAMBERAMO TENGAH	5,131	2.43	129,763	1.60	16,917	0.25	155,229	1.12	1,750	0.07
MAPPI	668	0.32	87,030	1.07	1,181,742	17.23	963,475	6.96	306,003	13.09
MERAUKE	6,648	3.15	507,732	6.25	1,993,445	29.06	774,297	5.59	1,044,903	44.68
MIMIKA	7,086	3.36	288,822	3.56	376,191	5.48	886,748	6.40	223,987	9.58
NABIRE	5,502	2.61	475,060	5.85	224,507	3.27	479,666	3.46	20,437	0.87
NDUGA	2,226	1.05	292,238	3.60	8,268	0.12	371,373	2.68	24,194	1.03
PANIAI	16,014	7.58	177,167	2.18	64,619	0.94	203,199	1.47	94,570	4.04
PEGUNUNGAN BINTANG	11,401	5.40	767,787	9.45	71,753	1.05	675,359	4.88	1,121	0.05
PUNCAK	5,932	2.81	340,805	4.20	61,448	0.90	314,789	2.27	76,110	3.25
PUNCAK JAYA	2,655	1.26	241,853	2.98	69,594	1.01	128,214	0.93	652	0.03
SARMI	11,977	5.67	346,640	4.27	281,874	4.11	765,267	5.53	3,773	0.16
SUPIORI		-	29	0.00	4,678	0.07	56,642	0.41	5,197	0.22
TOLIKARA	657	0.31	212,854	2.62	15,502	0.23	135,847	0.98		-
WAROPEN	3,286	1.56	643,095	7.92	83,766	1.22	329,549	2.38	24,384	1.04
YAHUKIMO	6,943	3.29	400,395	4.93	175,078	2.55	856,678	6.19	22,158	0.95
YALIMO	7,079	3.35	103,116	1.27	68,319	1.00	221,301	1.60	1,852	0.08
Total	211,182	100.00	8,122,385	100.00	6,859,414	100.00	13,848,258	100.00	2,338,457	100.00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Daya dukung penyediaan air per-wilayah budaya dapat dilihat pada Gambar 2.146 berikut ini. Gambar tersebut menunjukan distribusi penyediaan kapasitas penyediaan dari lima wilayah budaya yang ada di Provinsi Papua.

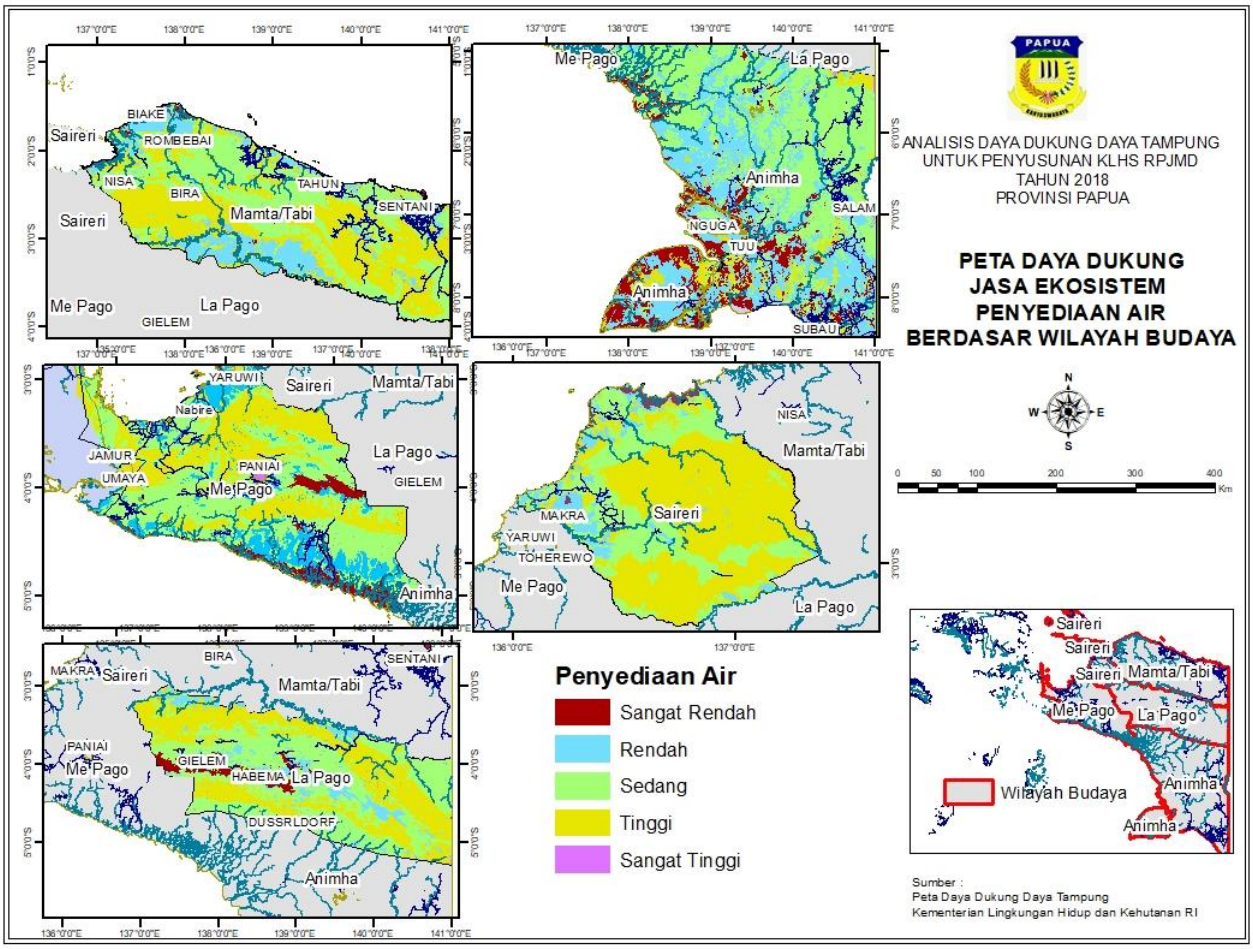

Gambar 2.146. Peta daya dukung penyediaan air per-wilayah budaya

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Kondisi daya dukung penyediaan air pada kategori sedang-tinggi disajikan pada Tabel 2.72 dimana Wilayah Mamta, H Anim, dan Lapago menunjukan luas area yang tinggi dalam penyediaan air.

Tabel 2.72. Kondisi daya dukung penyediaan air per wilayah budaya

Wilayah Budaya	Daya Dukung Penyediaan Air (ha)			Jumlah (ha)
	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	

I. Mamta	2,696,527	2,785,848	101,679	5,584,054
II. Saereri	714,289	643,958	3,370	1,361,617
III. Ha Anim	5,077,828	783,682	30,463	5,891,973
IV. Meepago	2,140,068	1,413,547	33,314	3,586,929
V. Lapago	3,219,546	2,495,350	42,355	5,757,252
Total	**13,848,258**	**8,122,385**	**211,182**	**22,181,825**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Dalam konteks kebutuhan air, selain unsur daya dukung juga diperlukan informasi daya tampung dalam hal ini adalah pemurnian air. Gambar .... dibawah ini menunjukan daya tampung pemurnian air Provinsi Papua.

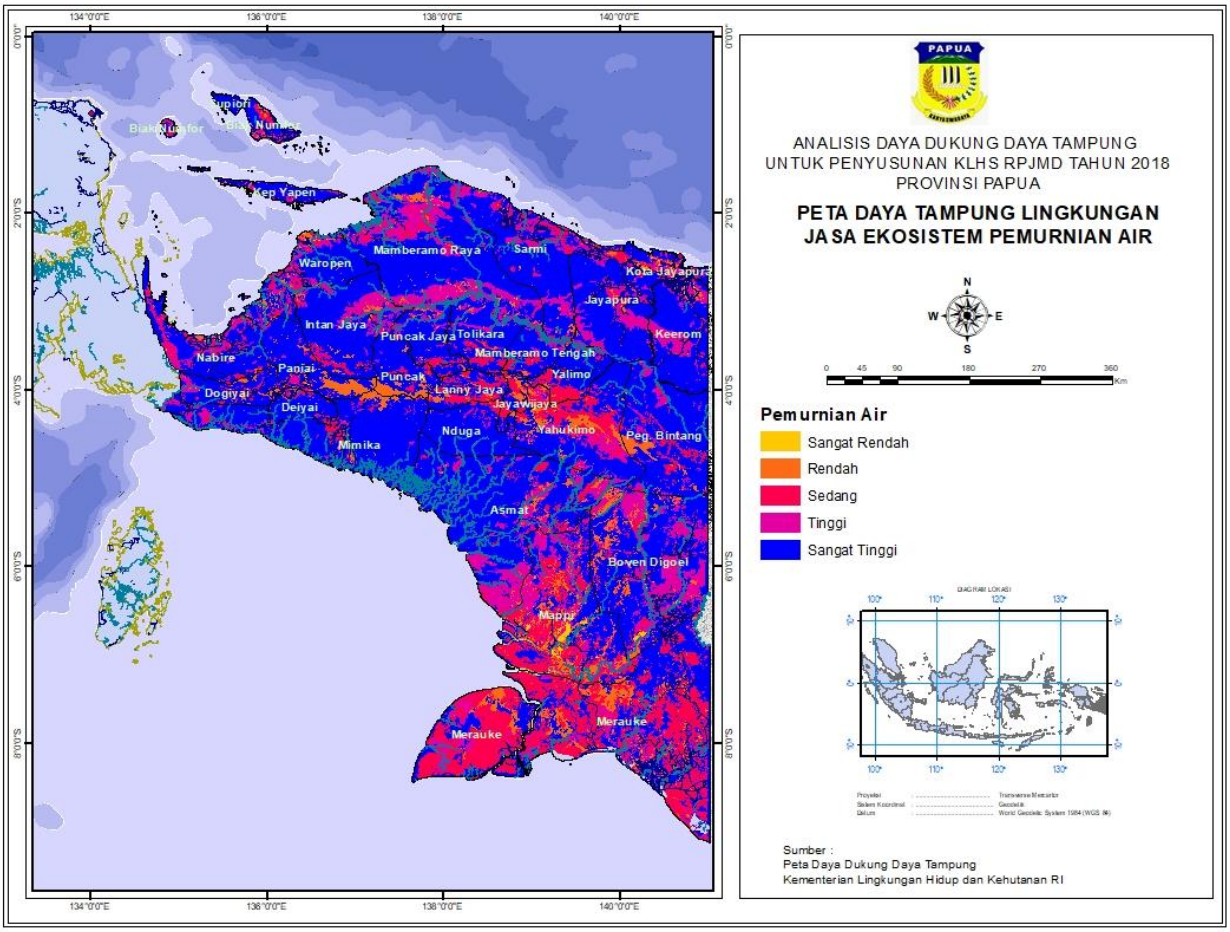

Gambar 2.147. Peta Daya Tampung Pemurnian Air

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Kabupaten Mimika dan beberapa kabupaten lain seperti tersebut pada Gambar 2.147 atas memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap unsur-unsur pencemar yang masuk dalam wilayahnya. Sedangkan Tabel 2.73 menunjukkan kondisi daya tampung per kabupaten dalam pemurnian air.

Tabel 2.73. Kondisi daya tampung per kabupaten dalam pemurnian air

Kabupaten	Perkiraan Luas Daya Dukung Pemurnian Air									
	Sangat Tinggi (ha)		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
ASMAT	1,878,286	9.97	440,878	8.76	105,858	1.99	53,698	2.61	115	0.01
BIAK NUMFOR	105,116	0.56	32,275	0.64	53,970	1.01	34,410	1.67		-
BOVEN DIGOEL	1,214,017	6.45	742,349	14.74	196,848	3.69	217,159	10.54	16,104	0.78
DEIYAI	144,658	0.77	14,717	0.29	14,121	0.26	12,410	0.60	1,936	0.09
DOGIYAI	345,225	1.83	32,621	0.65	54,428	1.02	34,421	1.67	1,460	0.07
INTAN JAYA	379,626	2.02	17,285	0.34	50,277	0.94	18,292	0.89	41	0.00
JAYAPURA	928,202	4.93	360,892	7.17	139,639	2.62	74,902	3.64	11,000	0.53
JAYAWIJAYA	87,035	0.46	16,220	0.32	109,048	2.05	51,536	2.50		-
KEEROM	605,905	3.22	217,997	4.33	33,004	0.62	38,430	1.87	11,910	0.58
KEPULAUAN YAPEN	180,454	0.96	27,889	0.55	17,885	0.34	17,010	0.83		-
LANNY JAYA	169,465	0.90	879	0.02	154,948	2.91	43,912	2.13		-
MAMBERAMO RAYA	1,817,633	9.65	851,076	16.90	125,183	2.35	90,857	4.41	10,170	0.49
MAMBERAMO TENGAH	217,562	1.16	28,585	0.57	54,890	1.03	7,752	0.38		-
MAPPI	984,399	5.23	427,922	8.50	766,054	14.37	313,327	15.21	47,215	2.29
MERAUKE	1,398,028	7.42	398,318	7.91	2,188,349	41.06	340,914	16.55	1,416	0.07
MIMIKA	1,489,157	7.91	130,093	2.58	102,252	1.92	61,332	2.98		-
NABIRE	775,657	4.12	186,931	3.71	164,735	3.09	70,450	3.42	7,399	0.36
NDUGA	632,117	3.36	21,524	0.43	36,330	0.68	8,328	0.40		-
PANIAI	350,899	1.86	32,276	0.64	21,440	0.40	147,097	7.14	3,857	0.19
PEGUNUNGAN BINTANG	1,215,649	6.46	125,789	2.50	120,319	2.26	65,665	3.19		-
PUNCAK	514,878	2.73	129,790	2.58	43,435	0.81	110,482	5.36	499	0.02
PUNCAK JAYA	331,863	1.76	49,016	0.97	46,433	0.87	15,458	0.75	198	0.01
SARMI	909,158	4.83	295,210	5.86	177,828	3.34	23,143	1.12	4,191	0.20
SUPIORI	59,355	0.32	599	0.01	2,313	0.04	4,278	0.21		-
TOLIKARA	274,318	1.46	19,503	0.39	65,931	1.24	5,031	0.24	76	0.00
WAROPEN	742,602	3.94	212,729	4.22	81,717	1.53	40,712	1.98	6,321	0.31
YAHUKIMO	821,585	4.36	190,706	3.79	303,239	5.69	145,721	7.08		-
YALIMO	258,308	1.37	31,488	0.63	99,060	1.86	12,720	0.62	91	0.00
Jumlah	18,831,157	100.00	5,035,558	100.00	5,329,535	100.00	2,059,447	100.00	123,999	6.02

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Perhitungan daya dukung ketersediaan air di bagi dalam 3 wilayah sungai, yaitu: (1) WS Wapoga-Mimika, (2) WS Mamberamo-Tami-Apauvar dan, (3) WS Einlanden-Digul-Bikuma. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat WS Mamberamo Tami Apauvar terdiri dari 27 DAS, WS Wapoga - Mimika terdiri atas 97 DAS dan WS Einlanden-Digul-Bikuma terdiri atas 29 DAS.

Gambar 2.148. Urutan daya tampung dalam pemurnian air per

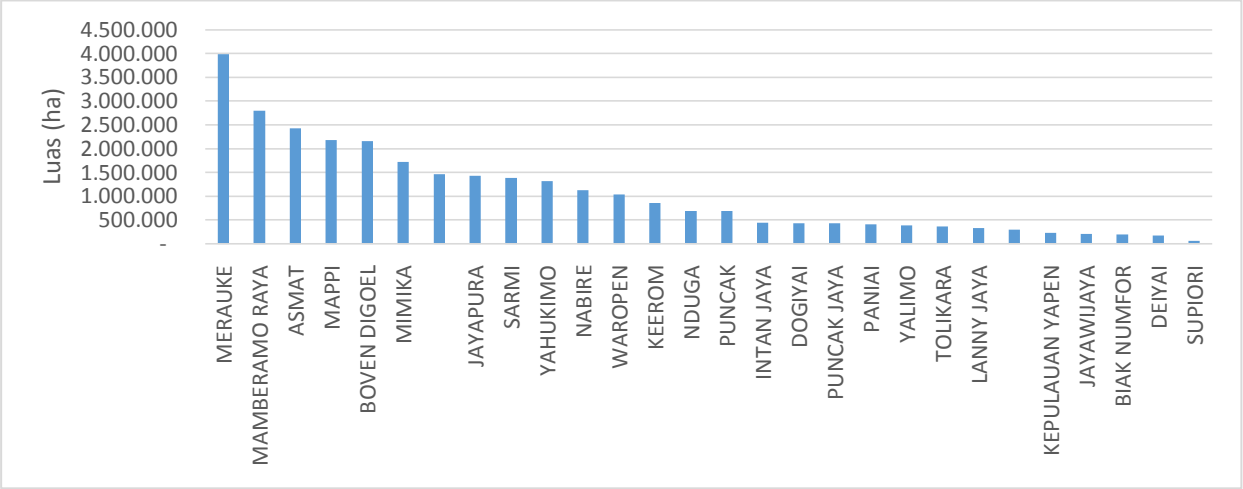

kabupaten

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Kapasitas daya tampung dalam pemurnian air Provinsi Papua dilihat pada Gambar 2.149 di bawah ini. Jika diperhatikan semua wilayah budaya memiliki daya tampung yang tinggi dan sangat tinggi terhadap pemurnian air.

Gambar 2.149. Peta daya tampung pemurnian air berdasarkan wilayah budaya

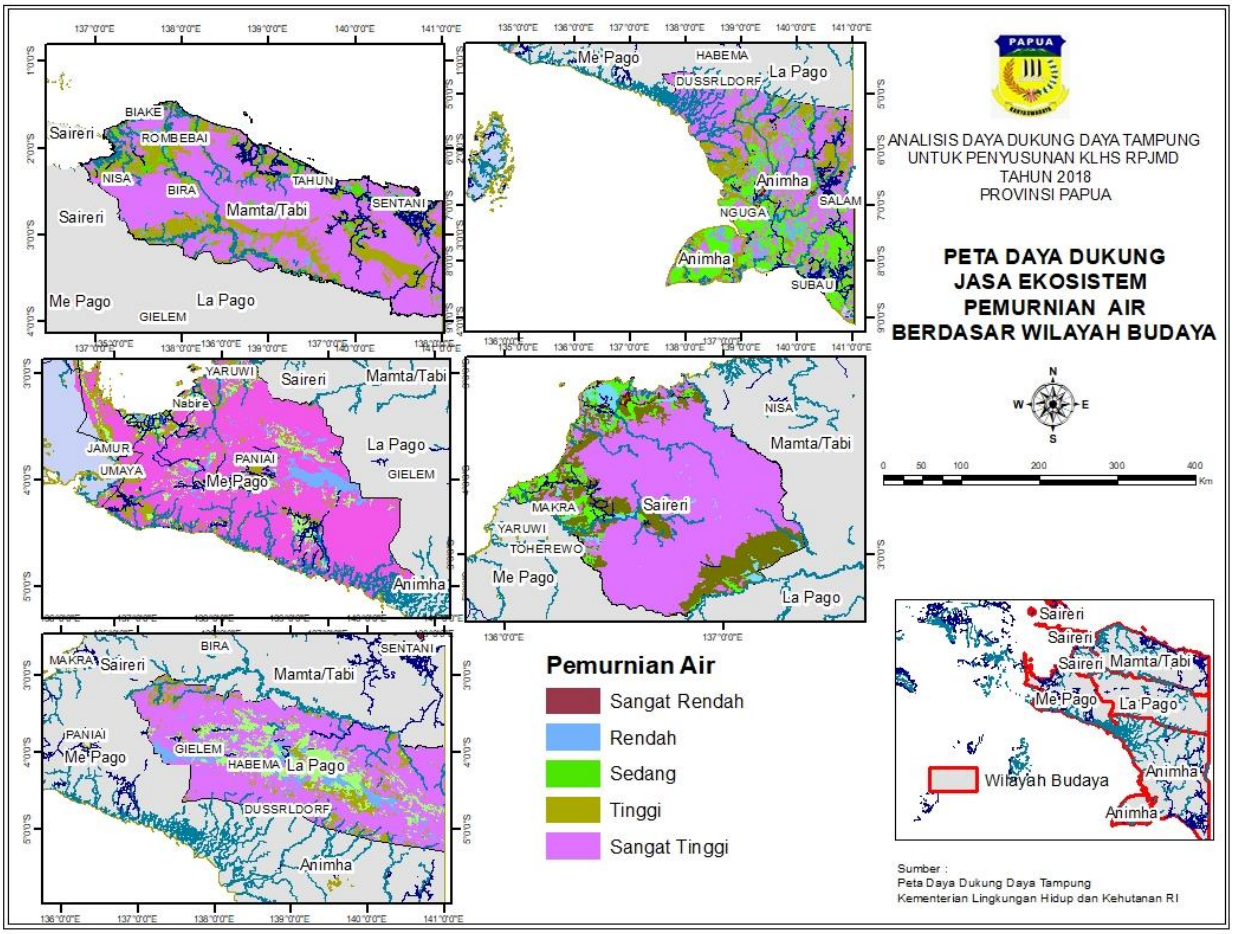

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Kapasitas daya tampung dalam pemurnian air Provinsi Papua dari kategori sedang hingga tinggi berdasarkan wilayah budaya dapat dilihat pada Tabel 2.74 Wilayah budaya dengan kapasitas daya tampung relatif tinggi terdapat dalam luasan 10 juta hektare di wilayah adat Ha Anim dan 6 Juta hektare berada pada wilayah adat Mamta dan Lapago.

Tabel 2.74. Kondisi daya tampung pemurnian air per wilayah budaya

Wilayah Budaya	Daya Tampung Pemurnian Air (ha)			Jumlah (ha)
	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
I. Mamta	475,654	1,725,176	4,260,899	6,461,730
II. Saereri	155,886	273,491	1,087,527	1,516,905
III. Ha Anim	3,257,108	2,009,468	5,474,731	10,741,307

Wilayah Budaya	Daya Tampung Pemurnian Air (ha)			Jumlah (ha)
	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
IV. Meepago	407,253	413,923	3,485,221	4,306,397
V. Lapago	1,033,634	613,499	4,522,779	6,169,912
Total	**5,329,535**	**5,035,558**	**18,831,157**	**29,196,250**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

b) Berdasarkan Kapasitas Riil Penyediaan dan Kebutuhan Air

Perhitungan penyediaan air dilakukan dengan mempergunakan data debit air tahunan pada wilayah sungai yang melintasi masing-masing kabupaten di Provinsi Papua. Hasil analisis di bawah ini menunjukan adanya daya dukung penyediaan air yang sangat tinggi di Provinsi Papua terutama di Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Sarmi, Tolikara dan Yahukimo.

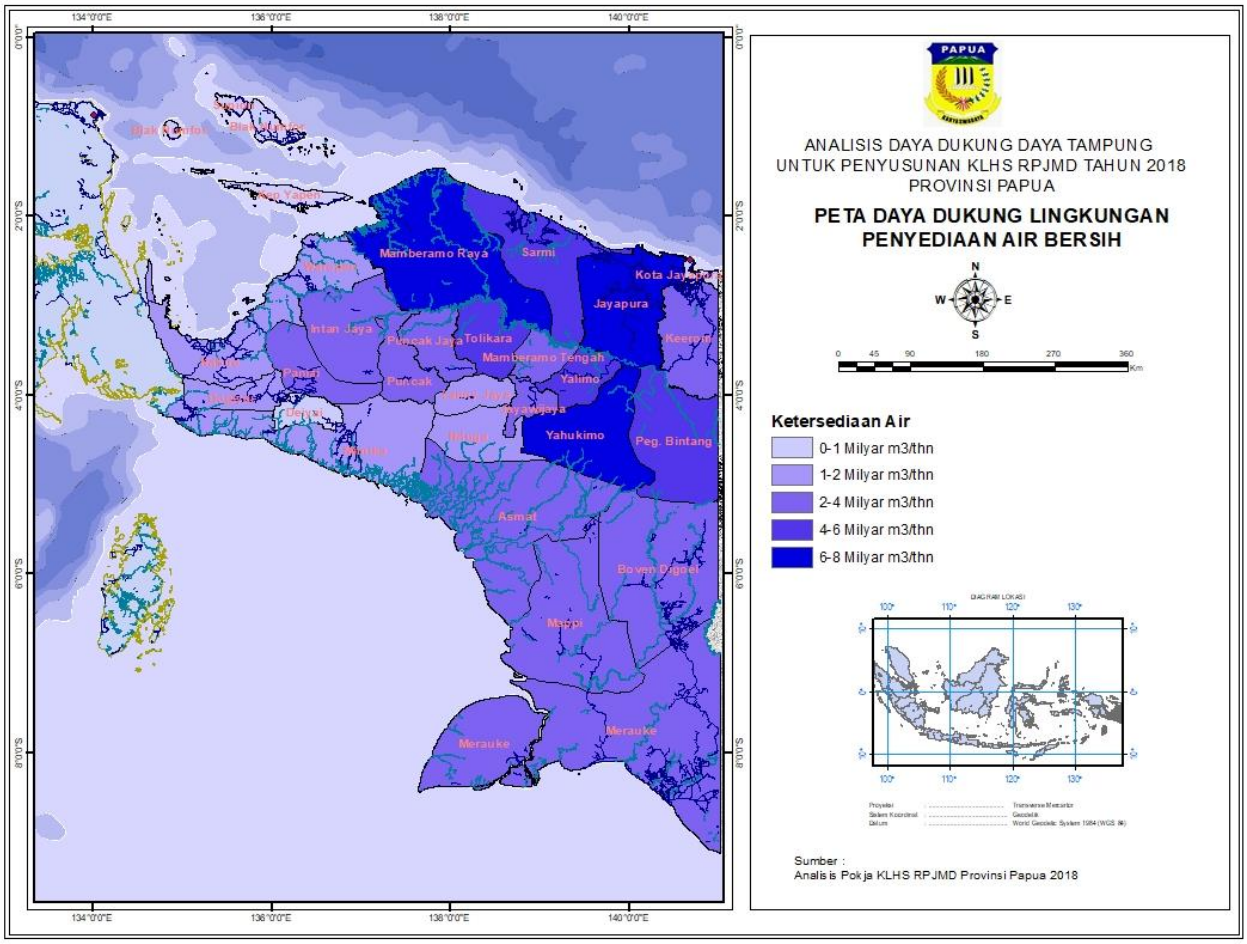

Gambar 2.150. Peta Ketersediaan Air Per Kabupaten

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Perhitungan kebutuhan air domestik dilakukan dengan memperhitungkan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten dengan standar rata-rata kebutuhan air bersih antara perkotaan sedang dan pedesaan menurut WHO sebesar 85 liter per kapita. Hasil analisis di bawah ini menunjukkan bahwa Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, Jayawijaya dan Mimika merupakan kabupaten dengan kebutuhan air terbesar, sedangkan Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya dan Waropen merupakan kabupaten dengan kebutuhan air terendah.

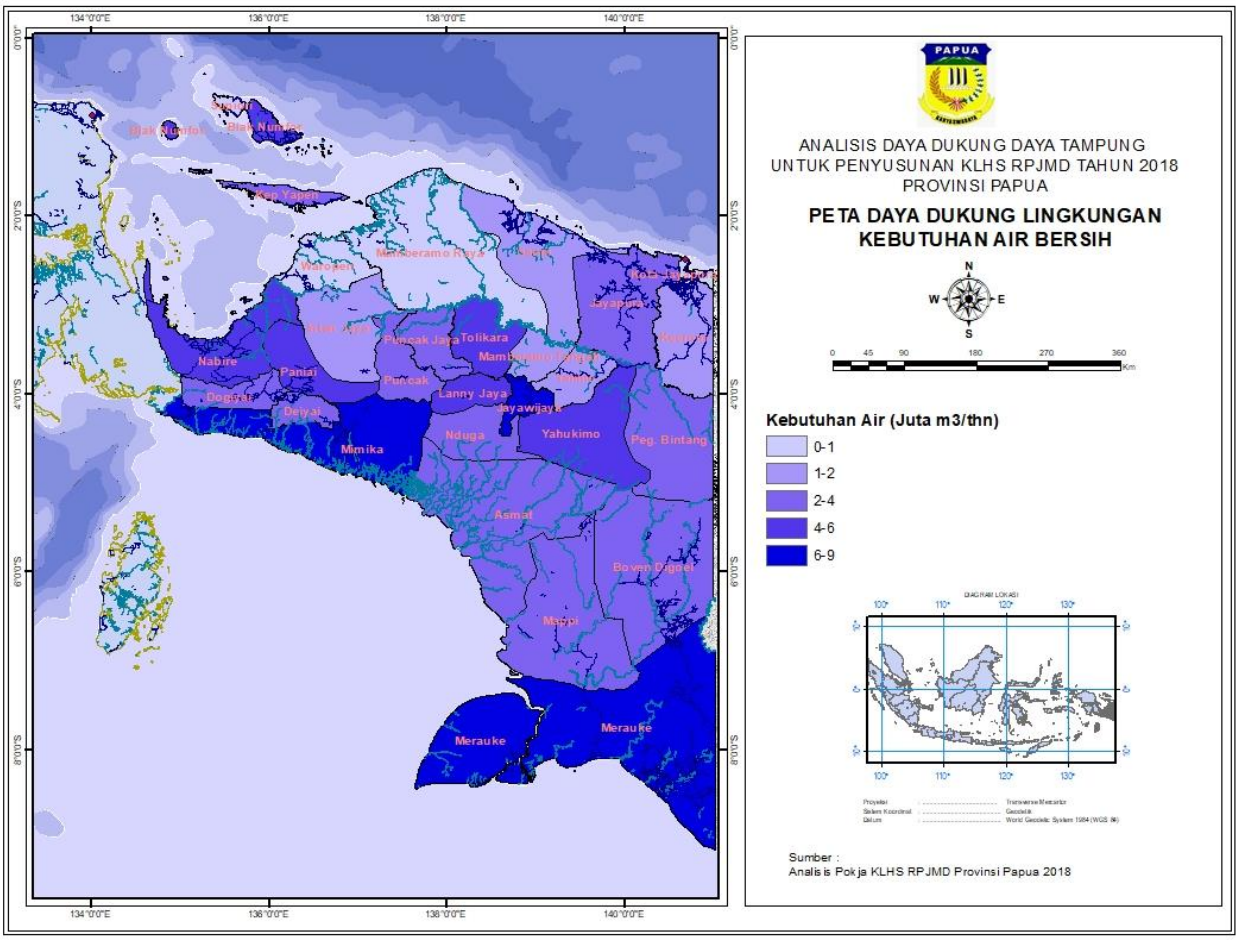

Gambar 2.151. Peta Kebutuhan Air Bersih Per Kabupaten

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Saldo ketersediaan adalah imbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Dari hasil analisis dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa seluruh kabupaten di Provinsi Papua masih berada dalam kondisi surplus. Kabupaten Mamberamo Raya, Yahukimo, Jayapura, Sarmi, Pegunungan Bintang dan Tolikara memiliki nilai surplus air terbesar sedangkan Kabupaten Deiyai, Kota Jayapura, Kepulauan Yapen, Supiori dan Biak Numfor merupakan kabupaten yang memiliki nilai surplus air terkecil.

Tabel 2.75. Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Air (m3/detik)

No	Kabupaten	Kebutuhan Air	Ketersediaan Air	Saldo Air
1	Kabupaten Asmat	2.882.502	3.641.719.464	3.638.836.962

No	Kabupaten	Kebutuhan Air	Ketersediaan Air	Saldo Air
2	Kabupaten Biak Numfor	4.489.224	16.855.992	12.366.768
3	Kabupaten Boven Digoel	2.054.134	3.769.860.744	3.767.806.610
4	Kabupaten Deiyai	2.240.191	389.989.944	387.749.753
5	Kabupaten Dogiyai	2.947.282	1.585.304.208	1.582.356.926
6	Kabupaten Intan Jaya	1.499.066	2.892.387.312	2.890.888.246
7	Kabupaten Jayapura	3.908.374	6.393.487.752	6.389.579.378
8	Kabupaten Jayawijaya	6.602.461	2.512.972.440	2.506.369.979
9	Kabupaten Keerom	1.706.933	2.346.472.872	2.344.765.939
10	Kabupaten Kep. Yapen	2.947.592	86.771.304	83.823.712
11	Kabupaten Lanny Jaya	5.481.714	1.256.184.000	1.250.702.286
12	Kabupaten Mamberamo Raya	692.261	8.324.515.872	8.323.823.611
13	Kabupaten Mamberamo Tengah	1.473.284	3.834.866.952	3.833.393.668
14	Kabupaten Mappi	2.937.168	2.562.252.696	2.559.315.528
15	Kabupaten Merauke	6.930.644	2.478.472.056	2.471.541.412
16	Kabupaten Mimika	6.528.063	1.698.224.112	1.691.696.049
17	Kabupaten Nabire	4.501.759	1.692.584.424	1.688.082.665
18	Kabupaten Nduga	3.009.797	1.378.827.504	1.375.817.707
19	Kabupaten Paniai	5.280.238	2.417.633.856	2.412.353.618
20	Kabupaten Peg. Bintang	2.279.500	5.431.413.744	5.429.134.244
21	Kabupaten Puncak	3.345.178	3.042.404.064	3.039.058.886
22	Kabupaten Puncak Jaya	3.834.411	2.863.389.960	2.859.555.549
23	Kabupaten Sarmi	1.185.465	5.822.407.584	5.821.222.119
24	Kabupaten Supiori	592.702	63.213.912	62.621.210
25	Kabupaten Tolikara	4.237.270	5.391.210.600	5.386.973.330
26	Kabupaten Waropen	914.617	1.535.477.328	1.534.562.711
27	Kabupaten Yahukimo	5.802.327	6.743.200.968	6.737.398.641
28	Kabupaten Yalimo	1.887.003	4.201.830.360	4.199.943.357
29	Kota Jayapura	9.111.732	259.635.888	250.524.156

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Kabupaten-Kabupaten surplus airnya terkecil perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Papua untuk memastikan capaian TPB No. 6. Rendahnya ketersediaan air pada kabupaten-kabupaten ini menjadi pertimbangan dalam pengaturan penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk dan jalinan kemitraan jaringan air bersih dengan daerah hulu atau daerah sekitarnya yang surplus airnya lebih besar.

Berdasarkan proyeksi laju kebutuhan air Provinsi Papua terlihat terdapat kenaikan kebutuhan air domestik yang signifikan dari sekitar 100 juta m3/tahun menjadi sekitar

200 juta m3/tahun. Kebutuhan ini belum memperhitungkan kebutuhan air komersial dan industri atau kegiatan ekonomi yang lain. Namun demikian kebutuhan akan air masih dibawah ketersediaan air dari segi kuantitas dengan belum memperhatikan lebih jauh terhadap kualitas.

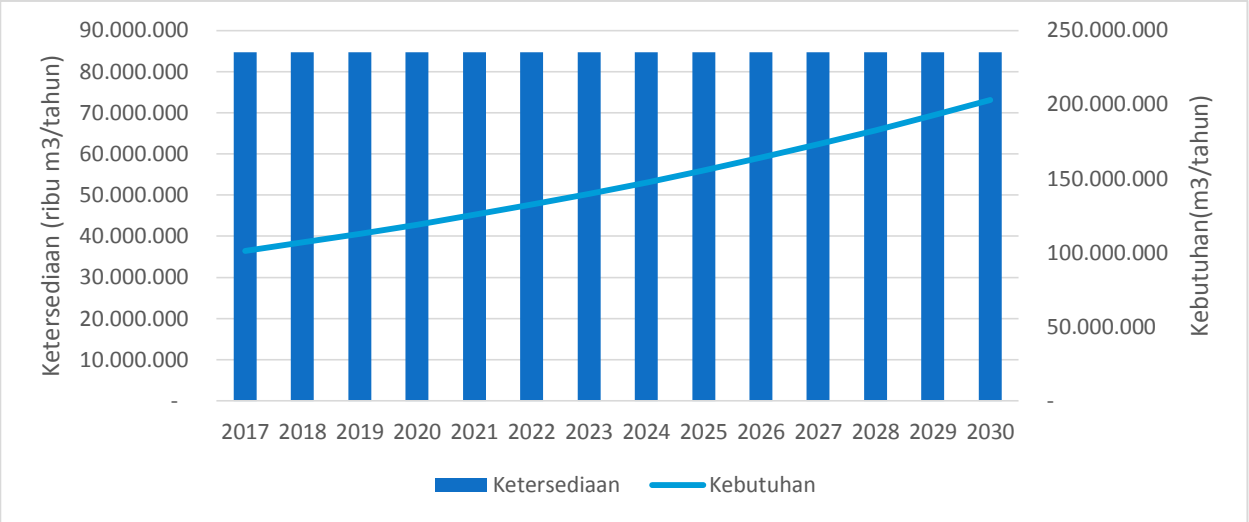

Gambar 2.152. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

2.6.1.3. Daya Dukung Kelestarian Hutan

Daya dukung kelesatarian hutan didekati dengan proxy berupa daya dukung fungsi lindung yang menggambarkan alokasi fungsi lindung di suatu wilayah. Alokasi fungsi lindung tersebut ditentukan berdasarkan alokasi fungsi ruang yang terdapat dalam pola ruang wilayah seperti dalam gambar 2.153 di bawah ini.

Gambar 2.153. Pola Ruang Wilayah Sebagai Dasar Analisi Luas Guna Lahan

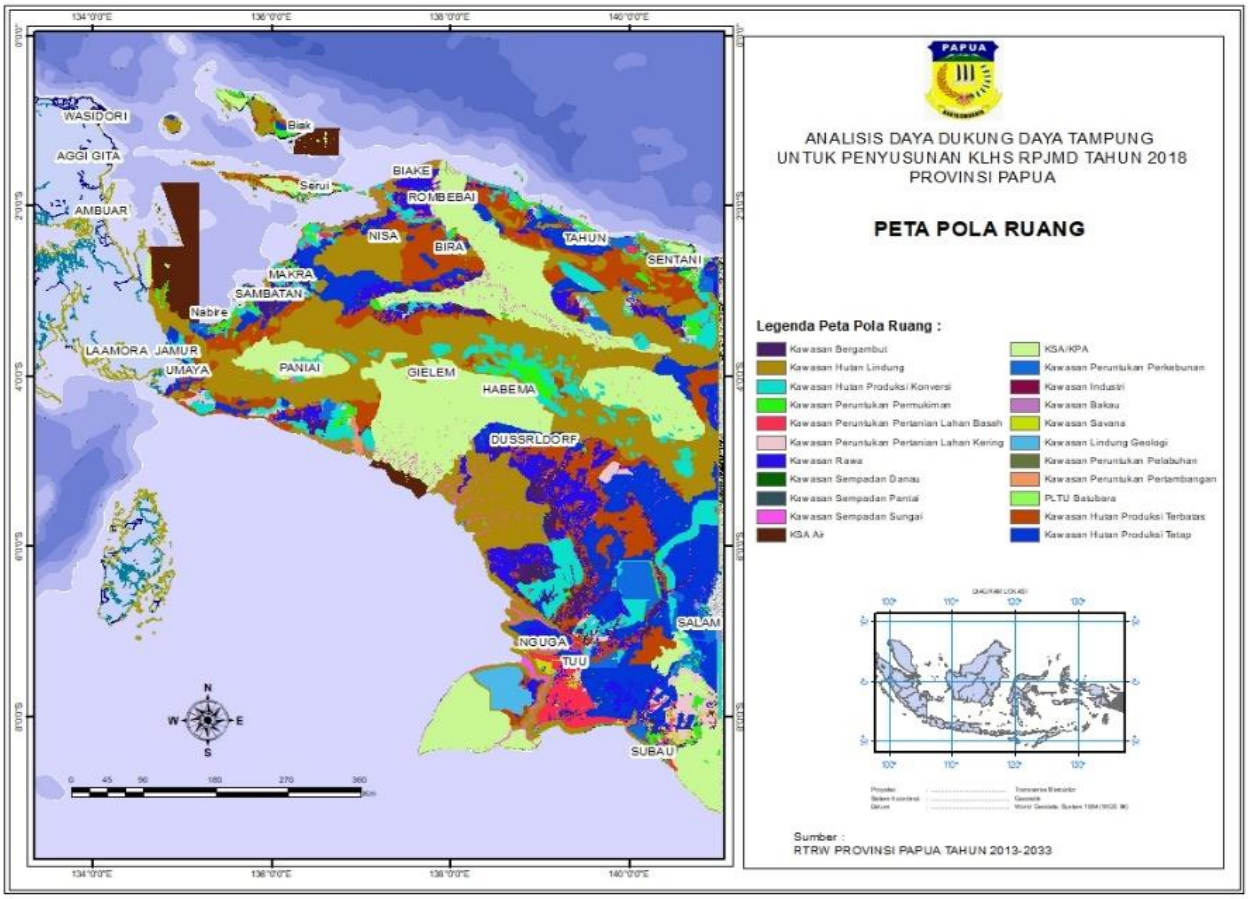

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Provinsi Papua dengan luas wilayah yaitu 32.757.938 ha. Dalam penghitungan daya dukung fungsi lindung seluruh penggunaan lahan memiliki fungsi lindung, tetapi dengan koefisien yang berbeda-beda. Tutupan lahan hutan dan badan air memiliki fungsi lindung yang tinggi dibandingkan dengan tutupan lahan bangunan atau terbuka. Tabel 2.76 menunjukkan perhitungan luas lahan yang dengan fungsi lindung tiap tutupan lahan Provinsi Papua.

Tabel 2.76. Perhitungan luas guna lahan fungsi lindung

No	Pola Ruang	Luas (ha)	Koefisien Lindung	Luas Guna Lahan (ha)
1	KSA/KPA	6,755,995	1	6,755,995
2	KSA Air	1,019,016	1	1,019,016
3	Kawasan Hutan Lindung	7,839,652	1	7,839,652

No	Pola Ruang	Luas (ha)	Koefisien Lindung	Luas Guna Lahan (ha)
4	Kawasan Bergambut	939,136	1	939,136
5	Kawasan Bakau	3,836	1	3,836
6	Kawasan Sempadan	563,463	1	563,463
7	Kawasan Lindung Geologi	284,678	1	284,678
8	Kawasan Rawa	2,057,906	0.98	2,016,748
9	Kawasan Savana	101,778	0.28	28,498
10	Kawasan HP	4,197,246	0.68	2,854,127
11	Kawasan HPK	2,448,298	0.68	1,664,842
12	Kawasan HPT	3,796,353	0.68	2,581,520
13	Kawasan Peruntukan Perkebunan	717,803	0.54	387,613
14	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	651,995	0.46	299,918
15	Kawasan peruntukan Pertanian Lahan kering	540,461	0.21	113,497
16	Kawasan Industri	12,239	0.18	2,203
17	Kawasan Peruntukan Pelabuhan	294	0.18	53
18	Kawasan Peruntukan Permukiman	788,347	0.18	141,903
19	Kawasan Peruntukan Pertambangan	39,422	0.01	394
20	PLTU Batubara	21	0.01	0
		32,757,938	**12.07**	**27,497,092**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Perhitungan DD fungsi lindung adalah 27.497.092/32.757.938 atau sebesar 0,84, sehingga dapat dikatakan bahwa DDL Provinsi Papua berada pada kondisi sangat baik. Hal ini juga terlihat kondisi yang masih baik dari lanskap hutan utuh (Intact Forest Landscape/IFL) Provinsi Papua.

Tabel 2.77. Perhitungan luas dan Proyeksi tutupan/penggunaan lahan

Kategori Penggunaan Lahan	Luas (ha)				
	1990	2000	2010	2020	2030
Hutan	28,347,725	27,600,738	26,900,850	26,182,681	25,466,538
Agroforest	507,350	520,000	718,075	924,888	1,114,669
Tanaman Kehutanan	183,538	85,606	81,750	94,431	108,600
Kelapa Sawit	381	37,894	39,806	51,456	64,363
Lahan belum termanfaatkan	3,411,413	4,171,788	4,721,394	5,159,263	5,598,994
Permukiman	75,763	76,638	116,356	160,438	207,544
Total	32,526,169	32,492,663	32,578,231	32,573,156	32,560,706

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Jika dilihat kondisi tutupan lahan Provinsi Papua secara historis berdasarkan hasil analisis Citra Satelit Landsat dari kegiatan Penyusunan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Papua Tahun 2018/2019 didapatkan bahwa terdapat perubahan luas penggunaan lahan yang signifikan sebagaimana pada Tabel 2.77 dan Gambar 2.154.

Gambar 2.154. Perubahan Tutupan/Penggunaaan Lahan 1990-2010 dan Proyeksi Tahun 2020-2030

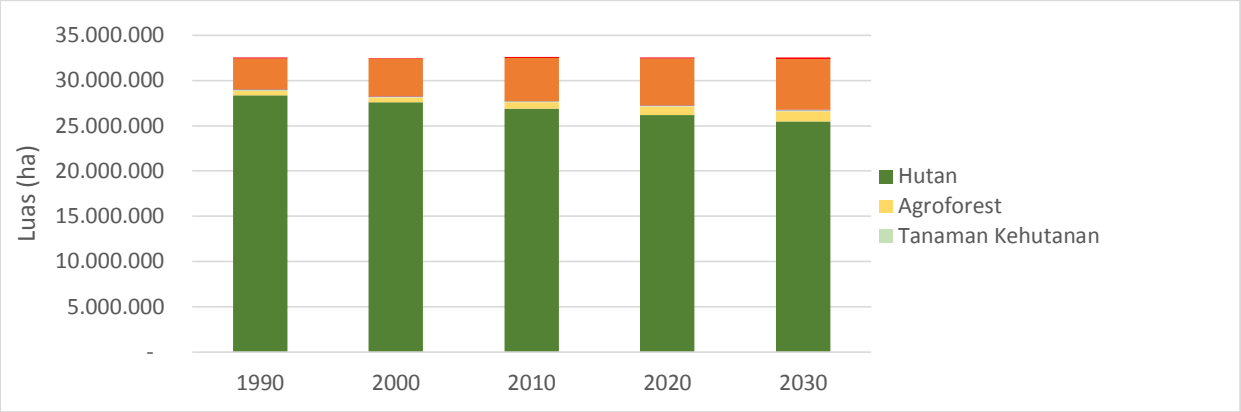

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

2.6.2. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam melakukan analisa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Papua, Pokja KLHS RPJMD melakukan identifikasi capaian atas indikator TPB yang disesuaikan dengan target yang ada pada RPJMD Papua 2013-2018. Selain itu, Pokja KLHS RPJMD juga melakukan pengukuran data capaian pembangunan di Provinsi Papua 2013-2017 terhadap indikator TPB Nasional sebagaimana tercantum pada lampiran Perpres 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang berjumlah 236 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi. Pada pengukuran capaian pembangunan Provinsi Papua 2013-2017 terhadap target Nasional, ada beberapa indikator yang tidak bisa diukur secara langsung terhadap Nasional, disebabkan indikator tersebut merupakan indikator skala nasional (Khusus Target Nasional) yang dikontribusikan dari masing-masing Provinsi yang ada di Indonesia dengan target yang berbeda-beda.

Berdasarkan analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan di Provinsi Papua, terdapat 236 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan pedoman penilaian tujuan pembangunan berkelanjutan, penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB akan dijabarkan menjadi 3 kategori yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional;
3. Indikator TPB belum dilaksanakan dan tidak ada data (termasuk indikator TPB yang berbeda satuan pengukuran; indikator yang menjadi target khusus Nasional)

Dari total indikator TPB tersebut, yang sudah dilaksanakan sebanyak 87 indikator (36,9%) terdiri dari 33 indikator (14,0%) sudah dilaksanakan dan sudah tercapai, 54 indikator (22,9%) yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai. Sementara 149 indikator (63,1%) belum dilaksanakan dan atau tidak ada data capaian, ada juga indikator yang tidak bisa dihitung karena menjadi khusus target Nasional. Hal ini menjadi catatan baik untuk Nasional maupun untuk Provinsi untuk terus mengevaluasi indikator capaian untuk pembangunan sebagai upaya yang dibutuhkan ke depan, serta pencatatan capaian pembangunan yang terus menerus mendokumentasikan database pembangunan secara lebih baik agar target daerah dan nasional dapat tercapai sesuai dengan kondisi riilnya.

Tabel 2.78. Ketercapaian Indikator Papua terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Status	Jumlah Indikator	Persentase
1	Sudah dilaksanakan dan sudah tercapai	33	14,0%
2	Sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai	54	22,9%
3	Belum dilaksanakan dan tidak ada data[1]	149	63,1%
	Jumlah	**236**	**100%**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Gambar 1 di bawah ini menunjukaan komposisi ketercapaian tersebut secara lebih jelas, dimana menunjukan masih cukup banyak indikator TPB yang belum dilaksanakan dan atau tidak ada datanya yaitu mencapai 63,1%. Indikator-indikator tersebut perlu

[1] *Data indikator tersebut termasuk indikator TPB yang tidak ada data, data berbeda satuan pengukuran (dianggap tidak ada data); dan juga indikator yang menjadi target khusus Nasional. Target Nasional adalah target yang diukur berdasarkan akumulasi dari pencapaian masing-masing Provinsi.*

dijadikan perhatian sebagai upaya untuk mengukur dan mendokumentasikan data capaian dengan lebih baik lagi.

Gambar 2.155. Ketercapaian Indikator Papua terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional

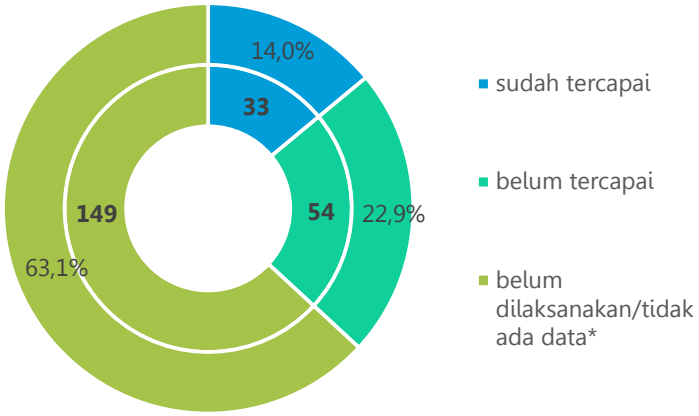

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Sementara disisi yang lain, data analisis Pokja KLHS juga mengukur capaian indikator TPB yang relevan dengan indikator RPJMD dibandingkan dengan antara target dan capaian dari RPJMD Provinsi Papua 2013-2018, hasil ini menjadi penting sebagai evaluasi internal pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua. Berdasarkan hasil identifikasi indikator TPB yang relevan dengan RPJMD sebanyak 102 indikator. Dari 102 indikator tersebut dibuat 4 kategorisasi, sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target daerah;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target daerah;
3. Indikator TPB ada data, tetapi belum menjadi target daerah;
4. Indikator TPB yang belum dilaksanakan atau tidak ada data;

Dari 102 indikator tersebut, sebanyak 36 indikator (35,3%) yang sudah dilaksanakan. Dari 36 indikator yang sudah dilaksanakan yakni; indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 14 indikator (13,7%), dan indikator

yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target sebanyak 22 indikator (21,6%). Selain itu, sebanyak 27 indikator (26,5%) yang memiliki data tetapi belum menjadi target di RPJMD. Sementara ada 39 indikator (38,2%) belum atau tidak ada datanya. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Papua untuk mengevaluasi kembali efektivitas capaian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu masih ada beberapa data yang belum dikumpulkan untuk menilai capaian pembangunan Provinsi Papua. Dengan kondisi seperti ini, diharapkan perlunya mengcapture data dan mengkompilasi data capaian tersebut untuk mengevaluasi dari indikator capaian yang dilaksanakan.

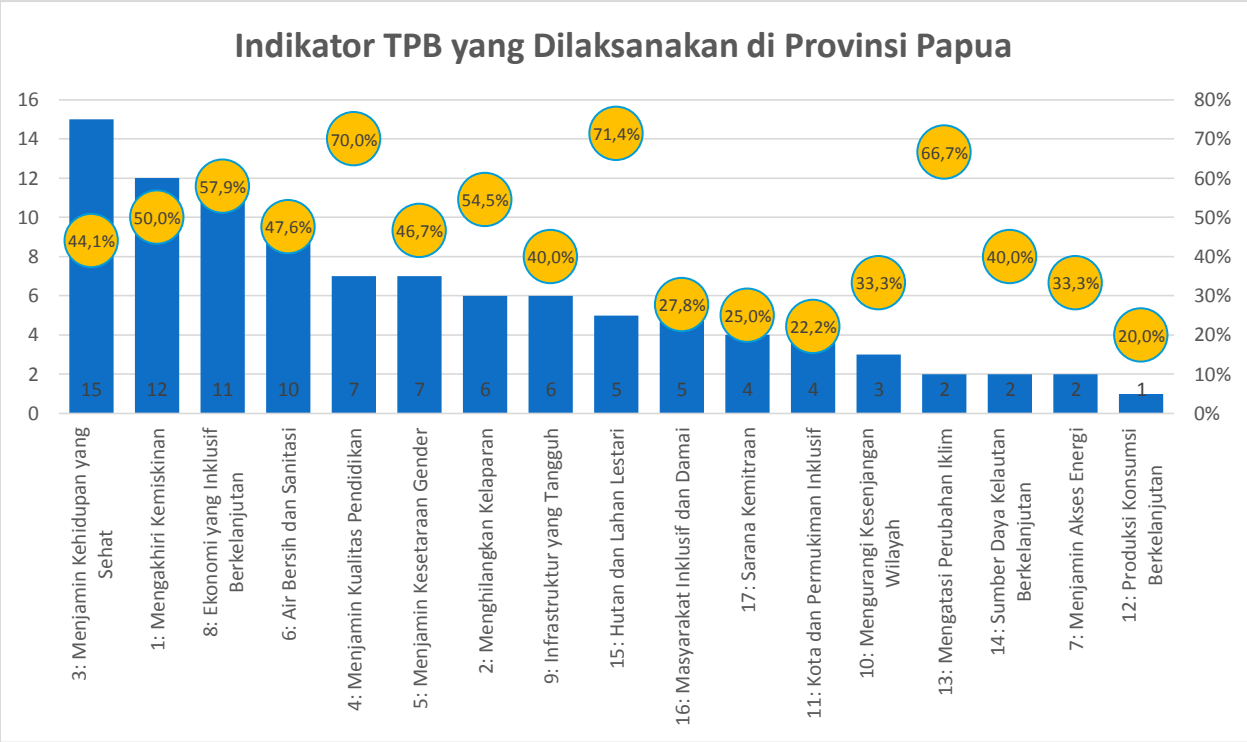

Gambar 2.156. Gambar 2. Indikator TPB yang Dilaksanakan di Provinsi Papua

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Dari 102 indikator yang ada dalam RPJMD Provinsi Papua sebagaimana Gambar 2 diatas, terdapat 6 TPB yang sudah dilaksanakan lebih dari 50% indikator di masing-masing TPB, yaitu TPB 15: Hutan dan Lahan yang Lestari, TPB 4: Menjamin Kualitas Pendidikan, TPB 13: Mengatasi Perubahan Iklim, TPB 8: Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, TPB 2:

Menghilangkan Kelaparan dan TPB 1: Mengakhiri Kemiskinan. Sementara dari sisi jumlah indikator yang paling banyak adalah TPB 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan yang paling sedikit adalah TPB 12: Produksi Konsumsi Berkelanjutan.

Hasil rekapitulasi analisa TPB terhadap target Nasional yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai, indikator yang sudah dilaksanakan tetapi masih belum tercapai, serta indikator yang belum dilaksanakan dan/atau indikator yang tidak ada datanya berdasarkan masing-masing TPB ditampilkan seperti Gambar 3 dibawah ini. Secara proporsi indikator yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai secara berurutan dari yang paling tinggi adalah indikator TPB 1, 6, 5, 8, 4, 3. Sementara itu masih banyak juga indikator TPB yang belum dilaksanakan dan/atau tidak ada datanya, diantaranya adalah TPB 11, 12, 14, 16, 9, 7, 15, 13. Hal tersebut penting untuk menjadi perhatian untuk penyusunan RPJMD Papua 2018-2023 ke depan, supaya indikator tersebut dapat diukur dan dikompilasi dengan baik sesuai dengan arah kebutuhan pembangunan di Papua.

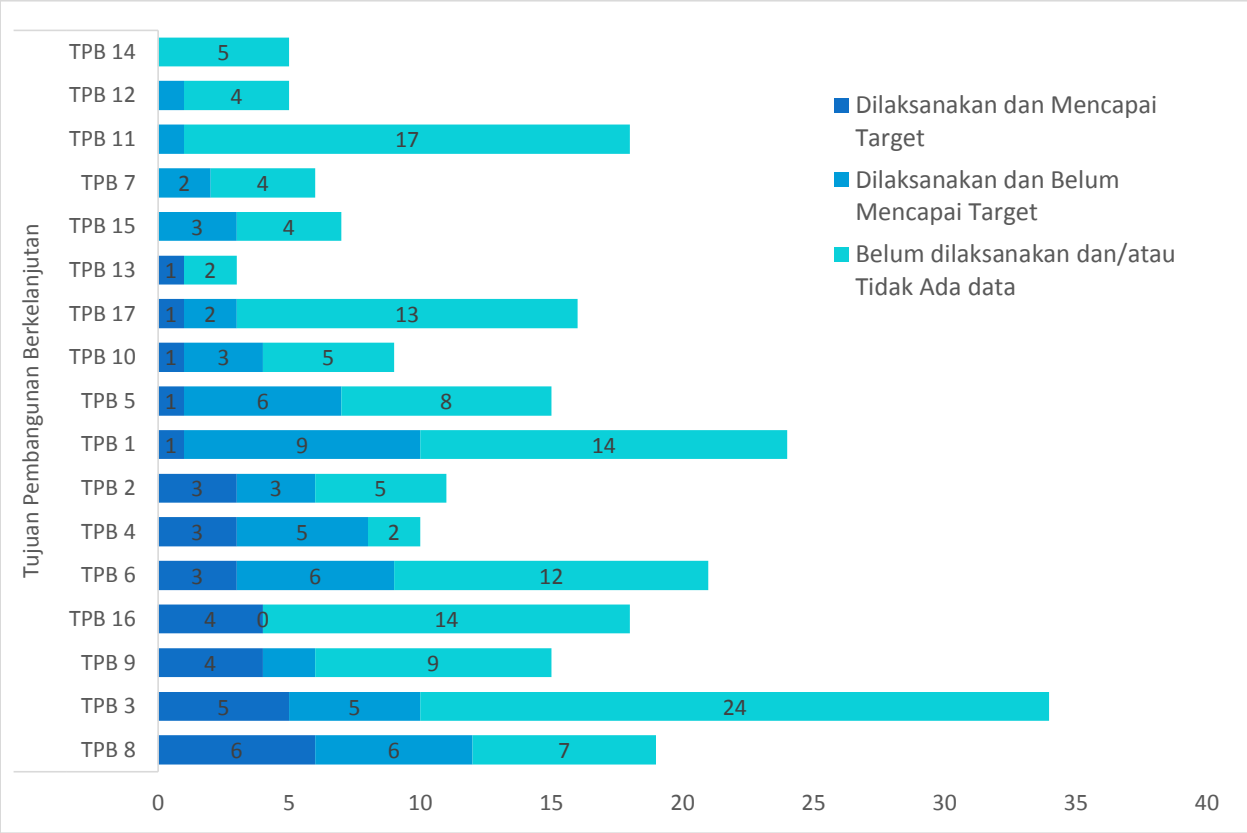

Gambar 2.157. Ketercapaian Indikator TPB di Provinsi Papua

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Berdasarkan analisis secara keseluruhan yang mengacu pada pembagian kategori di atas, rincian dan total indikator masing masing dapat dilihat pada Tabel 2.79 di bawah ini.

Tabel 2.79. Rekapitulasi Analisis Ketercapaian Indikator TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Dilaksanakan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum dilaksanakan dan/atau Tidak Ada data
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	**24**	1	9	14
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	**11**	3	3	5
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	**34**	5	5	24

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Dilaksanakan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum dilaksanakan dan/atau Tidak Ada data
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	**10**	3	5	2
Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	**15**	1	6	8
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	**21**	3	6	12
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	**6**	0	2	4
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	**19**	6	6	7
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	**15**	4	2	9
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	**9**	1	3	5
Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	**18**	0	1	17
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	**5**	0	1	4
Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	**3**	1	0	2
Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	**5**	0	0	5
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	**7**	0	3	4
Tujuan 16: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun	**18**	4	0	14

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Dilaksanakan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum dilaksanakan dan/atau Tidak Ada data
Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan				
Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	**16**	1	2	13
JUMLAH	**236**	**33**	**54**	**149**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Pada bagian selanjutnya di bawah ini akan diuraikan masing-masing ketercapaian indikator TPB di Provinsi Papua secara lebih detail.

2.6.3. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target

Secara keseluruhan ada 33 indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target di Provinsi Papua atau 14,0% dari keseluruhan indikator TPB terhadap indikator Nasional yang menjadi kewenangan Provinsi. Indikator tersebut berada pada 12 TPB yang berbeda dengan jangkauan jumlah indikator yang tercapai antara 1 sampai 6 indikator. Indikator yang paling tinggi ketercapaiannya adalah nomor 8 yaitu untuk ekonomi inklusif yang berkelanjutan, seperti kunjungan wisatawan, usia muda yang mengikuti pelatihan, tingkat setengah pengangguran dan indikator usaha mikro kecil menengah (UMKM). Diikuti oleh urutan ke dua yaitu TPB 3, 9 dan 16 untuk isu kesehatan, infrastruktur dan hukum dan tata kelola. Berikut gambar sebaran indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target. Meskipun sudah tercapai hasil tersebut masih sangat relative, karena sebagian besar capaian dalam target Nasional tidak sepenuhnya memiliki benchmark yang jelas, hanya disebutkan indikator “meningkat” atau indikator “menurun”.

Gambar 2.158. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sudah Tercapai

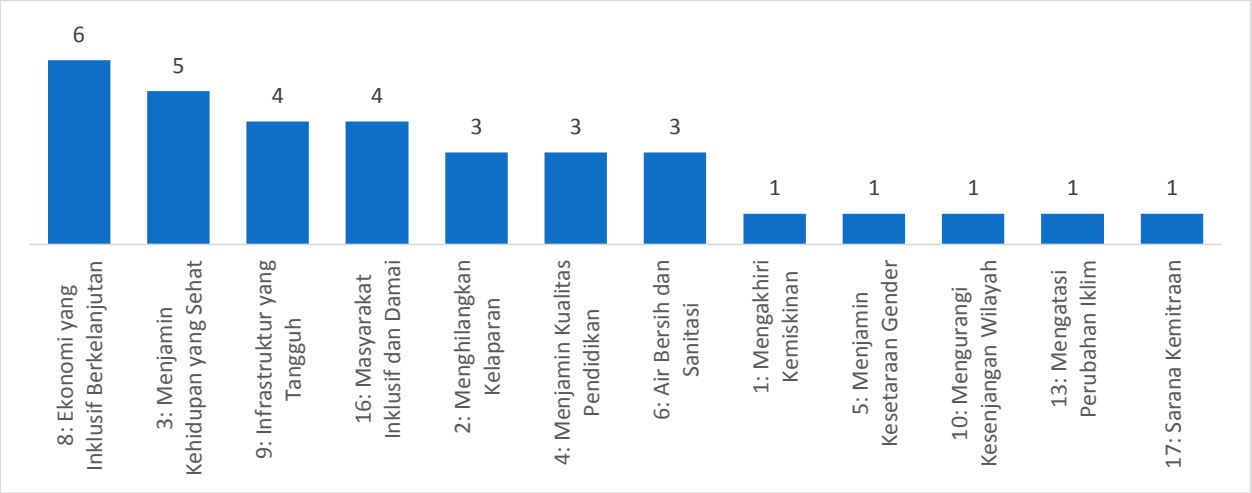

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas dapat dikatakan bahwa ketercapaian Provinsi Papua paling tinggi ada pada ekonomi kecil menengah, dan isu kesehatan seperti AKI dan AKB, isu infrastruktur dermaga dan telekomunikasi seperti jumlah dermaga dan akses individu terhadap telepon seluler. Disusul isu tata kelola seperti opini BPK, nilai SAKIP terhadap OPD, dan keterwakilan perempuan. Meskipun demikian, masih banyak indikator lainnya dari TPB yang sudah tercapai yang masih perlu mendapatkan perhatian serius, karena capaian tersebut hanya 19% per masing-masing TPB tersebut, selain itu masih ada indikator dalam 5 TPB (seperti TPB 7, 11, 12, 14, dan 15) yang belum tercapai sama sekali. Selain itu, hitungan capaian di atas masih didasarkan pada jumlah capaian indikator saja, namun secara proporsi masih sangat sedikit. Jumlah indikator di masing-masing TPB tidak berimbang, dan perlu dilihat secara proporsional.

Dalam pencapaian kesejahteraan manusia, TPB menempatkan kondisi lingkungan (biosphere) sebagai dasar untuk menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi. Artinya jika kondisi lingkungan yang sehat dan bersih dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Indikator biosphere yang perlu diperhatikan adalah TPB 13; mengatasi perubahan iklim,

TPB 14; Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan, TPB 15; Hutan dan Lahan Lestari, dan TPB 6; Air Bersih dan Sanitasi yang Sehat.

Berikut target dan indikator yang sudah tercapai dijabarkan pada tabel 2.80 berikut ini:

Tabel 2.80. Rekapitulasi Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai Target

No TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR TPB	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN			
					2014	2015	2016	2017
1	Tanpa Kemiskinan	Meningkat menjadi 63%.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Cakupan imunisasi dasar	71,27	63,35	60,57	66,83
2	Tanpa Kelaparan	Menurun menjadi 17%	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi balita gizi kurang		16,2	11,9	12,8
2	Tanpa Kelaparan	Menurun menjadi 28%	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.			26,5	25,0	24,3
2	Tanpa Kelaparan	Meningkat	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkatkan cadangan pangan daerah 200 ton		20,9	64,91	105
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurun menjadi 306	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	422	235	380	289
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurun menjadi 24	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.	8	44	8	7
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurun menjadi 245	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Cakupan penemuan penderita baru TB Paru BTA (+)		217	260	68
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurun menjadi 9,91%	Unmet need pelayanan kesehatan.	Unmet need pelayanan kesehatan.		2,78	2,63	
3	Kehidupan Sehat	Menurun	Persentase merokok pada	Persentase merokok pada		26,67	24,04	

No TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR TPB	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN			
					2014	2015	2016	2017
	dan Sejahtera		penduduk umur ≥15 tahun.	penduduk umur ≥15 tahun.				
4	Pendidikan Berkualitas	Meningkat	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).			17,03	23,09	
4	Pendidikan Berkualitas	Meningkat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	78,36	78,56	78,66	78,83
4	Pendidikan Berkualitas	Meningkat	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik			3388	3721
5	Kesetaraan Gender	Meningkat	Proporsi individu yang menguasai/memiliki	Persentase penduduk +5 thn menggunakan telepon		32,04	34,24	

No TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR TPB	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN			
					2014	2015	2016	2017
			telepon genggam.	seluler				
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Meningkat	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		11	4	21	28
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Meningkat	Kualitas air danau.	Indeks kualitas Air	54,67	80,00	76,00	77,33
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Meningkat	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks kualitas Air	54,67	80,00	76,00	77,33
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	Meningkat	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	Rasio penduduk yang bekerja	96,56	96,01	96,65	96,38
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	25,0%	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Cakupan jumlah UMKM yang di bina oleh Pemerintah				47.977
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	Meningkat	Upah rata-rata per jam pekerja.			18.589	22.191	
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	Menurun	Tingkat setengah pengangguran.			11,68	13,07	11,25
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	Meningkat	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan			15,42	16,53	16,35

No TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR TPB	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN			
					2014	2015	2016	2017
			(NEET).					
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	Meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah Kunjungan Wisatawan		865.816	546.699	900.570
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	Meningkat	Jumlah dermaga penyeberangan.	Tingkat ketersediaan dan fungsional pelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangn (ASDP)	20	21	22	22
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	Menurun	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.		19.884	19.559	19.247	18.952
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	Meningkat	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persentase penduduk +5 thn menggunakan telepon seluler		32,04	34,24	
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	Meningkat	Proporsi individu yang menggunakan internet			8,98	11,62	
10	Mengurangi Kesenjangan	Meningkat menjadi 87	Indeks Kebebasan Sipil.		85,69	82,72	92,15	
13	Penanganan Perubahan Iklim	Ada	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Serapan GRK (Gg CO2eq)	110.807	81.192	117.537	107.633
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	Menurun	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.			0,16	0,12	

No TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR TPB	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN			
					2014	2015	2016	2017
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Persentase OPD dengan nilai SAKIP "B"		55,69	61,97	65,25
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	Meningkat	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Proporsi perempuan di DPRP		6,79	6,79	14,55
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Meningkat	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Proporsi individu yang menggunakan internet.		8,98	11,62	

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Catatan: Tidak semua indikator TPB sama dengan indikator yang ada pada RPJMD Provinsi Papua, ada beberapa indikator TPB yang disesuaikan dengan indikator RPJMD Papua.

2.6.4. Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target

Berikut adalah indikator-indikator yang masuk dalam kategori sudah dilaksanakan namum belum mencapai target nasional. Indikator-indikator yang dijelaskan berikut sudah tercantum dalam program dan kegiatan OPD Provinsi Papua. Dalam melakukan analisis ketercapaian untuk indikator yang belum mencapai target nasional, dibutuhkan persandingan capaian dari pembangunan berdasarkan indikator target TPB nasional. Berikut indikator-indikator yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:

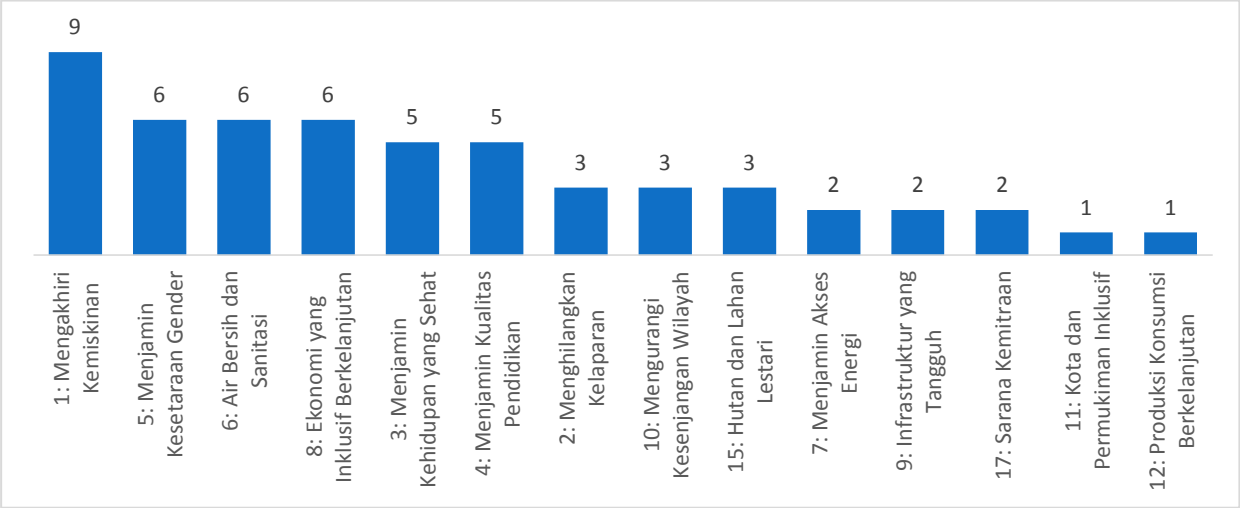

Gambar 2.159. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Belum Tercapai

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Dari 54 indikator yang belum tercapai, terdapat 18 indikator yang berbasis lahan (ditunjukkan dengan blok warna abu-abu pada Tabel 4). Indikator yang belum tercapai dan berbasis lahan ini mencakup isu ketersediaan prasarana air baku dan sanitasi layak, pangan, elektrifikasi, lahan kritis, dan tutupan hutan. Melihat proporsi yang belum tercapai di masing-masing TPB masih cukup tinggi, dimana secara rata-rata 23% indikator pada masing-masing TPB belum tercapai. Secara proporsi TPB yang paling banyak belum

tercapai secara berurutan adalah TPB 4, 15, 5, 1, 10, 7 dan 8 (di atas 30% dan maksimum 50%). Tabel 2.81 berikut merupakan analisis gap dari indikator yang belum tercapai.

Tabel 2.81. Gap Indikator yang Belum Tercapai

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	27,62%	Menurun menjadi 7-8%	-20,62%
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	29.083	Menurun menjadi 2,8 juta	meningkat 2.724 KPM dari tahun sebelumnya
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		51,05%	Meningkat menjadi 70%	18,95%
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase penduduk berakses air minum	59.09%	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	40.91%
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak (Rumah Sehat)	33,06	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	66,94
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.		14,44%	Meningkat menjadi 18,6 juta	perlu diturunkan
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Angka partisipasi murni (APM) pendidikan menengah (SMA)	43,48	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 82,42%).	48,15

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Rasio kepemilikan akta kelahiran	44%	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	33,34%
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	55,82%	Meningkat menjadi 100%	44,18%
2: Menghilangkan Kelaparan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	32,8	Menurun	meningkat 4,9% dari tahun sebelumnya
2: Menghilangkan Kelaparan	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	24,65	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	25,35
2: Menghilangkan Kelaparan	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Konsumsi ikan (kh/kap/org):34,26; ekspor hasil perikanan (US$/tahun):18.903.551; jumlah unit pengolahan ikan yang bersertifikasi (unit/tahun) : 12 unit	42,89	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	49,61%
3: Menjamin Kehidupan yang Sehat	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Kn)	49,2	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	45,8
3: Menjamin Kehidupan yang Sehat	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses		51,05%	Meningkat menjadi 85 %	33,95%

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
		melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.				
3: Menjamin Kehidupan yang Sehat	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBA) (Jiwa/1000/KH)	8	Menurun	meskipun tidak ada gap tetapi tren cenderung meningkat
3: Menjamin Kehidupan yang Sehat	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Angka kejadian Malaria	46	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	13.921
3: Menjamin Kehidupan yang Sehat	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		18,6%	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	-3,2%
4: Menjamin Kualitas Pendidikan	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	67,94	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).	23,69
4: Menjamin Kualitas Pendidikan	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah	6,27	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	2,53
4: Menjamin Kualitas Pendidikan	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	67,94	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).	23,69
4: Menjamin Kualitas Pendidikan	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	73,89	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	22,21
4: Menjamin Kualitas	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15	73,89%	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia	meningkat 2,87% dari

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
Pendidikan		24 tahun dan umur 15-59 tahun.	tahun.		dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	tahun sebelumnya
5: Menjamin Kesetaraan Gender	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Indeks Pemberdayaan Gender	63,69	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	menurun 1% dari tahun sebelumnya
5: Menjamin Kesetaraan Gender	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	98	Menurun	meningkat 78 kasus dari tahun sebelumnya
5: Menjamin Kesetaraan Gender	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.		24,54	Menurun	meningkat 1,8% dari tahun sebelumnya
5: Menjamin Kesetaraan Gender	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	67,94%	Meningkat menjadi 91,63%	23,69%
5: Menjamin Kesetaraan Gender	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	10.61	Meningkat	menurun 2,12% dari tahun sebelumnya
5: Menjamin Kesetaraan Gender	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait		25,13	Meningkat	menurun 2,75% dari tahun

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
		hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.				sebelumnya
6: Air Bersih dan Sanitasi	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase penduduk berakses air minum	28,34	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	71,66
6: Air Bersih dan Sanitasi	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Persentase Penduduk berakses air bersih	59,09	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	40,91
6: Air Bersih dan Sanitasi	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persentase penduduk berakses air minum	28,34	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	71,66
6: Air Bersih dan Sanitasi	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak (Rumah Sehat)	33,06	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	66,94
6: Air Bersih dan Sanitasi	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		1.718	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	kurang 20% dari jumlah desa
6: Air Bersih dan Sanitasi	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah	44.807.829	Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019.	1.019.217.062

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
7: Menjamin Akses Energi	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Rasio elektrifikasi	0.5582	Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019 (2014: 81,5%).	0.4078
7: Menjamin Akses Energi	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.		334,5	Meningkat menjadi 1.200 KWh	865,5
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Laju pertumbuhan PDRB DP	4,64	Meningkat	menurun 4,5% dari tahun sebelumnya
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDRB per kapita (Rp juta)	4.557.869	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	442.131.021
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian	33,8	Meningkat	menurun 5,38% dari tahun sebelumnya
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal.	21,81	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	29,19
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka	3,62	Menurun	meningkat 0,27% dari tahun sebelumnya
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	900.570	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	perlu ditingkatkan
9: Infrastruktur yang Tangguh	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	47,1%	1000 Km (skala nasional)	perlu ditingkatkan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
9: Infrastruktur yang Tangguh	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Jumlah pelabuhan strategis	3	24 pelabuhan (skala nasional)	perlu ditingkatkan
10: Mengurangi Kesenjangan Wilayah	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indeks Gini	0,397	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	0,04
10: Mengurangi Kesenjangan Wilayah	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	27,62	Menurun menjadi 7-8%	-20,62
10: Mengurangi Kesenjangan Wilayah	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Persentase penduduk miskin (P0)	0.2762	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	0.1362
11: Kota dan Permukiman Inklusif	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		49,35	Meningkat menjadi 80%	30,65
12: Produksi Konsumsi Berkelanjutan	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.		4,73	20 ton per hari (skala nasional)	15,27
15: Hutan dan Lahan Lestari	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Indeks kualitas tutupan hutan	78.18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	perlu ditingkatkan
15: Hutan dan Lahan Lestari	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	14	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	perlu ditingkatkan
15: Hutan dan Lahan Lestari	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah	44.807.829	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	1.019.217.062

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
17: Sarana Kemitraan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persentase PAD terhadap pendapatan	78.096.081	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	perlu ditingkatkan
17: Sarana Kemitraan	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		0,05%	Di atas 12%	11,95%

Sumber: Analisis GAP Pokja KLHS RPJMD 2019-2023 Provinsi Papua

Keterangan: Blok warna abu-abu merupakan indikator berbasis lahan, sementara blok warna hijau merupakan indikator dalam RPJMD baru.

2.6.5. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Ada Data

Dari 236 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan kewenangan provinsi, masih terdapat 149 indikator atau 63,1% yang belum dilaksanakan dan/atau tidak (belum) ada data yang dikumpulkan. Pada saat mengukur indikator pada kategoori ini ditemukan 17 indikator yang sebenar tidak bisa diukur secara langsung, karena indikator tersebut merupakan indikator secara Nasional atau target Nasional, meskipun demikian tim pokja berupaya untuk mengkonversi dari aggregasi setiap provinsi, dan sebagian besar dikelompokan atau dianggap tidak ada datanya Secara jumlah indikator, diantara 17 TPB, ada 6 TPB yang lebih dari 10 indikator dimasing-masing TPB belum dilaksanakan; diantaranya yang paling banyak adalah TPB 3; Menjamin Kehidupan, TPB 11; Kota dan Pemukiman Inklusif; TPB 1 mengurangi kemiskinan, TPB 16 hukum dan tata kelola, TPB 17 Sarana Kemitraan, seperti indikator statistik dan kepuasan masyarakat, serta TPB 12 yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi layak.

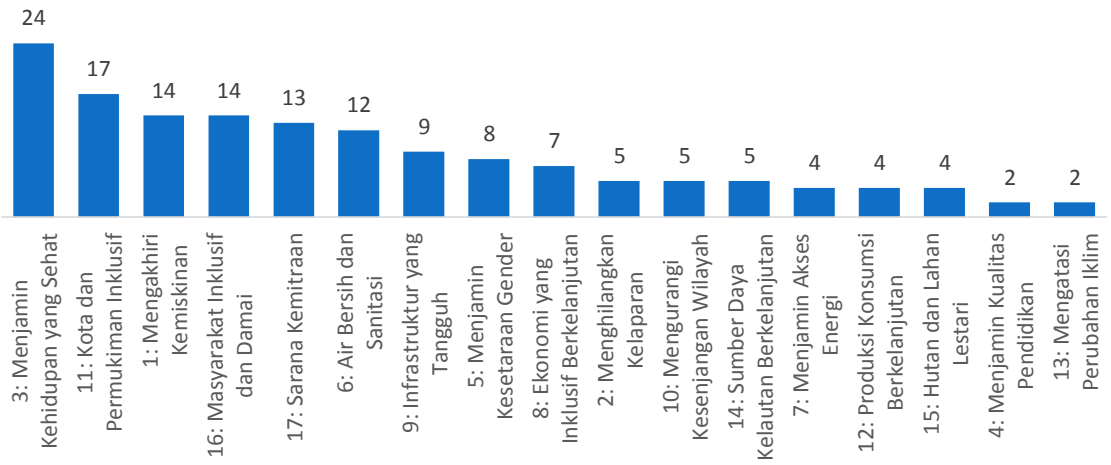

Gambar 2.160. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Ada Data

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

Namun, secara proprosional indikator TPB yang belum dilaksanakan dan/atau tidak ada datanya, secara berurutan adalah TPB 14 (semua 100% indikator tersebut belum dilaksanakan/tidak ada datanya), padahal TPB 14 merupakan isu penting

karena masuk dalam kategori biosphere. Indikator lainnya yang masih banyak belum dilaksanakan atau belum ada datanya adalah 11, 17, 12, 16, 3, 7, 13, dan 9 (antara 60-80% indikator belum dilaksanakan). Hal tersebut penting untuk menjadi perhatian untuk penyusunan RPJMD Papua 2018-2023 ke depan, supaya dalam diukur dan dilaksanakan.

Tabel 2.82. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan atau Tidak Ada Data

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Jumlah Indikator
1: Mengakhiri Kemiskinan	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a) 1.3.1.(b) 1.3.1.(c) Jumlah: 3 indikator
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1* 1.5.1.(a) 1.5.1.(b) 1.5.1.(c) 1.5.1.(d) 1.5.1.(e) 1.5.2.(a) Jumlah: 7 indikator
	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.5.3* 1.a.1* 1.a.2* Jumlah: 3 indikator
2: Menghilangkan Kelaparan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1* 2.1.2* 2.1.2.(a) Jumlah: 3 indikator
	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2* 2.2.2.(a) Jumlah: 2 indikator
3: Menjamin Kehidupan yang Sehat	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2* 3.2.2.(b) Jumlah: 2 Indikator
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a) 3.3.3.(a) 3.3.4.(a) 3.3.5* 3.3.5.(a) 3.3.5.(b) Jumlah: 6 indikator
	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui	3.4.1.(a) 3.4.1.(b)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Jumlah Indikator
	pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2* 3.4.2.(a) Jumlah: 4 indikator
	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e) 3.5.2* Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1* 3.7.1.(a) 3.7.1.(b) 3.7.2* 3.7.2.(a) Jumlah: 5 indikator
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2* 3.8.2.(a) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a) Jumlah: 1 indikator
	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a) 3.c.1* Jumlah: 2 indikator
4: Menjamin Kualitas Pendidikan	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(c) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1* Jumlah: 1 indikator
5: Menjamin Kesetaraan Gender	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a) 5.2.2* 5.2.2.(a) Jumlah: 3 indikator
	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(a) 5.3.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2* Jumlah: 1 indikator
	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a) 5.6.1.(b) Jumlah: 2 indikator
6: Air Bersih dan Sanitasi	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok	6.2.1.(a) 6.2.1.(e) 6.2.1.(f) Jumlah: 3 indikator

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Jumlah Indikator
	masyarakat rentan.	
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(a) 6.4.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a) 6.5.1.(c) 6.5.1.(e) 6.5.1.(f) 6.5.1.(g) Jumlah: 5 indikator
	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1.(e) Jumlah: 1 indikator
7: Menjamin Akses Energi	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(a) 7.1.2.(b) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1* Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1* Jumlah: 1 indikator
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1* 8.9.1.(c) 8.9.2* Jumlah: 3 indikator
	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1* 8.10.1.(a) 8.10.1.(b) Jumlah: 3 indikator
9: Infrastruktur yang Tangguh	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c) Jumlah: 1 indikator
	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1* 9.2.1.(a) 9.2.2* Jumlah: 3 indikator
	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1* 9.3.2* Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang	9.4.1(a) Jumlah: 1 indikator

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Jumlah Indikator
	dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	
	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1* Jumlah: 1 indikator
	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1* Jumlah: 1 indikator
10: Mengurangi Kesenjangan Wilayah	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b) 10.1.1.(e) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1* Jumlah: 1 indikator
	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d) Jumlah: 1 indikator
	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b) Jumlah: 1 indikator
11: Kota dan Permukiman Inklusif	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b) 11.1.1.(c) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a) 11.2.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(a) 11.3.1.(b) 11.3.2.(a) 11.3.2.(b) Jumlah: 4 indikator
	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1* 11.5.1.(a) 11.5.1.(b) 11.5.1.(c) 11.5.2.(a) Jumlah: 5 indikator
	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan	11.b.2* Jumlah: 1 indikator

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Jumlah Indikator
	mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	
12: Produksi Konsumsi Berkelanjutan	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a) Jumlah: 1 indikator
	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a) Jumlah: 1 indikator
13: Mengatasi Perubahan Iklim	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1* 13.1.2* Jumlah: 2 indikator
14: Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1.(b) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	14.6.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1* 14.b.1.(a) 14.b.1.(b) Jumlah: 3 indikator
15: Hutan dan Lahan Lestari	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1.(a) 15.2.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1* Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a) Jumlah: 1 indikator
16: Masyarakat Inklusif dan Damai	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a) 16.1.2.(a) 16.1.4*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Jumlah Indikator
		Jumlah: 3 indikator
	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a) 16.2.1.(b) 16.2.3.(a) Jumlah: 3 indikator
	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1* 16.6.1.(c) 16.6.1.(d) 16.6.2.(a) Jumlah: 4 indikator
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b) Jumlah: 1 indikator
	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c) Jumlah: 1 indikator
	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a) Jumlah: 1 indikator
17: Sarana Kemitraan	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2* Jumlah: 1 indikator
	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b) 17.6.2.(c) Jumlah: 2 indikator
	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a) 17.17.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a) 17.18.1.(b) 17.18.1.(c) 17.18.1.(d) Jumlah: 4 indikator
	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b) 17.19.2.(c) 17.19.2.(d) Jumlah: 3 indikator

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 (data diolah)

DAFTAR ISI

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II.1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II.1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II.28
2.1.3. Aspek Demografi II.36

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II.40
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.40
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat II.54
2.2.3. Fokus Pendidikan II.61
2.2.4. Fokus Kesehatan II.66
2.2.5. Fokus Ketenagakerjaan II.71
2.2.6. Fokus Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi II.77

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH II.97
2.3.1. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita II.97
2.3.2. Nilai Tukar Petani II.100
2.3.3. Produktivitas total daerah II.103
2.3.4. Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB II.104
2.3.5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR II.105
2.3.6. Rasio ketergantungan II.107
2.3.7. Angka kriminalitas yang Tertangani II.109
2.3.8. Daya Saing Investasi II.110

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM II.111
2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar II.112
2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar II.155
2.4.3. Layanan Urusan Pilihan II.188

2.5. ASPEK OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA II.203
2.5.1. Kerangka Regulasi Otonomi Khusus Provinsi Papua II.203
2.5.2. Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua II.207
2.5.3. Kewenangan Otonomi Khusus Provinsi Papua II.211
2.5.4. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua II.212
2.5.5. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan II.215
2.5.6. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Perekonomian Wilayah II.217
2.5.7. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Tenaga Kerja dan Pengangguran II.219
2.5.8. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia II.221
2.5.9. Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus II.222

2.6. ASPEK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN II.225
2.6.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II.225
2.6.2. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II.253
2.6.3. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target II.260
2.6.4. Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target .. II.268
2.6.5. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Ada Data . II.278

DAFTAR ISI 286
DAFTAR TABEL 288
DAFTAR GAMBAR 291

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2017 ..... II.3
Tabel 2.2. Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua II.7
Tabel 2.3. Kawasan Terluar di Provinsi Papua II.7
Tabel 2.4. Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan Wilayah Papua Tahun 2015-2019 ..... II.9
Tabel 2.5. Jumlah Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Provinsi Papua Tahun 2017* II.11
Tabel 2.6. Tingkat Kerawanan Bencana di Provinsi Papua Tahun 2013 ..... II.12
Tabel 2.7. Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua II.18
Tabel 2.8. Jenis Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2023 ..... II.22
Tabel 2.9. Distribusi Penyebaran Tutupan Lahan Menurut Kelas Tutupan Lahan Dan Kabupaten/Kota Di Papua Tahun 2017 ..... II.25
Tabel 2.10. Potensi Mineral Logam dan Non Logam II.33
Tabel 2.11. Keadaan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2017 ..... II.38
Tabel 2.12. Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%) II.42
Gambar 2.19. Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Berdasarkan Angka Deflator Tahun 2014-2017 (%) II.45
Tabel 2.13. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Tahun 2013-2016 ..... II.51
Tabel 2.14. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2013-2017 ..... II.59
Tabel 2.15. Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 ..... II.71
Tabel 2.16. Pemenuhan Konsumsi Energi dan Protein Berdasarkan Kelompok Bahan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 ..... II.81
Tabel 2.17. Komposisi PDRB Sektor Pertanian dan Perkebunan Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2017 (milyar rupiah) II.85
Tabel 2.18. Komposisi PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Papua (milyar rupiah) II.89
Tabel 2.19. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) II.92
Tabel 2.20. Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Se Papua Tahun 2017 (%) II.95
Tabel 2.21. Produktifitas Total Daerah per Tenaga Kerja (juta rupiah/orang) II.103
Tabel 2.22. Simpanan dan Kredit yang Disalurkan Sektor Perbankan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 ..... II.105
Tabel 2.23. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (ribu orang) II.107

Tabel 2.24. Angka Partisipasi Pendidikan di Kabupaten/Kota Tahun 2017 ..... II.114
Tabel 2.25. Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2017 ..... II.117
Tabel 2.26. Angka Melanjutkan SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK II.118
Tabel 2.27. Jumlah Gedung Sekolah Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (unit) II.119
Tabel 2.28. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua II.121
Tabel 2.29. Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 ..... II.122
Tabel 2.30. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar II.122
Tabel 2.31. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah II.123
Tabel 2.32. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2017 ..... II.124
Tabel 2.33. Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk II.151
Tabel 2.34. APM Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017 ..... II.159
Tabel 2.35. Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha) II.162
Tabel 2.36. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua II.163
Tabel 2.37. Persentase Anak, Bayi dan Balita Berakte Kelahiran Tahun 2017 ..... II.164
Tabel 2.38. Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2017 ..... II.165
Tabel 2.39. Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua II.169
Tabel 2.40. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) II.171
Tabel 2.41. Rasio Akseptor KB II.173
Tabel 2.42. Jumlah PUS yang Tidak ber-KB II.174
Tabel 2.43. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) II.178
Tabel 2.44. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Dari Perusahaan PMA Dan PMDN II.179
Tabel 2.45. Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2013-2017 ..... II.182
Tabel 2.46. Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2013-2017 ..... II.182
Tabel 2.47. Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda Papua II.184
Tabel 2.48. Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Pertanian Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 ..... II.189
Tabel 2.49. Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 ..... II.191
Tabel 2.50. Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua (m^3) II.192
Tabel 2.51. Luas Areal Pengunaan Lahan Pertambangan (ha) II.193
Tabel 2.52. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2013-2017 ..... II.196
Tabel 2.53. Volume Ekspor dan Impor Menurut Negara Tujuan (ton) II.197
Tabel 2.54. Volume Ekspor dan Impor Menurut Pelabuhan (ton) II.198
Tabel 2.55. Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Digit Provinsi Papua Tahun 2013 – 2016 (ton/US$) II.199
Tabel 2.56. Nilai Ekspor-Impor Provinsi Papua dan Indonesia (Juta US$) Tahun 2013-2016 (US$/%) II.199
Tabel 2.57. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan II.200
Tabel 2.58. Jumlah Rumah Tangga Perikanan II.201
Tabel 2.59. Produksi Perikanan Tangkap (Ton) II.202
Tabel 2.60. Perdasus Perintah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 ..... II.203
Tabel 2.61. Perdasi yang diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2001 ..... II.204

Tabel 2.62. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua II.215
Tabel 2.63. Rata-Rata Orang Bekerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka II.220
Tabel 2.64. Rata-Rata Percepatan IPM Di Provinsi Papua Dan Indonesia..... II.222
Tabel 2.65. Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Papua II.222
Tabel 2.66. Kualitas daya dukung penyediaan pangan di Provinsi Papua II.225
Tabel 2.67. Kondisi daya dukung penyedian pangan per kabupaten II.227
Tabel 2.68. Tabel …. Kualitas daya dukung penyediaan pangan berdasar wilayah budaya II.229
Tabel 2.69. Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Energi Pangan (kkal/tahun) II.233
Tabel 2.70. Kualitas daya dukung penyediaan air Provinsi Papua..... II.237
Tabel 2.71. Kondisi daya dukung penyediaan air per kabupaten di Provinsi Papua II.240
Tabel 2.72. Kondisi daya dukung penyediaan air per wilayah budaya..... II.241
Tabel 2.73. Kondisi daya tampung per kabupaten dalam pemurnian air..... II.243
Tabel 2.74. Kondisi daya tampung pemurnian air per wilayah budaya II.245
Tabel 2.75. Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Air (m3/detik)..... II.248
Tabel 2.76. Perhitungan luas guna lahan fungsi lindung II.251
Tabel 2.77. Perhitungan luas dan Proyeksi tutupan/penggunaan lahan..... II.252
Tabel 2.78. Ketercapaian Indikator Papua terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II.254
Tabel 2.79. Rekapitulasi Analisis Ketercapaian Indikator TPB..... II.258
Tabel 2.80. Rekapitulasi Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai Target..... II.263
Tabel 2.81. Gap Indikator yang Belum Tercapai II.270
Tabel 2.82. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan atau Tidak Ada Data..... II.279

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi Provinsi Papua II.2
Gambar 2.2. Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua II.5
Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng II.6
Gambar 2.4. Peta Pos Lintas Batas Negara di Indonesia Tahun 2018 ..... II.8
Gambar 2.5. Kejadian Konflik di Provinsi Papua Tahun 2015 ..... II.12
Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Alam II.15
Gambar 2.7. Peta Intensitas Curah Hujan II.17
Gambar 2.8. Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua II.20
Gambar 2.9. Peta Tutupan Lahan Tahun 2012 ..... II.23
Gambar 2.10. Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8 OLI liputan tahun 2017 (dalam hektar) II.24
Gambar 2.11. Peta Penetapan Lokasi Fasilitasi Pada 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 4 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Tahun 2015 ..... II.29
Gambar 2.12. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia II.32
Gambar 2.13. Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017 ..... II.36
Gambar 2.14. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk II.37
Gambar 2.15. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Sex II.38
Gambar 2.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 (%) II.41
Gambar 2.17. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dengan Tambang per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (%) II.42
Gambar 2.18. Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi II.44
Gambar 2.19. Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Berdasarkan Angka Deflator Tahun 2014-2017 (%) II.45
Gambar 2.20. Tingkat Kemahalan Konstruksi di Provinsi Papua II.46
Gambar 2.21. Peta Kemahalan Konstruksi dan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017 ..... II.47
Gambar 2.22. Pendapatan Perkapita Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 (juta Rp) II.48
Gambar 2.23. Pendapatan Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Dengan Tambang dan Tanpa Tambang di Provinsi Papua Tahun 2017 ..... II.49
Gambar 2.24. Angka Rasio Gini di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 ..... II.50

Gambar 2.25. Distribusi Pendapatan Menurut Kategori Bank Dunia II.52
Gambar 2.26. Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Berdasarkan Angka Williamson Index dengan Menyertakan Sektor Pertambangan II.52
Gambar 2.27. Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Berdasarkan Angka Williamson Index Tanpa Sektor Pertambangan II.53
Gambar 2.28. Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Papua II.55
Gambar 2.29. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua (%) II.55
Gambar 2.30. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua (%) II.56
Gambar 2.31. Peta Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017 ..... II.58
Gambar 2.32. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Pada Tahun 2017 ..... II.60
Gambar 2.33. Tingkat Pertumbuhan IPM Beserta Komponennya di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%) II.60
Gambar 2.34. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 ..... II.61
Gambar 2.35. Angka Melek Huruf di Provinsi Papua Tahun 2013-2016 (%) II.62
Gambar 2.36. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua (tahun) II.64
Gambar 2.37. Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua (tahun) II.66
Gambar 2.38. Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua II.68
Gambar 2.39. Status Gizi Anak Balita Umur 0 - 23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2015-2017 (%) II.69
Gambar 2.40. Angka Stunting Tertinggi di Indonesia Tahun 2017 (%) II.70
Gambar 2.41. Cakupan Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Posbindu TM di Indonesia sampai dengan Tahun 2017 (%) II.71
Gambar 2.42. Tingkat Pengangguran di Provinsi Papua Tahun 2017 (%) II.72
Gambar 2.43. Peta Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017 ..... II.73
Gambar 2.44. Komposisi dan Struktur Tenaga Kerja Menurut Sektor II.74
Gambar 2.45. Struktur Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%) II.75
Gambar 2.46. Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2017 (%) II.76
Gambar 2.47. Produktifitas Regional (Juta Rupiah Per Tenaga Kerja) II.77
Gambar 2.48. Kondisi Demografi Keluarga di Provinsi Papua Tahun 2017 ..... II.78
Gambar 2.49. Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi Tahun 2014 dan 2017 ..... II.79
Gambar 2.50. Perbedaan Nilai Sub Indeks Terpenting Pembentuk Indeks Kebahagiaan di Provinsi Papua Antara Tahun 2014 dan 2017 ..... II.80
Gambar 2.51. Skor Pola Pangan Harapan di Indonesia dan Provinsi Papua II.82
Gambar 2.52. Kondisi Ketahanan Pangan di Provinsi Papua II.83
Gambar 2.53. Ketersediaan Cadangan Pangan di Provinsi Papua (ribu ton) II.84
Gambar 2.54. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%) II.86
Gambar 2.55. Nilai PDRB, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%) II.87
Gambar 2.56. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%) II.88
Gambar 2.57. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%) II.89

Gambar 2.58. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%) II.91
Gambar 2.59. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) II.91
Gambar 2.60. Pengeluaran Per Kapita Riil di Provinsi Papua (juta rupiah) II.98
Gambar 2.61. Struktur Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Papua II.98
Gambar 2.62. Komposisi Pengeluaran Per Kapita Papua Tahun 2017 (%) II.99
Gambar 2.63. Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017 (ribu rupiah) II.100
Gambar 2.64. Nilai Tukar Petani di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%) II.101
Gambar 2.65. Nilai Tukar Petani di Indonesia pada Desember 2017 (%) II.102
Gambar 2.66. Nilai Tukar Petani dan Nelayan Provinsi Papua (%) II.102
Gambar 2.67. Net Ekspor Daerah dan Rasionya Terhadap PDRB II.104
Gambar 2.68. Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua II.107
Gambar 2.69. Proyeksi Bonus Demografi di Provinsi Papua II.108
Gambar 2.70. Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Papua dan Indonesia (%) II.109
Gambar 2.71. Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2014 dan 2017 ..... II.110
Gambar 2.72. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua II.113
Gambar 2.73. Angka Partisipasi Pendidikan di Provinsi Papua II.114
Gambar 2.74. Jumlah Sekolah pendidikan SD, SMP dan SMA Tahun 2017 ..... II.120
Gambar 2.75. Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun (%) II.126
Gambar 2.76. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup II.128
Gambar 2.77. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup II.128
Gambar 2.78. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) II.129
Gambar 2.79. Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2016 ..... II.130
Gambar 2.80. Cakupan Puskesmas per 10.000 Penduduk di Provinsi Papua II.131
Gambar 2.81. Rasio Dokter dan Tenaga Medis per 100.000 Penduduk II.131
Gambar 2.82. Angka Penderita Malaria di Provinsi Papua Dan Indonesia Tahun 2013-2017 ..... II.132
Gambar 2.83. Angka Penderita Malaria DI Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2013-2017 ..... II.133
Gambar 2.84. HIV/AIDS di Provinsi Papua (orang) II.134
Gambar 2.85. HIV/AIDS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 ..... II.134
Gambar 2.86. Cakupan Kunjungan K4 di Provinsi Papua II.136
Gambar 2.87. Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Tahun 2016 ..... II.137
Gambar 2.88. Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Papua Tahun 2016 (km) II.138
Gambar 2.89. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk II.139
Gambar 2.90. Akses terhadap Sarana Pendidikan dan Kesehatan II.140
Gambar 2.91. Jumlah Jembatan berdasarkan Kondisi Tahun 2016 ..... II.141
Gambar 2.92. Penduduk Berakses Air Bersih di Provinsi Papua II.142
Gambar 2.93. Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Provinsi Papua II.143
Gambar 2.94. Sumber Air Minum, Mandi, dan Cuci Dominan II.144
Gambar 2.95. Persentase Rumah Tangga dengan Jamban Tidak Layak Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2015 ..... II.145

Gambar 2.96. Kondisi Ketersediaan Infrastruktur Air Limbah Domestik di Provinsi Papua Tahun 2017 ..... II.147
Gambar 2.97. Kondisi Penanganan Sampah di Provinsi Papua 2013-2018 ..... II.148
Gambar 2.98. Tempat Buang Sampah Dominan (Kiri); Persentase Sampah yang Dikelola secara Mandiri oleh Masyarakat di Sumber (Kanan) II.149
Gambar 2.99. Ketersediaan Infrastruktur Persampahan Domestik Papua II.150
Gambar 2.100. Kondisi Rumah Layak Huni di Provinsi Papua II.152
Gambar 2.101. Kondisi Penyenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua II.153
Gambar 2.102. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2017 (orang) II.154
Gambar 2.103. Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja Per Tahun (%) II.156
Gambar 2.104. Kondisi Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja II.156
Gambar 2.105. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 ..... II.158
Gambar 2.106. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Papua II.159
Gambar 2.107. Jumlah KDRT Provinsi Papua Tahun 2013-2016 ..... II.161
Gambar 2.108. Proporsi Penduduk Di Provinsi Papua dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar = 2.100 Kkal/kapita/hari) II.161
Gambar 2.109. Kondisi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung II.166
Gambar 2.110. Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013-2017 (program) II.167
Gambar 2.111. Jumlah kelompok PKK dan binaan PKK II.168
Gambar 2.112. Perkembangan APBK, APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (Ribu Rupiah) II.170
Gambar 2.113. Persentase Dana Desa terhadap APBD Provinsi, Dana Otonomi Khusus, dan APBK di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%) II.170
Gambar 2.114. Persentase APBK terhadap APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%) II.171
Gambar 2.115. Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga II.173
Gambar 2.116. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan II.176
Gambar 2.117. Individu yang Menggunakan Telepon Genggam dan Internet II.177
Gambar 2.118. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 ..... II.178
Gambar 2.119. Capaian Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga II.181
Gambar 2.120. Tingkat Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di Kalangan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta II.186
Gambar 2.121. Kondisi Perpustakaan di Provinsi Papua II.186
Gambar 2.122. Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku II.187
Gambar 2.123. Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Tamu di Provinsi Papua II.188
Gambar 2.124. Jumlah Tamu WNA dan WNI Tahun 2016 (orang) II.189
Gambar 2.125. Distribusi Penyebaran Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua Tahun 2016 ..... II.192
Gambar 2.126. Jumlah Cadangan (*Reserve*) yang Terdata dan Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Batubara di Provinsi Papua II.194

Gambar 2.127. Potensi dan Jumlah Cadangan Tembaga dan Emas yang Sudah Diketahui (Juta Ton Bijih) II.194
Gambar 2.128. Total Produksi Tembaga dan Emas (Juta Ton Bijih) II.195
Gambar 2.129. Kondisi Perindustrian di Provinsi Papua II.200
Gambar 2.130. Mekanisme Hubungan Gubernur, DPRP dan MRP II.208
Gambar 2.131. Alokasi Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2002-2016 ..... II.214
Gambar 2.132. Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua dan Indonesia II.216
Gambar 2.133. Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 1995-2017 (%) II.218
Gambar 2.134. Jumlah Orang Bekerja dan Tingkat Pengangguran di Papua II.220
Gambar 2.135. IPM di Provinsi Papua dan Indonesia II.221
Gambar 2.136. Gambar Peta kualitas daya dukung penyediaan pangan Provinsi Papua II.226
Gambar 2.137. Urutan daya dukung dalam penyediaan pangan per kabupaten II.228
Gambar 2.138. Peta daya dukung penyediaan pangan per-wilayah budaya II.229
Gambar 2.139. Peta Kebutuhan Energi Pangan Per Kabupaten II.231
Gambar 2.140. Peta Ketersediaan Energi Pangan Per Kabupaten II.232
Gambar 2.141. Peta Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Energi Pangan ... II.233
Gambar 2.142. Proyeksi Kebutuhan Pangan II.235
Gambar 2.143. Proyeksi Kehilangan Tanah II.236
Gambar 2.144. Peta kualitas daya dukung penyediaan air Provinsi Papua II.238
Gambar 2.145. Urutan daya dukung penyediaan air per Kabupaten II.239
Gambar 2.146. Peta daya dukung penyediaan air per-wilayah budaya II.241
Gambar 2.147. Peta Daya Tampung Pemurnian Air II.242
Gambar 2.148. Urutan daya tampung dalam pemurnian air per kabupaten II.244
Gambar 2.149. Peta daya tampung pemurnian air berdasarkan wilayah budaya ... II.245
Gambar 2.150. Peta Ketersediaan Air Per Kabupaten II.247
Gambar 2.151. Peta Kebutuhan Air Bersih Per Kabupaten II.248
Gambar 2.152. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air II.250
Gambar 2.153. Pola Ruang Wilayah Sebagai Dasar Analisi Luas Guna Lahan II.251
Gambar 2.154. Perubahan Tutupan/Penggunaaan Lahan 1990-2010 dan Proyeksi Tahun 2020-2030 ..... II.253
Gambar 2.155. Ketercapaian Indikator Papua terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional II.255
Gambar 2.156. Gambar 2. Indikator TPB yang Dilaksanakan di Provinsi Papua II.256
Gambar 2.157. Ketercapaian Indikator TPB di Provinsi Papua II.258
Gambar 2.158. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sudah Tercapai II.261
Gambar 2.159. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Belum Tercapai II.268
Gambar 2.160. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Ada Data II.278